PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 18 TAHUN 2022

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2023 - 2026



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 63 /KUM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026

BUPATI BARITO KUALA,

bahwa :

a. bahwa berdasarkanpasal 1 poin 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 tentang Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirUndang-undang Nomor 2 Tahun 2015 *tentang* Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah BerakhirTahun 2022;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Dipindai dengan CamScanner

Daerah 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 101 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sekaligus akan menjadi Tim Evaluasi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

KETIGA : Tugas Tim adalah sebagai berikut :

A. Tim Penyusun Materi :
   1. Menyusun draft rancangan awal dokumen RPD 2023-2026
   2. Melaksanakan Konsultasi Publik
   3. Menyempurnakan rancangan awal dokumen RPD 2023-2026 berdasarkan hasil Konsultasi Publik, dan bahan penyusunan rancangan akhir
   4. Menyerahkan draft rancangan akhir RPD 2023-2026 ke Inspektorat untuk di reviu
   5. Melaksanakan fasilitasi rancangan akhir hasil reviu Inspektorat dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
   6. Menetapkan Dokumen RPD dengan Peraturan Kepala Daerah
   7. Menyerahkan dokumen RPD ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Kabupaten Barito Kuala

Dipindai dengan CamScanner

B. Tim Teknis

1. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi
   Bertugas : menyusun sasaran dan indikator sasaran, arah kebijakan dan strategi terkait Bidang Ekonomi.
2. Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur
   Bertugas : menyusun sasaran dan indikator sasaran, arah kebijakan dan strategi terkait Bidang Infrastruktur.
3. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan
   Bertugas : menyusun sasaran dan indikator sasaran, arah kebijakan dan strategi terkait Bidang Pemerintahan
4. Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Manusia
   Bertugas : menyusun sasaran dan indikator sasaran, arah kebijakan dan strategi terkait Bidang Sumber Daya Manusia

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Febuari 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/63/KUM/2022
Tanggal 2 Februari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023 – 2026

NO	NAMA/JABATAN /SKPD	JABATAN TIM
A.	Tim Penyusun Materi RPD	
1	Bupati Barito Kuala	Pengarah
2	Wakil Bupati Barito Kuala	Penanggungjawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Ketua
4	Kepala Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris
6	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7	Inspektur Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9	Sekretaris Bappelitbang Kab. Barito Kuala	Anggota
10	Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala	Anggota
11	Kabid Evaluasi dan Pengendalian Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala	Anggota
B	Tim Teknis	
B.1	Kelompok Kerja Bidang Ekonomi	
1	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala	Koordinator
2	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
3	Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Fungsional Perencana Ahli Muda A.n Herni Yanti	Anggota
10	Fungsional Perencana Ahli Muda A.n Ahmad Rijani	Anggota
B.2	Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur	
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	Koordinator
2	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
3	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda A.n M. Yasier	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda A.n Khairul Arifin	Anggota
B.3	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan	
1	Kabag Tapem Sekretariat Daerah	Koordinator
2	Irban I, II, III, dan IV	Anggota
3	Sekretaris DPRD	Anggota
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA/JABATAN /SKPD	JABATAN TIM
5	Kepala Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6	Seluruh Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
13	Fungsional Perencana Ahli Muda A.n Rita Kartini	Anggota
14	Fungsional Perencana Ahli Pertama A.n M. Ridha	Anggota
B.4	Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Manusia	
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Koordinator
2	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8	Fungsional Perencana Ahli Muda A.n Juniartinah, SE	Anggota
9	Fungsional Perencana Ahli Pertama A.n Agisna Fauzia	Anggota
10	Fungsional Perencana Ahli Muda A.n Abdurrasyid Ridho	Anggota

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala akan berakhir pada bulan November 2022, maka perlu Menyusun Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Kembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

23. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 101 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 – 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

Dipindai dengan CamScanner

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, *RTRW dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta* RPJMN.

Pasal 3

(1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : GAMBARAN UMUM
c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
e. BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
i. BAB IX : PENUTUP

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023- 2026.
(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
(3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan

BAB IV
PERUBAHAN RPD

Pasal 6

(1) RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
    c. terjadi perubahan yang mendasar;
    d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

RPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 18

Dipindai dengan CamScanner

KATA
PENGANTAR



Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan proses awal penyusunan Dokumen yang wajib disusun pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/kota. Penyusunan Dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala didalamnya tergambar Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui program kegiatan yang telah dipetakan dari Permendagri 86 tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja ke nomenklatur baru sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2020 taentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021. Program kegiatan ini juga memuat dari usulan masyarakat yang di inventarisir melalui musrenbang desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten Barito Kuala serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barito Kuala. Evaluasi pelaksanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun sebelumnya serta kerangka pendanaan dan pendapatan daerah digambarkan pada kebijakan daerah, sekaligus di sinkronkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan serta prioritas nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2023.

Diharapkan disusun dan disampaikanya dokumen Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ini dapat menjadi acuan atau referensi dari seluruh stakeholder dalam bersinergi membangun daerah. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan

laporan ini, semoga bermanfaat dalam upaya membangun daerah dan mensejahtrakan masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

BUPATI BARITO KUALA



Hj. NOORMILIYANI AS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3 HUBUNGAN RPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN	7
BAB II GAMBARAN UMUM	9
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	9
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	23
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	38
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	49
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	74
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU	74
3.2 KEBIJAKAN KEUANGAN MASA LALU	87
3.3 KERANGKA PENDANAAN	91
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	95
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	95
4.2 ISU STRATEGIS	109
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	126
5.1 TUJUAN PEMBANGUNAN	127
5.2 SASARAN PEMBANGUNAN	128
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	136
6.1 STRATEGI	137
6.2 ARAH KEBIJAKAN	139
6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	145
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	201
7.1 KERANGKA PENDANAAN	201
7.2 PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	202

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 220

8.1 INDIKATOR MAKRO DAERAH 220
8.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH 222

BAB IX PENUTUP 237
9.1 PEDOMAN TRANSISI 237
9.2 KAIDAH PELAKSANAAN 237

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Menurut Kecamatan 9

Tabel 2.2 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, 2021 13

Tabel 2.3 Produksi Pertanian Se-Kalimantan Selatan 14

Tabel 2.4 Pola Ruang Kabupaten Barito Kuala 17

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama 21

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Barito Kuala, 2021 22

Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021 22

Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2016–2020 23

Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2016–2020 25

Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala (milliar rupiah), 2016 – 2020 26

Tabel 2.11 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala (milliar rupiah), 2016 – 2020 27

Tabel 2.12 Perbandingan Gini Rasio Se-Kalimantan Selatan 31

Tabel 2.13 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se-Kalimantan Selatan 32

Tabel 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Se-Kalimantan Selatan 35

Tabel 2.15 Tingkat Kemiskinan Se-Kalimantan Selatan 36

Tabel 2.16 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala 39

Tabel 2.17 Jumlah Guru di Kabupaten Barito Kuala 40

Tabel 2.18 Jumlah Murid di Kabupaten Barito Kuala 40

Tabel 2.19 Rasio Tenaga Kesehatan di Barito Kuala 2017-2021 43

Tabel 2.20 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala 43

Tabel 2.21 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala 43

Tabel 2.22 Presetase Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting di Kalimantan Selatan 44

Tabel 2.23 Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kalimantan Selatan 45

Tabel 2. 24 Sebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia dan Kelamin Tahun 2021 47

Tabel 2.25 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi pada Industri Besar Se-Kalimantan Selatan 49

Tabel 2.26 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah), 2017-2021 51

Tabel 2.27 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2021 52
Tabel 2.28 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2021 53
Tabel 2.29 Produksi Padi Kabupaten Barito Kuala 55
Tabel 2.30 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala (km), tahun 2021 59
Tabel 2.31 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala 59
Tabel 2.32 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 60
Tabel 2.33 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi, dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 61
Tabel 2.34 Data Blankspot di Kabupaten Barito Kuala 65
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Dampak (Impact) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 69
Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2020 75
Tabel 3.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2021 76
Tabel 3.3 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-222 (Rp. Miliar) 89
Tabel 3.4 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Kuala (Rp. Miliar) 90
Tabel. 3.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 90
Tabel 3.6 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Rp. Miliar) 92
Tabel 4.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals/SDGs 105
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala 121
Tabel 5.2 Keselarasan RPD 2023-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 127
Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Barito Kuala 166
Tabel 6.2 Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 172
Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Barito Kuala 173
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 234
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan 235
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Kuala 250

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala 251

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan 10
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Barito Kuala 11
Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Curah Hujan Kab. Barito Kuala selama 5 Tahun 12
Gambar 2.4 Jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021). 19
Gambar 2.5 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2021 20
Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala, 2021. 21
Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Gini / Gini Rasio selama 5 tahun terakhir 30
Gambar 2.8 Perkembangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) selama 5 tahun terakhir 32
Gambar 2.9 Perkembangan Usia Harapan Hidup selama 5 tahun terakhir 33
Gambar 2.10 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah selama 5 tahun terakhir 34
Gambar 2.11 Perkembangan Angka Rata-rata pengeluaran per kapita selama 5 tahun terakhir 34
Gambar 2.12 Perkembangan tingkat pengangguran selama 5 tahun terakhir 35
Gambar 2.13 Perkembangan tingkat kemiskinan selama 5 tahun terakhir 36
Gambar 2.14 Capaian UHC Se-Kalimantan Selatan sd November 2021 45
Gambar 2.15 Kasus Covid-19 Kalimantan Selatan 46
Gambar 2.16 Perkembangan angka harapan lama sekolah selama 5 tahun terakhir 63
Gambar 2.17 Perkembangan angka rata-rata lama sekolah selama 5 tahun terakhir 63
Gambar 2.18 Perkembangan angka harapan hidup selama 5 tahun terakhir 64
Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2028 – 2022 77
Gambar 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 78
Gambar 3.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2022 78
Gambar 3.4 Dana Transfer Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2022 79
Gambar 3.5 Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2022 79
Gambar 3.6 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 80
Gambar 3.7 Realisai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Brito Kuala Tahun 2018 – 2022 81
Gambar 3.8 Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 82
Gambar 3.9 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 82
Gambar 3.10 Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022 83
Gambar 3.11 Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2018-2022 83

Gambar 3.12 Penerimaan pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 84
Gambar 3.13 Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 84
Gambar 3.14 Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 85
Gambar 3.15 Pengeluaran Pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 85
Gambar 3.16 Proporsi Belaja Modal pada Struktur Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 86
Gambar 3.17 Grafik Pertumbuhan Proposi Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 87
Gambar 3.18 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 88
Gambar 3.19 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 88
Gambar 6.1 Crosscutting Program Prioritas Batola Berdaya 136
Gambar 6.2 Crosscutting Program Prioritas Batola Berkarya 147
Gambar 6.3 Crosscutting Program Prioritas Batola Berkinerja Baik 154
Gambar 6.4 Crosscutting Program Prioritas Batola Sehat, Cerdas dan Berprestasi 163
Gambar 7.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 232

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah lima tahun dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, dalam Pasal 260 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 berakhir pada tahun 2022.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 bahwa Bupati yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2023 – 2026 serta memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2023 – 2026.

Penyusunan Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPD Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2022 dan Tim Penyusun Renstra PD berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022

2. Rapat Tim Penyusun RPD dan Paparan Konsep Rancangan RPD di Hadapan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
3. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026.
4. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.
5. Forum Konsultasi Publik dengan pemangku kepentingan untuk menyerap saran masukan termasuk dengan DPRD yang dituangkan kedalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik.
6. Penyempurnaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 – 2026 berdasarkan Berita Acara Konsultasi Publik dan Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 berdasarkan workshop Renstra.
7. Fasilitasi Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 oleh Gubernur Kalimantan Selatan via Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil Rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan RPD dan Renstra PD.
8. Penetapan RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 dan Renstra PD oleh Bupati Barito Kuala.
9. Penyerahan Dokumen RPD kepada DPRD Kabupaten Barito Kuala

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 disusun dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 Ayat (6).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkup Pemerintah Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.

34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031;

1.3. Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 adalah Rencana Pembangunan Jangka Mengah daerah Masa Transisi dimana dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Kuala. Selain itu RPD Kabupaten Barito Kuala juga memiliki keterkaitan dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan serta keberlanjutan RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017 - 2022.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPD sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 4 (empat) tahun ke depan, RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023–2026 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Sistematika Penulisan

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2. Kebijakan Keuangan Masa Lalu

3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan Pembangunan

5.2. Sasaran Pembangunan

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1. Strategi

6.2. Arah Kabijakan

6.3. Program Pembangunan Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PREANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

7.2. Program Prioritas Perangkat Daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Indikator Makro Daerah

8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah

BAB IX PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

9.2. Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1.Maksud

RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka melaksanakan pemabangunan daerah dalam masa transisi melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2023 - 2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan

1.5.2.Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menerjemah target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 kedalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026 menjadi tujuan dan sasaran pembangunan periode masa transisi tahun 2023 – 2026, yang disertai dengan program atau kegiatan prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.;
2. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2023 – 2026;
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan terpilih yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan padaTahun 2023 – 2026.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah, merumuskan target RPJPD ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2023 - 2026, perumusan

strategi dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2023 – 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografi dan demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu pemerintah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.996,46 km² dan berpenduduk sebanyak 318.044 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020).

Kabupaten Barito Kuala berada di bagian Barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak pada 20 29‟ 50‟ – 3 0 . 30‟ 18‟ Lintang Selatan dan 1140 20‟ 50‟ – 1140 50‟ 18” Bujur Timur dan berada pada pertemuan 3 (tiga) sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuasdan Sungai Negara yang bermuara ke Kecamatan Tabunganen akhirnya ke Laut Jawa. Letak wilayah Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin, Banjar dan Kota Banjarmasin, selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin;

b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut Jawa;

c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.

Wilayah Kabupaten Barito Kuala terbagi menjadi 17 kecamatan dengan 195 desa dan 6 kelurahan. Adapun luas kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Menurut Kecamatan

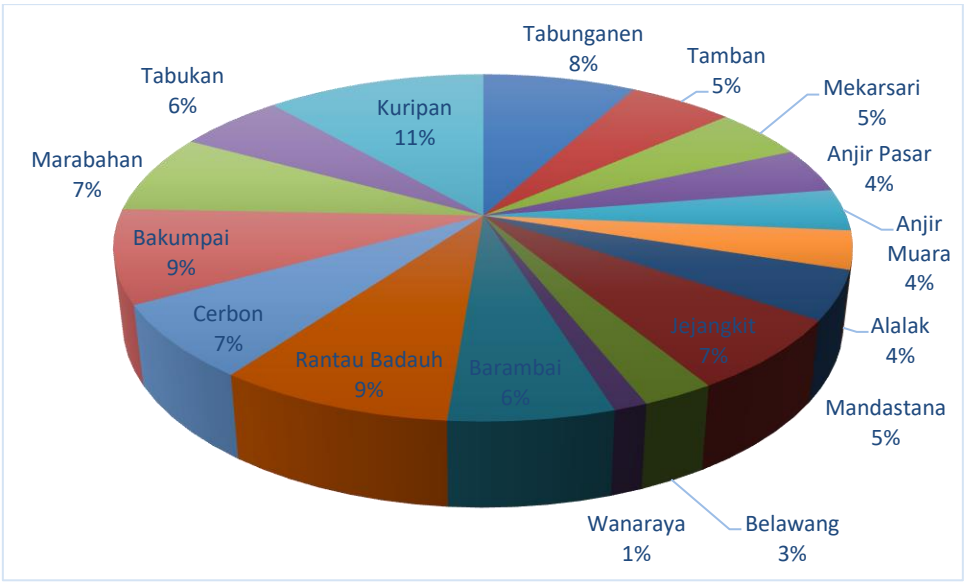
No	Kecamatan	Luas (KM^2)
1.	Tabunganen	240
2.	Tamban	164,30
3.	Mekarsari	143,50
4.	Anjir Pasar	126,00
5.	Anjir Muara	116,75
6.	Alalak	106,85
7.	Mandastana	136,00

8.	Jejangkit	203,00
9.	Belawang	80,25
10.	Wanaraya	37,50
11.	Barambai	183,00
12.	Rantau Badauh	261,81
13.	Cerbon	206,00
14.	Bakumpai	261,00
15.	Marabahan	221,00
16.	Tabukan	166,00
17.	Kuripan	343,50
	TOTAL	2.996

Sumber: BPS Barito Kuala

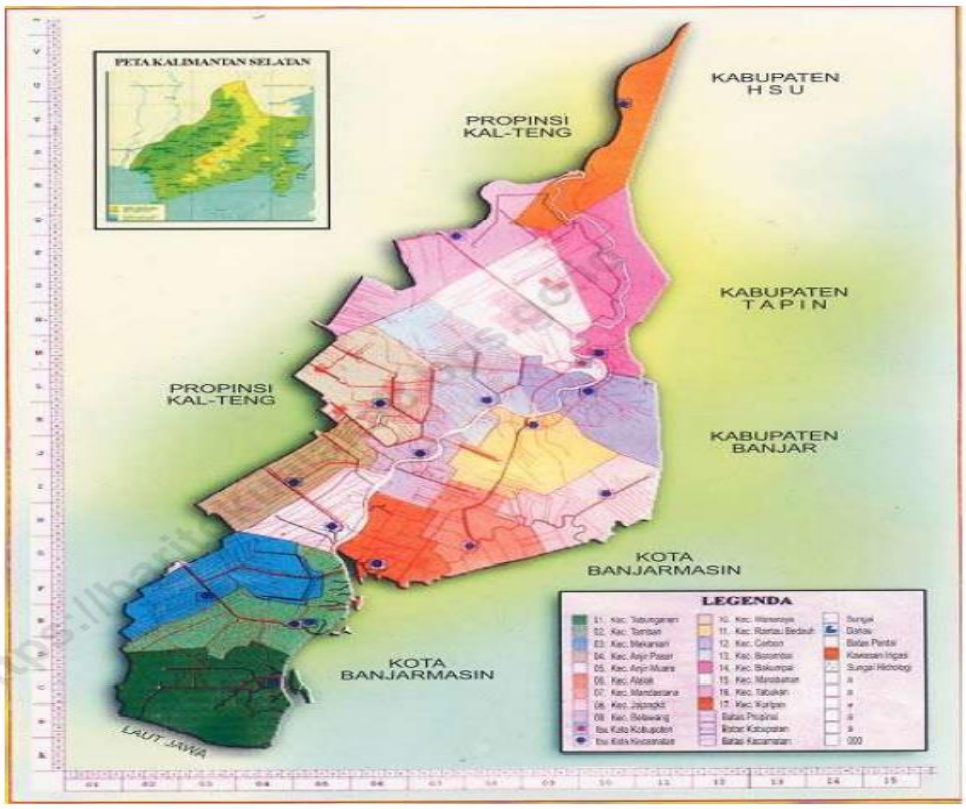
Dari Tabel diatas terlihat bahwa kecamatan Kuripan merupakan Kecamatan terluas yakni 343,50 km2 atau 11,46 % dari total luas wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wanaraya yakni 37,50 km2 atau hanya 1,25 % dari total luas Kabupaten Barito Kuala. Gambaran luasan kecamatan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dalam info grafis berikut.

Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan



Berikut peta wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Barito Kuala



2.1.2.Topografi Daerah

Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,2 sampai dengan 3 mdpl (meter dari permukaan laut) yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Karena merupakan dataran rendah maka hampir di semua kecamatan tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan dan purun yang dimanfaatkan untuk anyaman tikar, bakul dsb. Barito Kuala dibelah oleh Sungai Barito yang membentang dari selatan sebagai muara sungainya (Kecamatan Tabunganen) hingga ke-utara (Kecamatan Kuripan)

2.1.3.Hidrologi Daerah

Kondisi wilayah Kabupaten Barito Kuala sangat strategis karena wilayahnya dilalui oleh Sungai Barito, Sungai Negara dan Sungai Kapuas yang bermuara ke laut Jawa. Kabupaten Barito Kuala berada pada pertemuan tiga sungai tersebut. Sungai – sungai tersebut menjadi jalur transportasi bagi angkutan berbagai hasil bumi baik antar kabupaten dalam provinsi Kalimantan Selatan maupun antar provinsi di Kalimantan. Disamping berfungsi sebagai prasarana transportasi, Sungai Barito juga sebagai jaringan irigasi utama untuk berbagai usaha pertanian dan perikanan.

Selain Sungai Barito, sungai yang ada di Kabupaten Barito Kuala antara lain: Selain Sungai Barito, sungai yang ada di Kabupaten Barito Kuala antara lain:Sungai Negara, Sungai Kapuas, Sungai Alalak, Sungai Puntik, Saluran Drainase Tamban, Saluran Drainase Anjir Pasar, Saluran Drainase Tabukan dan Saluran Drainase Tabunganen. Sungai-sungai ini selain berguna untuk tranportasi, juga untuk pengairan

2.1.4.Kondisi Klimatologis Daerah

Seperti umumnya daerah-daerah lain yang berada di Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala termasuk daerah yang beriklim tropis. Data curah hujan tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2017 sampai dengan 2021 (data belum tersedia) menunjukkan bahwa curah hujan agregat tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan mencapai 3.378 mm^3 dengan jumlah hari hujan sebanyak 250 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 2016 mm^3 dengan jumlah hari hujan sebanyak 109 hari. Terjadi lonjakan curah hujan yang cukup tinggi dari tahun 2019 menuju tahun 2020. Bulan Tertinggi curah hujan dalam lima tahun selalu bergantian berkisar dari Bulan Desember – April, sedangkan Bulan Terendah curah hujan dalam lima tahun cenderung terjadi pada Bulan Agustus (*Sumber Data: Barito Kuala Dalam Angka 2018-2022)*.

Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Curah Hujan Kab. Barito Kuala selama 5 Tahun (2021 belum ada) *Sumber: BPS*



2.1.5.Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.5.1. Potensi Penggunaan Lahan

Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi terbesar pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Berdasarkan sektor ini, jenis penggunaan lahan

yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari penggunaan lahan pertanian dan lahan non pertanian.

1. Pertanian

Produksi padi tahun 2020 adalah 412.532 ton dengan rata-rata produksi 35,59 Kw/Ha. Hasil ini setara dengan beras sebanyak 261.215 ton. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Barito Kuala merupakan sentra produksi padi sawah. Selain itu, Kabupaten Barito Kuala juga merupakan sentra produksi padi di Provinsi Kalimantan Selatan. Produksi tanaman bahan makanan lainnya pada tahun 2020 yaitu jagung 6795 ton, kedelai 1263 ton, kacang tanah 8 ton, ubi kayu 13.501 ton, dan 35 ton ubi jalar.

Potensi produksi pangan terutama dapat dilihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur, dapat dilihat dari tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Kuala, 2021

Kecamatan *Subdistrict*	Luas Panen (ha) *Harvested Area (ha)*	Produktivitas (kw/ha) *Productivity (kw/ha)*	Produksi (ton) *P9roduction (ton)*
(1)	(2)	(3)	(4)
Tabunganen	13 231	35,63	47 142
Tamban	9 243	35,60	32 906
Mekarsari	6 464	35,59	23 006
Anjir Pasar	8 402	35,59	29 903
Anjir Muara	11 524	35,62	41 047
Alalak	4 249	35,56	15 108
Mandastana	9 604	35,60	34 190
Jejangkit	3 224	35,57	11 469
Belawang	7 445	35,58	26 488
Wanaraya	2 277	35,55	8 093
Barambai	10 434	35,61	37 157
Rantau Badauh	8 488	35,59	30 210
Cerbon	5 818	35,59	20 706
Bakumpai	4 649	35,56	16 533
Marabahan	4 317	35,56	15 353
Tabukan	6 402	35,58	22 778
Kuripan	124	35,57	442
Barito Kuala	115 896	35 59	412 532

Sumber/Source: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura/*Departement of Agriculture, Crop and Holticulture*

https://baritokualakab.bps.go.id

Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian ini, kabupaten barito kuala telah menginisiasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sejak tahun 2018. Pada tahun 2019, melalui Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala, telah disusun naskah akademik untuk kebutuhan pembuatan perda tersebut. Hingga akhir tahun 2021, telah berhasil dikeluarkan Surat Keputusan Bupati mengenai Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan nomor 188.45/7/KUM/2022. Namun proses penetapan Perda ini belum selesai dan saat ini masih terkendala pada penetapan deliniasi spasial yang merupakan salah satu lampiran wajib dalam Perda LP2B Selain melalui dana APBD, usaha untuk menetapkan Perda LP2B ini juga di fasilitasi melalui dana APBN dengan kegiatan berupa Penyusunan Rekomendasi Perlindungan LP2B.

Tabel 2.3 Produksi Pertanian Se-Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota	Padi (ton)	Jagung (ton)	Kedelai (ton)	Kacang Tanah (ton)	Kacang Hijau (ton)	Ubi Kayu (ton)	Ubi Jalar (ton)
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Tanah Laut	98.591,31	171020	47	734	85	9730	1928
Kotabaru	21.554,71	59160	8	85	13	6168	456
Banjar	167.690,91	2631	-	1322	18	3037	807
Barito Kuala	236.565,61	9225	409	33	-	12870	25
Tapin	122.871,65	5230	-	60	3	890	69
Hulu Sungai Selatan	112.958,92	4047	-	415	2	5162	1031
Hulu Sungai Tengah	131.609,45	22402	-	269	75	6098	1354
Hulu Sungai Utara	97.835,84	1901	-	209	3	707	1840
Tabalong	58.179,85	12938	639	83	14	1261	86
Tanah Bumbu	57.145,30	33913	855	91	10	1686	647
Balangan	16.203,79	15450	338	200	100	5368	627
Banjarmasin	10.153,68	-	-	-	-	-	-
Banjarbaru	3.089,19	384	-	12	1	561	172
Kalimantan Selatan	1.134.450,21	338.301,00	2.296,00	3.513,00	324,00	53.538,00	9.042,00

Sumber : Kalimantan Selatan dalam Angka tahun 2021

2. Hortikultura / Perkebunan

Disamping pada sektor tanaman pangan, produksi hortikultura atau produksi perkebunan Kabupaten Barito Kuala juga memiliki keunggulan yang kompetitif di propinsi Kalimantan Selatan. Jeruk Siam dan Nenas adalah dua komoditas buah-buahan dimana Barito Kuala memberikan sumbangsih yang besar pada total produksi buah tersebut di Propinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2020, Luas tanam untuk Jeruk yang tesebar di seluruh kecamatan adalah sebesar 7.497,98 Ha dengan luas panen

sebesar 5.616 Ha dengan total produksi hampir 10.096,83 ton. Sedangkan untuk komoditas Nenas, yang luas totalnya mencapai 445,39 Ha pada tahun 2020, produksi total mencapai 1254,63 Ton. Berbeda dengan jeruk, komoditas nenas tidak di terdapat di seluruh kecamatan dan 91% dari luas total tersebut berada pada Kecamatan Mekarsari.

Selain kedua jenis buah tersebut, terdapat komoditas lain yaitu Kueni yang menjadi salah satu Produk Lokal Unggulan Daerah (PLUD) yang merupakan hasil strategi *One Village One Product* (OVOP) pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022. Sebaran komoditas Kueni berada di seluruh Kecamatan kecuali kecamatan kuripan dan Jejangkit. Produksi Total pada tahun 2020 mencapai 36.267 Ton dengan luas tanam 417,46 Ha.

Terakhir, hasil Hortikultura lainnya yaitu produksi tanaman sayuran di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 sebanyak 85 kw bawang merah, 21.49 kw cabai, dan 499 kw tomat. Sedangkan, produksi buah-buahan terbesar adalah semangka sebesar 4.850 kw dan melon sebesar 356 kw.

3. Peternakan dan Perikanan

Populasi ternak di Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 adalah sebagai berikut: populasi sapi potong sebanyak ekor, kerbau 1.593 ekor, kambing 1.656 ekor, babi 417 ekor. Sedangkan populasi unggas di Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 adalah sebagai berikut: populasi ayam kampung 1.024 .852, ayam pedaging 1.185.630 ekor, itik 49.957 ekor, itik manila 1.102 ekor. Adapun jumlah ternak yang dipotong pada tahun 2020 yaitu sapi potong 452 ekor, kerbau 14 ekor, kambing 56 ekor. Produksi daging ternak dan unggas pada tahun 2020 yaitu sapi potong 987,26 kuintal, kerbau 30,96 kuintal, kambing 10,69 kuintal, ayam kampung 798,87 kuintal, ayam pedaging 15.253,30 kuintal, itik 34,03 kuintal, dan itik manila 0,09 kuintal. Produksi telur unggas tahun 2020 yaitu telur ayam kampung 55.902 kg, telur itik 11.422 kg, dan telur itik manila 1.100 kg.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 355/Kpts/PK.040/6/ 2015 tentang Penetapan Kabupaten Barito Kuala sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali

Produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.700,3 ton. Sedangkan jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum adalah sebanyak 6.687 ton. Untuk produksi budidaya perikanan selama tahun 2020 mencapai 16.074 ton. Produksi perikanan menurut sub-sektor sebesar 19.857,84 ton. Dengan jumlah rumah tangga perikanan tanggap yaitu sebesar 7.343 Keluarga. Sedangkan produksi perikanan

menurut lokasinya yaitu pada sungai sebesar 141.157 dan rawa sebesar 681 ton. Berbagai macam jenis perahu / kapal yang digunakan yaitu perahu motor tempel sebanyak 2.220 unit dan kapal motor sebanyak 2.501 unit.

4. Pariwisata

Kabupaten Barito Kuala secara berkelanjutan dengan pengembangan pariwisata menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Melindungi lingkungan yang dimanfaatkan;
b. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
c. Menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan dan rekreasi dari nilai-nilai karakteristik (alam dan budaya lokal);
d. Memberi sumbangan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah;
e. Menekan sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan pariwisata.

Pemanfaatan potensi SDA, SDM lokal, seni budaya dan adat khas dalam konsep pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan (masyarakat, pengusaha, BUMN/BUMD, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) secara bersinergi, terkoordinasi dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga memberikan ruang yang luas bagi desa untuk memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya baik dalam pengelolaan daya tarik/atraksi wisata, peningkatan aksesibilitas, fasilitas penunjang dan pemanfaatan peluang usaha jasa pariwisata melalui badan usaha milik desa dan pemberdayaan kelompok sadar wisata. Pemasaran pariwisata dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan aksesibilitas dan potensi jenis atraksi wisata.

2.1.5.2. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Pola Ruang

Pengembangan wilayah ke depan berdasarkan rencana pola ruang yang terkait dengan pengembangan potensi ekonomi terbagi atas kawasan budidaya, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan dan kawasan pariwisata.

Jenis budidaya yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala meliputi budidaya pertanian dan budidaya perkebunan. Kawasan perdagangan dan jasa dijadikan kawasan strategis yang cepat

tumbuh yang menjadi tempat pergudangan, perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan dan peruntukan lain.

Tabel 2.4 Pola Ruang Kabupaten Barito Kuala

No	Jenis Kawasan Lindung dan Lokasi	Luas (Ha)
1	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**	
	Kawasan Lindung Gambut	
	1. Kecamatan Kuripan	79,72
Total		**79,72**
2	**Kawasan Perlindungan Setempat**	
	A. Sempadan Sungai	
	Anjir Pasar	-
	Anjir Muara	110,96
	Bakumpai	497,59
	Barambai	93,74
	Belawang	133,46
	Cerbon	96,76
	Jejangkit	-
	Alalak	74,41
	Kuripan	394,63
	Mandastanah	-
	Marabahan	-
	Mekarsari	-
	Rantau Badauh	41,16
	Tabukan	162,04
	Tabunganen	317,33
	Tamban	101,13
	Wanaraya	-
Total		**2023,197849**
3	**Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal**	**-**
	1. Kawasan tradisional Panglima Wangkang, terdiri atas :	**-**
	a. Kompleks Makam H. Abdussamad	
	b. Rumah bulat garing joglo	
	c. Rumah adat Banjar di Kec. Marabahan	
	d. Makam Datu Aminin dan Makam Datu Kayan di Kec. Alalak	
	2. Lain-lain terdiri atas :	
	a. Makam Datuk Ilyas Bakul	
	b. Makam Tabib Gabun	
	c. Makam Syahidun	
	d. Makam Habib Alwi	
	e. Makam Syarifah Ratu Shella	
	f. Makam Panglima Jaya Arja	

No	Jenis Kawasan Lindung dan Lokasi	Luas (Ha)
4	**Kawasan Konservasi**	
	Kawasan Suaka Alam	
	Anjir Muara	38,23
	Alalak	80,21
	Tabunganen	3836,69
Total		**3955,13**
5	**Kawasan Rawan Bencana Alam**	
	1. Kawasan rawan gelombang pasang	-
	a. Terdapat di Kec. Tabukan, Kec. Marabahan, Kec. Cerbon, Kec. Rantau Badauh, Kec. Belawang, Kec. Anjir Pasar, Kec. Anjir Muara, Kec. Alalak, Kec. Tamban dan Kec. Tabunganen	
	2. Kawasan rawan banjir	
	a. Terdapat di Kec. Kuripan, Kec. Bakumpai, Kec. Tabunganen, Kec. Mandastana, Kec. Jejangkit dan Kec. Tabukan yang terdiri atas :	
	✓ Daerah pesisir/pantai, meliputi sepanjang pantai Selatan dan wilayah Kecamatan Tabunganen	
	✓ Daerah dataran banjir tersebar pada daerah rendah dan rawa di Kec. Bakumpai	
	✓ Daerah sempadan sungai meliputi Kec. Tabukan dan Kec. Kuripan	
	3. Kawasan kebakaran hutan	
	Tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.	
6	**Kawasan Cagar Budaya**	
	1. Kawasan tradisional Panglima Wangkang, terdiri atas :	-
	a. Kompleks Makam H. Abdussamad	
	b. Rumah bulat garing joglo	
	c. Rumah adat Banjar di Kec. Marabahan	
	d. Makam Datu Aminin dan Makam Datu Kayan di Kec. Alalak	
	2. Lain-lain terdiri atas :	
	a. Makam Datuk Ilyas Bakul	
	b. Makam Tabib Gabun	
	c. Makam Syahidun	
	d. Makam Habib Alwi	
	e. Makam Syarifah Ratu Shella	
	f. Makam Panglima Jaya Arja	
Total Kawasan Lindung		**6.058,048**

Untuk kawasan industri besar di Kecamatan Tamban, Tabunganen, Anjir Muara dan Alalak. Dan untuk kawasan industri sedang diarahkan ke Kecamatan Alalak Tamban, Anjir Muara, Tabunganen dan Rantau Badauh.Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala diarahkan dengan potensi wisata religius, wisata buatan dan wisata alam.

2.1.6.Kawasan Rawan Bencana

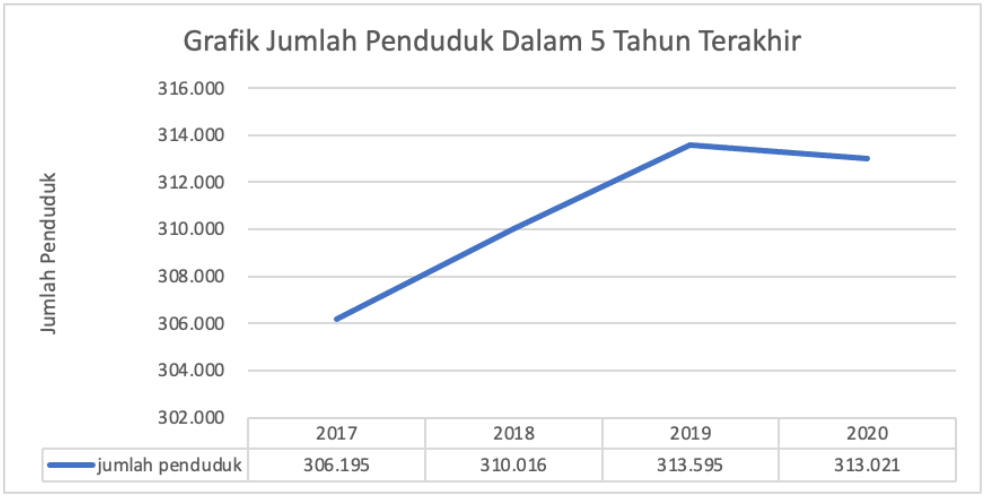
Topografi Kabupaten Barito Kuala yang relatif datar dan berada hanya 0,2 - 3 meter di atas permukaan laut menyebabkan Kabupaten Barito Kuala rawan terhadap genangan-genangan air baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air laut. Potensi banjir kiriman juga bisa saja terjadi karena posisi Kabupaten Barito Kuala yang berada di antara pertemuan 2 (dua) sungai besar yakni Sungai Barito dan Sungai Negara. Curah hujan yang cukup tinggi dari daerah atau wilayah hulu serta pasang air laut merupakan sumber penyebab terjadinya bencana alam banjir di Kabupaten Barito Kuala.

Adapun daerah-daerah yang rawan banjir yaitu di Kecamatan Kuripan, Bakumpai, Tabunganen, Mandastana, Jejangkit dan Tabukan. Sedangkan daerah yang rawan bencana gelombang pasang adalah Kecamatan Tabukan, Marabahan, Cerbon, Rantau Badauh, Belawang, Anjir Pasar, Alalak, Tamban dan Tabunganen.

2.1.7. Demografis

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala tahun 2018-2022 tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2017 sampai dengan 2021 (belum ada data) mengalami peningkatan dari sisi jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan selama kurun waktu tersebut, namun mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Tercatat dari tahun 2017, penduduk Barito Kuala tercatat sebanyak 306.195 jiwa, tahun 2018 sebanyak 310.016 jiwa, tahun 2019 sebanyak 313.595 jiwa, tahun 2020 sebanyak 313.021 jiwa dan terakhir pada tahun 2021 sebanyak 316 960 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada info grafis berikut.

Gambar 2.4 Jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2020). Sumber: Barito Kuala dalam Angka



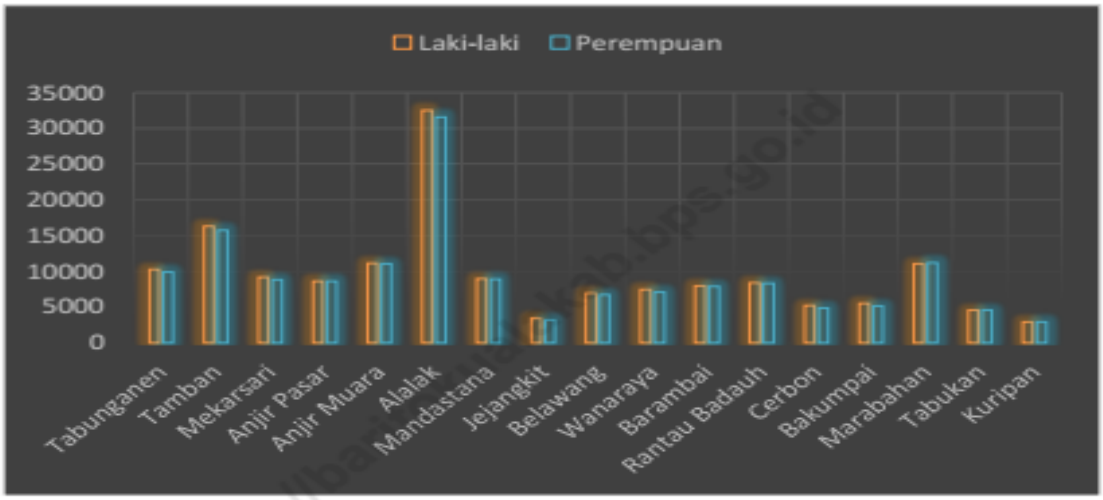
2.1.7.1. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Barito Kuala

Secara umum penduduk Kabupaten Barito Kuala terdiri dari beberapa suku yaitu Suku Dayak Bakumpai, Banjar, Jawa, Bali, Sunda, Madura dan Sasak.

2.1.7.2. Komposisi dan Populasi Masyarakat

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 sebanyak 319.093 jiwa, yang terdiri dari 160.534 laki-laki dan 156.429 perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelaminnya jumlah penduduk laki-laiki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dengan sex rasio 102,7 yang artinya jika terdapat 100 penduduk perempuan, maka akan terdapat sejumlah 102 penduduk laki-laki. Lebih detailnya, jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.5 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2021.



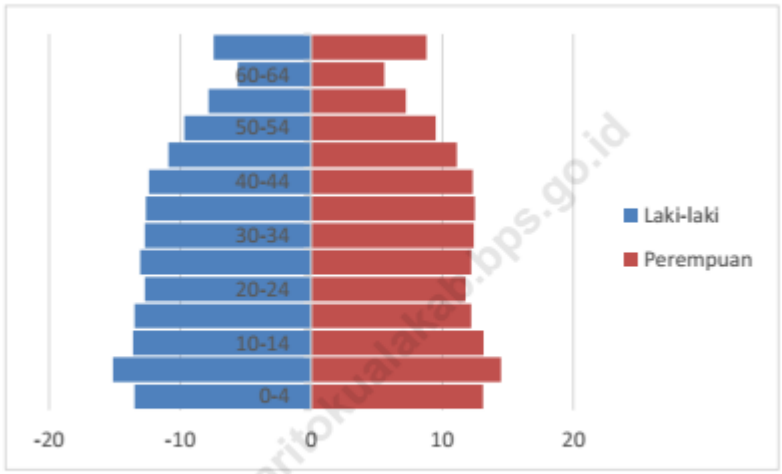
Sumber/Source : BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045/ /BPS-Statistics Indonesia, 2010 Population Census and Indonesia Population Projection 2015-2045

Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045

Dari grafik di atas terlihat bahwa perbandingan jenis kelamin antar penduduk tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan data tahun 2021 yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Barito Kuala, komposisi penduduk terbanyak adalah berasal dari kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah 29.590 jiwa, diikuti kelompok umur 0 – 4 Tahun sebanyak 26.583 jiwa. Jumlah penduduk pada usia kerja adalah sebanyak 226.823 Jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 1760573 jiwa yang terdiri dari jumlah angkatan kerja sebanyak 170.889 dan 5.684

jiwa pada pengangguran terbuka. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin serta persentase penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik-grafik berikut ini.

Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala, 2021



Sumber/Source : BPS, Sensus Penduduk (SP) 2021 dan Hasil Registrasi/ /BPS-Statistics Indonesia, 2021 Population Census and Registration Result

. Sumber : BPS, Sensus Penduduk (SP) 2021 dan Hasil Registrasi

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama *Main Employment Status*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri *Own account worker*	16 093	9 137	25 230
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh takdi bayar *Employer assisted by temporary worker/unpaid worker*	32 445	10 697	43 142
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar *Employer assisted by permanent worker/paid worker*	2 068	478	2 546
Buruh/Karyawan/Pegawai *Regular employee*	34 787	16 221	51 008
Pekerja bebas *Casual employee*	7 275	2 228	9 503
Pekerja keluarga/tak dibayar *Family worker/unpaid worker*	9 873	29 587	39 460
Jumlah/*Total*	**102 541**	**68 348**	**170 889**

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Berdasarkan agama yang dianut, tahun 2021 terdapat 98,98 persen penduduk Kabupaten Barito Kuala beragama Islam, dan selebihnya adalah Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya, yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Barito Kuala, 2021

Kecamatan *Subdistrict*	Islam *Islam*	Protestan *Christian*	Katolik *Catholic*	Hindu *Hindu*	Budha *Buddha*	Lainnya *Other*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tabunganen	20 413	4	0	0	0	0
Tamban	32 764	11	10	4	2	0
Mekarsari	18 313	0	0	0	0	0
Anjir Pasar	17 507	7	4	0	0	0
Anjir Muara	22 906	5	16	0	0	0
Alalak	58 721	669	179	42	57	0
Mandastana	17 639	48	9	0	2	0
Jejangkit	851	21	1	1	0	0
Belawang	14 118	20	12	0	0	0
Wanaraya	14 049	88	3	592	0	0
Barambai	15 384	118	2	694	0	0
Rantau Badauh	16 865	17	25	0	0	0
Cerbon	9 918	47	150	4	0	0
Bakumpai	10 706	97	105	0	0	0
Marabahan	22 315	86	71	15	0	0
Tabukan	9 352	0	0	0	0	0
Kuripan	6 017	5	35	0	0	0
Barito Kuala	307 838	1 243	622	1 352	61	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil Kabupaten Barito Kuala

Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan *Subdistrict*	Persentase Penduduk *Percentage of Total Population*	Kepadatan Penduduk per km² *Population Density per sq.km*
(1)	(4)	(5)
Tabunganen	6,35	83,91
Tamban	10,11	195,11
Mekarsari	5,66	125,09
Anjir Pasar	5,42	136,37
Anjir Muara	7,00	189,95
Alalak	20,22	599,72
Mandastana	5,64	131,48
Jejangkit	2,10	32,83
Belawang	4,33	170,98
Wanaraya	4,59	387,92
Barambai	5,00	86,61
Rantau Badauh	5,27	63,83
Cerbon	3,20	49,21
Bakumpai	3,36	40,86
Marabahan	7,02	100,61
Tabukan	2,88	54,99
Kuripan	1,84	17,00
Barito Kuala	100,00%	105,78

Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Alalak dengan kepadatan sebesar 599.72 jiwa/km2 diikuti oleh Kecamatan Wanaraya yaitu sebesar 387,92 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Kuripan sebesar 17 jiwa/km^2

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berikut disajikan tabel perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Barito Kuala tahun 2016-2020. Kinerja perekonomian Barito Kuala mulaip tahun 2020 mengalami panurunan. Terdapat 11 sektor lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan. Namun, terdapat 6 sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan. Dari 6 sektor lapangan usaha tersebut terdapat sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Barito Kuala.. Nilai PDRB Barito Kuala atas dasar harga berlaku tahun 2021* mencapai 9,87 triliun rupiah, bertambah 0,06 triliun rupiah dibanding tahun 2020 yang tercatat 8,69 triliun rupiah. Namun, laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan sebesar 1,03 persen (Tabel 2.8).

Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2016–2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1.399,63	1.502,80	1.561,77	1.628.50	1.596,47
B	Pertambangan dan Penggalian	4,39	4,59	4,77	5,05	5,27
C	Industri Pengolahan	856,98	877,88	906,32	923,32	901,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	4,99	5,35	5,60	5,87
E	Pengadaan Air;Pengelolaan	12,88	13,65	14,74	15,81	16,86

	Sampah Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	673,12	711,97	757,09	802,23	780,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	572,97	617,47	664,91	713,60	689,11
H	Transportasi dan Pergudangan	178,38	187,17	197,10	203,80	196,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125,34	130,56	137,10	145,95	141,23
J	Informasi dan Komunikasi	111,02	119,11	128,22	136,19	145,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	91,10	94,30	97,73	102,01	105,07
L	Real Estate	181,49	194,88	209,77	224,82	231,68
M N	Jasa Perusahaan	7,33	7,77	8,21	8,70	8,52
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	378.50	387,69	402,31	423,12	441,05
P	Jasa Pendidikan	277,49	300,96	326,50	355,13	362,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,55	71,09	76,40	80,71	86,61
R S T U	Jasa Lainnya	38,55	41,54	44,61	48,08	47,27
Produk Domestik Regional Bruto		**4.979,94**	**5.268,39**	**5.542,91**	**5.822,63**	**5.762,36**

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya (Barito Kuala Dalam Angka 2021, BPS)

Catatan: * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah seluruh lapangan usaha yang mencakup 17 (Tujuh belas) kategori lapangan usaha, yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Berikut disajikan tabel Perkembangan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016-2020:

Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2016–2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1.945,14	2.121,87	2.266,20	2.449,20	2.423,50
B	Pertambangan dan Penggalian	6,05	6,36	6,74	7,28	7,72
C	Industri Pengolahan	1.192,45	1.270,74	1.341,97	1.386,89	1.372,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,50	7,45	8,47	9,13	9,84
E	Pengadaan Air;Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	17,44	19,05	21,26	23,13	24,89
F	Konstruksi	902,77	981,27	1.075,49	1.170,99	1.148,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	790,77	887,72	987,41	1.089,38	1.074,01
H	Transportasi dan Pergudangan	239,35	259,24	281,85	302,56	295,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	165,30	177,12	190,99	207,02	204,99
J	Informasi dan Komunikasi	132,85	146,35	162,09	176,06	188,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	125,25	134,94	146,15	158,92	164,52
L	Real Estate	231,72	254,98	279,78	306,89	321,72
M N	Jasa Perusahaan	10,42	11,48	12,55	13,61	13,67
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	554,41	582,11	627,59	676,52	714,70
P	Jasa Pendidikan	378,21	423,44	469,86	523,75	543,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90,78	100,18	110,74	120,21	131,67
R S T U	Jasa Lainnya	54,25	60,47	66,83	74,09	74,39
Produk Domestik Regional Bruto		**6.843,23**	**7.444,77**	**8.055,96**	**8.695,93**	**8.713,13**

B. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran merupakan pengeluaran atas barang dan jasa pada tingkat konsumsi akhir. Pendekatan ini merupakan penghitungan PDRB yang dilakukan dengan menghitung semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; pengeluaran konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga; pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; pembentukan modal tetap domestik bruto; perubahan inventori; dan Net Ekspor (Ekspor dikurang Impor).

Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala (milliar rupiah), 2016 – 2020

Jenis Pengeluaran	**2016**	**2017**		**2018**	**2019***	**2020x***
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.302,68	4.631,88		4.996,00	5.369,69	5.833,55
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	91,86	103,74		112,73	126,57	141,54
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.061,93	1.115,24		1.150.52	1.201,68	1.248,28
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.877,30	2 014,45		2 190,90	2379,38	2 620,23
Perubahan Inventori	7,74	-70,03		77,22	-117,07	24,27
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	-1.091,12	-952,02		-1.082,61	-903,94	-1.154,13
Produk Domestik Regional Bruto	**6.250,39**	**6.843,25**		**7.444,77**	**8.056,30**	**8.713,74**

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya
Catatan: * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN,1993).

C. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan adanya kecenderungan turun dari tahun ke tahun. Kondisi terparah adalah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami minus (-) 1.04. meskipun secara umum di Kalimantan Selatan laju pertumbuhan ekonomi berada pada pertumbuhan minus (-) bahkan secara nasional. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.11 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala (milliar rupiah), 2016 – 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,37	3,92	4,27	(1,97)
B	Pertambangan dan Penggalian	4,38	3,96	5,39	4,30
C	Industri Pengolahan	2,44	3,24	1,88	(2,35)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,43	7,23	4,66	4,83
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,96	8,01	7,25	6,63
F	Konstruksi	5,77	6,34	5,96	(2,69)
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,77	7,68	7,32	(3,43)
H	Transportasi dan pergudangan	4,92	5,31	3,40	(3,37)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,16	5,01	6,45	(3,24)
J	Informasi dan Komunikasi	7,29	7,65	6,21	6,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,52	3,63	4,39	2,99
L	Real Estat	7,38	7,64	7,18	3,05
M.N	Jasa Perusahaan	6,00	5,75	5,90	(2,00)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,43	3,77	5,17	4,24
P	Jasa Pendidikan	8,45	8,49	8,77	2,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	7,48	5,64	7,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,75	7,41	7,77	(1,70)
Produk Domestik Regional Bruto		**5,79**	**5,21**	**5,05**	**(1,04)**

D. Inflasi

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun, sedangkan inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum

(*price level*) cenderung naik. Kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala mengacu inflasi di Kota Banjarmasin.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Pada tahun 2016 mengalami inflasi sebesar 3,68%, inflasi tersebut naik menjadi 3,82% pada tahun 2017, dan turun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 menjadi 2,63%. Pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 4,15% .

E. PDRB per Kapita

PDRB perkapita merupakan suatu ukuran pendapatan yang dapat dianggap menggambarkan tingkat pendapatan tiap penduduk pada suatu daerah. PDRB per Kapita Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 sudah mencapai Rp 27.471.000,00 dengan capaian sebesar 108,79%. Meningkatnya PDRB perkapita melampaui angka tahun sebelumnya cukup unik ditengah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara global, regional maupun lokal dimana pertumbuhan ekonomi atau PDRB kabupaten Barito Kuala tumbuh -1,04%. Walaupun angka ini tidak bisa secara pasti menggambarkan kondisi real kesejahteraan masyarakat di Barito Kuala karena dominasi sektor pertanian yang memiliki nilai produktivitasnya masih rendah. Meningkatnya angka ini disebabkan laju signifikan sektor sekunder dan tersier, diantaranya sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi yang merupakan kegiatan yang mempunyai nilai tambah dan efek multiplier yang cukup tinggi. Diharapkan kedepan PDRB perkapita ini akan dapat diimbangi dengan pengeluaran perkapita yang tidak jauh beda. Gambaran umum capaian indikator yang mendukung capaian PDRB perkapita pada tahun 2020 adalah:

Kesatu, jumlah pelaku UKM, sampai tahun 2020 mencapai 35.965 orang, terdiri dari usaha mikro berjumlah 35.405 buah, usaha kecil 490 buah, dan usaha menengah sebanyak 70 buah. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya mencapai 35.844 buah, terdiri dari usaha mikro berjumlah 35.284, usaha kecil 490, dan usaha menengah sebanyak 70 buah. Untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro telah dilakukan pembinaan kepada usaha mikro berupa kegiatan pelatihan pengolahan, pengemasan dan pemasaran produksi, hasilnya adalah meningkatnya dua usaha mikro menjadi usaha kecil.

Kedua, jumlah koperasi yang berprestasi, sampai tahun 2020 jumlah koperasi mencapai 121 buah dengan jumlah anggota sebanyak 31.703 orang, sedangkan jumlah koperasi yang berprestasi sebanyak 44 buah atau mencapai 36,3 %. Adapun dana yang dikelola sebesar Rp.

9.421.680.000,-. Jumlah koperasi tersebut meningkat dibanding jumlah tahun 2019 yang hanya mencapai 120 buah, dengan jumlah koperasi yang berprestasi sebanyak 43 buah.

Ketiga, jumlah investasi yang berusaha di Kabupaten Barito Kuala baik dari penanaman modal asing dan dalam negeri pada tahun 2020 sebesar Rp. 295.801.400.000,- dari target Rp. 250.000.000.000 atau tercapai sebesar 118,32% namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp. 331.501.600.000,. Rendahnya capaian tahun 2020 disebabkan pelaku usaha tidak kontinue dan konsisten dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berupa jumlah nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Barito Kuala, ketergantungan sumber pengolahan data dan informasi pada database Badan Koordinasi Pengolahan Penanaman Modal (BKPM), sarana dan prasarana yang tidak memadai serta adanya keterbatasan akses database di BKPM untuk menginventarisasi data yang lebih rinci. Namun demikian upaya-upaya yang menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan jumlah investasi ke depannya telah dilakukan melalui koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, meningkatkan perhatian dan partisipasi/kesadaran dari pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM, meningkatkan informasi dari media massa, melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, serta melaksanakan dan mengikuti pameran investasi/promosi daerah.

Keempat, pembinaan kawasan transmigrasi, pada tahun 2020 telah dilakukan beberapa program untuk lebih mengembangkan kawasan transmigrasi. Tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal, dan meningkatkan infrastruktur kawasan transmigrasi, mengadakan pelatihan bagi pelaku usaha dalam rangka peningkatan kualitas SDM sehingga meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, merencanakan kegiatan pelatihan pengembangan peningkatan usaha untuk pelaku usaha di kawasan Transmigrasi melalui kajian dan FGD yang dilaksanakan dengan melibatkan stake holder yang terkait.

Kegiatan yang menunjang pengembangan kawasan transmigrasi meliputi kajian Pengembangan Ekonomi Inklusif di Kawasan Transmigrasi sebanyak 58 orang dan FGD Identifikasi Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka penguatan produk unggulan di Kawasaan Transmigrasi sebanyak 32 orang. Selain itu melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelatihan pelatihan yang telah dilaksanakan dalam keterkaitan dengan Usaha yang mereka jalankan termasuk dalam aspek manajemen pengelolaan dan peningkatan daya saing para pelaku usaha di Kawasan Transmigrasi. Untuk pengembangan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal telah dilaksanakan pelatihan pengolahan

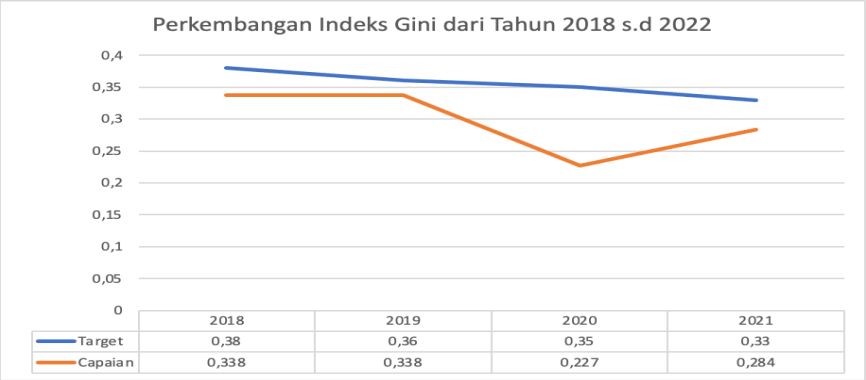
jamur krispy beserta kemasannya, dan fasilitasi pengembangan BUMDES di kawasan transmigrasi.Untuk mendukung dan mempermudah akses transportasi dan ekonomi transmigran ke daerah pasar dilaksanakan peningkatan jalan di kawasan transmigrasi sepanjang 2 km. Upaya ini sangat bermanfaat untuk lebih meningkatkan penghasilan keluarga transmigran.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Gini (Gini Rasio)

Gini rasio atau indeks gini merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam suatu daerah. Indeks gini di Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2021 mencapai 0,284 dari target sebesar 0,33. Ini menunjukan pemerataan pendapatan di Barito Kuala hampir merata dan tiap tahunnya terus menurun mendekat ke arah angka nol yang merupakan angka terbaik yang artinya tidak ada lagi kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Gini / Gini Rasio selama 5 tahun terakhir (2022 belum ada datanya)



Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan acuan adalah capaian angka Indeks Gini (Gini Ratio). Meskipun kondisi ini masih tergolong berada pada tingkat kesenjangan yang tinggi, namun trend angka yang semakin mendekati ke angka “0” tentu sebuah gambaran kondisi yang semakin baik. Kedepan Indeks Gini akan diupayakan agar berada pada kisaran angka di bawah 0,30 sehingga kesenjangan pendapatan di Kabupaten Barito Kuala tidak semakin jauh antar penduduk. Upaya pemerataan pendapatan dilakukan pemerintah dengan pemberdayaan penduduk menjadi penduduk yang produktif sesuai bidang usaha yang digeluti. Terutama pada pengembangan wirausahan-wirausahan baru maupun wirausahawan yang sudah ada.Kebanyakan usaha produktif mereka laksanakan bergerak pada usaha perdagangan dan usaha jasa lainnya.

Tabel 2.12 Perbandingan Gini Rasio Se-Kalimantan Selatan

Kabupaten	Gini Ratio		
	2019	2020	2021
KALIMANTAN SELATAN	0,334	0,332	0,33
TANAH LAUT	0,271	0,25	0,232
KOTABARU	0,335	0,287	0,306
BANJAR	0,33	0,322	0,344
BARITO KUALA	0,285	0,277	0,284
TAPIN	0,268	0,274	0,289
HULU SUNGAI SELATAN	0,288	0,3	0,275
HULU SUNGAI TENGAH	0,288	0,285	0,331
HULU SUNGAI UTARA	0,327	0,319	0,378
TABALONG	0,306	0,346	0,288
TANAH BUMBU	0,346	0,3	0,281
BALANGAN	0,273	0,298	0,277
KOTA BANJARMASIN	0,326	0,342	0,35
KOTA BANJAR BARU	0,357	0,381	0,361

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 berada pada peringkat 9 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 0.284 dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0.33

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

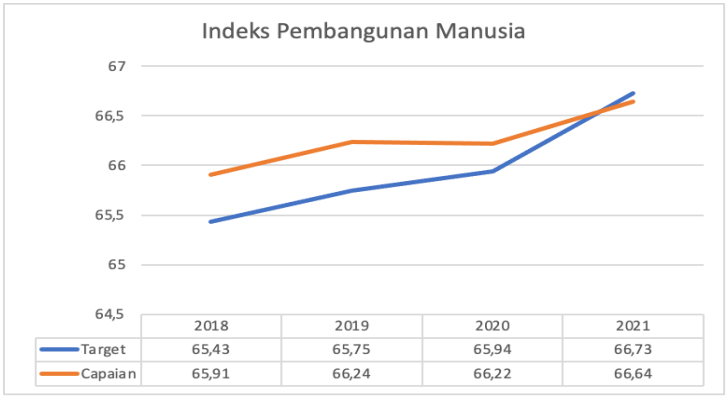
Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Perkembangan IPM di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.13 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se-Kalimantan Selatan

Kabupaten	(Metode Baru) Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
KALIMANTAN SELATAN	70,72	70,91	71,28
TANAH LAUT	69,04	69,38	69,87
KOTABARU	68,95	68,86	69,13
BANJAR	68,94	69,18	69,89
BARITO KUALA	66,24	66,22	66,64
TAPIN	70,13	70,11	70,31
HULU SUNGAI SELATAN	68,8	68,85	69,21
HULU SUNGAI TENGAH	68,8	68,84	69,05
HULU SUNGAI UTARA	65,49	65,59	66,12
TABALONG	71,78	72,19	72,6
TANAH BUMBU	70,5	70,71	71
BALANGAN	68,39	68,82	69,11
KOTA BANJARMASIN	77,16	77,1	77,57
KOTA BANJAR BARU	79,22	79,1	79,26

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 peringkat 12 di provinsi kalimantan selatan dengan nilai IPM 66,64 dan nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan adalah 71,28

Gambar 2.8 Perkembangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) selama 5 tahun terakhir (2022 belum ada data)

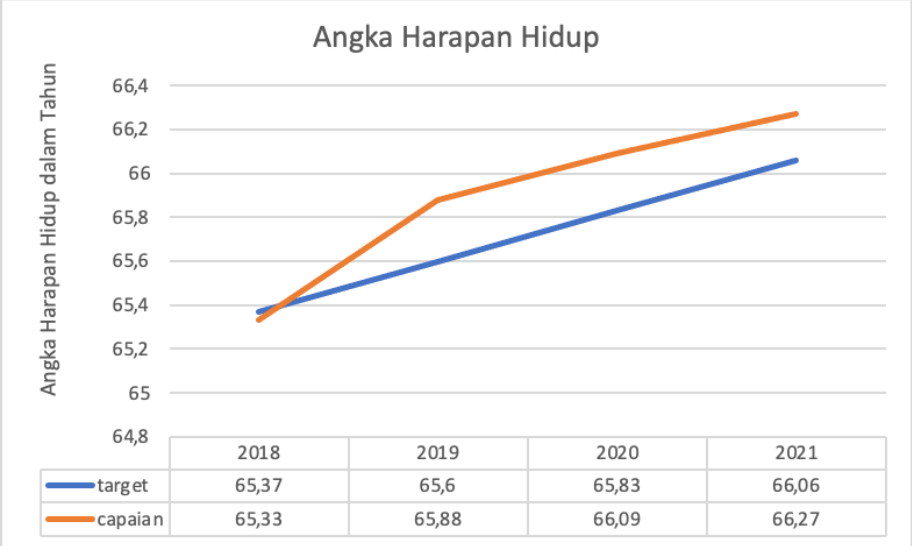


Pada tahun 2018 capaian IPM Kabupaten Barito Kuala berada pada 65,91 dan mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Secara garis besar, capaian IPM Kabupaten Barito Kuala selalu berada di atas target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2021 yang berada sedikit rendah dengan selisih 0,09. IPM Barito Kuala berada pada kategori

“sedang” dan dengan capaian ini tentu menjadi indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Barito Kuala terutama yang menjadi unsur dari pembangunan IPM sendiri yaitu Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Daya Beli Masyarakat yang juga mengalami perbaikan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

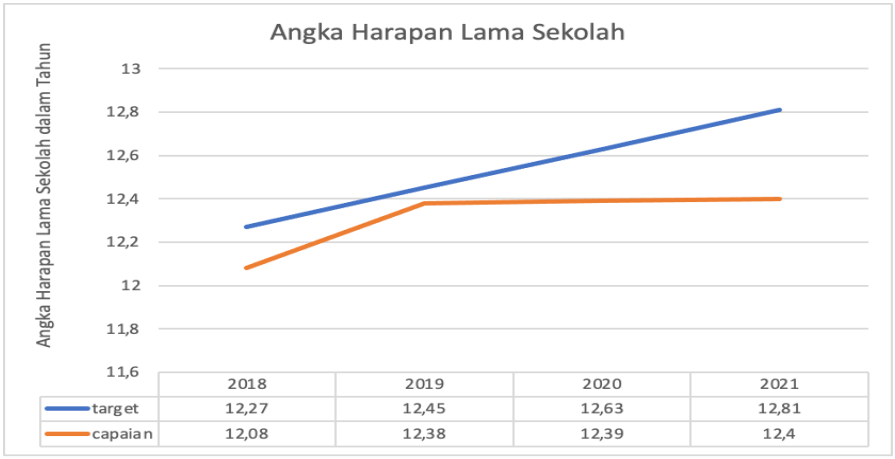
Dari 3 (tiga) dimensi yang membentuk capaian IPM, hanya dimensi daya beli masyarakat yang mengalami penurunan selebihnya 2 (dua) indikator lainnya yakni Usia Harapan Hidup (UHH) dan Rata-Rata Lama Sekoleh mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan capaian Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Barito Kuala sebagai derivat dari Indeks Pembangunan Manusia.

Gambar 2.9 Perkembangan Usia Harapan Hidup selama 5 tahun terakhir (2022 belum ada data)



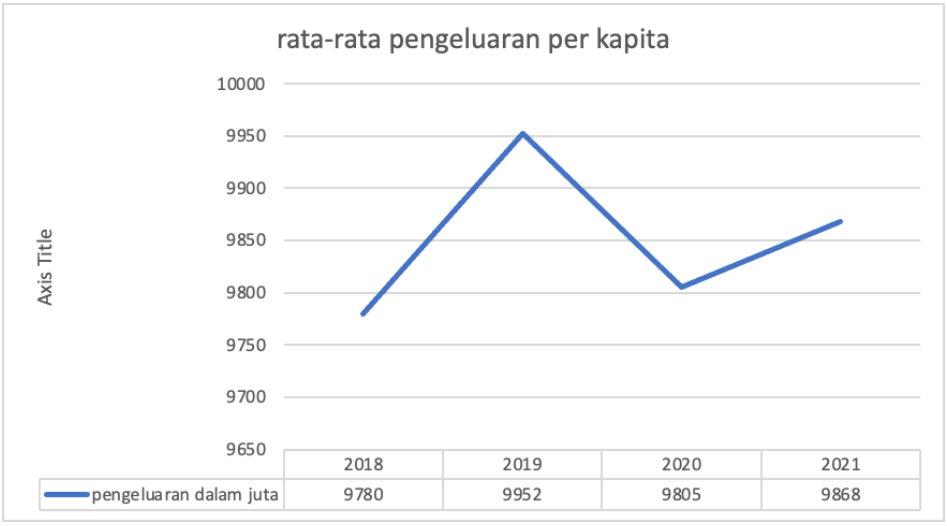
Melihat grafik di atas, Usia harapan hidup mulai dari tahun 2018 sampai 2022 selalu mengalami peningkatan per tahunnya dan selalu berada diatas target yang telah ditetapkan, terkecuali untuk tahun 2018 yang berada sedikit dibawah target yaitu dengan selisih sebesar 0,04.

Gambar 2.10 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah selama 5 tahun terakhir (2022 belum ada data)



Melihat dari grafik diatas, Angka Harapan Lama Sekolah selalu menagalami peningkatan tiap tahun dari 2018 hingga 2022 dan mengalami capaian kenaikan yang paling signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sayangnya capaian ini masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Gambar 2.11 Perkembangan Angka Rata-rata pengeluaran per kapita selama 5 tahun terakhir (2021 perkiraan, 2022 belum ada data)



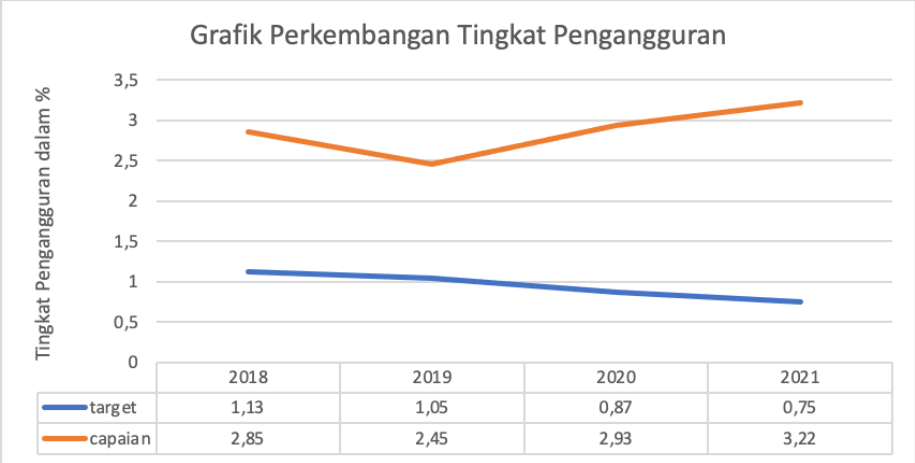
Sebagaimana diutarakan sebelumnya, bahwa dari 3 (tiga) derivat IPM, pengeluaran per kapita mengalami penurunan pada tahun 2020, berbagai faktor diduga menjadi penyebab dari Penurunan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Barito Kuala, salah satunya adalah kondisi Pandemi Covid-19 yang sangat dominan memberikan pengaruh cukup besar terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Barito Kuala. Data angkat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai berikut.

Gambar 2.12 Perkembangan tingkat pengangguran selama 5 tahun terakhir



Tabel 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Se-Kalimantan Selatan

Kabupaten	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)**		
	2019	**2020**	**2021**
KALIMANTAN SELATAN	4.18	4.74	4.95
TANAH LAUT	3.50	3.57	3.52
KOTABARU	5.02	4.96	5.57
BANJAR	2.98	3.87	3.98
BARITO KUALA	2.45	2.93	3.22
TAPIN	3.79	3.73	4.96
HULU SUNGAI SELATAN	2.49	2.24	2.44
HULU SUNGAI TENGAH	2.89	3.90	3.76
HULU SUNGAI UTARA	3.46	4.49	4.80
TABALONG	3.29	3.07	3.43
TANAH BUMBU	6.43	6.95	6.83
BALANGAN	2.33	2.46	2.44
KOTA BANJARMASIN	8.10	8.32	8.47
KOTA BANJAR BARU	5.18	5.54	5.70

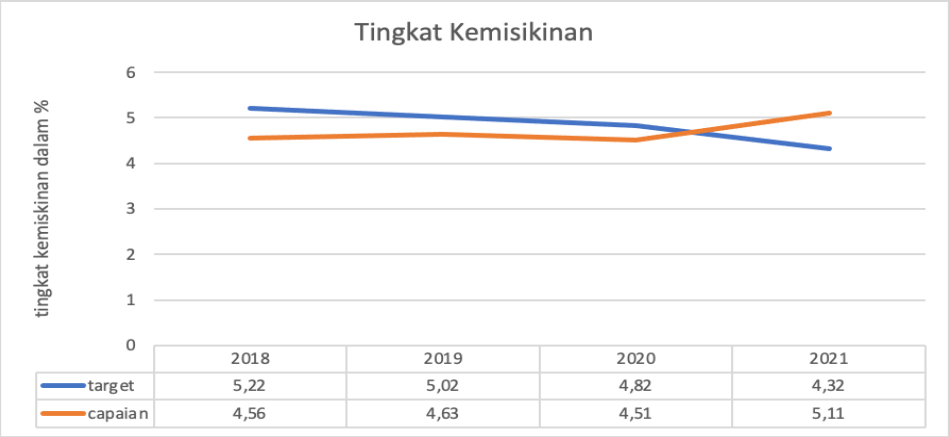
Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 berada pada peringkat 3 dengan nilai 3.22 % sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 4,95%

D. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik di setiap tahunnya. Seperti tersaji dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.13 Perkembangan tingkat kemiskinan selama 5 tahun terakhir



Tabel 2.15 Tingkat Kemiskinan Se-Kalimantan Selatan

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	2021	2021
KALIMANTAN SELATAN	208118	4,83
TANAH LAUT	15862	4,57
KOTABARU	16834	4,86
BANJAR	18067	3,04
BARITO KUALA	16099	5,11
TAPIN	6925	3,6
HULU SUNGAI SELATAN	11466	4,84
HULU SUNGAI TENGAH	16770	6,18
HULU SUNGAI UTARA	16186	6,83

TABALONG	16128	6,27
TANAH BUMBU	18919	4,82
BALANGAN	8062	6,07
KOTA BANJARMASIN	34839	4,89
KOTA BANJAR BARU	11951	4,4

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 berada pada peringkat 9 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 5.11% diatas tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 4,83%

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Jumlah organisasi kepemudaan yang ada menyebar di beberapa kecamatan diantaranya merupakan organisasi pemuda yang sudah cukup terkenal di masyarakat seperti: AMPI, KNPI, Karang Taruna, dan Kelompok Pemuda Produktif yang telah terdaftar dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Penyelenggaraan kegiatan olah raga, yang dilaksanakan/diprogramkan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi, Festival, Kejurda, dan Turnamen-turnamen lainnya dan kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat/swasta/sponsor/pihak ketiga. Kegiatan olah raga yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah seperti event dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan dan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Di Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi wisata dan lazim dikunjungi oleh wisatawan seperti Taman Wisata Alam Pulau Kembang, Jembatan Barito, Jembatan Rumpiang, Cagar Alam Pulau Kaget Alur Sungai Barito, Desa Wisata Pulau Curiak, Desa Talaran, Jejangkit Ecopark dan Makam Datuk H. Abdussamad. Wisatawan yang berkunjung didominasi wisatawan nusantara sebanyak 92.249 orang. Selain makam Datuk H. Abdussamad masih banyak makam yang didatangi peziarah seperti makam Panglima Wangkang, Datuk Ilyas Bakul, Datuk Syahidun, Datuk Aminim, Datuk Khayan, Habib Alwi,

Syarifah Ratu Sela, dan Jaya Arja serta wisata sejarah lainnya seperti rumah bulat dan rumah budaya. Kelompok kesenian budaya dan keagamaan juga tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Jenis kesenian budaya dan keagamaan tersebut antara lain Maulid Habsyi, Rebana, Sinoman Hadrah, Kuda Lumping, Kuda Gepang, Reog dan Keroncong

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Fokus aspek pelayanan umum diukur dari indikator layanan pendidikan (Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, Rasio Guru Murid), indikator layanan kesehatan (Rasio rumah sakit/penduduk, rasio puskesmas/penduduk), indikator layanan perizinan (jumlah perizinan yang dikeluarkan)dan Indikator layanan kependudukan (rasio penduduk ber KTP).

2.3.1. Fokus Pelayanan Umum Pendidikan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 seperti yang dituangkan dalam Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2021, penyebaran sekolah di Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan cukup merata di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Jumlah sekolah terbanyak dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi terdapat di Kecamatan Alalak yakni 35 buah unit. Sedangkan jumlah sekolah yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Jejangkit yang hanya 10 buah unit. Perbedaan jumlah ini sangat ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk terutama jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing kecamatan.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala adalah 344 buah sekolah dengan rincian pada jenjang Pendidikan TK/RA sebanyak 250 unit, pendidikan SD/MI saat ini tersedia 328 buah unit, SMP/MTs sebanyak 102 unit, SMA/MA sebanyak 41 unit, dan SMK sebanyak 4 unit yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

Jumlah maksimal peserta didik setiap ruang kelas pada jenjang SD/MI adalah 28 peserta didik, jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK adalah 32 peserta didik. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase sekolah menurut SNP, sehingga dapat ditentukan sekolah atau daerah mana yang belum memenuhi SNP menurut rasio siswa per rombel, dan dapat sebagai bahan untuk perencanaan peningkatan mutu proses belajar mengajar. Dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) Barito Kuala masih berada di bawah SNP yang berarti jumlah ruang kelas masih dapat menampung sejumlah peserta didik yang ada. Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas dan fasilitas pendukung lainnya sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang Sekolah Dasar, perbandingan guru terhadap siswaadalah 1 : 20. Hal ini menjadi kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 65 dikatakan bahwa aturan ini secara efektif berlaku 10 tahun sejak UU No. 14 Tahun 2005 ditetapkan, yang artinya sejak tahun 2016 yang baru lalu mutlak diberlakukan. Ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang menyatakan akan mulai diberlakukan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 (Permendikbud No. 17 Tahun 2016 Point A Item No. 5)

Tabel 2.16 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Tabunganen	15	21	4	1
Tamban	24	26	8	2
Mekarsari	14	12	2	1
Anjir Pasar	5	18	2	1
Anjir Muara	15	20	3	1
Alalak	37	34	9	2
Mandastana	18	19	4	1
Jejangkit	2	11	2	1
Belawang	9	16	2	1
Wanaraya	16	14	4	1
Barambai	12	13	3	1
Rantau Badauh	14	16	4	1
Cerbon	10	11	2	-
Bakumpai	6	10	3	1
Marabahan	23	15	4	1
Tabukan	11	9	2	1
Kuripan	9	9	3	1
Barito Kuala	240	274	61	18

Sumber : Barito Kuala dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.17 Jumlah Guru di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Tabunganen	50	191	47	22
Tamban	93	224	79	39
Mekarsari	43	101	22	24
Anjir Pasar	21	149	25	30
Anjir Muara	51	161	49	19
Alalak	147	381	149	61
Mandastana	71	161	46	34
Jejangkit	6	83	23	16
Belawang	37	115	31	17
Wanaraya	47	118	43	27
Barambai	51	121	33	19
Rantau Badauh	47	133	51	22
Cerbon	38	90	23	
Bakumpai	24	97	41	17
Marabahan	109	158	76	42
Tabukan	37	67	23	22
Kuripan	25	60	23	15
Barito Kuala	897	2410	784	426

Sumber : Barito Kuala dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.18 Jumlah Murid di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Tabunganen	466	2104	618	383
Tamban	601	2733	907	554
Mekarsari	341	1087	211	311
Anjir Pasar	124	1193	240	499
Anjir Muara	377	1565	527	209
Alalak	1448	6726	2276	848
Mandastana	530	1896	580	547
Jejangkit	52	706	260	165
Belawang	260	1228	376	147
Wanaraya	425	1229	508	493
Barambai	362	1474	369	179
Rantau Badauh	379	1415	469	288
Cerbon	198	912	146	
Bakumpai	259	1158	344	230

Marabahan	687	2189	705	652
Tabukan	362	925	266	268
Kuripan	170	580	250	220
Barito Kuala	7041	29120	9052	5993

Sumber : Barito Kuala dalam Angka Tahun 2022

2.3.2. Fokus Pelayanan Umum Kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, Pemerintah berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan paramedis. Berdasar data dari Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2021, fasilitas Kesehatan yang tersedia di Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 adalah Rumah Sakit Umum sebanyak 2 unit, puskesmas sebanyak 19 unit, klinik kesehatan sebanyak 5 unit, posyandu sebanyak 390 unit, dan polindes sebanyak 112 unit. Angka rasio posyandu per jumlah balita terus naik dari tahun ke tahun, dari angka 0,28 (tahun 2013) menjadi 0,30 (tahun 2014), namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi hanya 0,27. Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera.

Ketersediaan berbagai sarana kesehatan yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Sarana Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alat Kesehatan dan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, secara kuantitas sudah terpenuhi untuk pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Saat ini sudah tersedia Puskesmas sebanyak 19 buah dengan perincian 10 Puskesmas Perawatan dan 9 Puskesmas non Perawatan. Disamping Puskesmas untuk tingkat kecamatan, juga terdapat beberapa fasiliats pelayanan kesehatan yang tersebar hampir di seluruh desa dalam wilayah Kanupaten Barito Kuala, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 63 buah, Poskesdes permanen sebanyak 93 buah dan Poskesdes non permanen sebanyak 60 buah. Di beberapa kecamatan juga sudah tersedia Puskesmas Keliling sebanyak 26 buah yang terdiri dari kendaraan bermotor sebanyak 21 buah dan perahu bermotor sebanyak 5 buah.

Selain fasilias kesehatan yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, juga tersedia beberapa fasiliats kesehatan yang dibangun dan dikelola oleh

pihak lain seperti oleh pihak swasta dan TNI/Polri. Sarana Kesehatan pada TNI/Polri sebanyak 3 buah dan Swasta sebanyak 5 buah.

Jumlah tenaga medis yang tersedia yaitu dokter spesialis sebanyak 17 orang dengan rasio 16,09 per 100.000 penduduk, dokter gigi sebanyak 12 orang dengan rasio xx per 100.000 penduduk, dokter umum sebanyak 41 orang dengan rasio 3,02 per 100.000 penduduk. Jumlah Tenaga Keperawatan yaitu untuk bidan sebanyak 281 orang sedangkan untuk perawat sebanyak 196 orang dan perawat gigi sebanyak 25 orang, rasio (perawat dan bidan) 220,93 per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk tenaga gizi sebanyak 48 orang dengan rasio 13,41 per 100.000 penduduk, berikutnya farmasi terdiri 25 orang dengan rincian dari apoteker sebanyak 39 orang dengan rasio 12,4 per 100.000 penduduk, dan tenaga teknis terdiri dari tenaga Sanitasi sebanyak 23 orang dengan rasio 8,72 per 100.000 penduduk,dan teknis analis sebanyak 33 orang dengan rasio 11,73 per 100.000 penduduk.

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah sebuah data yang memberikan gambaran pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap masyarakat. Angka ini tentu akan terus bergerak seiring dengan terjadinya dinamika jumlah penduduk dalam satu wilayah. Pada tabel di bawah, terlihat bahwa rasio jumlah Puskesmas sempat mengalami peningkatan pada tahun 2014 namun akhirnya turun kembali pada tahun 2016. (Data rasio puskesmas dengan jumlah penduduk dari 2017-2021 belum ada)

Secara umum ketersediaan tenaga dokter jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan sebaran penduduk di Kabupaten Barito Kuala masih diperlukan penambahan secara jumlah yang disertai dengan pemerataan penyebarannya di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sementara ini ketersediaan tenaga dokter dalam hal ini dokter umum masih lebih besar berada pada fasilitas kesehatan yang tergolong dalam wilayah perkotaan terutama d rumah sakit yang berada di ibukota kabupaten.

Tabel 2.19 Rasio Tenaga Kesehatan di Barito Kuala 2017-2021

Uraian *Description*	Tahun *Year*				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dokter & Dokter Gigi *Doctors & Dentists*	14,70	13,23	13,55	...	...
Apoteker & Ass Apoteker *Pharmacist & assistant*	13,70	12,60	13,90	...	...
Perawat & Bidan *Nurses & Midwives*	273,03	263,53	213,50	...	...
Tenaga Gizi *Nutrition staff*	15,02	18,06	18,06	...	...
Tenaga Sanitarian *Sanitarian staff*	7,51	6,45	6,45	...	...
Tenaga Analisis *Analysis staff*	9,80	9,80	9,80	...	...

Sumber/*Source*: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala/*Health Service of Barito Kuala Regency*

Tabel 2.20 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Tabunganen	-	-	-	1	3	-
Tamban	-	-	-	1	4	-
Mekarsari	-	-	-	2	2	-
Anjir Pasar	-	-	-	1	4	-
Anjir Muara	-	-	1	1	4	-
Alalak	1	-	-	2	5	1
Mandastana	-	-	-	1	5	1
Jejangkit	-	-	-	1	1	-
Belawang	-	-	-	1	3	-
Wanaraya	-	-	-	1	4	-
Barambai	-	-	-	1	3	-
Rantau Badauh	-	-	-	1	2	-
Cerbon	-	-	-	1	3	-
Bakumpai	-	-	-	1	3	-
Marabahan	1	-	-	1	4	2
Tabukan	-	-	-	1	2	-
Kuripan	-	-	-	1	3	-
Barito Kuala	2	0	1	19	55	4

Sumber : Barito Kuala dalam Angka 2022

Tabel 2.21 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Tabunganen	3	12	19	1	6
Tamban	2	13	16	1	4
Mekarsari	2	19	22	3	4
Anjir Pasar	2	16	19	1	2

Anjir Muara	1	18	24	1	3
Alalak	4	18	32	5	6
Mandastana	1	11	25	1	2
Jejangkit	1	11	14	2	3
Belawang	2	11	14	1	2
Wanaraya	3	8	17	1	2
Barambai	2	16	16	1	3
Rantau Badauh	1	13	16	1	3
Cerbon	1	10	11	1	2
Bakumpai	1	7	14	1	3
Marabahan	10	107	53	26	7
Tabukan	1	13	12	0	3
Kuripan	2	8	12	1	2
Barito Kuala	39	311	336	48	57

Sumber : Barito Kuala dalam Angka 2022

Tabel 2.22 Presetase Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting di Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Stunting
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/*Regency*			
1. Tanah Laut	1,85	8,6	10,5
2. Kotabaru	2,13	12,7	14.98
3. Banjar	2,29	13,4	17,7
4. Barito Kuala	1,75	12,5	14,6
5. Tapin	2,77	11,5	11,6
6. Hulu Sungai Selatan	0,91	10,5	6.01
7. Hulu Sungai Tengah	0,71	11,4	9,4
8. Hulu Sungai Utara	0,60	22,3	19,7
9. Tabalong	1,25	10,8	8.40
10. Tanah Bumbu	0,23	4,8	4,1
11. Balangan	1,05	17,0	17.97
Kota/*Municipality*			
1. Banjarmasin	0,30	3,3	4,2
2. Banjarbaru	1,58	14,1	17,1
Kalimantan Selatan	**1,19**	**10,2**	**10,6**

Sumber/*Source:* Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan/*Health Agency of Kalimantan Selatan Province*

https://kalsel.bps.go.id

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 angka gizi buruk mencapai 1,75; kurang gizi mencapai 12, 5 dan stunting adalah 14,6 dan berada diatas angka rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang mana angka gizi buruk pada tahun 2021 mencapai 1,19 kurang gizi 10,2 dan stunting 10,6

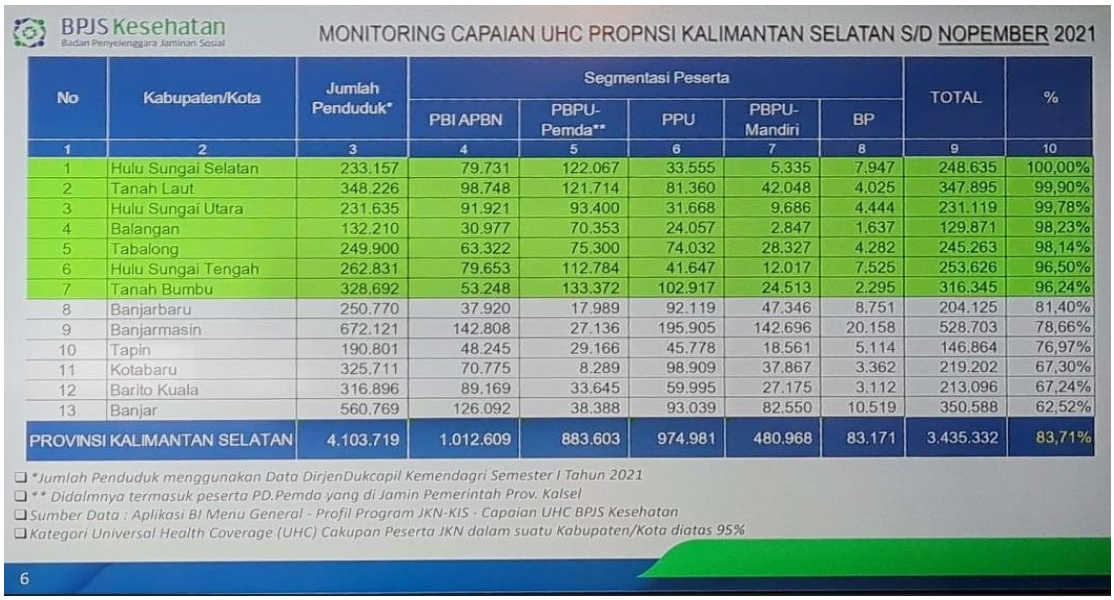
Tabel 2.23 Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) di Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota *Regency/ Municipality*	AKI *MMR*			AKB *IMR*			AKN *NMR*		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)			
Kabupaten/ *Regency*									
1. Tanah Laut	46	123	267	8	12	11	7	9	9
2. Kotabaru	168	141	266	15	8	7	11	7	6
3. Banjar	91	72	157	8	7	8	3	5	6
4. Barito Kuala	0	102	133	12	10	13	10	7	9
5. Tapin	93	149	385	12	14	10	7	12	8
6. Hulu Sungai Selatan	80	77	108	21	16	11	19	12	10
7. Hulu Sungai Tengah	202	428	226	12	15	16	10	12	13
8. Hulu Sungai Utara	68	169	326	10	13	16	8	11	12
9. Tabalong	93	146	276	4	10	10	4	9	7
10. Tanah Bumbu	97	149	166	11	10	11	9	7	9
11. Balangan	181	89	309	16	7	13	11	7	10
Kota/*Municipality*									
1. Banjarmasin	77	101	100	3	3	2	3	2	1
2. Banjarbaru	121	172	269	3	5	5	2	5	4
Kalimantan Selatan	**92**	**135**	**205**	**9**	**9**	**9**	**7**	**7**	**7**

Sumber/*Source*: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan/*Health Agency of Kalimantan Selatan Province*

Berdasarkan tabel diatas angka kematian ibu di kabupaten barito kuala pada tahun 2021 mencapai 133 orang, angka kematian bayi mencapai 13 dan angka kematian neonatal mencapai 9. Sedangkan angka kematian ibu di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 205 orang, angka kematian bayi mencapai 13 dan angka kematian neonatal mencapai 7 orang.

Gambar 2.14 Capaian UHC Se-Kalimantan Selatan sd November 2021



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

MONITORING CAPAIAN UHC PROPNSI KALIMANTAN SELATAN S/D NOPEMBER 2021

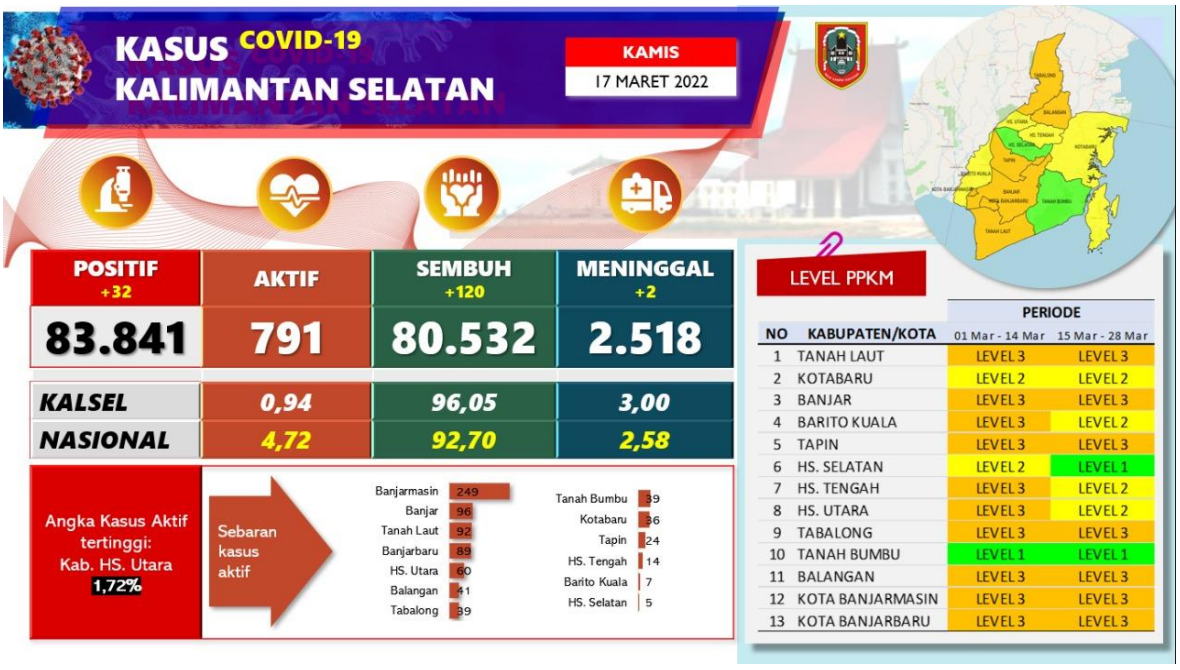
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk*	Segmentasi Peserta					TOTAL	%
			PBI APBN	PBPU-Pemda**	PPU	PBPU-Mandiri	BP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hulu Sungai Selatan	233.157	79.731	122.067	33.555	5.335	7.947	248.635	100,00%
2	Tanah Laut	348.226	98.748	121.714	81.360	42.048	4.025	347.895	99,90%
3	Hulu Sungai Utara	231.635	91.921	93.400	31.668	9.686	4.444	231.119	99,78%
4	Balangan	132.210	30.977	70.353	24.057	2.847	1.637	129.871	98,23%
5	Tabalong	249.900	63.322	75.300	74.032	28.327	4.282	245.263	98,14%
6	Hulu Sungai Tengah	262.831	79.653	112.784	41.647	12.017	7.525	253.626	96,50%
7	Tanah Bumbu	328.692	53.248	133.372	102.917	24.513	2.295	316.345	96,24%
8	Banjarbaru	250.770	37.920	17.989	92.119	47.346	8.751	204.125	81,40%
9	Banjarmasin	672.121	142.808	27.136	195.905	142.696	20.158	528.703	78,66%
10	Tapin	190.801	48.245	29.166	45.778	18.561	5.114	146.864	76,97%
11	Kotabaru	325.711	70.775	8.289	98.909	37.867	3.362	219.202	67,30%
12	Barito Kuala	316.896	89.169	33.645	59.995	27.175	3.112	213.096	67,24%
13	Banjar	560.769	126.092	38.388	93.039	82.550	10.519	350.588	62,52%
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		4.103.719	1.012.609	883.603	974.981	480.968	83.171	3.435.332	83,71%

- *Jumlah Penduduk menggunakan Data DirjenDukcapil Kemendagri Semester I Tahun 2021
- ** Didalmnya termasuk peserta PD.Pemda yang di Jamin Pemerintah Prov. Kalsel
- Sumber Data : Aplikasi BI Menu General - Profil Program JKN-KIS - Capaian UHC BPJS Kesehatan
- Kategori Universal Health Coverage (UHC) Cakupan Peserta JKN dalam suatu Kabupaten/Kota diatas 95%

6

Data Peserta JKN/UHC tahun 2021 mencapai 67,24% dari jumlah total penduduk Kabupaten Barito Kuala sesuai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.15 Kasus Covid-19 Kalimantan Selatan



2.3.3. Fokus Pelayanan Umum Kependudukan

Data dari BPS Kabupaten Barito Kuala dalam Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2021 menunjukan Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 berjumlah 313.021 jiwa yang terdiri dari laki–laki 158.593 jiwa dan perempuan 154.428 jiwa dengan Sex Rasio sebesar 102,7. Distribusi penduduk menurut kecamatan terbesar terletak pada Kecamatan Alalak sebanyak 62.883 jiwa atau 20,07% sedangkan Jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuripan dengan jumlah penduduk sebanyak 5.789 jiwa atau 1,85%.

Rata-rata kepadatan penduduk per km^2 di Kabupaten Barito Kuala adalah 104,46 jiwa, dimana Kecamatan Alalak adalah kecamatan terpadat dengan 588,05 jiwa per km^2 disusul Kecamatan Wanaraya 382,45 jiwa per km^2, sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatannya yaitu Kecamatan Kuripan sebesar 16,85 jiwa per km^2.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2020 menunjukkan bahwa demografi penduduk di Kabupaten Barito Kuala didominasi penduduk dengan usia 5-9 tahun dengan total 29,43 ribu jiwa dengan rincian 15,05 ribu laki-laki dan 14,38 ribu perempuan. Detail sebaran penduduk berdasar kelompok umur dan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Sebaran Penduduk Berdasar Kelompok Usia dan Kelamin Tahun 2021

Kecamatan *Subdistrict*	Jenis Kelamin (ribu) *Sex (thousand)*		
	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	13,47	13,10	26,58
5-9	15,11	14,48	29,59
10-14	13,58	13,17	26,75
15-19	13,47	12,23	25,71
20-24	12,69	11,78	24,47
25-29	13,06	12,20	25,27
30-34	12,69	12,42	25,11
35-39	12,61	12,47	25,09
40-44	12,38	12,34	24,72
45-49	10,89	11,11	21,99
50-54	9,69	9,52	19,21
55-59	7,82	7,25	15,07
60-64	5,61	5,60	11,17
65+	7, 44	8,80	16,24
Jumlah/*Total*	160,53	156,43	316,96

https://baritokualakab.bps.go.id

Sumber/ Source: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2021/*BPS-Statistics Indonesia, 2021 Population Census*

Ruang lingkup pelayanan kependudukan yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari pelayanan pembuatan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Kematian, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Kedepan akan ditambah lagi dengan pembuatan Kartu Identiats Anak (KIA) yang merupakan program dari pemerintah nasional.

2.3.4. Fokus Pelayanan Umum Perizinan

Iklim investasi di Kabupaten Kaupaten Barito Kuala terus berkembang dan menarik investor dari tahun ke tahun seiring bertambahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dari tahun ke tahun. Untuk mendorong iklim investasi yang bai, Kabupaten Barito Kuala memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dibentuk atas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Proyeksi investasi di Kabupaten Barito Kuala diperkirakan terus berkembang karena adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan usaha baik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sendiri. Disamping itu semakin membaik dan kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Barito Kuala akan mendorong minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Barito Kuala. Keadaan ini menuntuk tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi, terampil dan produktif. Selain itu, perkembangankondisi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), kajian-kajian potensi dan peluang investasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Barito Kuala juga mendorong pertumbuhan investasi di wilayah ini.

Pelayananan perizinan yang tepat waktu merupakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dengan menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan DPMPTSP 85% dan peningkatan nilai investasi daerah 50 milliar pertahun selama 4 tahun ke depan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala menargetkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi terutama pengembangan sistem pelayanan perizinan dan no perizinan Kabupaten Barito Kuala yang aplikatif sehingga masyarakat/pelaku usaha dapat mengakses informasi berupajenis perizinan, persyaratan perizinan, proses perizinan, perkembangan investasi, perkembangan penerbitan perizinan, perkembangan retribusi, indeks kepuasan masyarakat dan potensi serta peluang investasi di Kabupaten Barito Kuala dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap tahun. Hal ini didukung kondisi teknologi yang berkembang cepat dengan adanya perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 pindah kantor dari kantor yang ada ke Mall Pelayanan Publik (MPP).

Tabel 2.25 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi pada Industri Besar Se-Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Jumlah Perusahaan *Number of Establishments (unit)*	Jumlah Tenaga Kerja *Number of Workers Enganged (orang/person)*	Investasi (ribu rupiah) *Investment (thousand rupiahs)*	Nilai Produksi (ribu rupiah) *Production Value (thousand rupiahs)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/*Regency*				
1. Tanah Laut	32	1 190	563 726 433	820 045 612
2. Kotabaru	18	1 217	4 288 870 480	9 736 810 762
3. Banjar	21	660	162 937 682	75 101 983
4. Barito Kuala	16	3 031	1 197 366 424	1 093 595 285
5. Tapin	4	85	209 052 319	200 430 084
6. Hulu Sungai Selatan	1			
7. Hulu Sungai Tengah	1	242		149 450 202
8. Hulu Sungai Utara	2	167	19 540 403	118 829 705
9. Tabalong	15	8	567 575	225 000
10. Tanah Bumbu	11	209	10 443 465	
11. Balangan	4			
Kota/*Municipality*				
1. Banjarmasin	30	6 532	844 264 214	1 163 917 185
2. Banjarbaru	26	738	263 865 110	57 774 394
Kalimantan Selatan	**181**	**14 079**	**7 560 634 105**	**13 416 180 212**

Sumber/*Source*: Dinas Perindustian Provinsi Kalimantan Selatan/*Industrial Department of Kalimantan Selatan Province*

https://kalsel.bps.go.id

Berdasrkan tabel diatas nilai investasi di Kabupaten Barito Kuala dengan nilai sekitar 1,2 Triliun Rupiah masih berada dibawah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai investasi mencapai 7,5 Triliun Rupiah.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran umum tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Barito Kuala merupakan daerah dengan potensi terbesar berada pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga dalam struktur yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi didominasi oleh kontribusi sektor pertanian yakni berkisar antara 27 sampai dengan 28 persen dari PDRB Kabupaten Barito Kuala.

Salah satu indikator yang di akui secara internasional dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu negara/regional adalah Produk Domestik Bruto/ PDB (Gross National

Product/GNP). Pada cakupan yang lebih kecil seperti provinsi atau kabupaten/kota, digunakan istilah Produk Domestik Regional Bruto/ PDRB yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam dokumen RPD ini digunakan harga tahun 2020.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di kabupaten barito kuala pada tahun 2020 berada pada posisi minus (-) walaupun masih didominasi oleh lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dimana pertumbuhan PDRB sektor ini sebesar -1.97% diiringi oleh industri pengolahan -2,35%, konstruksi -2.69% dan perdagangan sebesar -3.43% Berikut beberapa data terkait dengan PDRB di Kabupaten Barito Kuala yang bersumber dari BPS Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.26 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah), 2017-2021

	Lapangan Usaha/*Industry*	2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan/*Agriculture Forestry and Fishing*	2 121,87	2 266,20	2 449,04	2 423,50	2 476,18
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	6,36	6,74	7,28	7,72	8,13
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	1 270,74	1 341,97	1 386,89	1 372,82	1 439,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	7,45	8,47	9,13	9,84	10,56
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage Waste Management and Remediation Activities*	19,05	21,26	23,13	24,89	26,72
F	Konstruksi/*Construction*	981,27	1 075,49	1 170,99	1 148,16	1 274,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	887,72	987,41	1 089,38	1 074,01	1 141,87
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	259,24	281,85	302,56	295,27	304,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	177,12	190,99	207,02	204,99	216,45
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	146,35	162,09	176,53	188,05	203,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	134,94	146,15	158,92	164,52	173,36
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	254,98	279,78	306,89	321,72	347,84
M N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	11,48	12,55	13,61	13,67	14,67
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	582,11	627,59	676,52	714,70	729,39
P	Jasa Pendidikan/*Education*	423,44	469,86	523,75	543,21	581,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	100,18	110,74	120,21	131,67	147,94
R S T U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	60,47	66,83	74,09	74,39	78,68
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**7 444,77**	**8 055,96**	**8 695,93**	**8 713,13**	**9 175,16**

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

Terlihat pada tabel di atas, bahwa PDRB Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh sektor pertanian disusul oleh sektor industri pengolahan dan pada posisi ketiga adalah konstruksi. Sedangkan PDRB berdasarkan angka konstan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.27 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2021

	Lapangan Usaha/*Industry*	2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan/*Agriculture Forestry and Fishing*	1 502,80	1 561,77	1 628.50	1 596,47	1 613,96
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	4,59	4,77	5,05	5,27	5,51
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	877,88	906,32	923,32	901,63	926,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	4,99	5,35	5,60	5,87	6,13
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage Waste Management and Remediation Activities*	13,65	14,74	15,81	16,86	17,91
F	Konstruksi/*Construction*	711,97	757,09	802,23	780,65	835,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	617,47	664,91	713,60	689,11	708,72
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	187,17	197,10	203,80	196,93	200,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	130,56	137,10	145,95	141,23	145,20
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	119,11	128,22	136,19	145,46	156,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	94,30	97,73	102,01	105,07	105,39
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	194,88	209,77	224,82	231,68	244,31
M N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	7,77	8,21	8,70	8,52	8,94
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	387,69	402,31	423,12	441,05	444,14
P	Jasa Pendidikan/*Education*	300,96	326,50	355,13	362,69	379,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	71,09	76,40	80,71	86,61	94,26
R S T U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	41,54	44,61	48,08	47,27	49,11
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**5 268,39**	**5 542,91**	**5 822,63**	**5 762,36**	**5 942,83**

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

Sama seperti pada PDRB berdasarkan harga berlaku, pada PDRB berdasarkan angka konstan, sektor pertanian, industri dan pengolahan dan konstruksi masih menjadi 3 (tiga) besar penyumbang PDRB di Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 sampai dengan 2021.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan dan mulai tahun 2020 memperlihatkan adanya kecenderungan turun. Kondisi terparah adalah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami minus (-) 1.04. meskipun secara umum di Kalimantan Selatan laju pertumbuhan ekonomi berada pada pertumbuhan minus (-) bahkan secara nasional. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.28 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Presen), 2017-2021

	Lapangan Usaha/*Industry*	2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	7,37	3,92	4,27	(1,97)	1,13
B	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quarrying*	4,38	3,96	5,93	4,30	4,54
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	2,44	3,24	1,88	(2,35)	2,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	1,43	7,23	4,66	4,83	4,52
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	5,96	8,01	7,25	6,63	6,26
F	Konstruksi/*Construction*	5,77	6,34	5,96	(2,69)	6,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	7,77	7,68	7,32	(3,43)	2,85
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	4,92	5,31	3,40	(3,37)	1,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	4,16	5,01	6,45	(3,24)	2,82
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	7,29	7,65	6,21	6,81	7,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	3,52	3,63	4,39	2,99	(0,06)
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	7,38	7,64	7,18	3,05	5,45

https://baritokualakab.bps.go.id

M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	6,00	5,75	5,90	(2,00)	4,91)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	2,43	3,77	5,17	4,24	1,08
P	Jasa Pendidikan/*Education*	8,45	8,49	8,77	2,13	4,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	7,96	7,48	5,64	7,31	8,83
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	7,75	7,41	7,77	(1,70)	3,90
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	5,79	5,21	5,05	(1,04)	3,17

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

Dari 17 sektor PDRB, mengalami penurunan sebanyak 14 sektor PDRB dan hanya 3 sektor yang mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi karena dampak dari Pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Termasuk terhadap 3 (tiga) sektor unggulan Barito Kuala yakni pertanian, industri dan pengolahan dan konstruksi ikut mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020.

2. Produk Lokal Unggulan Daerah (PLUD)

Kabupaten Barito Kuala sangat fokus terhadap pembangunan dan pengembangan daerah melalui PLUD yang ada dimana sasarannya adalah mampu menumbuh kembangkan masyarakat melalui kreatifitas yang mampu menciptakan lapangan usaha baru melalui hasil alam yang dimiliki. Pada tahun 2019, Bupati Barito Kuala mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah (PLUD) dimana ini menjadi indikasi komitmen yang cukup besar terhadap proses kemajuan daerah melalui kemandirian masyarakat.

Kabupaten Barito Kuala memiliki 8 (delapan) PLUD yang dikembangkan dan diprioritaskan dalam mendukung penguatan inovasi daerah antara lain:

a) Produk padi

Pada tahun 2021 data menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala mampu menghasilkan 412,532 ton dengan luas panen seluas 115,896 Ha yang artinya memiliki produktivitas pada kisaran 35,59 kw/Ha. luas tanam terbesar berada di Kecamatan Tabunganem seluas 13.231 Ha dan yang terendah berada pada Kecamatan Kuripan seluas 124 Ha.

Tabel 2.29 Produksi Padi Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan *Subdistrict*	Luas Panen (ha) *Harvested Area (ha)*	Produktivitas (kw/ha) *Productivity (kw/ha)*	Produksi (ton) *P9roduction (ton)*
(1)	(2)	(3)	(4)
Tabunganen	13 231	35,63	47 142
Tamban	9 243	35,60	32 906
Mekarsari	6 464	35,59	23 006
Anjir Pasar	8 402	35,59	29 903
Anjir Muara	11 524	35,62	41 047
Alalak	4 249	35,56	15 108
Mandastana	9 604	35,60	34 190
Jejangkit	3 224	35,57	11 469
Belawang	7 445	35,58	26 488
Wanaraya	2 277	35,55	8 093
Barambai	10 434	35,61	37 157
Rantau Badauh	8 488	35,59	30 210
Cerbon	5 818	35,59	20 706
Bakumpai	4 649	35,56	16 533
Marabahan	4 317	35,56	15 353
Tabukan	6 402	35,58	22 778
Kuripan	124	35,57	442
Barito Kuala	115 896	35 59	412 532

Sumber/*Source*: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura/*Departement of Agriculture, Crop and Holticulture*

https://baritokualakab.bps.go.id

b) Produk Hortikultura jeruk

Kabupaten Barito Kuala merupakan Penghasil Jeruk terbesar di Kalimantan selatan (sumber data BPS Prov Kalsel tahun 2020). Pada tahun 2020, produksi tertinggi jeruk ada di Kecamatan Mandastana: 18.675,50 ton jeruk dengan luas tanam 1.218,25 Ha dan luas panen 1.176,55 ha. Data yang menunjukkan bahwa produksi jeruk yang cukup besar dipengaruhi karena kesesuaian faktor lahan dan iklim yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

Kawasan pemasaran komoditi jeruk unggulan dari Kab. Batola meliputi : Pasar Lokal/Kabupaten, Pasar Provinsi, Kalimantan Tengah (Kapuas, Palangkaraya), dan Jawa Timur (Surabaya). Dari komoditi jeruk tersebut telah dilakukan beberapa inovasi guna meningkatkan nilai jualnya salah satunya adalah pembuatan produk olahan Sirup Jeruk dan Es Krim di Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana.

c) Nenas

Kabupaten Barito Kuala Penghasil Nenas terbesar di Kalimantan selatan (sumber data BPS Prov Kalsel tahun 2020) 12.546.3 ton. Pengembangan Nenas terbanyak ada di Kecamatan Mekarsari. Pada tahun 2020, produksi tertinggi Nenas ada di Kecamatan Mekarsari : 12.006,40 ton Nenas dengan luas tanam 406,58 Ha dan luas panen 145,55 ha.

Daerah penghasil nenas di kab. Batola berada di 2 desa, yaitu : Desa Jelapat II dan Desa Tinggiran Darat yang berada di Kecamatan Mekarsari. Dari komoditi nenas tersebut telah dilakukan beberapa inovasi guna meningkatkan nilai jualnya, antara lain : Permen Jely nenas, Selai nenas, Rimpi/Sale Nenas, Sirop Nenas, dan Sari Buah Nenas.

d) Kweni

Kabupaten Barito Kuala Penghasil kweni terbesar di Kalimantan selatan (sumber data BPS Prov Kalsel tahun 2020) 41.248 kuintal. Pengembangan Nenas terbanyak ada di Kecmatan Mekarsari. Pada tahun 2020, produksi tertinggi Kueni berada di Kecamatan Anjir Muara : 1,555.50 ton Kweni dengan luas tanam 361.14 Ha dan luas panen 95.60 ha. dengan produktivitas 162,71 kwintal/Ha. Pangsa pasar kweni juga terbilang cukup meluas dimana tidak hanya Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini kebutuhan mangga kweni juga menyasar pada Provinsi Kalimantan Tengah.

e) Produk peternakan/Pembibitan Sapi bali

Sapi Bali yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala memiliki produktivitas yang tinggi, dibuktikan dengan calving interval rata-rata 12 bulan (mampu menghasilkan anak sapi satu tahun sekali).

Penetapan Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah sebaran sapi bali mendapat dukungan dari pemerintah pusat sejak tahun 2010 dimana kementerian pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Mentan Nomor: 352/2010 tentang Penetapan Sapi Bali sebagai rumpun asli Indonesia. Wilayah Kalimantan Selatan khususnya Barito Kuala merupakan wilayah sebaran Sapi Bali yang perlu dipertahankan kemurniannya. Sejalan dengan itu pada tanggal 8 Juni 2015 Kementerian Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Mentan Nomor: 355/Kpts/PK.040/6/ 2015 tentang Penetapan Kabupaten Barito Kuala sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali.

f) Produk ikan dan hasil Olahannya

Sesuian Perbub Nomor 57 tahun 2019 tentang PLUD, salah satu produk unggulan adalah ikan Pipih. Tetapi dengan terbitnya Permen KKP Nomor 1 tahun 2021 tentang jenis ikan yang di lindungi, yang menyatakan ikan Pipih sebagai salah satu ikan yang dilindungi maka produk unggulan diganti dengan ikan Gabus (Channa striata) atau yang lebih dikenal di daerah dengan sebutan ikan Haruan.

Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu kabupaten yang membudidayakan komoditas ikan air tawar ini. Hingga tahun 2021 terdapat 4 kecamatan yang melakukan proses budidaya serta 1 kecamatan yang melakukan pengolahan ikan Haruan, yaitu sebagai berikut:

- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Tabukan

  Memiliki potensi lahan pengembangan seluas 4.404 M². Budidaya menggunakan sistem bioflok yang berlokasi di Desa Teluk Tamba. Telah terbentuk Pokdakan sebanyak 8 kelompok dengan 99 pembudidaya dan telah dijadikan sebagai Kampung Haruan untuk menghasilkan produk albumin.

- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Jejangkit

  Budidaya sistem terpal yang berlokasi di Desa Jejangkit Pasar. Telah terbentuk kelompok pembudidaya ikan sebanyak 9 kelompok dengan 105 orang pembudidaya ikan. Pada tahun 2017 mendapatkan bantuan benih gabus 25.000 ekor dan pakan 2 ton

- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Mandastana

  Potensi lahan pengembangan di Mandastana adalah seluas 2.150 M². Budidaya sistem terpal berkembang di Desa Tatah Halayung dan Desa Tanipah. Telah terbentuk kelompok pembudidaya ikan sebanyak 6 kelompok dengan 66 orang pembudidaya ikan.

- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Tamban

  Potensi lahan pengembangan seluas 1.575 M². Usaha pembenihan dan pembesaran yang berlokasi di Desa Jalapat Baru dan telah terbentuk 1 Pokdakan dengan 10 orang pembudidaya ikan. Pakan yang diberikan berupa ikan sepat hasil tangkapan dilingkungan sekitar.

- Pengembangan hasil olahan ikan di Kecamatan Bakumpai

  Potensi lahan pengembangan di Kecamatan Bakumpai masih tersedia. Hasil olahannya berupa Kerupuk Ikan Haruan dengan areal pemasaran dalam dan luar Barito Kuala. Telah terbentuk POKLAHSAR HARUAN sebanyak 2 kelompok.

g) Produk Kain Sasirangan

Kabupaten Barito Kuala juga telah melakukan pengembangan dan inovasi kain sasirangan dimana pemerintah daerah melakukan intensifikasi pendampingan dan pelatihan kepada para pengrajin yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Barito Kuala. Salah satu desain kain batik sasirangan sudah terdaftar di Kemenkumham sebagai Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Barito Kuala dengan motif padi, purun, jeruk dan gigi haruan (ciri khas Barito Kuala).

Hasil identifikasi pengrajin yang ada di Kabupaten Barito Kuala setidaknya terdapat di 6 (enam) kecamatan antara lain Sasirangan Nazwa di Desa Pendalaman Kec. Barambai, Parhan Sasirangan di Desa Patih Selera Kec. Belawang, Wahyu Sasirangan di Desa Gandaria Kec. Anjir Pasar, Aulia Sasirangan di Kelurahan Handil Bakti Kec.

Alalak, Lampau Sasirangan di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh, Santik Sasirangan di Desa Puntik Luar Kec. Mandastana.

h) Produk Purun Tikus dan Purun Danau.

Purun Tikus merupakan jenis tanaman rumput yang tumbuh di daerah rawa berair. Sejauh ini di Provinsi Kalimantan Selatan, tanaman purun tikus hanya dapat tumbuh di Barito Kuala dan menjadi ciri khas Barito Kuala.

Hingga saat ini hasil identifikasi pengrajin purun tikus/danau tersebar di 3 (tiga) kecamatan antara lain: Kerajinan Anyaman Purun Tikus di Desa Parimata Kec. Belawang, Kerajinan Anyaman Purun Danau di Kelurahan Lepasan Kec. Bakumpai, Kerajinan Anyaman Purun Danau di Desa Asia Baru Kec. Kuripan. Seluruh pengrajin anayaman purun ini mengembangkan hasil olahan purun tersebut dalam bentuk Masker Purun kombinasi kain, Tas Purun Kombinasi Kulit, Tas Purun kombinasi Sasirangan, Wadah Tisu, Box File, Kotak Souvenir dan Topi Kreasi purun yang semuanya merupakan jenis handicraft pada sektor pariwisata. Hal ini memiliki peluang yang cukup besar terutama mendukung pariwisata tidak hanya di daerah Barito Kuala tetapi juga pada sektor wisata populer di Kalimantan Selatan.

Sejauh ini dalam peningkatan kualitas produk kerajinan Anyaman Purun Tikus, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melakukan kerjasama dengan pengrajin tas kulit dari Yogyakarta dan Tanggerang. Dalam peningkatan kualitas produk kerajinan anyaman purun danau, pemerintah daerah juga telah melakukan kerjasama dengan PT. Eco Fesyen Indonesia (EFI) dan Kementerian Koperasi RI

3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Data panjang jalan di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kecamatan dan kondisi jalan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala (km), tahun 2021

Kecamatan *Subdistrict*	Kondisi Jalan/*Road Condition*				
	Baik *Good*	Sedang *Average*	Rusak *Damaged*	Rusak Berat *Severely Damaged*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Tabunganen	2,05	25,67	10,60	5,00	43,32
Tamban	3,96	33,23	22,65	9,67	69,51
Mekarsari	11,71	26,28	15,65	6,18	59,81
Anjir Pasar	0,40	13,01	4,40	1,60	19,40
Anjir Muara	2,15	27,55	12,95	6,00	48,65
Alalak	0,47	20,90	10,60	5,28	37,25
Mandastana	0,18	37,79	7,30	2,78	48,05
Jejangkit	0	25,55	1,4	0,3	27,52
Belawang	3,44	13,69	4,55	0,90	22,58
Wanaraya	2,32	23,58	17,75	8,62	52,28
Barambai	0,20	13,47	4,35	1,74	19,75
Rantau Badauh	0,93	10,40	0,67	0,00	12,00
Cerbon	1,91	15,18	3,33	2,94	23,35
Bakumpai	1,79	7,31	7,10	0,20	16,40
Marabahan	6,48	42,33	8,33	4,75	61,89
Tabukan	9,71	15,42	2,00	6,93	34,05
Kuripan	4,64	12,75	3,71	11,50	32,60
Barito Kuala	52,32	364,10	137,33	74,38	628,13

Sumber/*Source* : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala/*Public Work and Spatial Planning Service of Barito Kuala Regency*

Tabel 2.31 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan *Subdistrict*	Jenis Permukaan Jalan/*Type of Road Surface*				
	Aspal *Paved*	Krikil *Gravel*	Tanah *Earth*	Lainnya *Others*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Tabunganen	7,4	32,57	3,05	0,30	43,32
Tamban	27,73	31,04	3,705	7,02	69,51
Mekarsari	29,05	25,76	3,07	1,92	59,81
Anjir Pasar	17,47	1,93	-	-	19,40
Anjir Muara	27,27	15,72	5,65	-	48,65
Alalak	22,83	8,02	1,40	5,00	37,25
Mandastana	36,91	6,34	1,60	3,20	48,05
Jejangkit	23,46	2,69	1,1	-	27,52
Belawang	19,57	3,01	-	-	22,58
Wanaraya	18,47	30,90	2,9	-	52,28
Barambai	12,78	5,67	1,3	-	19,75
Rantau Badauh	12,00	-	-	-	12,00
Cerbon	20,26	2,34	-	0,75	23,35
Bakumpai	4,02	11,58	-	0,8	16,40
Marabahan	47,47	12,34	0,17	1,90	61,89
Tabukan	11,89	18,16	4,00	-	34,05
Kuripan	-	27,15	2	3,45	32,60
Barito Kuala	338,58	235,22	29,945	24,34	628,13

Sumber/*Source* : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala/*Public Work and Spatial Planning Service of Barito Kuala Regency*

Panjang jalan yang dimiliki kabupaten sepanjang 628,13 km. Kondisi jalan ruas kabupaten dengan kerusakan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Tabukan, sedangkan

yang paling rendah terletak pada Kecamatan Kuripan. Walaupun demikian kondisi kerusakan jalan di Kecamatan Kuripan masih terbilang kecil dikarenakan panjang jalan di Kecamatan Kuripan masih minim.

Tabel 2.32 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

Kecamatan *Subdistrict*	Banjir *Floods*	Gempa Bumi *Earthquake*	Tanah Longsor *Landslide*	Putting Beliung *Beliung Tornado*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen		-	-	-
Tamban		-	-	-
Mekarsari		-	-	-
Anjir Pasar		-	-	-
Anjir Muara		-	-	-
Alalak	1	-	-	-
Mandastana	1	-	-	-
Jejangkit		-	-	-
Belawang	1	-	-	-
Wanaraya		-	-	-
Barambai		-	-	-
Rantau Badauh	1	-	-	-
Cerbon	1	-	-	-
Bakumpai		-	-	-
Marabahan		-	-	-
Tabukan		-	-	-
Kuripan	1	-	-	-
Barito Kuala	**6**	**-**	**-**	**-**

Kecamatan *Subdistrict*	Orang Tenggelam *Drown*	Kebakaran Rumah *House Fire*	Kebakaran Hutan dan Lahan *Forest and Land Fires*
(1)	(6)	(7)	(8)
Tabunganen	-	2	1
Tamban	-	2	-
Mekarsari	-	2	-
Anjir Pasar	-	2	-
Anjir Muara	-	4	-
Alalak	-	2	3
Mandastana	-		-
Jejangkit	-	1	4
Belawang	-		1
Wanaraya	-	1	-
Barambai	-	2	1
Rantau Badauh	-	2	1
Cerbon	-	2	-
Bakumpai	-	1	-
Marabahan	-	5	3
Tabukan	-		1
Kuripan	-	1	-
Barito Kuala	**-**	**29**	**16**

Sumber/*Source*: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala
Regional Disaster Management Agency of Barito Kuala Regency

https://baritokualakab.bps.go.id

Tabel Luas Lahan Sawah per kecamatan dapat dilihat

4. Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitan tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak.

Tabel 2.33 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi, dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Kecamatan *Subdistrict*	Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi	Nilai Produksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	428	570	1 028 862	1 510 247
Tamban	510	816	50 374 500	118 523 599
Mekarsari	347	330	1 412 600	2 305 400
Anjir Pasar	508	569	2 665 605	3 930 539
Anjir Muara	558	687	2 913 500	4 632 199
Alalak	616	2124	100 291 358	210 881 622
Mandastana	435	669	41 658 000	122 175 000
Jejangkit	225	412	229 200	314 000
Belawang	272	347	1 446 826	2 102 175
Wanaraya	324	487	291 600	411 000
Barambai	396	485	1 991 900	2 546 000
Rantau Badauh	453	899	604 500	3 198 398
Cerbon	373	364	886 000	1 089 200
Bakumpai	399	406	1 041 600	1 280 800
Marabahan	509	767	3 501 530	4 800 322
Tabukan	300	413	1 435 600	1 015 600
Kuripan	228	304	390 000	918 000
Barito Kuala	**1809**	**10 649**	**212 703 181**	**481 634 101**

Sumber/*Source*: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala
Cooperative Unit, Industry, and Trading Service of Barito Kuala Regency

https://baritokualakab.bps.go.id

Berdasarkan tabel diatas nilai investasi terbanyak ada di kecamatan Alalak dan yang paling sedikit nilai investasinya ada di kecamatan Jejangkit. Kecamatan Alalak tertinggi nilai investasinya dikarenakan letaknya strategis dan berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin.

5. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Fokus Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu target yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) yakni pada tujuan (goals) yang ke 4 (empat), yang berbunyi *"Menjamin Kualitas Pendidikan yang Berkualitas dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua"*. Target ini terdiri dari beberapa target:

(1) Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas;

(2) Semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol;

(3) Memastikan transisi semua pemuda ke pasar tenaga kerja secara efektif.

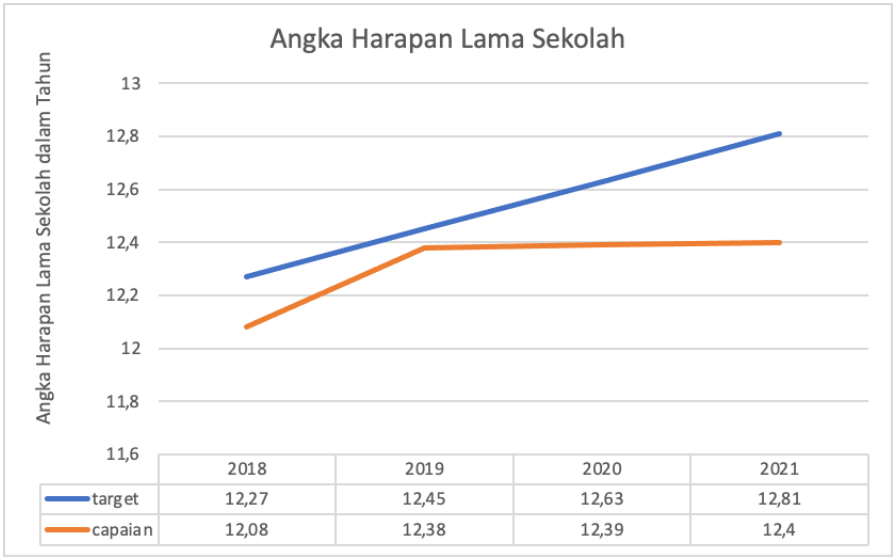
Dengan berpijak pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, langsung maupun tidak langsung Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam rangka mencapai indikator yang telah ditetapkan dalam SDGs tersebut.

Angka Harapan Lama Sekolah berarti lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa yang mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung dari penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang dimulai saat penduduk berusia 7 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah dapat juga digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Angka Harapan Lama Sekolah, dimana target tahun 2021 diharapkan mencapai 12,81 Tahun, dan capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 adalah 12,4 tahun. Angka capaiannya dibawah target RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Pada perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah ini diasumsikan bahwa kemungkinan seorang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama

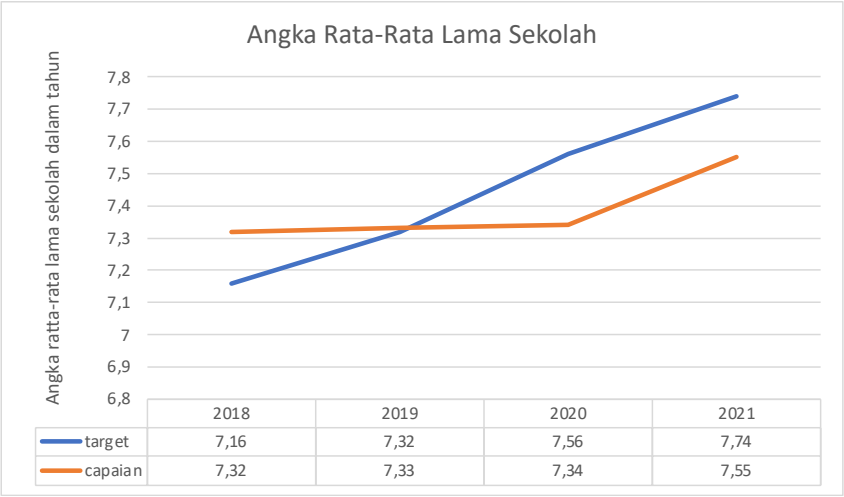
dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Gambar 2.16 Perkembangan angka harapan lama sekolah selama 5 tahun terakhir (2022 belum ada data)



Sedangkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah untuk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 berada pada posisi 7,55 tahun, yang mana tiap tahun meningkat secara signifikan namun sayangnya mulai pada tahun 2020 selalu berada di bawah target yang telah ditetapkan. Detailnya dapat dilihat pada grafis dibawah.

Gambar 2.17 Perkembangan angka rata-rata lama sekolah selama 5 tahun terakhir (2022 belum ada data)

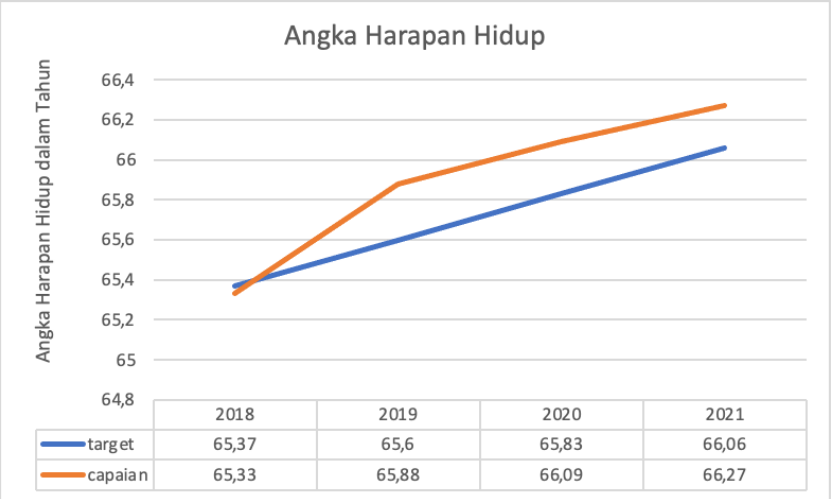


b. Aspek Kesehatan

Keberhasilan Pembangunan kesehatan diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Pemilihan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa usia panjang pada diri seseorang merupakan tujuan hidupnya. Angka Harapan Hidup yang tinggi juga mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik. Angka Harapan Hidup diukur sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Angka Harapan Hidup, dimana pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Kuala diharapkan 66,06 Tahun, dan capaiannya pada adalah 66,27 tahun, yang mana berada di atas target. Angka ini menggambarkan bahwa setiap bayi yang lahir tahun 2021 mempunyai harapan untuk hidup sampai dengan umur 66,27 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,18 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 pada angka 66,09.

Gambar 2.18 Perkembangan angka harapan hidup selama 5 tahun terakhir



6. Fokus Telekomunikasi dan Informasi

Dalam bidang komunikasi dan informasi, Jumlah blankspot di wilayah Kabupaten Barito Kuala ada 72 desa atau 35,82% dari luas wilayah kabupaten Barito Kuala. Sedangkan data blankspot untuk kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34 Data Blankspot di Kabupaten Barito Kuala

NO	KECAMATAN	DESA	LUAS DESA (Km2)	KETERANGAN
1	Marabahan	Kelurahan Marabahan Kota *	221	Tidak blankspot
2		Kelurahan Ulu Benteng		Tidak blankspot
3		Desa Bagus		Tidak blankspot
4		Desa Baliuk		Tidak blankspot
5		Desa Penghulu		Tidak blankspot
6		Desa Antar Baru		Tidak blankspot
7		Desa Antar Jaya		Tidak blankspot
8		Desa Antar Raya		Tidak blankspot
9		Desa Sido Makmur		Tidak blankspot
1	Cerbon	Desa Sungai Kambat		Blankspot
2		Desa Sungai Rasau		Blankspot
3		Desa Simpang Nungki		Blankspot
4		Desa Sawahan		Blankspot
5		Desa Bantuil *	206	Blankspot
6		Desa Badandan		Blankspot
7		Desa Sungai Tunjang		Tidak blankspot
8		Desa Sungai Raya		Blankspot
1	Bakumpai	Kelurahan Lepasan *	261	Tidak blankspot
2		Desa Batik		Tidak blankspot
3		Desa Bahalayung		Tidak blankspot
4		Desa Banua Anyar		Tidak blankspot
5		Desa Murung Raya		Tidak blankspot
6		Desa Sungai Lirik		Tidak blankspot
7		Desa Banitan		Blankspot
8		Desa Palingkau		Blankspot
9		Desa Balukung		Blankspot
1	Rantau Badauh	Desa Sungai Pantai		Blankspot
2		Desa Pindahan Baru		Blankspot
3		Desa Gampa Asahi		Tidak blankspot
4		Desa Sungai Gampa *	261.81	Tidak blankspot
5		Desa Sungai Sahurai		Tidak blankspot
6		Desa Simpang Arja		Tidak blankspot
7		Desa Sinar Baru		Blankspot
8		Desa Sungai Bamban		Tidak blankspot
9		Desa Danda Jaya		Tidak blankspot
1	Tabukan	Desa Pantang Jaya		Blankspot
2		Desa Tabukan Raya		Tidak blankspot
3		Desa Taluk Tamba *	166	Blankspot
4		Desa Rantau Bamban		Blankspot
5		Desa Tamba Jaya		Blankspot
6		Desa Muara Pulau		Blankspot
7		Desa Karya Indah		Blankspot
8		Desa Bandar Karya		Blankspot
9		Desa Karya Makmur		Blankspot
10		Desa Karya Jadi		Blankspot
11		Desa Pantang Baru		Blankspot
1	Barambai	Desa Barambai *	183	Tidak blankspot
2		Desa Sungai Kali		Tidak blankspot
3		Desa Pendalaman		Tidak blankspot
4		Desa Bagagap		Tidak blankspot
5		Desa Handil Barambai		Tidak blankspot

6		Desa Pendalaman Baru		Tidak blankspot
7		Desa Barambai Kolam Kiri		Blankspot
8		Desa Barambai Kolam Kanan		Tidak blankspot
9		Desa Karya Tani		Blankspot
10		Desa Karya Baru		Blankspot
11		Desa Barambai Kolam Kiri Dalam		Tidak blankspot
1	Belawang	Desa Rangga Surya		Tidak blankspot
2		Desa Karang Buah		Blankspot
3		Desa Karang Dukuh		Blankspot
4		Desa Samuda		Tidak blankspot
5		Desa Murung Keramat		Tidak blankspot
6		Desa Sungai Seluang		Tidak blankspot
7		Desa Sungai Seluang Pasar		Tidak blankspot
8		Desa Binaan Baru		Tidak blankspot
9		Desa Belawang *	80.25	Tidak blankspot
10		Desa Parimata		Tidak blankspot
11		Desa Patih Selera		Tidak blankspot
12		Desa Bambangin		Tidak blankspot
13		Desa Suka Ramai		Blankspot
1	Jejangkit	Desa Jejangkit Muara		Tidak blankspot
2		Desa Jejangkit Pasar *	203	Tidak blankspot
3		Desa Sampurna		Tidak blankspot
4		Desa Jejangkit Barat		Tidak blankspot
5		Desa Bahandang		Tidak blankspot
6		Desa Jejangkit Timur		Blankspot
7		Desa Cahaya Baru		Tidak blankspot
1	Mandastana	Desa Lok Rawa		Blankspot
2		Desa Terantang		Blankspot
3		Desa Sungai Ramania		Tidak blankspot
4		Desa Sungai Puntik Luar *	136	Blankspot
5		Desa Sungai Puntik Tengah		Tidak blankspot
6		Desa Sungai Puntik Dalam		Tidak blankspot
7		Desa Karang Indah		Blankspot
8		Desa Karang Bunga		Blankspot
9		Desa Tabing Rimbah		Tidak blankspot
10		Desa Bangkit Baru		Blankspot
11		Desa Tanipah		Blankspot
12		Desa Tatah Alayung		Tidak blankspot
13		Desa Antasan Segara		Tidak blankspot
14		Desa Pantai Hambawang		Tidak blankspot
1	Wanaraya	Desa Kolam Kiri *	37.5	Tidak blankspot
2		Desa Roham Raya		Tidak blankspot
3		Desa Simpang Jaya		Blankspot
4		Desa Tumih		Tidak blankspot
5		Desa Pinang Habang		Blankspot
6		Desa Waringin Kencana		Blankspot
7		Desa Babat raya		Tidak blankspot
8		Desa Kolam Kanan		Tidak blankspot
9		Desa Sido Mulyo		Tidak blankspot
10		Desa Kolam Makmur		Tidak blankspot
11		Desa Surya Kanta		Blankspot
12		Desa Sumber Rahayu		Blankspot
13		Desa Dwipasari		Blankspot
1	Alalak	Kelurahan Berangas		Tidak blankspot
2		Kelurahan Berangas Barat		Tidak blankspot
3		Kelurahan Handil Bakti *	106.85	Tidak blankspot
4		Desa Pulau Alalak		Tidak blankspot

5		Desa Pulau Sewangi		Tidak blankspot
6		Desa Pulau Sugara		Tidak blankspot
7		Desa Sungai Lumbah		Tidak blankspot
8		Desa Berangas Timur		Tidak blankspot
9		Desa Semangat Bakti		Blankspot
10		Desa Sungai Pitung		Tidak blankspot
11		Desa Balandean Muara		Blankspot
12		Desa Balandean		Blankspot
13		Desa Tanjung Harapan		Blankspot
14		Desa Semangat Dalam		Tidak blankspot
15		Desa Beringin		Tidak blankspot
16		Desa Semangat Karya		Blankspot
17		Desa Panca Karya		Blankspot
18		Desa Tatah Masjid		Tidak blankspot
1	Anjir Muara	Desa Anjir Serapat Muara		Blankspot
2		Desa Anjir Muara Kota *	116.75	Tidak blankspot
3		Desa Patih Muhur		Blankspot
4		Desa Anjir Muara Kota Tengah		Tidak blankspot
5		Desa Anjir Serapat Lama		Tidak blankspot
6		Desa Anjir Serapat Baru		Tidak blankspot
7		Desa Anjir Muara Lama		Tidak blankspot
8		Desa Sungai Punggu		Blankspot
9		Desa Anjir Serapat Baru I		Tidak blankspot
10		Desa Patih Muhur Baru		Blankspot
11		Desa Sungai Punggu Baru		Blankspot
12		Desa Anjir Serapat Muara I		Tidak blankspot
13		Desa Sepakat Bersama		Tidak blankspot
14		Desa Marabahan Baru		Tidak blankspot
15		Desa Beringin Jaya		Tidak blankspot
1	Anjir Pasar	Desa Pandan Sari		Tidak blankspot
2		Desa Andaman		Tidak blankspot
3		Desa Andaman II		Tidak blankspot
4		Desa Anjir Seberang Pasar II		Tidak blankspot
5		Desa Anjir seberang Pasar		Tidak blankspot
6		Desa Anjir Pasar Lama		Tidak blankspot
7		Desa Anjir Pasar Kota II		Tidak blankspot
8		Desa Anjir Pasar Kota *	126	Tidak blankspot
9		Desa Barunai Baru		Tidak blankspot
10		Desa Hilir Masjid		Tidak blankspot
11		Desa Banyiur		Blankspot
12		Desa Danau Karya		Blankspot
13		Desa Mantaren		Blankspot
14		Desa Gandaria		Blankspot
15		Desa Ganda Raya		Blankspot
1	Tamban	Desa Sekata Baru		Blankspot
2		Desa Damsari		Blankspot
3		Desa Purwosari II		Tidak blankspot
4		Desa Sidorejo		Tidak blankspot
5		Desa Koanda		Blankspot
6		Desa Purwosari Baru		Tidak blankspot
7		Desa Tamban Sari Baru		Tidak blankspot
8		Desa Purwosari I *	164.3	Tidak blankspot
9		Desa Tamban Bangun		Tidak blankspot
10		Desa Tamban Bangun Baru		Tidak blankspot
11		Desa Tamban Muara Baru		Blankspot
12		Desa Tamban Muara		Tidak blankspot
13		Desa Tamban Kecil		Tidak blankspot
14		Desa Tinggiran II		Tidak blankspot
15		Desa Jelapat I		Tidak blankspot

16		Desa Jelapat Baru		Tidak blankspot
1	Mekarsari	Desa Mekarsari		Tidak blankspot
2		Desa Tamban Raya *	143.5	Blankspot
3		Desa Tinggiran Tengah		Tidak blankspot
4		Desa Tinggiran Darat		Tidak blankspot
5		Desa Jelapat II		Blankspot
6		Desa Tamban Raya Baru		Tidak blankspot
7		Desa Tinggiran Baru		Blankspot
8		Desa Karang Mekar		Tidak blankspot
9		Desa Indah Sari		Tidak blankspot
1	Tabunganen	Desa Kuala Lupak		Tidak blankspot
2		Desa Sungai Telan Besar		Tidak blankspot
3		Desa Sungai Telan Kecil		Tidak blankspot
4		Desa Sungai Telan Muara		Tidak blankspot
5		Desa Tabunganen Muara		Tidak blankspot
6		Desa Tabunganen Kecil *	240	Blankspot
7		Desa Tabunganen Tengah		Tidak blankspot
8		Desa Karya Baru		Tidak blankspot
9		Desa Tabunganen Pemurus		Tidak blankspot
10		Desa Tanggul Rejo		Blankspot
11		Desa Beringin Kencana		Tidak blankspot
12		Desa Sungai Teras Dalam		Tidak blankspot
13		Desa Sungai Teras Luar		Tidak blankspot
14		Desa Sungai Jingah Besar		Tidak blankspot
1	Kuripan	Desa Jambu Baru		Tidak blankspot
2		Desa Jambu		Blankspot
3		Desa Kabuau		Tidak blankspot
4		Desa Asia Baru		Blankspot
5		Desa Jarenang		Blankspot
6		Desa Kuripan		Tidak blankspot
7		Desa Rimbun Tulang *	343.5	Tidak blankspot
8		Desa Tabatan		Tidak blankspot
9		Desa Tabatan Baru		Blankspot

Sumber : Rumah Data Kabupaten Barito Kuala

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak (Impact) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

IKU	Target	Realisasi
Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	66	66
Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	67.8	63.35
Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang	20	17.6
Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat	57	57
Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	80	80
Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	67.75	67.75
Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	7.01	7.01
Persentase timbulan sampah yang terangkut	87	87
Persentase luas RTH	0.635	0.635
Persentase Rumah Layak Huni	89,47	89,53
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	68	71
Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai	100	100
Indeks Kualitas Air (IKA)	59,05	54,14
Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,92	92,87
Prosentase pengurangan timbulan sampah skala Kab/Kota	24	24
Persentase Tutupan Hutan	4,684	4,680
Cakupan Layanan Akses Internet Pemerintah	90%	69,75%
Terkelolannya/Akses Data /Informasi Pembangunan Daerah Yang Aman	100%	100%
Persentase Cakupan Media Informasi Komunikasi Publik	100%	95,24%
Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi Sakip Pemkab. Kab. Barito Kuala	8	8
Persentase Skpd Yang Penyusunan Laporan	100	100

Keuangannya Telah Sesuai Sap		
Persentase Skpd Yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	80%	111,63%
Level Tingkat Maturitas Spip Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	3	3
Level Kapabilitas Apip	3	3
Meningkatnya Kesempatan Kerja	100	100
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	100	100
Meningkatnya Pembangunan Dan Pengembangan Di Kawasan Transmigrasi	100	100
Meningkatnya Pembangunan Dan Pengembangan Di Kawasan Transmigrasi	100	100
Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan	25%	30%
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri	3,07%	4.97%
Persentase Tata Kelola pemerintahan desa yang baik	97%	98%
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	100%	68%
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Sungai	3,07%	13%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dari Unsur Perencanaan	22,07	22,04
Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	100	100
Pelatihan Keterampilan Dan Penanggulangan Bencana Alam	100	100
Persentase Tanggap Darurat Bencana Alam	100	100
Persentase Sosialisasi Mitigasi Bencana Dan Pasca Bencana	100	80
Persentase Pendataan Dampak Bencana	100	100
Persentase Penyediaan & Penyaluran Logistik Penanggulangan Bencana	100	90
Persentase Pembentukan Desa Tangguh Bencana	100	100
Persentase Produk Hukum Daerah Yg Dievaluasi	100%	100%
Nilai Lppd	3,414	0 (belum terisi)
Nilai Sakip Kabupaten Komponen Laporan	12	10.87
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Nilai Ikm Pemkab	89	84
Persentase Kecamatan Dengan Kondisi Tentram Dan Tertib	70	55,85
Persentasi Penurunan Pelanggaran Perda Yang Ditindak Lanjuti	65	55,52

Persentase Penangulangan Kebakaran	70	63,16
Persentasi kepemilikan dokumen dukcapil secara lengkap dan valid	68	28
Prosentase koperasi yang berkualitas	38,33	38,33
Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	494	494
Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas	4,7	3,75
Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan	1,5	1,45
Persentase desa yang bebas konflik di kabupaten barito kuala	100%	100%
Prosentase Skpd Yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Benar	100%	100%
Prosentase Skpd Yang Melaksanakan Pengelolaan Bmd Yang Benar	100%	100%
Persentase Peningkatan Pengembangan Dan Pelayanan	1.585 WP	10.173 WP (641,82 %)
Persentase Peningkatan Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah	180 WP	296 WP (168,44%)
Ersentase Peningkatan Pelaporan, Evaluasi Dan Pengendalian	12 BERKAS DAN 33 SKPD PENGHASIL	12 Berkas (100 %) dan 33 SKPD penghasil (100%)
Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA) 2021	250 Milyar	370,13 Milyar
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2021	84,99	85,01
Prosentase Peningkatan Populasi Ternak	2,55 %	2,55 %
Prosentase Peningkatan Produksi Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	6,00 %	7,51 %
Prosentase Peningkatan Produk Olahan Perkebunan yang Diterima Pasar	20,00 %	20,00 %
Prosentase Peningkatan Produk Olahan Peternakan yang Diterima Pasar	11,11 %	11,11 %
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	1,50 %	4,31 %
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
Padi	0.35	0.41
Jagung	2.62	1.71
Kedelai	2.34	2.31
Prosentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan		
Padi	0.26	0.26
Jagung	1.03	1.12
Kedelai	0.39	0.38
Prosentase Peningkatan Produksi Hortikultura		

Jeruk	2.0	1.9
Nenas Tamban	2.0	1.67
Kueni Anjir	1.99	0.35
Cabai Rawit	2.09	2.3
Cabai Besar	2.97	2.3
Bawang Merah	0.26	133.29
Prosentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura		
Jeruk	0.99	0.58
Nenas Tamban	0.99	0.32
Kueni Anjir	1.01	0.12
Cabai Rawit	1.31	0.77
Cabai Besar	1.01	0.52
Bawang Merah	3.40	5.54
Skor Pola Pangan Harapan (Pph) Ketersediaan	89	89.0
Skor Pola Pangan Harapan (Pph) Konsumsi	86,7	83.5
Jumlah Produksi Perikanan	19.929	18.738,02
Indeks Tingkat Kepuasan Anggota Dprd Terhadap Pelayanan Sekretariat Dprd	90	90
Jumlah Pemuda yang berprestasi	8 Orang	4 Orang
Persentase cabang olahraga yang berprestasi	15,60 %	12,50 %
Persentase jenis Seni budaya yang menjadi Obyek Wisata	36,36 %	36,36 %
Jumlah kunjungan wisatawan	127.938 orang	92.249 Orang
Jumlah Penyandang Masalah Sosial (Pmks) Yang Ditangani	1,5 %	1,5 %
Persentase apk sd/mi	106.55 %	107.07%
Persentase apk smp/mts	99.95%	99.99%
Persentase paud terakreditasi b	13,36%	25,06%
Persentase sd terakreditasi b	37.86%	64.23%
Persentase smp terakreditasi b	75.00%	79.03%
Persentase apk paud	67.00%	67.02%
Persentase balita stunting	22 Persen	17,7 Persen
Persentase puskesmas dengan peningaktan status akreditasi (Utama)	10 persen	0 Persen
Kasus kematian ibu	4 Kasus	-
Kasus kematian bayi	50 Kasus	8 kasus
Prosentase tersedianya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	80 %	49,4 %
INdeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	80 %	47,5 %
Indeks Pembangunan gender (ipg)	-	88,91

Angka Laju Pertumbuhan penduduk	-	1,25
Unmeet Neet	-	9,34
Score capaian kla	-	0
Indeks Profesionalitas Asn	96	100 %
Indeks Kepuasan Pns Terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	95	100 %
Prosentase skpd yang arsipnya tertata dengan baik	32 SKPD	17 skpd
Prosentase peningkatan pemustaka	24 persen	93,09 %
Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	80	88.58
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.6	78.57

Sumber : e-Sakip Barito Kuala

BAB III
GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pedoman Teknis dari Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengertian keuangan daerah itu sendiri merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Struktur APBD terdiri dari; pendapatan daerah meliputi; semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah meliputi; semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan Pembiayaan meliputi; semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala dibagi menjadi dua periode yaitu periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 karena perubahan struktur anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Tabel 3.1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2020

Uraian	APBD		
	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH	**Rp 1,204,316,189,428.00**	**Rp 1,265,315,820,000.00**	**Rp 1,329,705,119,593.00**
Pendapatan Asli daerah (PAD)	**Rp 90,931,709,068.00**	**Rp 64,041,347,701.00**	**Rp 60,577,580,739.00**
Pajak Daerah	Rp 45,874,949,250.00	Rp 22,182,637,085.00	Rp 15,513,095,906.00
Retribusi Daerah	Rp 4,288,401,847.00	Rp 4,196,426,028.00	Rp 3,813,752,515.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	Rp 8,877,148,818.00	Rp 4,082,304,260.00	Rp 6,132,938,662.00
lain-lain PAD yang Syah	Rp 31,891,209,153.00	Rp 33,579,980,328.00	Rp 35,117,793,656.00
Dana Perimbangan	**Rp 854,336,146,540.00**	**Rp 925,941,549,299.00**	**Rp 931,896,976,530.00**
Pendapatan Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak	Rp 86,264,368,000.00	Rp 146,663,028,120.00	Rp 163,095,666,530.00
Dana Alokasi Umum	Rp 565,599,843,000.00	Rp 593,083,399,000.00	Rp 536,423,276,000.00
Dana Alokasi Khusus	Rp 202,471,935,540.00	Rp 186,195,122,179.00	Rp 232,378,034,000.00
Lain-lain Pendapatan daerah yang Syah	**Rp 259,048,333,820.00**	**Rp 275,332,923,000.00**	**Rp 337,230,562,324.00**
Penadapatan Hibah	Rp 35,454,653,000.00	Rp 44,559,245,000.00	Rp 64,743,217,529.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 56,189,609,820.00	Rp 57,454,610,000.00	Rp 69,372,655,795.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 167,404,071,000.00	Rp 21,461,681,000.00	Rp 49,694,420,000.00
Pendapatan Lainnya		Rp 151,857,387,000.00	Rp 153,420,269,000.00
Jumlah Pendapatan	**Rp 1,204,316,189,428.00**	**Rp 1,265,315,820,000.00**	**Rp 1,329,705,119,593.00**
BELANJA	**Rp 1,314,629,583,764.87**	**Rp 1,415,253,845,577.65**	**Rp 1,444,937,647,188.56**
Belanja Tidak Langsung	**Rp 707,796,377,728.14**	**Rp 777,896,886,749.92**	**Rp 888,352,735,526.56**
Belanja Pegawai	Rp 478,989,836,853.00	Rp 526,234,705,760.00	Rp 543,471,627,315.00
Belanja Hibah	Rp 9,716,500,000.00	Rp 12,537,450,000.00	Rp 12,387,482,390.00
Belanja Bantuan Sosial	Rp 9,841,650,000.00	Rp 5,020,975,000.00	Rp 3,064,475,000.00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	Rp 4,765,518,354.00	Rp 2,461,005,000.00	Rp 2,902,924,045.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	Rp 201,015,583,044.00	Rp 230,036,908,055.00	Rp 222,780,152,700.00
Belanja Tak Terduga	Rp 3,467,289,477.14	Rp 1,605,842,934.92	Rp 103,746,074,076.56
Belanja Langsung	**Rp 606,833,206,036.73**	**Rp 637,356,958,827.73**	**Rp 556,584,911,662.00**
Belanja Pegawai	Rp 12,973,159,436.00	Rp 18,813,643,593.00	Rp 16,761,989,491.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 283,491,251,427.00	Rp 332,321,000,597.00	Rp 277,141,652,947.00
Belanja Modal	Rp 310,368,795,173.73	Rp 286,222,314,637.73	Rp 262,681,269,224.00
Surplus/Defisit	**-Rp 110,313,394,336.87**	**-Rp 149,938,025,577.65**	**-Rp 115,232,527,595.56**
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**Rp 127,313,394,336.87**	**Rp 166,938,025,577.65**	**Rp 139,832,527,595.56**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 116,313,394,336.87	Rp 155,938,025,577.65	Rp 129,832,527,595.56
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp 11,000,000,000.00	Rp 11,000,000,000.00	Rp 10,000,000,000.00
Pengeluaran Pembiayaan	**Rp 17,000,000,000.00**	**Rp 17,000,000,000.00**	**Rp 24,600,000,000.00**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 6,000,000,000.00	Rp 6,000,000,000.00	Rp 14,600,000,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah	Rp 11,000,000,000.00	Rp 11,000,000,000.00	Rp 10,000,000,000.00
Pembiayaan Netto	**Rp 110,313,394,336.87**	**Rp 149,938,025,577.65**	**Rp 115,232,527,595.56**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**

Tabel 3.2

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2021

Uraian	APBD			
	2021		2022	
PENDAPATAN DAERAH				
Pendapatan Asli daerah (PAD)	**Rp**	**62,949,723,748.00**	**Rp**	**67,036,209,984.00**
Pajak Daerah	Rp	25,819,321,000.00	Rp	23,329,653,000.00
Retribusi Daerah	Rp	4,982,487,215.00	Rp	9,042,244,800.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	Rp	8,170,591,369.00	Rp	8,470,800,000.00
lain-lain PAD yang Syah	Rp	23,977,324,164.00	Rp	26,193,512,184.00
Pendapatan Transfer	**Rp**	**1,123,789,617,347.00**	**Rp**	**1,199,196,005,000.00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1,054,389,617,347.00	Rp	1,121,146,005,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp	69,400,000,000.00	Rp	78,050,000,000.00
Lain-lain Pendapatan daerah yang Syah	**Rp**	**57,267,857,493.00**	**Rp**	**9,409,821,341.00**
Penadapatan Hibah	Rp	11,403,401,409.00	Rp	3,170,772,041.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp	45,864,456,084.00	Rp	6,239,049,300.00
Jumlah Pendapatan	**Rp**	**1,244,007,198,588.00**	**Rp**	**1,275,642,036,325.00**
BELANJA				
Belanja Operasi	**Rp**	**910,265,267,941.00**	**Rp**	**835,634,421,715.00**
Belanja Pegawai	Rp	570,235,063,771.00	Rp	553,740,710,025.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	314,118,254,218.00	Rp	257,212,338,554.00
Belanja Hibah	Rp	25,630,184,893.00	Rp	24,520,273,018.00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	281,765,059.00	Rp	161,100,118.00
Belanja Modal	**Rp**	**216,599,462,679.00**	**Rp**	**241,371,174,510.00**
Belanja Modal Tanah	Rp	1,339,346,326.00	Rp	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	40,508,466,797.00	Rp	29,639,720,221.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	56,222,909,495.00	Rp	66,197,583,445.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	115,392,161,283.00	Rp	142,061,586,659.00
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	Rp	3,136,578,778.00	Rp	3,472,284,185.00
Belanja Tidak Terduga	**Rp**	**3,569,533,030.00**	**Rp**	**5,000,000,000.00**
Belanja Tak Terduga	Rp	3,569,533,030.00	Rp	5,000,000,000.00
Belanja Transfer	**Rp**	**220,255,137,300.00**	**Rp**	**216,986,440,100.00**
Belanja Bagi Hasil	Rp	3,693,315,100.00	Rp	2,843,779,800.00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	216,561,822,200.00	Rp	214,142,660,300.00
Jumlah Belanja	**Rp**	**1,350,689,400,950.00**	**Rp**	**1,298,992,036,325.00**
Surplus/Defisit	**-Rp**	**106,682,202,362.00**	**-Rp**	**23,350,000,000.00**
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp	118,782,202,362.00		25000000000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	8,000,000,000.00		8000000000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp**	**126,782,202,362.00**	**Rp**	**33,000,000,000.00**
Pengeluaran Pembiayaan				
Penyertaan Modal Daerah	Rp	12,100,000,000.00	Rp	1,650,000,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	8,000,000,000.00		8000000000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp**	**20,100,000,000.00**	**Rp**	**9,650,000,000.00**
Pembiayaan Netto	**Rp**	**106,682,202,362.00**	**Rp**	**23,350,000,000.00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**

3.1.1.Kinerja Pelaksanaan APBD

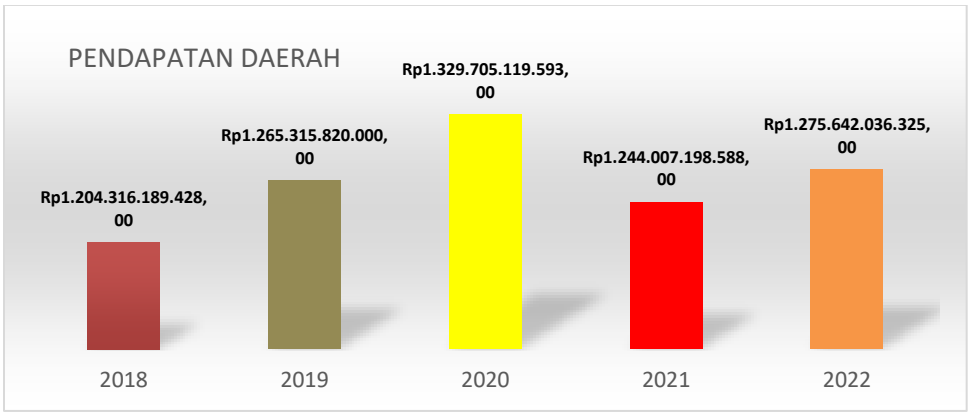
Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Kuala meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2.

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah diperlukan untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD, dalam struktur APBD Kabupaten Barito Kuala secara umum terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah meliputi; semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Analisisnya meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Secara garis besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam periode 2018-2022 secara umum adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2028 – 2022



Sumber : BPKAD Kab. Barito Kuala

Pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala sepanjang periode 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan rata-rata angka pertumbuhan sebesar 1,44% pertumbuhan tertinggi di tahun 2019 sebesar 5,07% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan penurunan -6,40%.

Kontribusi terbesar dari Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Transfer dengan rata-rata kontribusi 85,25%, Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata- rata kontribusi 9,41%, dan Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kontribusi

5,35%, masing-masing komponen pembentuk Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.2

Gambar 3.2

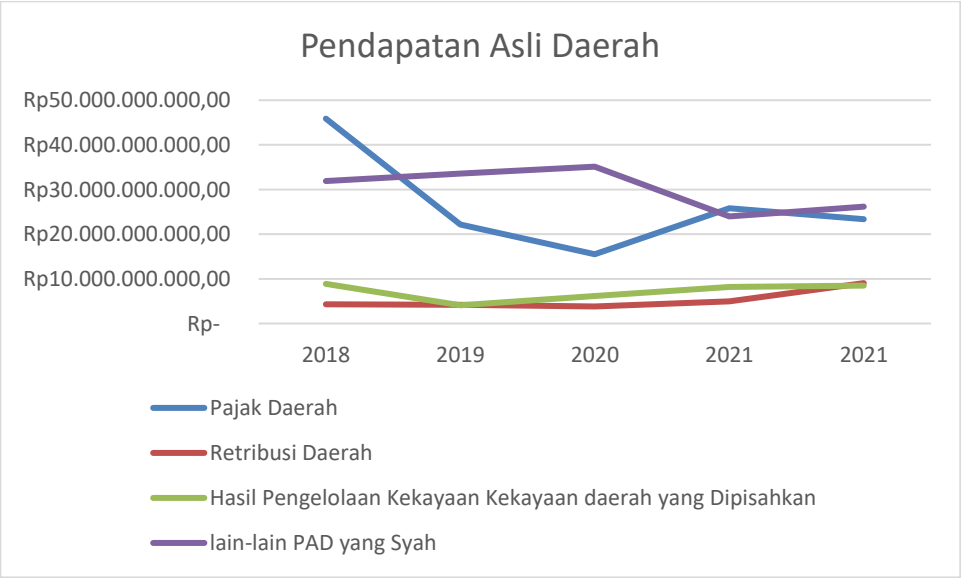
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022



Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana Gambar 3.3.

Gambar 3.3

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2022

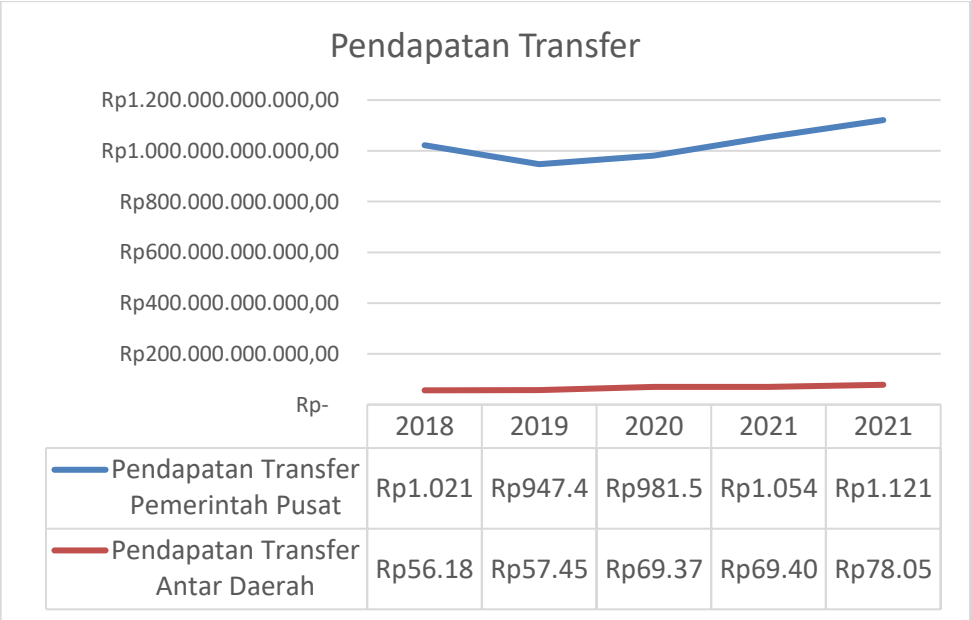


Dana Transfer terdiri dari: (1) transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, (2) transfer pemerintah pusat lainnya, dan (3) transfer pemerintah provinsi. Dana Transfer

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.4:

Gambar 3.4

Dana Transfer Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2022

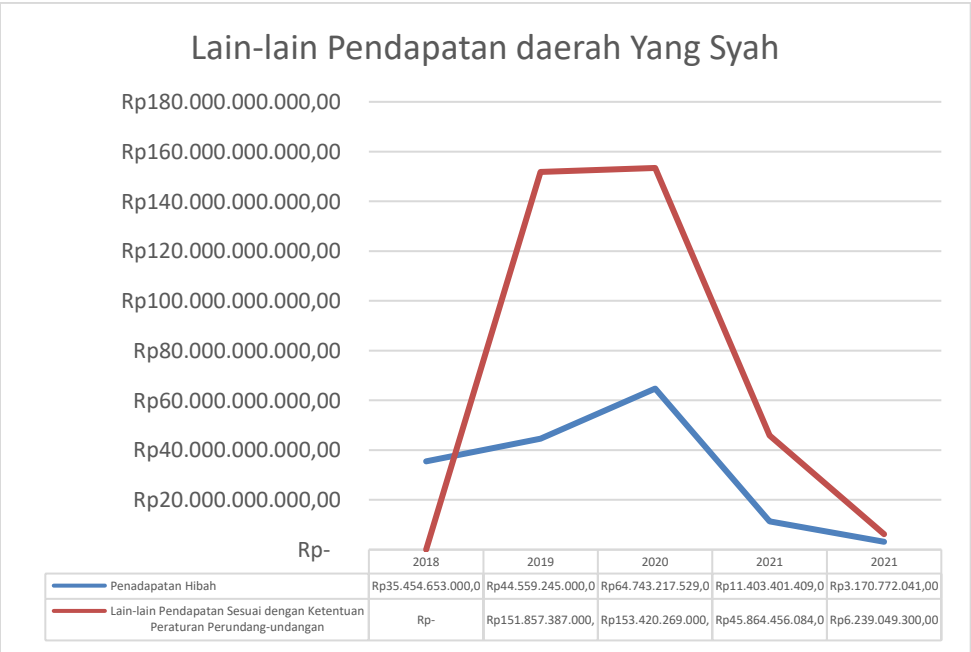


	2018	2019	2020	2021	2021
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.021	Rp947.4	Rp981.5	Rp1.054	Rp1.121
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp56.18	Rp57.45	Rp69.37	Rp69.40	Rp78.05

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari (1) Pendapatan hibah, (2) Pendapatan Lainnya. Lain lain pendapatan daerah yang syah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar 3.5 dibawah ini:

Gambar 3.5

Lain lain Pendapatan Daerah sang Syah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2022



	2018	2019	2020	2021	2021
Penadapatan Hibah	Rp35.454.653.000,0	Rp44.559.245.000,0	Rp64.743.217.529,0	Rp11.403.401.409,0	Rp3.170.772.041,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp-	Rp151.857.387.000,	Rp153.420.269.000,	Rp45.864.456.084,0	Rp6.239.049.300,00

3.1.1.2. Kinerja Belanja Daerah

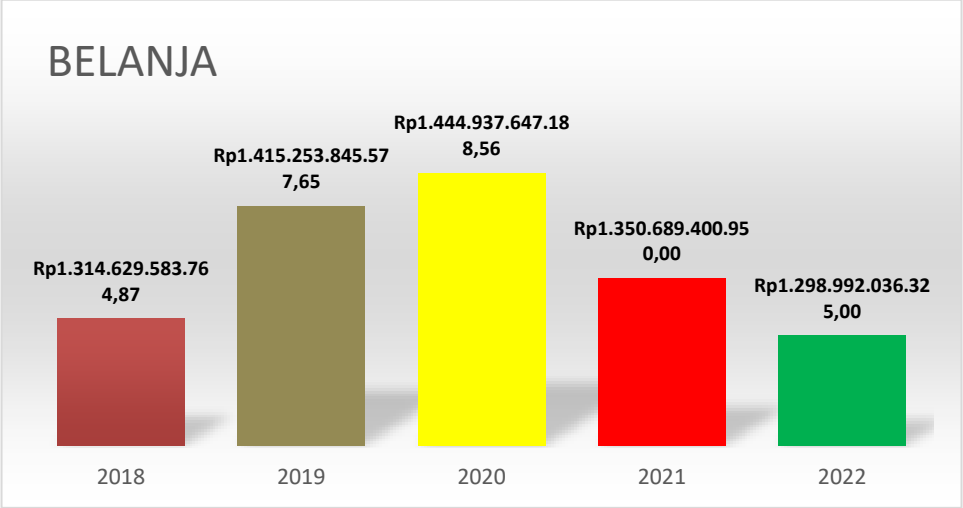
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2018-2022.

Selama periode ini secara keseluruhan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala mengalami kecendrungan menurun dengan rata-rata pertahun sebesar -0,30%. Akan tetapi jika dilhat dalam periode sebelum pandemic Covid-19 sebenarnya mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dan sejak pandemic covid-19 pada tahun 2021 dan tahun 2022 belanja mengalami penurunan. Pada tahun 2018 total Belanja Daerah sebesar Rp 1.314,62 Miliar dan mameningkat menjadi menjadi Rp 1.444,93 Miliar pada tahun 2020, selanjutnya menurun pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.350,68 Miliar dan Rp. 1.298,99 Miliar pada tahun 2021.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Barito Kuala mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut ini:

Gambar 3.6

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022



Belanja Daerah dikelompokkan dalam empat jenis yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi dalam kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dimana pada periode tahun 2018 – 2020 mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Rata rata penurunan sejak tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar -3,83%. Belanja operasi mengalami rata-rata penurunan pertahun sebesar (- 8,20%) dari Rp.910,26 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp.835,63 Miliar pada tahun 2022. Sedangkan Belanja Modal dan belanja tak terduga mengalami peningkatan diamana belanja modal pada tahun 2021 Rp. 216,59 Miliar menjadi Rp.241,37 Miliarpada tahun 2022, Belanja tak terduga

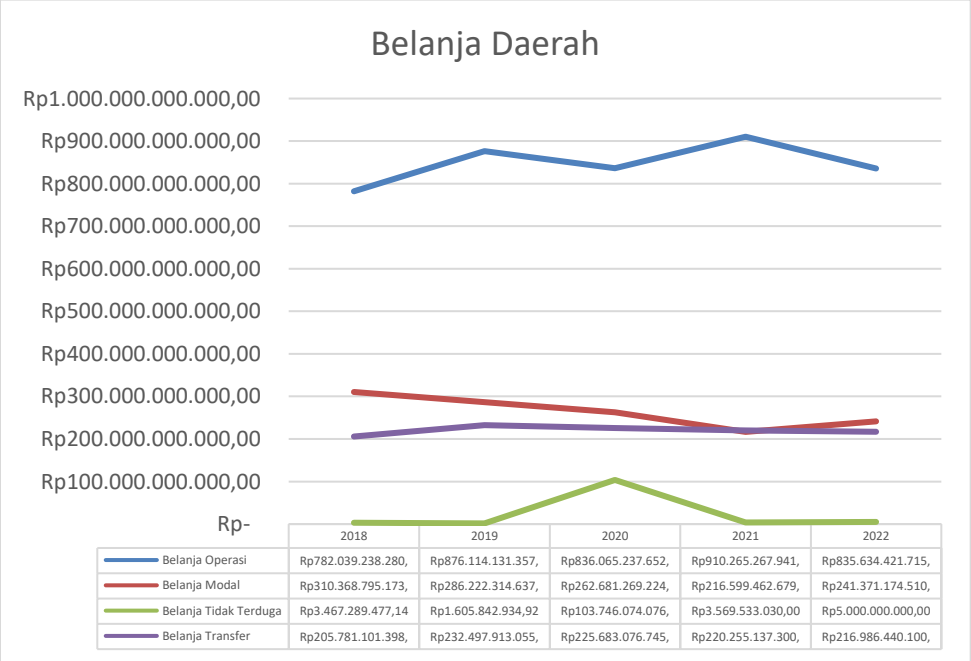
meningkat dari Rp. 3,56 Miliar pada tahun 2021 meningkat menjadi %. 5 Miliar pada tahun 2022. Belanja transfer pada tahun 2021 sebesar Rp.220,25 Miliar menurun menjadi Rp. 216,98 Miliar pada tahun 2022.

Untuk melihat perkembangan belanja daerah selama lima tahun terahir dapat dilihat pada gambar 3.7 sebagaimana tersaji dibawah ini:

Gambar 3.7

Realisai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Brito Kuala

Tahun 2018 – 2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Operasi	Rp782.039.238.280,	Rp876.114.131.357,	Rp836.065.237.652,	Rp910.265.267.941,	Rp835.634.421.715,
Belanja Modal	Rp310.368.795.173,	Rp286.222.314.637,	Rp262.681.269.224,	Rp216.599.462.679,	Rp241.371.174.510,
Belanja Tidak Terduga	Rp3.467.289.477,14	Rp1.605.842.934,92	Rp103.746.074.076,	Rp3.569.533.030,00	Rp5.000.000.000,00
Belanja Transfer	Rp205.781.101.398,	Rp232.497.913.055,	Rp225.683.076.745,	Rp220.255.137.300,	Rp216.986.440.100,

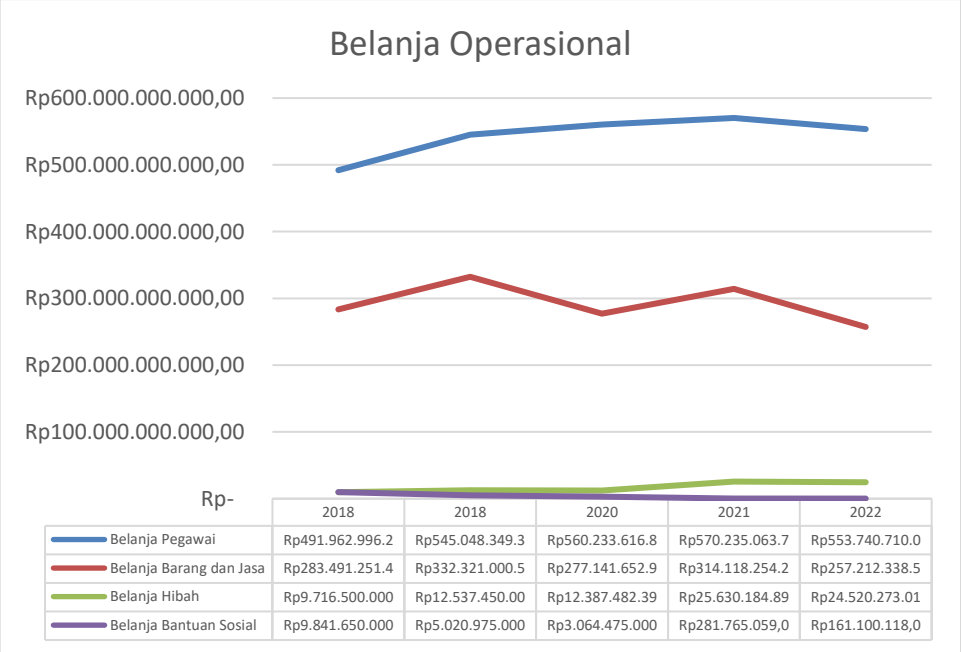
Belanja Daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Operasional meliputi Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 3.8 sebagaimana dibawah ini:

Gambar 3.8

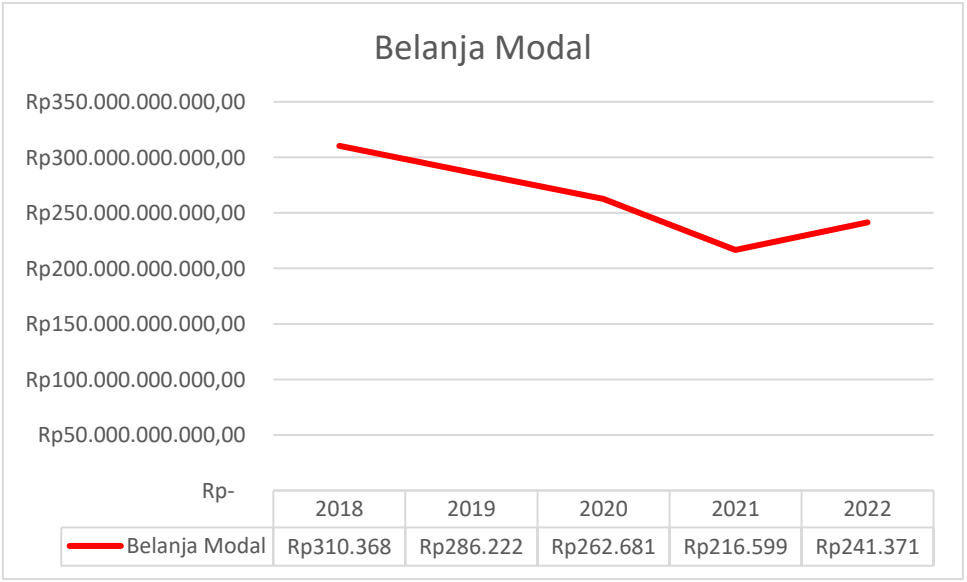
Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022



	2018	2018	2020	2021	2022
Belanja Pegawai	Rp491.962.996.2	Rp545.048.349.3	Rp560.233.616.8	Rp570.235.063.7	Rp553.740.710.0
Belanja Barang dan Jasa	Rp283.491.251.4	Rp332.321.000.5	Rp277.141.652.9	Rp314.118.254.2	Rp257.212.338.5
Belanja Hibah	Rp9.716.500.000	Rp12.537.450.00	Rp12.387.482.39	Rp25.630.184.89	Rp24.520.273.01
Belanja Bantuan Sosial	Rp9.841.650.000	Rp5.020.975.000	Rp3.064.475.000	Rp281.765.059,0	Rp161.100.118,0

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan; Belanja Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap lainnya. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 3.9 sebagai berikut:

Gambar 3.9
Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Modal	Rp310.368	Rp286.222	Rp262.681	Rp216.599	Rp241.371

Sedangkan Belanja Transfer meliputi; Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 - 2022 dapat disajikan pada gambar 3.10 dibawah ini:

Gambar 3.10

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022



Belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.11 sebagaimana berikut ini:

Gambar 3.11

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2018-2022



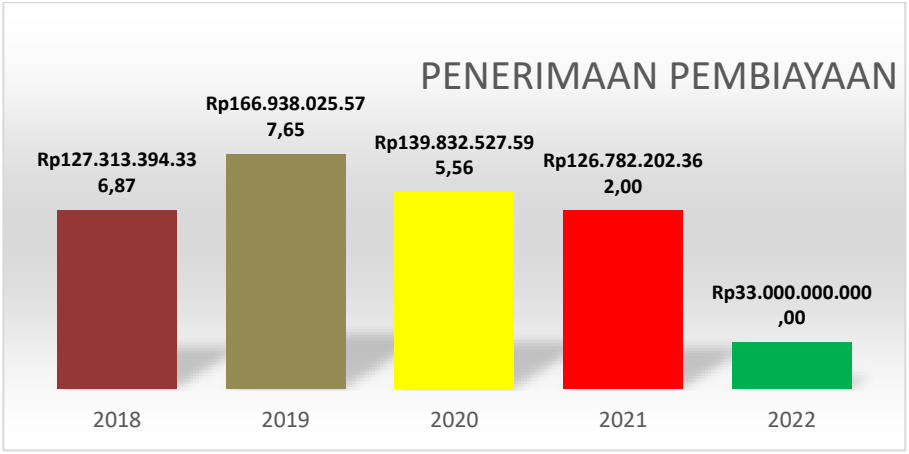
3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun terahir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilhat pada gambar 3.12 berikut ini:

Gambar 3.12

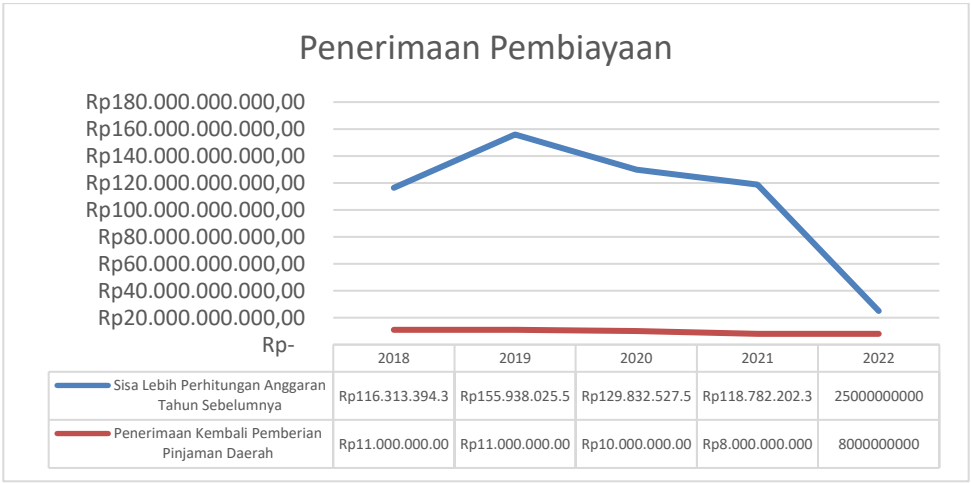
Penerimaan pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022



Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Barito Kuala selama periode ini hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 3.13 dibawah ini:

Gambar 3.13

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022



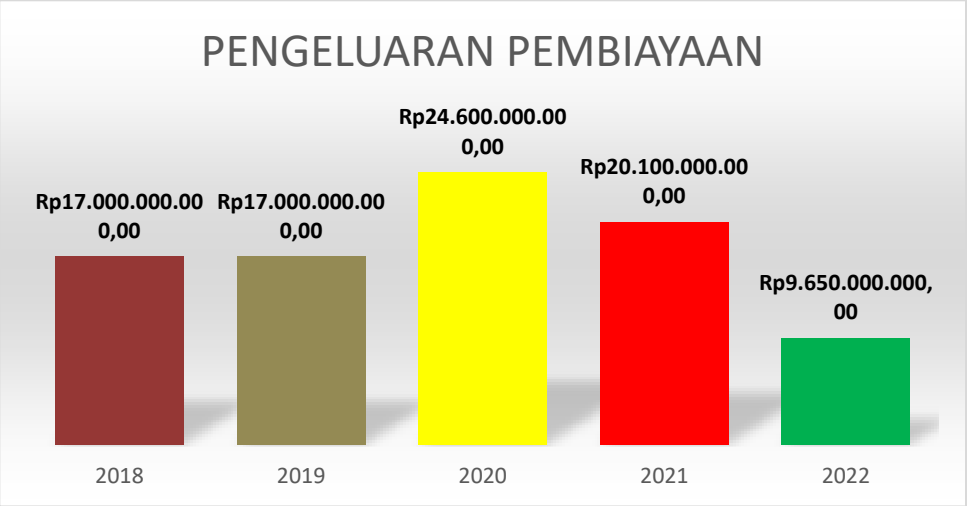
	2018	2019	2020	2021	2022
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp116.313.394.3	Rp155.938.025.5	Rp129.832.527.5	Rp118.782.202.3	25000000000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp11.000.000.00	Rp11.000.000.00	Rp10.000.000.00	Rp8.000.000.000	8000000000

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun terahir dapat dilihat pada gambar 3.14 sebagai berikut:

Gambar 3.14

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2018-2022

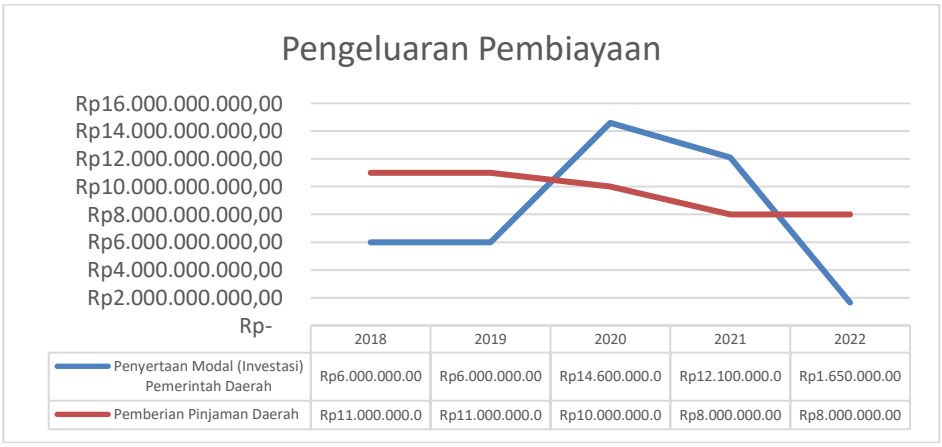


Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas penyertaan modal dan pemberian pinjaman daerah. Gambaran pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun terahir dari tahun 2018-2022 dapat disajikan sebagaimana gambar 3.15 berikut ini:

Gambar 3.15

Pengeluaran Pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2018-2022



3.1.2.Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas

memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

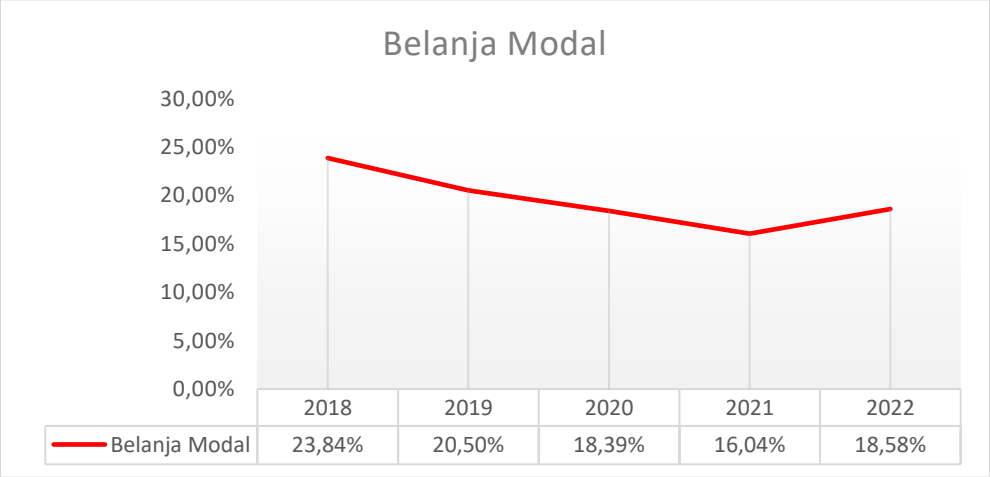
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Aktivitas belanja daerah di Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan mengalami pertumbuhan rata-rata pada proporsi belanja operasional sebesar 1,67% dan proporsi belanja tak terduga sebesar 9,58%, dan belanja transfer sebesar sedangkan proporsi belanja modal dan belanja transfer sebesar 1,33%, sedangkan belanja modal menunjukan penurunan -6,09%.

Proporsi Belanja Modal mengalami kecendrungan menurun selama periode tahun 2018- 2022, dari 23,84% menjadi 18,58% tahun 2022. Penurunan Proporsi belanja dari tahun ketahun terus terjadi sampai dengan tahun 2021 sampai dengan 16,04, dan pada tahun 2022 dianggarkan meningat menjadi 18,58%.

Penurunan proporsi belanja ini terjadi akibat adaanya refocusing anggaran sebagai dampak pandemic covid-19 yang mulai terjadi diawal tahun 2020. Grafik penurunan proporsi belanja modal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pata gambar 3.16 sebagai berikut:

Gambar 3.16
Proporsi Belaja Modal pada Struktur Belanja Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022

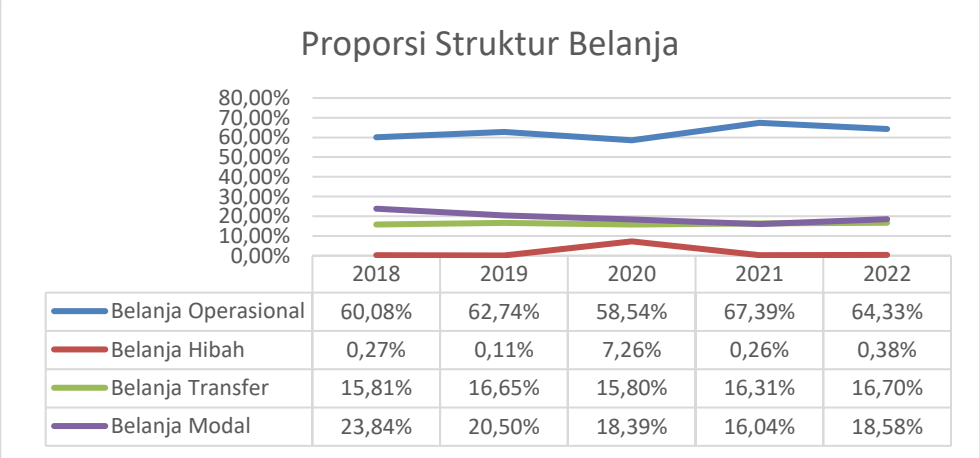


Dalam kurun waktu 5 tahun terahir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 proporsi belanja operasional mengalami fluktuasi dimana terjadi kenaikan pada tahun 2019 dan tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2022 mengalami penurunan, Jika dihitung pertumbuhan rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 belanja operasional mengalami pertumbuhan kenaikan rata rata 1,67%, belanja tak terduga mengalami kenaikan 9,58% dan belanja transfer mengalami kenaikan 1,33%.

Fluktuasi pertumbuhan proporsi belanja operasional, belanja modal, belanja hibah dan belanja transfer dalam struktur belanja pemerintah Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 3.17 sebagaimana tersaji berikut ini:

Gambar 3.17

Grafik Pertumbuhan Proposi Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022

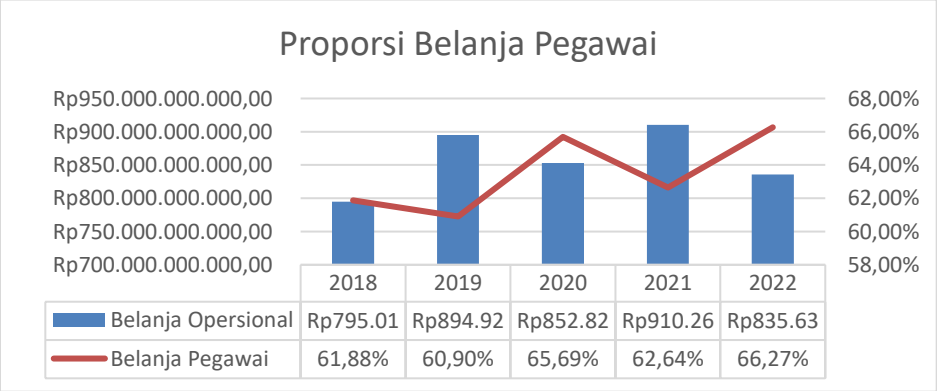


	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Operasional	60,08%	62,74%	58,54%	67,39%	64,33%
Belanja Hibah	0,27%	0,11%	7,26%	0,26%	0,38%
Belanja Transfer	15,81%	16,65%	15,80%	16,31%	16,70%
Belanja Modal	23,84%	20,50%	18,39%	16,04%	18,58%

Proporsi Belanja Pegawai di Kabupaten Barito Kuala terhadap porsi Belanja Operasional cukup dominan meskipun mengalami kecenderungan meningkat selama periode tahun 2018- 2022. Pada tahun 2018 dominasi Belanja Pegawai sebesar 61,88% menurun menjadi 60,88% pada tahun 2019, meningkat menjadi 65,69 pada tahun 2020dan men urun Kembali di tahun 2021 menjadi 62,64% dapa pada tahun 2022 meningkat menjadi 66,27% dari Belanaja Operasional, atau rata-rata menguasai sebesar 63,48% dari belanja operional selama periode ini. Gaambaran Proposi Belanja Pegawai terhadap belanja operasional selama periode tahun 2028-2022 dapat dilihat pada gambar 3.18 berikut ini.

Gambar 3.18

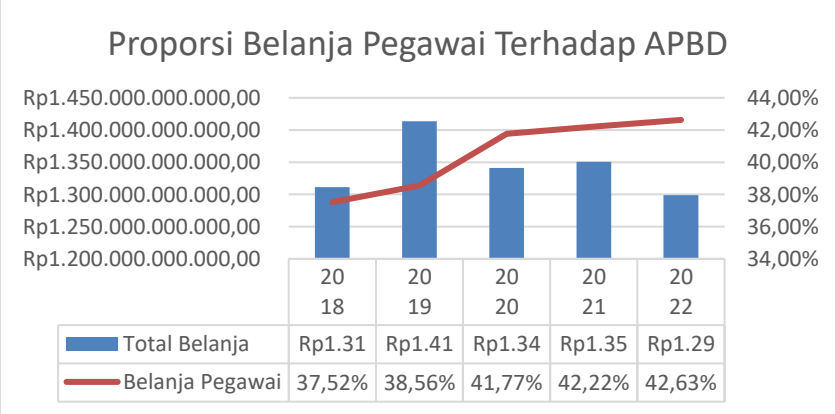
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022



Sementara itu apabila Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Belanja APBD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala maka dominasi porsi belanja ini selama periode dimaksud berada di rata rata 40,54%. Porsi ini juga mengalami kecendrungan meningkat selama periode 2018-2022 dari 37,52% ditahun 2018 meningkat menjadi 42,63% pada tahun 2022. Gambaran Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja APBD Kabupaten Barito Kuala selama periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 3.19 berikut ini;

Gambar 3.19

Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perhitungan defisit riil diperlukan untuk mengetahui besarnya kekurangan dari penerimaan daerah untuk menutupi belanja daerah, agar menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai. Defisit Riil di Kabupaten Barito Kuala tahun 2018-2022 menunjukkan kondisi variatif dimana difisit terendah terjadi pada tahun anggaran 2020 dengan deficit sebesar Rp.11,48 Miliar dan deficit tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2019 terjadi defisit sebesar Rp. 148,33 Miliar.

Gambaran riil deficit anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table 3.4 berikut ini

Tabel 3.3
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-222
(Rp. Miliar)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.204,316	1.263,315	1.329,705	1.224,007	1.275,642
2.	Realisasi Belanja Daerah	1.311,162	1.413,648	1.341,191	1.350,689	1.298,992
3.	Defisit	**(106,846)**	**(148,332)**	**(11,486)**	**(106,668)**	**(23,350)**

Untuk menutup defisit diperlukan perencanaan penganggaran penutup defisit tersebut, penutup defisit di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Kuala
(Rp. Miliar)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	SiLPA TA sebelumnya	116,313	115,938	129,832	118,782	33,0
2.	Penerimaan Kembali Pinjaman Daearh	11,00	11,00	10,00	8,00	8,00

Penutup defisit riil di Kabupaten Brito Kuala berdasarkan komposisinya ditutup oleh 2 komponen yakni SiLPA dan Penerimaan Kembali pinjaman kepada pihak ketiga, yang proporsi terbesarnya bersumber dari SiLPA tahun 2018 sebesar 91,36% dan tahun 2021 naik menjadi 93,69%%. Komposisi penutup defisit riil Kabupaten Barito Kuala tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel. 3.5
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	SiLPA TA sebelumnya	91.36%	91.33%	92.85%	93.69%	80.49%
2.	Penerimaan Kembali Pinjaman Daearh	8.64%	8.67%	7.15%	6.31%	19.51%

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan pembangunan daerah selama empat tahun ke depan dimasa transisi serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.6. Proyeksi APBD Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan 3 persen dan 12 persen di tahun 2026 dengan pertimbangan ekonomi akan mulai membaik di tahun 2024 pasca berahirnya pandemic covid-19.
2. Pendapatan Retribusi Daerah mengalami peningkatan 3 persen dan 12 persen di tahun 2026 dengan pertimbangan ekonomi akan mulai membaik di tahun 2024.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan 3 persen dan 12 persen di tahun 2026 dengan pertimbangan ekonomi akan mulai membaik di tahun 2024.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat sebesar rata-rata 3 persen per tahun.
5. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami peningkatan 10 persen di tahun 2026 dengan dasar perhitungan APBD tahun 2022 (dengan pertimbangan ekonomi akan mulai membaik di tahun 2024).
6. Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan 3 persen dan 5 persen di tahun 2026, dengan dasar perhitungan APBN 2022 (dengan pertimbangan Ekonomi akan mulai membaik di tahun 2024).
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) (Fisik dan Non Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan) mengalami peningkatan dengan perkiraan persentase rata-rata peningkatan 3 persen pertahun, dasar perhitungan adalah tahun 2022.
8. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya mengalami peningkatan dengan perkiraan persentase rata-rata peningkatan 3 persen pertahun dan 5 persen di tahun 2026 dasar perhitungan adalah tahun 2022 (dengan pertimbangan Ekonomi akan mulai membaik di tahun 2024).
9. Pendapatan Lainnya (Dana Desa dan Lumpsum Payment) Asumsi dasar perhitungan TA. 2022 dengan adanya penyesuaian besaran TPP.

10. Belanja Hibah Asumsi dasar perhitungan TA. 2022 karena pada tahun 2024 ada Pemilu maka untuk tahun tersebut diluar asumsi rata-rata.
11. Bantuan Sosial Asumsi rata-rata naik 3 persen karena dasar perhitungan Bansos.
12. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 10 persen dari penerimaan pajak dan retribusi Daerah.
13. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (ADD APBD) 10 persen dari Dana perimbangan diluar dari belanja yang diatur secara khusus.
14. Belanja Tidak Terduga (untuk kondisi normal) tidak memperhitungkan adanya Pandemi atau kejadian luar biasa yang mengharuskan penangan secara khusus.
15. Belanja Pegawai pada belanja langsung yang bersifat wajib dan diatur secara khusus.
16. Belanja Modal di asumsikan minimal 25 - 40 persen dari APBD.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (Silpa), ditargetkan rata- rata 7 persen.

3.3.2.Perhitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, diperlukan untuk mengetahui kerangka pendanaan yang tersedia dan untuk mendanai pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Kuala (Rp. Miliar)

No	Uraian	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan daerah	1301	1326,12	1361,17	1397,58
2	Pencairan dana Cadangan	5	5	5	5
3	Sisa lebih Riil perhitungan anggaran	116	116	116	116
	Total Pendapatan	1422	1447,12	1482,17	1518,58
4	Belanja Oprasional	1409,57	1409,57	1409,57	1409,57
	Pengeluaran Pembiayaan	1409,57	1442,86	1477,14	1512,46
	Kapasitas Riil Kemampuan keuangan	12,43	4,26	5,03	6,12

3.3.3.Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas

program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Kuala untuk periode 2023-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala. Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Barito Kuala ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya serta telaahan pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya, sehingga rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Barito Kuala.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna serta berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan Pembangunan secara umum, yaitu :

Pertama, Terbatasnya anggaran pembangunan daerah. APBD menduduki posisi yang sangat strategis guna menstimulasi perekonomian di Kabupaten Barito Kuala. APBD diharapkan mampu menggerakkan peningkatan produksi dan konsumi masyarakat, nilai belanja pegawai dengan persentase sebesar 40% dari keseluruhan belanja. Dalam kondisi ideal, persentase belanja pegawai harus lebih kecil dibandingkan dengan belanja pembangunan sehingga pemenuhan kebutuhan masayarakat dalam rangka pelayanan akan terpenuhi dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan memiliki kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Untuk itu harus diimbangi oleh strategi yang tepat sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah Kabupaten Barito Kuala. Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, jika perencanaan anggaran belanja setiap kegiatan pada APBD efisien, tepat sasaran, wajar, tidak *underfinancing* (kurang) atau *overfinancing* (berlebih).

APBD Kabupaten Barito Kuala masih ditopang dari sebagian besar Dana Transfer, untuk itu tantangan yang dihadapi adalah sinkronisasi pembangunan di setiap bidang sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat keterpaduan, saling mendukung dan saling memperkuat dalam rangka mencapai sinergi melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pemangku kepentingan terkait sampai pada level pemerintah pusat dan provinsi, dengan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan. Mengingat kondisi anggaran yang terbatas, maka harus dipastikan bahwa setiap Satuan Perangkat Daerah melaksanakan pembangunan di setiap bidang dengan memiliki komitmen yang kuat pada pencapaian sasaran dan visi misi pembangunan daerah.

Kedua, Ketersediaan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang sangat strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena perwujudan Barito Kuala sebagai kota pertanian yang berkembah kearah jasa tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai. Melalui pembangunan infrastruktur diharapkan dapat ditingkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta diangkat harkat dan daya saing Indonesia dalam tatanan global. Dalam pembangunan infrastruktur ini, tantangan yang dihadapi di satu sisi terletak pada bagaimana infrastruktur membantu pengurangan kemiskinan ditengah tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pelayanan umum, sementara di sisi lain kemampuan dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau terkendala oleh keterbatasan anggaran.

Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih produktif lagi dalam melakukan kegiatannya. Pembangunan infrastruktur perlu diorientasikan kepada penanggulangan kemiskinan di daerah, yang dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerjasama melalui kemitraan secara adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Untuk itu, kapasitas masyarakat, pemerintah dan dunia usaha harus disejajarkan sehingga dalam memroses pembangunan infrastruktur fungsi dan peran masing-masing dapat saling melengkapi. Pemerintah, pada khususnya, akan terus berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, dengan program dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Berdasarkan tabel diatas infrasturktur jalan merupakan kebutuhan yang sangat prioritas. Jalan merupakan prasarana penghubung antar wilayah dan menuntaskan keterisolasian. Aktivitas ekonomi dan aksesbilitas sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan. Infrastruktur lainnya berupa jembatan mengingat Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah rawa dan terdiri dari banyak sungai.

Pertanian merupakan salah satu potensi Kabupaten Barito Kuala yang sangat dominan. Agar produktifitas pertanian dapat dipertahankan maka kondisi saluran irigasi harus dalam keadaaan baik. Air bersih, sanitasi, transportasi, komunikasi, RTH serta infrastruktur perkotaan lainnya juga harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, Keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi. Keberhasilan proses pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi dan meningkatkan kinerja dan citra pelayanan publik. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa dalam meningkatkan daya saing daerah.

Keempat, Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia. indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator yang mencerminkan keadaan sumber daya manusia yang ada baik dari segi pendidikan maupun kesehatan selain daya beli masyarakat. Secara urutan Kabupaten Barito Kuala masih berada di peringkat 12 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang dirinci menurut urusan Pemerintahan daerah di uraikan sebagai berikut :

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan secara umum dalam urusan Pendidikan adalah **belum tercapainya kualitas pendidikan masyarakat sesuai standar** yang disebabkan oleh :

a. Masih adanya sarana prasana dalam kondisi rusak.
b. Rasio ketersediaan lanjutan pendidikan dasar di setiap kecamatan belum terpenuhi.
c. Pendidikan vokasi belum optimal dalam rangka meningkatkan keterampilan.
d. Keterbatasan akses internet bagi masyarakat marginal untuk anaknya yang sekolah daring
e. Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.
f. Belum dicapainya Prestasi Non Akademik Siswa di tingkat Nasional.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan secara umum urusan Kesehatan adalah **belum tercapainya kualitas kesehatan masyarakat sesuai standar** yang disebabkan oleh :

a. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
b. Masih ditemukannya prevalensi stunting
c. UHC masih peringkat 12 di provinsi Kalimantan Selatan
d. Masih kurangnya pelayanan kesehatan bagi balita, lansia dan disabilitas.
e. Masih cukup tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular
f. Belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis.
g. Masih rendahnya perilaku budaya hidup sehat pada masyarakat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan secara umum urusan pekerjaan umum adalah **belum tercapainya kualitas infrastruktur kota bidang pekerjaan umum** yang disebabkan oleh :

a. Masih kurangnya konektivitas antar wilayah.
b. Masih ditemukannya kawasan rawan banjir
c. Masih belum terpenuhinya pelayanan air untuk pemenuhan pertanian
d. Masih belum tercapainya RTH sesuai ketentuan
e. Masih belum terpenuhinya pelayanan air minum dan air limbah

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan secara umum pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah **belum tercapainya kualitas infrastruktur kota bidang perumahan rakyat dan kawasan permukinan** yang disebabkan oleh :

a. Belum optimalnya penataan bangunan yang terkendali
b. Masih adanya kawasan perumahan yang belum didukung PSU yang

memadai

c. Masih ada kawasan permukinan kumuh.

d. Masih kurangnya penataan bangunan akibat bencana dan program pemerintah.

e. Belum tercapainya standar pelayanan minimal bidang perumahan dan permukiman.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan secara umum pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah **masih adanya pelanggaran masyarkat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** yang disebabkan oleh :

a. Belum optimalnya sosialiasi Perda/Perbup kepada masyarakat

b. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung tuposi Satpol PP

c. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran.

6. Urusan Sosial

Permasalahan yang ada pada urusan sosial adalah **peningkatan angka kemiskinan dan masih belum optimalnya penanganan pasca bencana** yang disebabkan oleh:

a. Masih rendahnya kemampuan PSKS.

b. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin

c. Belum terintegrasinya kegiatan penganggulangan kemiskinan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

d. Belum optimalnya jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin

e. Belum optimalnya pemberian bantuan bagi korban pasca bencana.

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaiatan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang ada pada urusan tenaga kerja adalah **peningkatan pengangguran** yang disebabkan oleh :

a. Masih tingginya angka pengangguran terbuka

b. Pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pengaruh pandemi COVID-19.

c. Masih rendah/belum tersedianya kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan lapangan kerja yang dibutuhkan.

d. Masih rendahnya minat masyarakat bekerja pada sektor informal.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang ada pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah **masih adanya kesenjangan gender** yang disebabkan oleh :

a. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan

organisasi kemasyarakatan.

b. Belum terpenuhinya fasilitas publik yang responsif gender.

c. Masih adanya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. **Urusan Pangan**

Permasalahan yang ada pada urusan Pangan adalah **belum optimalnya ketersediaan pangan masyarakat** yang disebabkan oleh :

a. Semakin berkurangnya lahan pertanian

b. Semakin berkurangnya minat masyarakat dalam bidang pertanian.

c. Masih kurangnya inovasi dalam bidang pertanian.

4. **Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan yang ada pada urusan Lingkungan hidup adalah **masih rendahnya kualitas lingkungan hidup** yang disebabkan oleh:

a. Penurunan kualitas air sungai dan udara yang disebabkan oleh kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran.

b. Peningkatan produksi sampah seiring peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah sarana dan prasarana persampahan.

b. Masih maraknya TPS liar.

c. Kebijakan pengelolaan limbah belum seluruhnya ditaati oleh para pelaku usaha

d. Banyaknya Bank Sampah yang belum berfungsi optimal

e. Potensi pengelolaan limbah bagi perekonomian (singular economy)

5. **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan yang ditemui pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih **belum optimalnya pelayanan kependudukan** yang disebabkan oleh :

a. Belum akuratnya data kependudukan untuk digunakan sebagai data organisasi perangkat daerah (OPD)

b. Masih kurangnya sarana prasarana untuk melayani masyarakat

6. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan yang ditemui pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** yang disebabkan oleh :

a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

b. Masih rendahnya tata kelola pemerintahan desa

7. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan yang ditemui pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana **masih rendahnya partisipasi akseptor KB** yang disebabkan oleh :

a. Masih terdapat pasangan usia subur yang belum ber KB.

8. **Urusan Perhubungan**

Permasalahan yang ditemui pada urusan Perhubungan antara lain adalah **belum tercapainya kualitas infrastruktur kota bidang perhubungan** yang disebabkan oleh :

a. Belum terpenuhinya sarana prasarana perhubungan sesuai standarnya.
b. Masih adanya kemacetan pada kawasan dan waktu tertentu.
c. Belum optimalnya pendapatan dari sektor perhubungan
d. Tingkat kecelakaan masih tinggi

9. **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan yang ditemui pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah **Belum optimalnya fasilitas TI dalam mendukung pelayanan informasi publik** yang disebabkan oleh :

a. Beberapa pejabat penghubung menanggapi laporan masih sekedar formalitas, tidak disertai dengan dokumentasi sebelum atau sesudah laporan ditanggapi.
b. Pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Kelompok Infomrasi Masyarakat masih kurang baik di kalangan remaja maupun golongan masyarakat yang sudah tua.
c. masih kurangnya bantuan sarana dan prasarana bagi keberadaan Kelompok Informasi Masyakarat.
d. Pengetahuan masyarakat tentang penyebaran informasi masih kurang baik dan cenderung informasi yang diterima tidak dipilah atau ditelaah dulu kebenarannya.
e. Dengan sarana komunikasi yang ada masyarakat lebih cepat menerima informasi dari berbagai media yang ada.
f. Belum tercapainya SPBE(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

10. **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan yang ada pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah

Menurunnya pertumbuhan pelaku UMKM yang disebabkan oleh :

a. Menurunnya omzet penjualan produk UMKM.
b. Masih kurangnya inovasi produk UMKM yang bersaing di pasar
c. Masih rendahnya kualitas keterampilan pelaku UMKM yang memenuhi pangsa pasar.
d. Potensi Produk Lokal Unggulan Daerah (PLUD) untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)

11. **Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan yang ada pada urusan Penanaman Modal adalah Menurunnya **investasi daerah** yang disebabkan oleh :

a. Menurunnya daya beli (konsumtif) masyarakat akibat penurunan pendapatan per kapita masyarakat.
b. Masih belum terpenuhinya sarana prasarana pendukung investasi.
c. Belum optimalnya ketersediaan data/informasi potensi/peluang investasi daerah.
d. Masih rendahnya investasi yang direalisasikan.

12. **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan yang ada pada urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah **Masih rendahnya daya saing prestasi olahraga** yang disebabkan oleh :

a. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional/internasional.
b. Masih kurangnya pembinaan olahraga berprestasi
c. Masih kurangnya pembinaan organisasi kepemudaan

13. **Urusan Statistik**

Permasalahan yang ada pada urusan Statistik **Masih belum optimalnya pemanfaatan data statistik oleh masyarakat/instansi pemerintah** yang disebabkan oleh :

a. Masih belum optimalnya Tim Pengelola Informasi Publik Pemerintah Daerah pada SKPD.
b. Masih belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk penyampaian informasi dan data pembangunan.
c. Masih banyaknya data sektoral yang tidak termutakhirkan
d. Belum optimalnya pengelolaan Forum Satu Data.

14. **Urusan Kebudayaan**

Permasalahan yang ada pada Urusan Kebudayaan adalah menurunnya pertumbuhan sektor pariwisata dampak pandemi COVID-19 sebagai berikut :

a. Masih adanya situs bersejarah yang belum dapat dilestarikan
b. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan seni budaya.
c. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang peninggalan sejarah

15. **Urusan Perpustakaan**

Permasalahan yang ada pada Urusan Perpustakaan adalah **Belum terpenuhinya perpusatakaan sesuai standar** yang disebabkan oleh :

a. Masih kurangnya Literasi
b. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan
c. Masih kurangnya Pustakawan
d. Masih belum optimalnya perpustakaan online (IPUSDA BATOLA)

16. **Urusan Kearsipan**

Permasalahan yang ada pada Urusan Kearsipan adalah **Belum optimalnya pengelolaan arsip** yang disebabkan oleh :

a. Terbatasnya jumlah arsiparis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.
b. Masih rendahnya pengelola kearsipan di SKPD
c. Masih terbatasnya layanan arsip bagi Lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

17. **Urusan Persandian**

Permasalahan yang ada pada urusan persandian adalah Proses pembahasan dokumen kebijakan belum bisa diterbitkan, karena terkain peraturan turunan dari pusat mengenai keamanan siber yang belum diterbitkan karena pergantian Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan yang ada pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah **Belum optimalnya ketersediaan pangan masyarakat bidang perikanan** sebagai berikut :

a. Berkurangnya pelaku usaha penangkapan/nelayan
b. Berkurangnya lokasi penangkapan karena perubahan fungsi lahan.
c. Masih kurangnya inovasi perikanan.

2. **Urusan Pariwisata**

Permasalahan yang muncul pada urusan pariwisata adalah menurunnya **pertumbuhan sektor pariwisata** yang disebabkan oleh :

a. Kurangnya kegiatan Pembangunan atau pengembangan amenitas di Destinasi Wisata.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar Destinasi dalam menjaga dan mengembangkan lingkungan sekitar Destinasi
c. Belum optimalnya data kunjungan wisata baik dari kunjungan hotel maupun kunjungan destinasi.

3. **Urusan Pertanian dan Peternakan**

Permasalahan yang ada pada Urusan Pertanian dan peternakan adalah **Belum optimalnya ketersediaan pangan masyarakat bidang pertanian dan peternakan** yang disebabkan oleh :

a. Belum optimalnya pengelolaan lahan pertanian
b. Masih kurangnya inovasi bidang pertanian dan peternakan

c. Berkurangnya pelaku usaha pertanian/peternakan

4. **Urusan Perdagangan**

Permasalahan yang ditemui pada urusan Perdagangan adalah :

a. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pasar.
b. Masih rendahnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan pasar.
c. Masih rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi

5. **Urusan Perindustrian**

Permasalahan yang ada pada urusan Perindustrian adalah **Menurunnya pertumbuhan pelaku IKM** yang disebabkan oleh :

a. Menurunnya omzet penjualan produk IKM.
b. Masih kurangnya inovasi produk IKM yang bersaing di pasar
c. Belum Optimalnya pembinaan Produk IKM terkait PLUD.

4.1.4 Fungsi Penunjang UrusanPemerintahan

1. **Bidang Administrasi Pemerintahan**

Permasalahan yang ada pada bidang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama tidak optimal terkendala pandemi.
b. Waktu pelaksanaan Pembinaan Kadarkum dan Kelurahan Sadar Hukum harus menyesuaikan jadwal kegiatan pada Kelurahan/Kecamatan yang akan bekerjasama dengan Bagian Hukum.
c. Masih ada sebagian masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya ijin mendirikan bangunan (IMB)
d. Belum Optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
e. Masih rebndahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
f. Masih rendahnya peringkat pelaporan LPPD di tingkat provinsi

2. **Bidang Pengawasan**

Permasalahan yang ditemui pada Bidang Pengawasan adalah **Masih belum optimalnya kapasitas APIP** yang disebabkan oleh :

a. SOP kegiatan tidak berjalan secara optimal sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
b. Tertumpuknya beberapa kegiatan pada, beberapa APIP (melaksanakan lebih dari satu kegiatan pada waktu yang bersamaan.
c. Indikator kinerja program persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal

(BPK) yang ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan tidak memenuhi target kinerja.

d. Realisasi indikator kinerja menunggu hasil verifikasi oleh Lembaga eksternal (Inspektorat Provinsi Kalsel, BPK, dan BPKP) sehingga terjadi keterlambatan pengukuran kinerja
e. Adanya tantangan terkait capaian indikator MCP Korsubgah KPK.

3. **Bidang Perencanaan**

Permasalahan yang ada pada Bidang Perencanaan adalah sebagai berikut :

a. Masih perlunya peningkatan SDM aparatur perencana
b. Masih perlunya peningkatan koordinasi perencanaan lintas bidang/SKPD.
c. Masih kurangnya data/informasi yang update untuk bahan penyusunan perencanaan
d. Belum optimalnya pengelolaan SIPD Perencanaan.

4. **Bidang Keuangan**

Permasalahan yang ditemui pada Bidang Keuangan adalah **Menurunnya Pendapatan Asli Daerah dan Belum optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah** yang disebabkan oleh :

a. Kemampuan membayar Wajib Pajak yang menurun akibat dari pandemi Covid-19 dan faktor lainnya, mengakibatkan banyaknya permintaan pengajuan keberatan dan keringanan pembayaran PBB dan BPHTB.
b. Subjek pajak berdomisili di luar daerah Kabupaten Barito Kuala (luar Provinsi Kalimantan Selatan) sehingga sulit melakukan penagihan/koordinasi dengan Wajib Pajak yang mengakibatkan tidak maksimal.
c. Masih kurangnya pemahaman terhadap penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penganggaran dan Penatausahaan
d. Masih banyaknya aset daerah yang belum tercatat atau belum di laporkan secara berkala.

5. **Bidang Kepegawaian**

Permasalahan yang ada pada Bidang Kepegawaian adalah **Masih rendahnya profesionalitas ASN** yang disebabkan oleh :

a. Belum optimalnya pelaksanaan analisis jabatan
b. Belum optimalnya pemberian sanksi dan penghargaan kepada ASN
c. Adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan Fungsional
d. Penerimaan CPNS dari unsur PPPK

6. **Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan yang ditemui pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah **Masih rendahnya kompetensi aparatur** yang disebabkan oleh :

a. Terbatasnya kewenangan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM aparatur
b. Pola karir ASN belum dituangkan dalam kebijakan kepala daerah (perkada).
c. Belum sinerginya kebutuhan kompetensi SDM aparatur dengan lembaga penyelenggara pendidikan (belum ada link and match).
d. Rendahnya minat ASN untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi (tugas belajar) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi

7. **Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan yang ada pada Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah **Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan masih kurangnya inovasi daerah** yang disebabkan oleh:

a. Masih belum di implementasikannya hasil penelitian oleh SKPD terkait.
b. Masih kurangnya inovasi daerah yang di inisiasi oleh SKPD

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Penelaahan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan Millenium Development Goals (MDGs). SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Perbedaan SDGs dengan MDGs adalah SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target, di mana MDGs hanya memiliki 8 tujuan. Oleh karenanya, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan dapat lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yakni: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yakni manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Tujuan ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030, oleh karenanya, disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut :

1. Tanpa kemiskinan (*nopoverty*);
2. Tanpa Kelaparan (*Zero hunger*);

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*good health and wellbeing*);
4. Pendidikan berkualitas (*QualityEducation*);
5. Kesetaraan Gender (*GenderEquality*);
6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and sanitation)*;
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean energy)*;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent work and Economic Growth)*;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure);*
10. Mengurangi Kesenjangan (*ReducedInequalities)*;
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*sustainable Cities and Communities);*
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible consumption and Production);*
13. Aksi terhadap iklim (*Climate Action);*
14. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water)*;
15. Kehidupan di darat (*Life on Land);*
16. Institusi Keadilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions);* dan
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals).*

Dengan berlandaskan tujuan tersebut, Kabupaten Barito Kuala berkeinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan TPB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2017 yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah daerah dengan dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Capaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (TPB) di Barito Kuala terkait pada 28 unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals/SDGs

No.	SKPD	Mencapai Target	Belum Mencapai	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
1	Bagian Hukum SETDA	1	0	0	0	1
2	Bagian Organisasi SETDA	0	0	0	0	0

3	Bagian Pengadaan barang dan jasa SETDA	1	0	0	0	1
4	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA	0	0	0	0	0
5	BPBD	11	2	2	0	15
6	BPS	8	0	0	0	8
7	Dinas Kesehatan	8	2	15	0	25
8	Dinas Lingkungan Hidup	15	0	8	0	23
9	Dinas Pendidikan	6	0	14	2	22
12	Dinas Perhubungan	3	0	0	0	3
13	Dinas PUPR	5	0	11	0	16
14	Dinas Sosial	2	4	4	0	10
15	Inspektorat	2	2	0	0	4
16	Diskoperindag	3	2	4	0	9
18	Dinas dukcapil	1	2	0	0	3
19	Dinas Perumahan dan Pemukiman	6	2	0	0	8
20	BPKAD	6	0	2	0	8
21	Dinas Ketahanan Pangan, dan Perikanan	7	4	0	0	11
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	0
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	3	4	3	0	10
25	Bappelitbang	2	0	2	0	4
28	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2	3	1	0	6
Total		92	27	66	2	187

Sumber : Bidang Litbang Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala, 2021.

4.2.2 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Isu-isu nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Isu-isu yang dirumuskan untuk masa depan berusaha untuk menjawab dan mengantisipasi tantangan dan ancaman dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito

Kuala, isu-isu nasional berikut menjadi perhatian dalam perumusan RPD Kabupaten Barito Kuala :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

   Dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, perlu adanya peningkatan inovasi dan kualitas investasi sebagai modal utama untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

   Pembangunan ekonomi tersebut akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui hal-hal berikut ini :

   a. Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertahuan serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

   Dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, perlu adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kondisi yang berkelanjutan dan inklusif dilakukan melalui Langkah-langkah berikut :

   a. Pengembangan sector/komoditas/kegiatan unggulan daerah
   b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang
   c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah
   d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata
   e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. **Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.**

   Dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, negara harus menyadari bahwa manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui hal-hal berikut :

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
c. Peningkatan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta
d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan yang berkualitas
e. Peningkatan kualitas, anak, perempuan, dan pemuda
f. Pengentasan kemiskinan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan yang penting dan berperan utama dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui :

a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
c. Moderasi beragama
d. Penguatan budaya dan literasi, inovasi dan kreativitas.

5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan melalui :

a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
c. Pembangunan infrastruktur perkotaan
d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan
e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**

Dalam pembangunan nasional, perlu adanya perhatian terhadap daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui hal-hal berikut :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
c. Pembangunan rendah karbon

7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Dalam hal penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi publik, negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Hal ini dapat dicapai melalui :

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas
b. Penataan kapasitas Lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan
c. perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata Kelola keamanan siber
d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi
e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri
f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industry pertahanan.

4.2.3 Penelaahan Terhadap Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Pembangunan Kabupaten Barito Kuala tidak hanya memperhatikan isu-isu internasional maupun nasional saja, namun juga memperhatikan isu provinsi. Isu-isu provinsi ini menjadi perhatian dalam pengkajian isu-isu strategis Kabupaten Barito Kuala dalam penyusunan RPD Kabupaten Barito Kuala. Berikut ini isu-isu provinsi yang menjadi perhatian dalam perumusan isu-isu strategis Kabupaten Barito Kuala :

1. **Ekonomi Melambat**

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang berada di kawasan tropis sehingga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi pelaksana pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan baik secara makro maupun mikro. Sumber daya alam tersebut berpotensi meningkatkan daya dukung perkembangan perekonomian melalui eksploitasi sumber daya alam baik terbaharui maupun tak terbaharukan.

Seiring berjalannya waktu, eksploitasi sumber daya alam mulai memunculkan sebuah permasalahan terkait lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam memberikan efek negatif terhadap kualitas lingkungan hidup dimana terjadi degradasi yang mengancam masa depan generasi mendatang. Eksploitasi yang paling mengkhawatirkan adalah eksploitasi sumber daya

mineral yang merupakan sumber daya tak terbaharui. Meskipun sudah ada UU minerba, namun perihal pertambangan dan penggalian sumber daya mineral harus tetap mendapat perhatian lebih dalam pelaksanaan pergerakan perekonomian wilayah.

Keterkaitan eksploitasi sumber daya mineral dan perekonomian daerah sangat erat terutama di Provinsi Kalimantan Selatan mengingat dominasi struktur ekonomi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang paling tinggi. Oleh karena itu, dalam menyikapi perubahan iklim global akibat degradasi kualitas lingkungan hidup serta menurunnya produksi bahan tambang dan galian, maka perlu perlahan-lahan dilakukan perubahan dominasi struktur ekonomi di Kalimantan Selatan.

Jika melihat salah satu tujuan pembangunan internasional terkait pembangunan berkelanjutan, maka perubahan struktur perekonomian Kalimantan Selatan adalah pergeseran dominasi sector pertambangan dan penggalian menjadi sector pertanian sebagai sector yang memiliki kontribusi terbesar kedua sekaligus sector yang megeksploitasi sumber daya alam terbaharukan. Meskipun kedua sector tersebut memiliki gap yang jauh dalam andil struktur ekonomi, namun jika shifting sector ekonomi dominan ini dilaksanakan dengan kontinu dan komitmen tinggi, maka bukan tidak mungkin pergeseran dominasi struktur akan terjadi dengan dampak positif pada lingkungan hidup.

2. Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan semenjak perencanaan pembangunan hingga realisasi perencanaan yang telah dirumuskan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus memberikan perhatian khusus dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga akselerasi pembangunan dapat terlaksana.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Saat ini, sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya.

3. Lingkungan Hidup

Proses pemanfaatan Sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah tentu saja dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Namun Tidak dapat dipungkiri, pertambahan penduduk, peningkatan urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas lingkungan. Permasalahan utama lingkungan di Kalimantan Selatan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dinilai berdasarkan kualitas udara, kualitas air sungai dan tutupan lahan/hutan. Permasalahan lingkungan yang juga terkait dengan IKLH adalah meningkatnya potensi bencana daerah di Kalimantan Selatan yaitu banjir dan kabut asap yang harus mendapatkan penanganan yang lebih baik di masa depan karena berdampak pada kesehatan masyarakat.

4. Sarana Prasarana dan Energi

Pembangunan daerah merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dibentuknya suatu regional wilayah sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun perlu digarisbawahi bahwa salah satu inti dari tujuan pelaksanaan pembangunan daerah adalah pemerataan hasil pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan daerah juga dapat diartikan sebagai pengembangan setiap lini kehidupan masyarakat yang menyebabkan rasa nyaman, damai, dan sejahtera setiap individu yang tinggal di dalamnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Hingga saat ini, di Provinsi Kalimantan Selatan belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan di setiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara maksimal.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil batubara di Indonesia. Namun dalam pemanfaatannya, batubara belum menjadi salah satu sumber energinatran Selatan. Konsep membangun sejatinya perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep pembangunan atas dasar penambahan nilai sumber daya. Hal ini merupakan amanat menurut instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 disertai Peraturan menteri ESDM No. 25 tahun 2013, tentang pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Energi alternatif merupakan sumber energi pengganti dari sumber energi yang pada umunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Saat ini peningkatan kebutuhan energi didominasi oleh energi fosil yang tak terbarukan tentunya tak ramah lingkungan. Energi terbarukan pada dasawarsa sekarang lebih dikenal dengan energi alternatif, seperti; tenaga air, panas bumi, mini/mickro hidro, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, bahan bakar nabati, biogass, dan sampah kota.

5. Pandemi Covid 19

Pada Awal Tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami penyebaran pandemic Novel Corona Virus-2019 (Covid-19). Pandemik ini menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan resesi di seluruh dunia. Dampak negatif yang menjadi permasalahan nasional bahkan global yaitu terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain meningkatnya pengangguran karena banyak pekerja pada perusahaan yang dirumahkan dan di PHK, meningkatnya Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan serta menurunnya kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika tiga unsur pembangunan daerah yakni pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

Pembangunan daerah akan terlaksana melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi setiap tahapan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai domain penting dalam mengatur setiap langkah jalannya program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itulah perlu adanya perwujudan good governance pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan agar capaian kinerja lebih optimal.

Good governance merupakan tata laksana pemerintahan yang baik dalam artian seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintahan untuk menuju suatu tujuan yang baik. Good governance juga didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai aparatur pemerintah daerah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang. Oleh karenanya, peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah. Lain halnya dengan pemerintah daerah, swasta memiliki fokus utama dalam pengembangan perekonomian regional melalui

pemberdayaan potensi sumber daya alam dan manusia tanpa mengindahkan degradasi kualitas lingkungan hidup.

7. Ibu Kota Negara Di Kaltim

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan Timur. Sebagai Ibu Kota Negara baru, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebelah timurnya berbatasan dengan sebagian (12 mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi. Sementara itu, sisi selatannya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemindahan Ibu Kota Negara sudah termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan merupakan salah satu kegiatan prioritas pengembangan kawasan perkotaan. Salah satu yang mendasari pemindahan ibukota negara yaitu mengubah mind-set pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris sehingga merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila.

Pemindahan Ibukota Negara keluar pulau Jawa untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

4.2.4 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025

Penelaahan terhadap isu strategis RPJPD Kabupaten Barito Kuala juga merupakan perhatian dalam penentuan isu strategis pada RPJMD, karena RPJMD yang disusun merupakan pelaksanakan RPJPD tahap ke-empat atau pencapaian tahap akhir dari perencanaan jangka panjang Kabupaten Barito Kuala.. Berikut ini isu-isu strategis RPJPD pada tahun V (2020-2025) yang menjadi perhatian dalam perumusan isu-isu strategis Kabupaten Barito Kuala:

1. Pengembangan SDM
2. Pengembangan Ekonomi Wilayah
3. Prasarana Dasar
4. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum
5. Penataan Ruang dan Lingkungan.

4.2.5 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Lain

Penyusunan RPD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun letak wilayah Kabupaten Barito Kuala memiliki perbatasan dengan 4 (empat) wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tapin, Kota Banjarmasin dan 2 (dua) wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan. Kebijakan lintas kabupaten/kota tentunya akan di akselerasikan dalam dokumen perencanaan agar dalam penentuan kebijakan strategis dapat sejalan tanpa ada pertentangan dalam tahap pelaksanaan. Diutamakan yang terkait dengan konektifitas, peruntukan ruang di perbatasan dan pengembangan aktifitas ekonomi masyarakat serta dokumen administrasi (kependudukan dan pertanahan). Terkait tapal batas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sudah diatur sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri.

4.2.6 Isu Strategis RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

Berdasarkan hasil telaah, terdapat Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penganganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi, yaitu:

1. PLUD mendukung IKN

   Deangan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara Pada Tanggal 15 Februari 2022 maka sudah sah Ibukota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkan munculnya pusat pertumbuhan di Pulau Kalimantan yang berdampak luas bagi semua Pemerintah Daerah yang ada di Pulau Kalimantan termasuk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

   Sesuai Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah (PLUD) disebutkan ada 8 produk unggulan yaitu Pembibitan Sapi Bali, Padi Siam Anjir, Kuini, Nenas, Kerajinan Sasirangan, Kerajinan Purun, Jeruk Siam Banjar dan Kerupuk Haruan.

   Dari delapan Produk tersebut ada dua yang memungkinkan untuk mendukung Ibu Kota Nasional yaitu Padi Siam Banjar dan Sapi Bali.

2. Penyediaan tenaga kerja kompeten

   Kebutuhan tenaga teknis khususnya untuk mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sangat besar dan perlu didukung dengan kompetensi. Kabupaten Barito Kuala memiliki SMK, BLK, Sekolah bertaraf Internasional (*Global Islamic Boarding School*) dan Universitas (UMB, Uniska dan Poltek Hasnur)

3. Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan dan Struktur Perekonomian Daerah yang Belum Kuat

   Terbatasnya anggaran untuk pembangunan karena masih minimnya pendapatan asli daerah dan ketergantungan dengan dana transfer pusat ke daerah.

4. Kualitas konektivitas dan sarpras belum optimal

   Masih belum optimalnya konektivitas antar Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala khususnya untuk daerah utara dan selatan, serta sarana dan prasarana/infrastruktur pendukung yang belum merata. Masih ada konektifitas dengan Kabupaten/Kota berbatasan yang perlu dibangun. Ini perlu sinergitas dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dan dukungan penuh baik dari pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Nasional. Infrastruktur tersebut seperti Jemabatan Barito 2, Jembatan Sei. Andai (Alalak 3), Jemabatan Simpang Lima (Jejangkit-Kab. Banjar) dan Jembatan Pantang Raya – Dadahup (Tabukan – Kapuas Murung).

5. Bencana alam akibat perubahan iklim

   Bencana alam di Kabupaten Barito Kuala terjadi akibat perubahan iklim berupa peningkatan curah hujan, daya dukung dan daya tampung lahan di daerah hulu sungai Barito sangat mempengaruhi. Pembangunan konstruksi dengan mengurug daerah rawa yang mengakibatkan terganggunya daerah resapan.

6. Kualitas pelayanan publik belum optimal

   Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman tanggal 18 Januari 2022 terhadap produk pelayanan administrasi di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dari 69 produk layanan administrasi (Disdukcapil, DPMPTSP, Disdik dan Dinkes) diperoleh nilai 73,64 dan masuk dalam zona kuning. Predikatnya adalah kepatuhan sedang. Kedepannya perlu meningkatkan kualitas pelayanan.

7. Kualitas SDM perlu ditingkatkan

   Berdasarkan nilai harapan lama sekolah adalah peringkat 7 dengan nilai 12,39 untuk tahun 2020 dan rata-rata lama sekolah adalah peringkat 13 dengan nilai 7,34 sehingga tingkat pendidikan di Kabupaten Barito Kuala masih perlu ditingkatkan.

8. UHC belum tercapai

   Universal Health Coverage (UHC) untuk Kabupaten Barito Kuala berada pada posisi kedua belas dari tiga belas Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan yaitu sebesar 213.096 peserta atau sebesar 67,24%

9. Target SDGs belum tercapai

   Target SDGs untuk Kabupaten Barito Kuala masih jauh dari yang diharapkan, ditambah dengan adanya Pandemi *Covid-19* sejak maret tahun 2020. Tapi ini tidak hanya untuk pemerintah Kabupaten Barito Kuala hal yang sama juga terjadi di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

10. Persiapan Pemilu serentak 2024

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 disebutkan pada tahun 2024 harus dilaksanakan Pilpres, Pileg dan Pilkada secara serentak. Untuk itu sejak tahun 2023 sudah dipersiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dalam Inmendagri tersebut, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) disusun tanpa adanya Visi-Misi Kepala Daerah. Aktualisasi visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang terlebih dahulu melewati proses pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan-kebijakan nasional maupun regional yang harus dipedomani.

Karena tidak adanya Visi Misi Kepala Daerah, maka dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) disusun dengan memedomani Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala 2005-2025.

Adapun Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 adalah **"TERWUJUDNYA BARITO KUALA YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRI BISNIS"**

Dalam visi tersebut terkandung nilai-nilai yang dicita-citakan dan diidam-idamkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala pada akhir periodesasi RPd Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 – 2026, yaitu :

a. **Adil** : Dimaksudkan pada kesamaan hak dan kewajiban seluruh elemen masyarakat Kabupaten Barito Kuala dalam menikmati dan memanfaatkan seluruh hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dengan tidak mengesampingkan kesamaan kewajiban untuk berperan aktif dalam berbagai aktiivitas pembangunan. Makna adil juga diartikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan dan pelayanan pemerintah terhadap berbagai kebutuhan daasr seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
b. **Maju** : Kondisi kehidupan masyarakat pada titik tataran tertentu menjadi lebih baik dari pada kondisi sebelumnya atau menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat di wilayah lainnya. Makna kata "Maju" yang terpenting adalah terwujudnya semangat, gairah dan dinamika masyarakat sebagai "budaya" dalam menanggapi hidup dan kehidupan yang lebih baik.
c. **Mandiri** : Tingkat kemampuan yang ingin dicapai dan merupakan output dari kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang telah diletakkan dan dilaksanakan secara konsisten. "Mandiri" dimaknai sebagai perwujudan dari kemampuan daerah dalam hal ini pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan segala potensi dan keunggulan yang dimiliki baik mandiri dari aspek ekonomi dan mandiri dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dasar.
d. **Agribisnis** : Sebagai daerah yang potensi utamanya didominasi oleh pertanian, maka segala upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sehingga

menghantarkan Kabupaten Barito Kuala sebagai pemasok pangan terutama padi terbesar untuk Kalimantan Selatan menjadikan agribisnis sebagai basis untuk mencapai kondisi yang diinginkan pada akhir periode RPJPD. Berkembangnya sektor *hulu* perlu didukung dengan perkembangan sektor *hilir* sehinga tercipta nilai tambah (*added value*) produk yang dihasilkan. Pengertian gribisnis sendiri adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

Dalam mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala tersebut ditempuh dengan misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan Mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan
b. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan
c. Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.

5.1 Tujuan Pembangunan

Sesuai dengan UUD 1945 tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan berperan serta dalam mewujudkan perdamaian. Sedangkan tujuan RPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 -2026 adalah:

- Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah
- Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta penanggulangan bencana
- Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas dan
- Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

5.2 Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang disusun secara lebih detail, terinci dan tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun kedepan. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk masa 4 (empat) tahun kemudian dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Barito Kuala

VISI : TERWUJUDNYA BARITO KUALA YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRI BISNIS											
NO	**MISI**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**RUMUS**	**Kondisi Awal 2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**SKPD**
1	**Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan Mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan**	**1. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah**	1 Meningkatnya kesempatan kerja	1. Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	(Jumlah Angkatan kerja yang memperoleh kesempatankerja/Jumlah angkatan kerja yang dilatih)x 100%	0	25	50	75	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			2 Meningkatnya kesejahteraan Pekerja	2. Persentase Perusahaan yang menerapkan Jamsostek & UMP	(Jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek/Jumlah perushaan seluruhnya) x 100%	100	100	100	100	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			3 Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan di Kawasan transmigrasi	3. Persentase Sapras di Kawasan Transmigrasi yang dibangun	(Jumlah Srpras yang dibangun/Jumlah sarpras seluruhnya)x 100%	0	25	50	75	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			4 Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1. Persentase Data Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang Mandiri	(Jumlah PPKS yang Mandiri/Jumlah PPKS yang terdata)x 100%	2,10%	2,72%	3,34%	3,96%	4,58%	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
			5 Tersedianya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.Produksi Padi	Luas Panen Tanaman Padi x Produkivitas Tanaman Padi	375.033,85	376.358,00	377.675,00	378.997,00	380.323,00	DISTAN TPH
				2. Produksi Jagung	Luas Panen Tanaman Jagung x Produkivitas Tanaman Jagung	7.025,86	7.054,76	7.083,31	7.111,91	7.140,57	DISTAN TPH
				3. Produksi Kacang Tanah	Luas Panen Tanaman Kacang Tanah x Produkivitas Tanaman Kacang Tanah	55,69	55,91	56,13	56,35	56,57	DISTAN TPH
				4. Produksi Porang	Luas Panen Tanaman Porang x Produkivitas Tanaman Porang	22,00	30,00	35,00	40,00	45,00	DISTAN TPH
				1. Produksi Jeruk	Luas Panen Tanaman Jeruk x Produkivitas Tanaman Jeruk	65.647,26	65.975,54	66.305,42	66.636,95	66.970,13	DISTAN TPH
				2. Produksi Nenas	Luas Panen Tanaman Nenas x Produkivitas Tanaman Nenas	14.063,63	14.137,56	14.208,25	14.279,29	14.350,68	DISTAN TPH
				3. Produksi Kueni	Luas Panen Tanaman Kueni x Produkivitas Tanaman Kueni	902,34	906,81	911,34	915,9	920,48	DISTAN TPH

				4. Produksi Cabai Rawit	Luas Panen Tanaman Cabai Rawit x Produkivitas Tanaman Cabai Rawit	87,07	90,27	93,01	95,82	98,72	DISTAN TPH
				5. Produksi Cabai Besar	Luas Panen Tanaman Cabai Besar x Produkivitas Tanaman Cabai Besar	59,36	80,74	83,42	85,92	88,53	DISTAN TPH
				6. Produksi Bawang Merah	Luas Panen Tanaman Bawang Merah x Produkivitas Tanaman Bawang Merah	151,35	38,19	57,86	75,75	98,37	DISTAN TPH
				6 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah rata-rata persentase peningkatan produksi kelapa sawit, karet, kelapa, dan purun	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	DISBUNNAK
				7 Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak	Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah rata-rata persentase peningkatan penyediaan daging ternak besar dan ternak unggas yang ASUH	2.69% 6.00%	2.53% 7.50%	2.53% 7.88%	2.53% 8.25%	2.53% 8.75%	DISBUNNAK
				8 Meningkatnya Usaha Produk Olahan Perkebunan dan Peternakan	Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil ternak	Jumlah realisasi peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan dibagi dengan jumlah awal kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan dikali 100 %	-	33.33% 1.67	25.00% 3.28%	20.00% 4.76%	16.67% 6.06	DISBUNNAK
				9 Meningkatnya kemandirian dan diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan(SPPH)	SPPH Keersedian+ SPPH Konsumsi	1,15	1,15	1,42	1,4	1,11	DKPP
				10 Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan Produksi perikanan	((Jumlah Produksi Perikanan tahun N - Jumlah Produksi Perikanan tahun N-1)/(Jumlah Produksi Perikanan tahun N-1)) x 100%	2,6	2,67	2,73	2,79	2,85	DKPP
				11 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	((PAD thn N - PAD tahun N-1)/(PAD thn N-1))x100%	3,39	3,39	4,97	4,97	4,97	BP2RD
				12 Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan Retribusi dari sektor perhubungan	((Jumlah Retribusi tahun N -Jumlah Retribusi Tahun N-1) /(Jumlah Retribusi tahun N-1)) x 100%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	DINAS PERHUBUNGAN

			13 Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas lingkungan (IKLH)	IKLH= (0,376xIKA)+(0,405xIKU) + (0,219 x IKL)	53,37	53,47	53,57	53,67	53,77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase pertumbuhan ekonomi lingkungan	(Persentase parameter lingkungan yang terakreditasi+Persentase timbulan limbah medis yang dikelola+ Persentase pengelolaan sampah)/3	60	65	76	89	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase lingkungan bersih dan sehat	(Persentase Desa Proklim+ Persentase Sekolah Adiwiyata+Persentase desa kota yang bersih dan sehat)/3	100	100	100	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			14 Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase Peningkatan Usaha Mikro menjadi usaha kecil	(jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil/Jumlah Usaha mikro keseluruhan) x 100%	1,38	1,38	2,9	2,82	1,41	DISKOPERINDAG
			15 Meningkatnya Koperasi yang aktif	Persentase Koperasi yang Aktif	(jumlah Koperasi yang aktif/Koperasi yang terdaftar) x 100%	55	55,38	56,21	57,04	57,87	DISKOPERINDAG
			16 Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Persentase IKM yang Tumbuh	(jumlah IKM yang tumbuh/Jumlah Usaha mikro keseluruhan) x 100%	4,00%	4,30%	4,60%	4,90%	5,20%	DISKOPERINDAG
			17 Menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang	Persentase ketersediaan bahan pokok sesuai kebutuhan masyarakat	(jumlah kebutuhan bahan pokok yang tersedia dipasar/Jumlah kebutuhan pokok masyarakat) x 100%	90	90	90	90	90	DISKOPERINDAG
			18 Meningkatnya Keamanan dan ketertiban mendukung kegiatan ekonomi	Persentase kecamatan dengan aktifitas ekonomi yang tertib	(Jumlah Kecamatan yang aktivitas ekonomi tertib/Jumlah Kec)x100%	100	100	100	100	100	SATPOL PP
			19 Meningkatnya pelestarian kebudayaan	Persentase pelestarian kebudayaan	Rata-rata persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	36,36	36,36	45,45	54,55	63,64	DISPORABUDPAR
			20 Meningkatnya jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan	Rata-rata persentase pemasaran pariwisata dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	69432	72000	78000	84000	90000	DISPORABUDPAR
2	**Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan**	**2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan penyediaan sarana**	21 Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas	Persentase Infrastruktur yang di bangun/dipelihara	Rata-rata persentase Infrastruktur yang di bangun/dipelihara	70	71	72	73	74	DPUPR

		prasarana yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta penanggulangan bencana	22 Meningkatnya Hunian dan Lingkungan yang layak huni	Persentase hunian dan lingkungan yang layak huni	(Jumlah hunian dan lingkungan yang ditangani/jumlah hunian dan lingkungan) x 100%	100	100	100	100	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
3	**Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.**	**3. Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas**	23 Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya level maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	INSPEKTORAT
				Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	INSPEKTORAT
			24 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	MCP Korsubgah KPK unsur tata kelola desa	Nilai MCP Korsubgah KPK unsur tata kelola desa	80	92	95	98	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
				Indeks Desa Membangun (IDM)	(Jumlah IDM Seluruh Desa/Jumlah Desa)	0,67	0,67	0,68	0,69	0,7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
			25 Memantapkan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi rata-rata Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan dan Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berjalan efektif	Jumlah Persentase realisasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan dan Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berjalan efektif/3	100%	100%	100%	100%	100%	SETDA
			26 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Kabupaten dari unsur perencanaan	Nilai SAKIP Kabupaten dari unsur perencanaan	24	24,5	25	26	26,5	BAPPELITBANG
			27 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan kecamatan	Nilai IKM	90	90	90	90	90	SELURUH KECAMATAN
				Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	(jumlah desa yang admistrasi baik/Jumlah desa keseluruhan) x 100%	100	100	100	100	100	SELURUH KECAMATAN
			28 Terwujudnya pengelolaan Keuangan dan BMD yang profesional transparan dan akuntabel	WTP	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
			29 Meningkatnya Kualitas Layanan	Indek SPBE (unsur Tata Kelola)	Nilai indikator tata kelol / Jumlah indikator tata kelola	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	DISKOMPINFO

			Informasi Publik Pemerintah Daerah	Indek Keamanan Informasi (KAMI)	Jumlah Total Nilai 5 Indikator Penilaian	190	200	273	300	320	DISKOMPINFO
				Persentase Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik (IKP)	Realisasi Jumlah informasi yang dipublikasikan pada media infromasi dibagi Target jumlah infromasi yang dipublikasikan pada media infromasi x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISKOMPINFO
			30 Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	(Persentase dokumen kependudukan + persentase Dokumen pencatatan sipil)/2	70	73	82	89	97	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
				Persentase data kependudukan dan catatan sipil secara valid dan terintegrasi	(Persentase Pemanfaatan data+ persentase validasi data)/2	85	86	88	89	90	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
			31 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan Kesbangpol	Nilai IKM	100	100	100	100	100	BAKESBANGPOL
			32 Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan ASN	(Total dari nilai persepsi per unsur X nilai penimbang) / Total unsur yang terisi (sumber data hasil survey)	100	100	100	100	100	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA
			33 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik terkait pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan DPMPTSP	Nilai IKM	85	85	85	85	85	DPMPTSP
				Nilai investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah	300 milyar	350 milyar	400 milyar	450 milyar	500 milyar	DPMPTSP
			34. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kabupatern	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Nilai IKM	100	100	100	100	100	SELURUH SKPD
4	**Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.**	**4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan**	35 Meningkatnya kualitas pemuda dalam mendukung pembangunan	Rata-rata persentase pemuda dan cabang olahraga yang berprestasi serta pelaksanaan aktivitas kepramukaan	Rata-rata Persentase Pemuda dan cabang olahraga yang berprestasi serta pelaksanaan aktivitas kepramukaan	62,94	62,94	63,27	64,83	65,31	DISPORABUDPAR
			36 Meningkatnya Kualitas	Angka Rata-rata Lama Sekolah	**RLS** = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} xi$	7,6	7,67	7,78	7,89	8,00	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA

$\mathbf{HLS}_a^t = \sum_{i=a}^{t} \frac{E_i^t}{P_i^t}$

			Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = \sum_{i=a}^{t} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	12,50	12,90	13,40	13,90	14,40	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
			37 Meningkatnya Minat dan Budaya Baca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	((jumlah Pengunjung tahun N-Jumlah Pengunjung tahunN-1)/(Jumlah Pengunjung tahun N-1))x100%	15%	15%	16%	17%	18%	DISPERPUSIP
			38 Meningkatnya pemanfaatn arsip Daerah	Presentase SKPD yang Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai NSPK	(Jumlah SKPD yang Menyelenggarakan arsip sesuai NSPK / Jumlah SKPD) x 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DISPERPUSIP
			39 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk	Total Fertillity Rate (TFR)	Jumlah TFR	2,24	2,24	2,28	2,27	2,25	DPPKBP3A
			40 Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai IPG	84,35	84,35	81,45	88,55	84,65	DPPKBP3A
			41 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	nilai KLA	Nilai KLA	675	700	725	750	775	DPPKBP3A
			42 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase rata-rata capaian SPM bidang Kesehatan	Jumlah Persentase capaian SPM bidang Kesehatan/Jumlah SPM bidang Kesehatan	66	67	68	69	70	DINAS KESEHATAN

Tujuan dan Sasaran di atas merupakan wujud dari apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara nyata untuk periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sampai dengan Tahun 2026, yang akan dicapai secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan APBD. Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai tahunan selama masa 4 (empat) tahun pembangunan jangka menengah.

Tabel 5.2 Keselarasan RPD 2023-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026

RPJMN 2020-2024	RPJMD PROVINSI KALSEL 2021-2026	RPD KABUPATEN BATOLA 2023-2026
Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata	Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah (BATOLA BERKARYA)
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta penanggulangan bencana (BATOLA MEMBANGUN)
Mengembangkan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik	Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas (BATOLA BERKINERJA BAIK)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berada Saing	Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudi Pekerti Luhur	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (BATOLA CERDAS, SEHAT DAN BERPRESTASI)
Revolusi Mental Dan Pengembangan Kebudayaan		

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan diwujudkan dalam empat tahun kedepan, perlu disusun strategi yang akan menjamin tercapainnya tujuan dan sasaran dengan baik. Selanjutnya strategi juga membutuhkan ketetapan arah kebijakan agar tujuan dan sasaran menjadi tepat dan tidak salah arah. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan didalam RPD Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 ini harus dipedomani dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan untuk empat tahun ke depan.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola setiap program kegiatan melalui proses, cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan merupakan rangkaian tahapan atau langkah- langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap Misi pembangunan Kaupaten Barito Kuala yang ditetapkan. Strategi yang disusun menunjukkan dan sekaligus mensyaratkan adanya komitmen dan konsistensi Kepala Daerah dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun yang memposisikan masyarakat subjek utama dari visi dan misi pembangunan, serta memantapkannya sebagai prinsip dalam pelayanan masyarakat.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan wujud pelaksanaan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Barito Kuala yang dibuat ini mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis (analisa internal dan eksternal) yang ada di Kabupaten Barito Kuala dan berpedoman kepada prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten. Dari proses tersebut diharapkan sasaran pembangunan dapat tercapai melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih dan selaras.

6.1 Strategi

Starategi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang mewujudkan tujuan adalah sebagai berikut

1. Batola Berdaya

Barito Kuala merupakan lumbung pangan Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan potensi utama di Kabupaten Barito Kuala yang merupakan daerah dengan lahan pertanian terluas di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk menjadikan Barito Kuala sebagai sentra pangan berupa padi, ikan dan ternak merupakan sesuatu yang sangat realistis mengingat Kabupaten Barito Kuala selain sebagai daerah pertanian juga sebagai penghasil perikanan dan peternakan. Sehingga untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberikan porsi yang cukup untuk mendukung pentingnya menjaga, mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan. Fokus untuk mengembangkan Batola Berdaya adalah peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui ketaatan terhadap pembangunan yang berorientasi pada aturan tata ruang. Indikator Batola Berdaya adalah :

a. Tingkat Pengganggguran Terbuka

SKPD Utama dalam penanganan tingkat pengganggguran terbuka adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 4 Program yang dilaksanakan. 4 program tersebut adalah:

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Penjelasan terkait strategi dan kebijakan mengenai penurunan tingkat pengganggguran terbuka (TPT) mengacu pada Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) tahun 2023-2026.

Serta SKPD penunjang dengan programnya masing-masing diantaranya :

i. Dinas Pendidikan dengan Program Pengelolaan Pendidikan

Uraian pelaksanaan Program ini adalah:

- Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan (Honor Daerah)
- Pendidikan non formal (Paket A, Paket B, Paket C dan Kursus-kursus keterampilan)

ii. DPPKBP3A dengan Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Uraian pelaksanaan Program ini adalah:

- Pelaksanaan pelatihan bagi perempuan

iii. Dinas Sosial dengan Program Pemberdayaan Sosial

Uraian pelaksanaan Program ini adalah:

- Pemberian bantuan usaha bagi keluarga miskin berupa bibit ternak, tenda, mesin jahit dan lain-lain.

iv. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Uraian pelaksanaan Program ini adalah:

- Fasilitasi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Pelatihan dan Bimtek anggota PKK

v. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Uraian pelaksanaan Program ini adalah

- Pelatihan pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan

vi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Program Penyuluhan Pertanian

Uraian pelaksanaan Program ini adalah:

- Pembinaan kelompok tani (Perkebunan) dan kelompok peternakan

vii. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dengan Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Dan Program Pengembangan UMKM

Uraian pelaksanaan Program ini adalah:

- Pembinaan Koperasi dan UMKM
- Pembinaan pengrajin

viii. Dinas Pertanian TPH dengan Program Penyuluhan Pertanian

Uraian pelaksanaan Program ini adalah:

- Pembinaan Kelompok Tani (Pertanian)

ix. Dinas PUPR dengan Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Uraian pelaksanaan Program ini adalah

- Pelatihan kerja jasa kontruksi (sertifikat tukang)

x. Kecamatan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Uraian pelaksanaan Program ini adalah

- Sosialisasi/penyuluhan pemberdayaan masyarakat
- Atak-Diang dan Karang Taruna

xi. Sekretariat Daerah dengan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Uraian pelaksanaan Program ini adalah:

- Kesejahteraan Guru Taman Pendidikan Al-quran dan guru Madrasah

xii. Bappelitbang dengan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Fasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- Evaluasi pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

b. Tingkat Kemiskinan

SKPD Utama untuk menangani Tingkat Kemiskinan adalah Dinas Sosial dengan jumlah program ada 4. 4 program yang menjadi kegiatan Dinas Sosial dalam menangani tingkat kemiskinan adalah:

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- Program Penanganan Bencana

serta SKPD penunjang dengan program untuk mendukung penurunan tingkat kemiskinan diantaranya :

i. Sekretariat Daerah dengan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Uraian pelaksanaan Program ini adalah:

- Bantuan anak putus sekolah, bantuan kegiatan keagamaan, bantuan pengobatan terhadap masyarakat miskin

ii. DPPKBP3A dengan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Penyelenggaraan Kampung KB (31 Desa) berupa bakti sosial dan kesatuan gerak PKK

iii. Dinas PUPR Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Uraian pelaksanaan program ini:

- Sambungan rumah air bersih (SR) gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas)

iv. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi

v. Bappelitbang dengan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)
- Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

vi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Bantuan peralatan keterampilan

vii. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Penuntasan, pembinaan dan pencegahan kawasan kumuh (Fasilitasi dan Penyediaan Rumah Layak Huni)

viii. Kecamatan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Kegiatan fasilitasi dana desa

c. Pertumbuhan Ekonomi

SKPD Utama untuk menangani Pertumbuhan Ekonomi adalah

i. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan 4 program

- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian

ii. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan 7 Program

- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Perizinan Usaha Pertanian
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian

iii. Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan dengan 5 Program

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Pengawasan Keamanan Pangan
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

iv. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan 1 Program

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

v. Dinas Perhubungan dengan 2 Program

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
- Program Pengelolaan Pelayaran

vi. Dinas Lingkungan Hidup dengan 8 program

- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

vii. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dengan 11 Program

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pengembangan UMKM

- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

viii. Satpol PP dengan 2 program

- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

ix. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan 4 Program

- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata

Serta SKPD penunjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan programnya masing-masing diantaranya:

i. Dinas PMD dengan Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Uraian pelaksanaan program ini adalah

- Fasilitasi adminitrasi keuangan desa
- Pembinaan dan pembentukan Bumdes

ii. Dinas Sosial dengan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga berupa bantuan stimulan usaha bagi keluarga rawan sosial ekonomi

iii. Sekretariat Daerah dengan Program Perekonomian Dan Pembangunan

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Kegiatan Tim Penanggulangan Inflasi Daerah berupa operasi pasar, distribusi LPG, Monev kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD dan pengawasan ekonomi pelaku usaha mikro.

iv. Dinas PUPR dengan Program Penyelenggaraan Jalan Dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)
- Galian waled

v. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Program Hubungan Industrial Dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Uraian Pelaksanaan program ini adalah:

- Penggajian sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pekerja mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan
- Monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing
- Swakelola pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Transmigrasi

vi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Program Pengembangan Perumahan

Uraian pelaksanaan program ini:

- Fasilitasi pengembangan perumahan komersil

vii. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Uraian pelaksanaan program ini:

- Fasilitasi data sektoral mendukung Batola Satu Data

viii. Dinas Perhubungan dengan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran

Uraian pelasanaan program ini adalah:

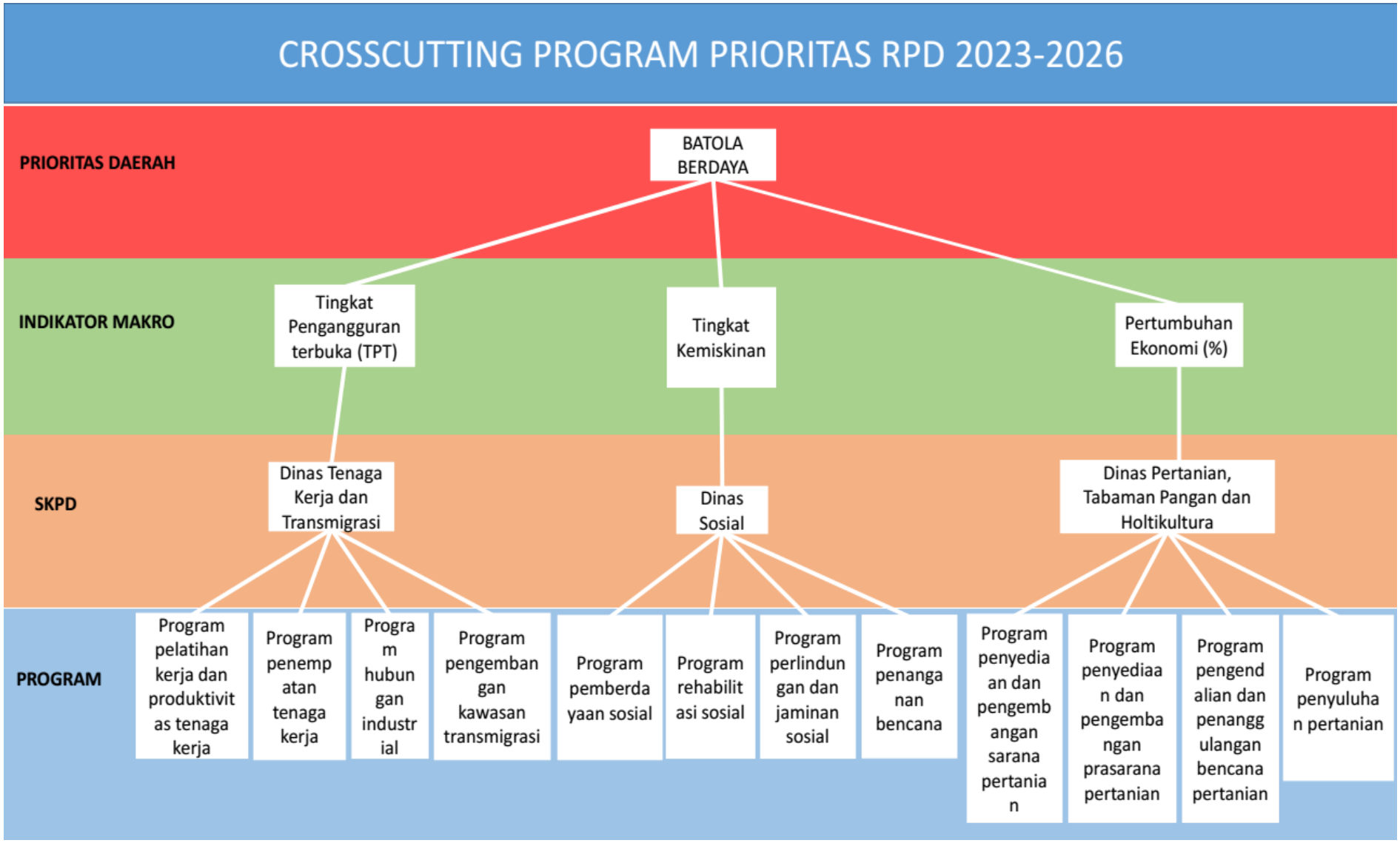
- Retribusi transportasi fery penyebrangan , Retribusi parkir dan uji kelayakan kendaraan

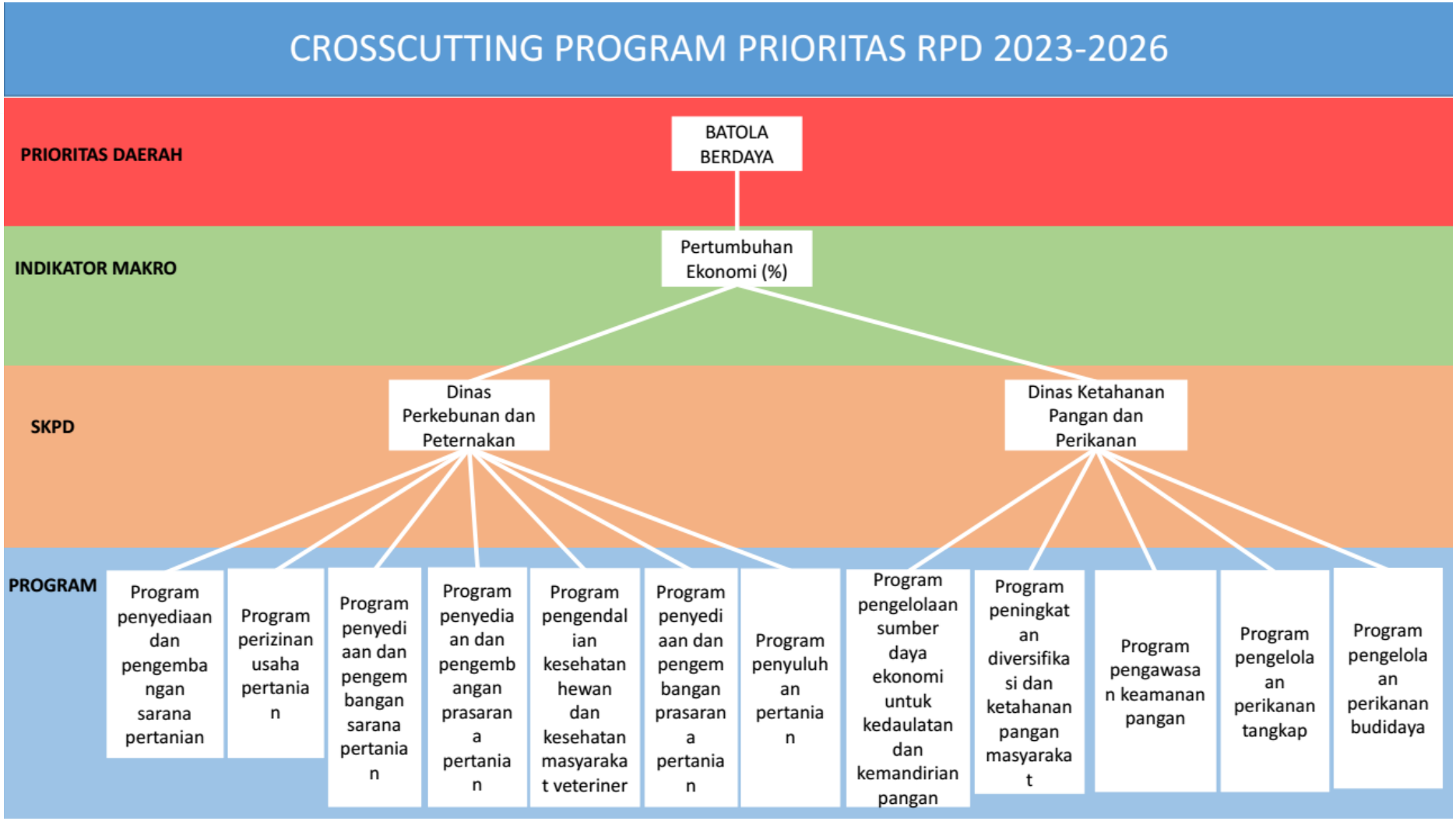
ix. Serta Kecamatan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

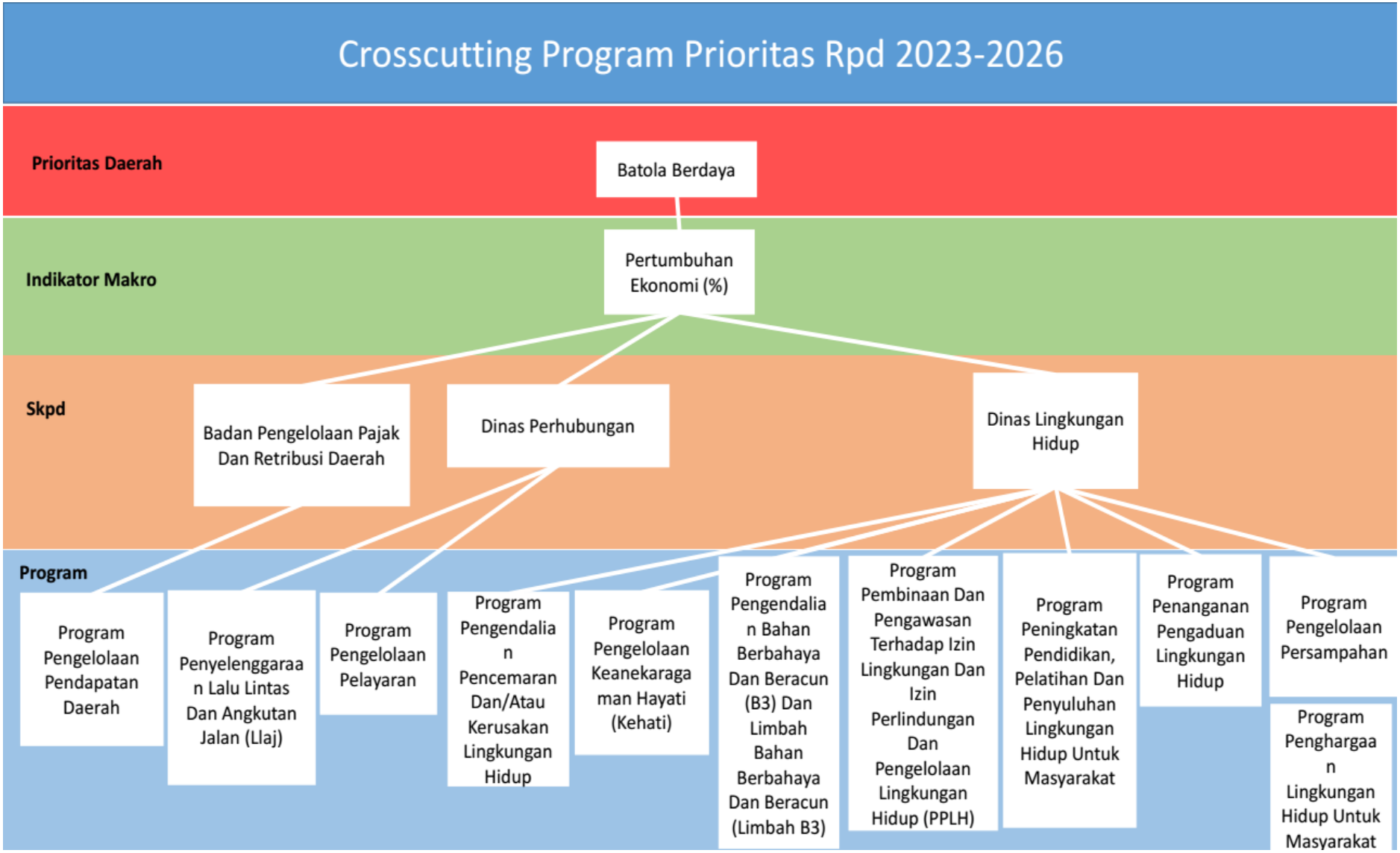
Uraian pelaksanaan program ini adalah:

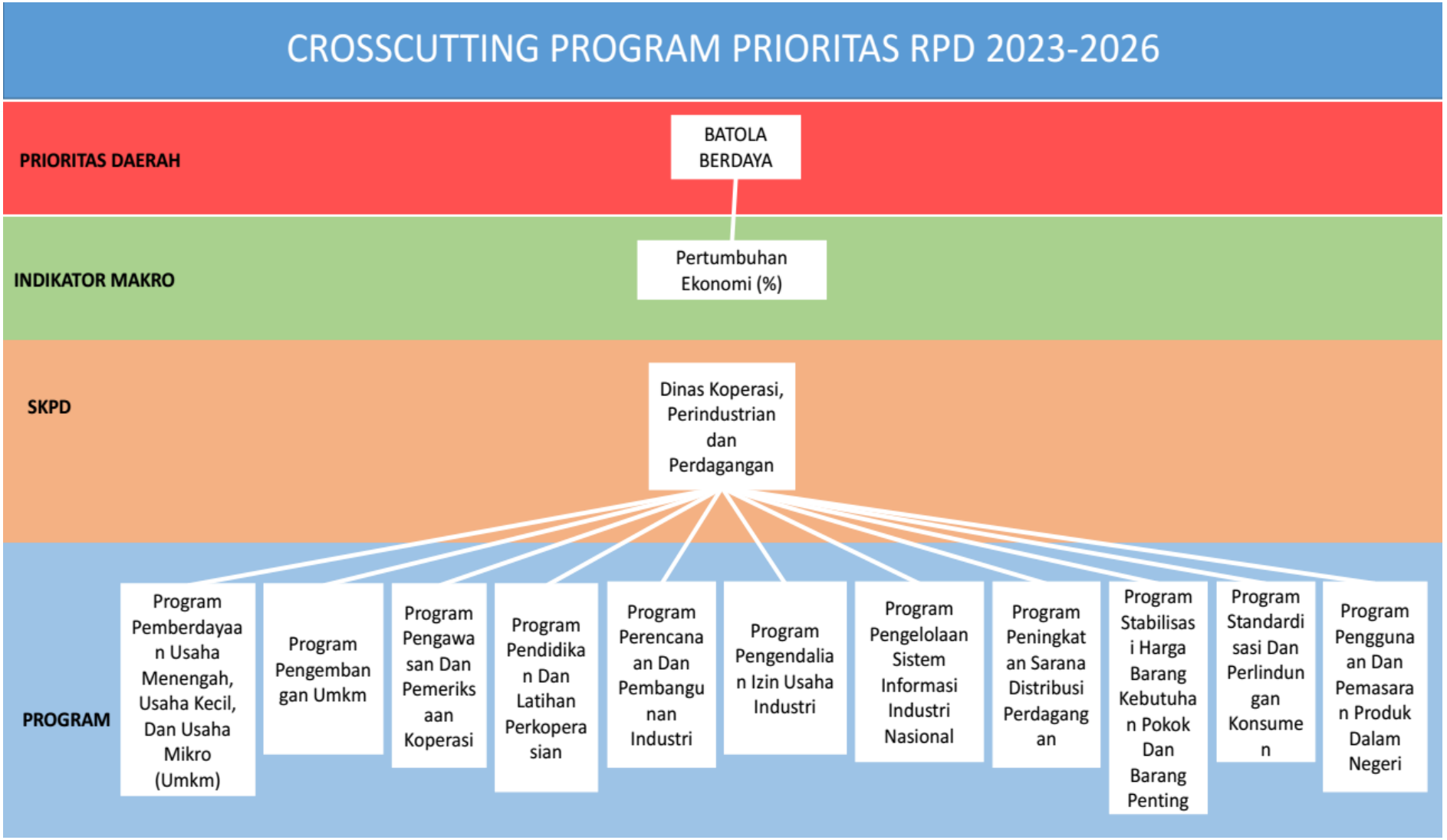
- Penyuluhan kegiatan pemberdayaan masyarakat

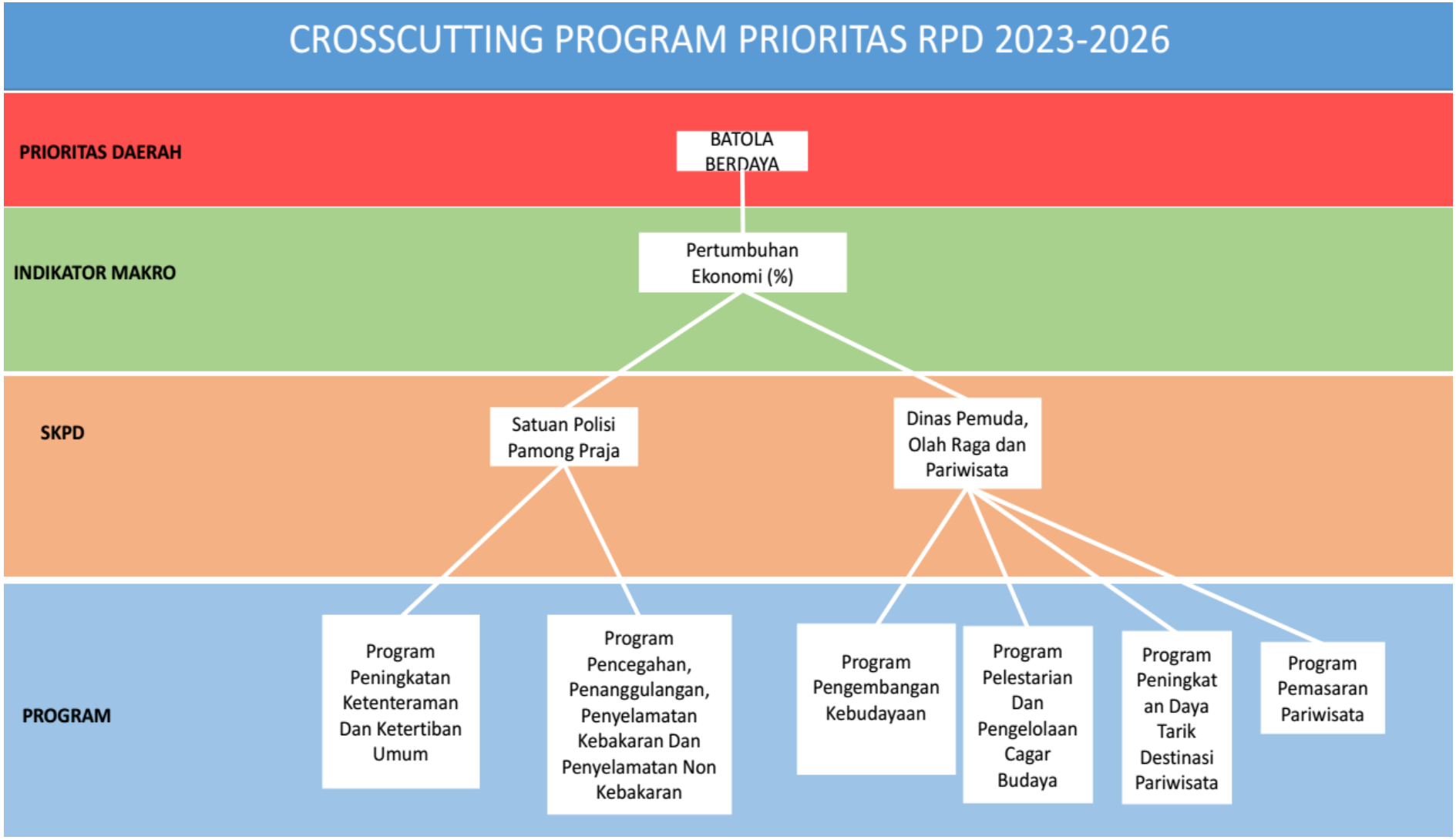
Gambar 6.1 Crosscutting Program Prioritas Batola Berdaya

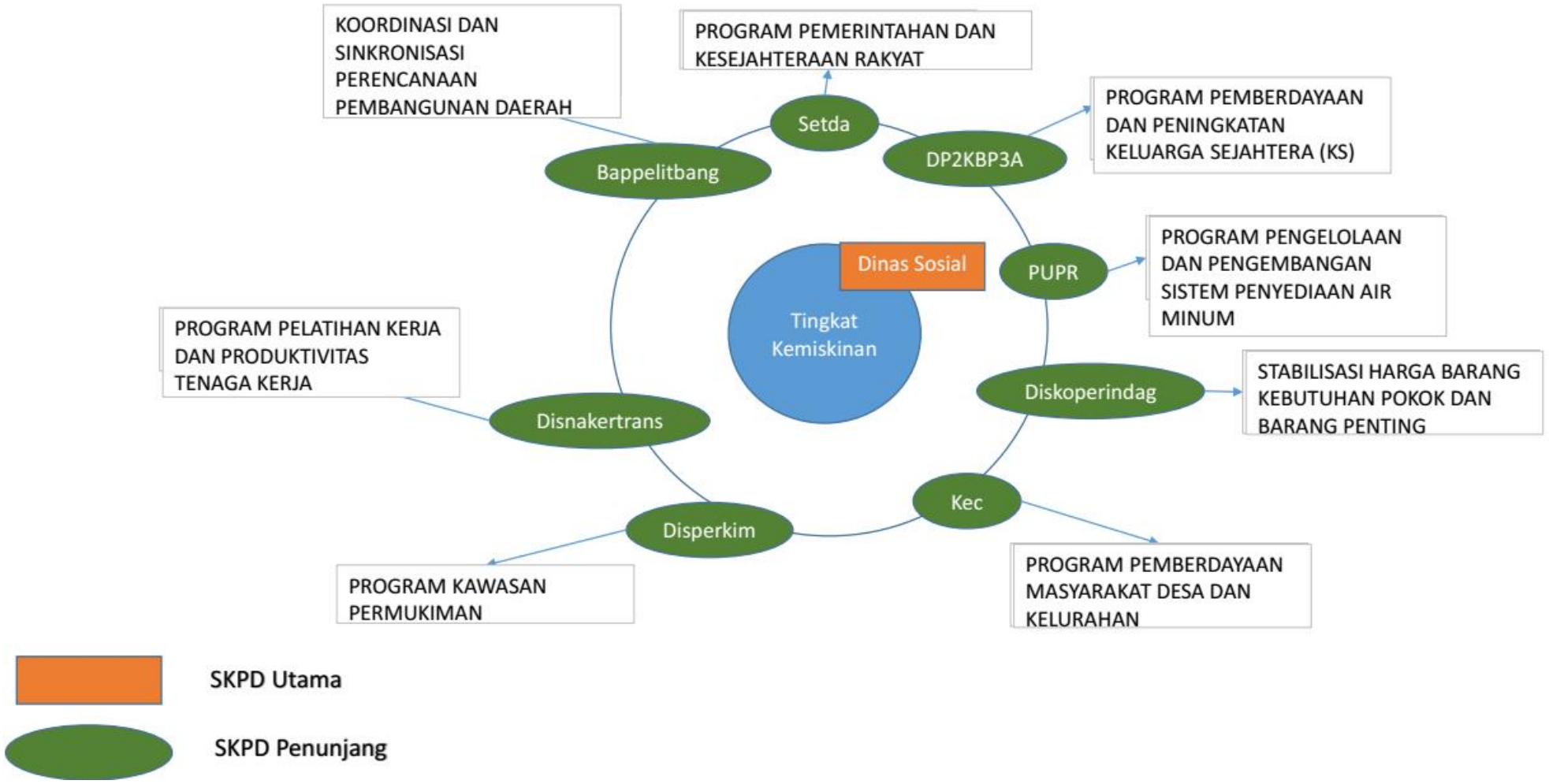


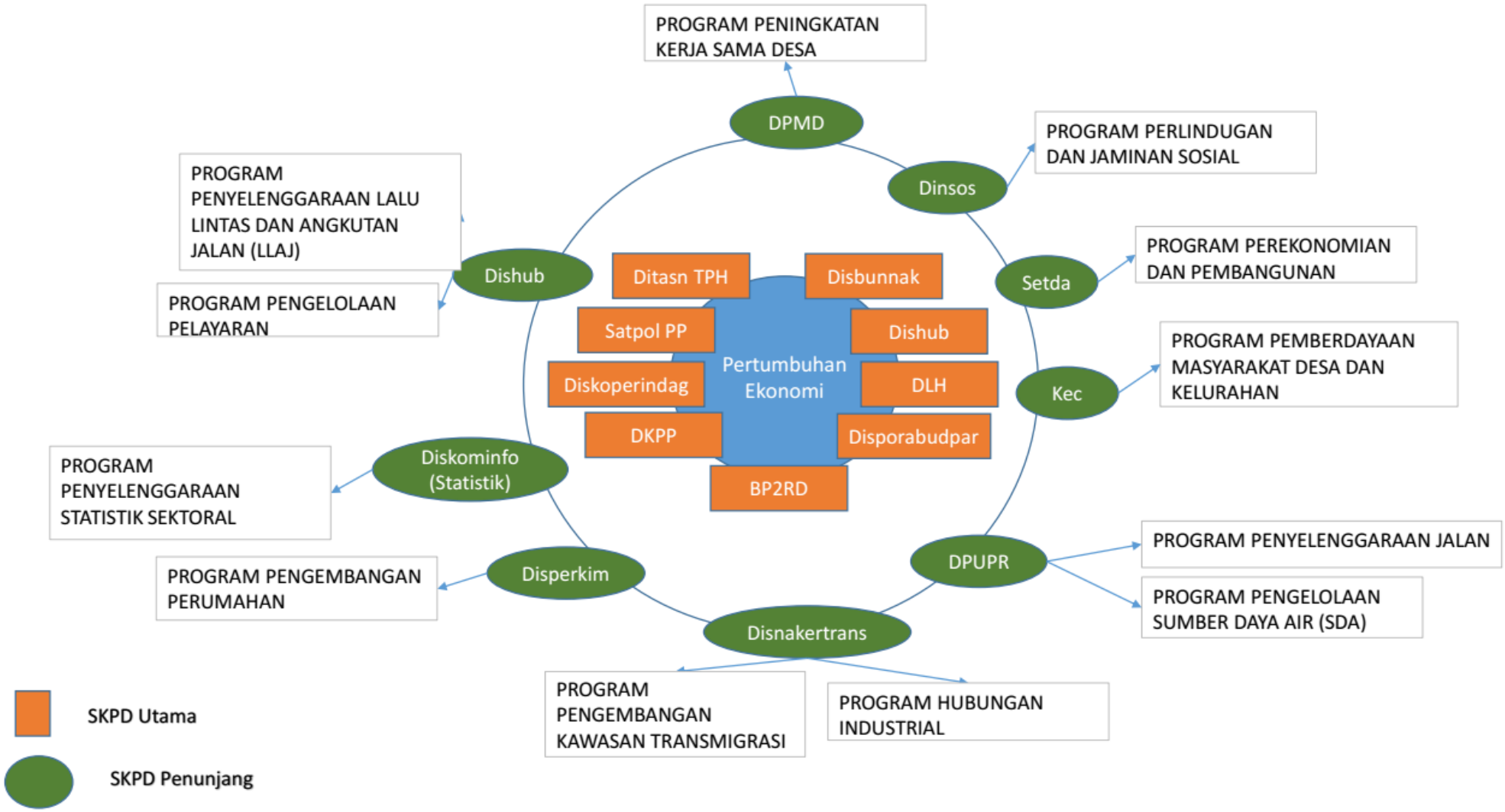

CROSSCUTTING PROGRAM PRIORITAS RPD 2023-2026
PRIORITAS DAERAH
BATOLA BERDAYA
INDIKATOR MAKRO
Pertumbuhan Ekonomi (%)
SKPD
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
Program perizinan usaha pertanian
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
Program penyuluhan pertanian
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
Program pengawasan keamanan pangan
Program pengelolaan perikanan tangkap
Program pengelolaan perikanan budidaya

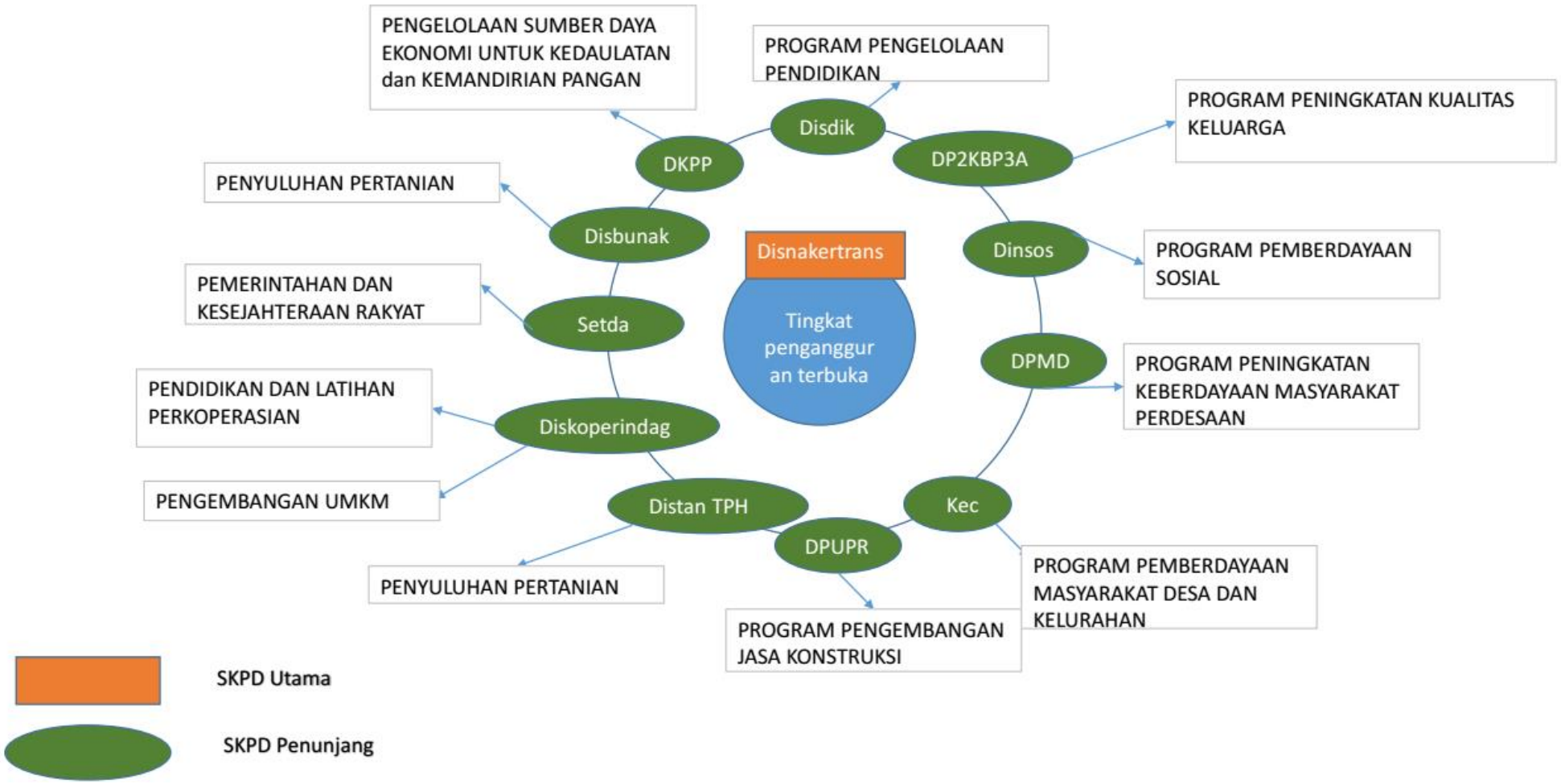

Crosscutting Program Prioritas Rpd 2023-2026
Prioritas Daerah
Batola Berdaya
Indikator Makro
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Skpd
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Dinas Perhubungan
Dinas Lingkungan Hidup
Program
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
Program Pengelolaan Pelayaran
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat


CROSSCUTTING PROGRAM PRIORITAS RPD 2023-2026
PRIORITAS DAERAH
BATOLA BERDAYA
INDIKATOR MAKRO
Pertumbuhan Ekonomi (%)
SKPD
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
Program Pengembangan Umkm
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri


CROSSCUTTING PROGRAM PRIORITAS RPD 2023-2026
PRIORITAS DAERAH
BATOLA BERDAYA
INDIKATOR MAKRO
Pertumbuhan Ekonomi (%)
SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
PROGRAM
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program Pengembangan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata


KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Setda
Bappelitbang
DP2KBP3A
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Dinas Sosial
Tingkat Kemiskinan
PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Disnakertrans
Diskoperindag
STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Kec
Disperkim
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
SKPD Utama
SKPD Penunjang


PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
DPMD
PROGRAM PERLINDUGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Dinsos
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Dishub
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Ditasn TPH
Disbunnak
Satpol PP
Dishub
Diskoperindag
DLH
DKPP
Disporabudpar
BP2RD
Pertumbuhan Ekonomi
Setda
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kec
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Diskominfo (Statistik)
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Disperkim
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Disnakertrans
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
SKPD Utama
SKPD Penunjang


PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
PENYULUHAN PERTANIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
PENGEMBANGAN UMKM
PENYULUHAN PERTANIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Disdik
DKPP
DP2KBP3A
Disbunak
Disnakertrans
Dinsos
Setda
Tingkat penganggur an terbuka
DPMD
Diskoperindag
Distan TPH
Kec
DPUPR
SKPD Utama
SKPD Penunjang

2. Batola Berkarya

Pembangunan desa dan masyarakat diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa. Sehingga masyarakat dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang diwujudkan dengan pembentukan modal untuk merangsang produksi produk daerah agar dapat menjadi desa mandiri. Kemampuan masyarakatan desa untuk memproduksi dan memasarkan hasil produknya harus didukung oleh kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan utilitas perdesaan dan perkotaan seperti fasilitas sanitasi, jalan, air bersih dan permukiman. Salah satu kegiatan untuk mendukung strategi Batola Berkarya adalah dengan dilakukan perencanaan pembangunan Jembatan Perbatasan, Pembangunan Dermaga Pelabuhan dan Dermaga-dermaga Penyeberangan dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta Pembangunan Jejangkit Ecopark untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Indikator untuk Batola Berkarya adalah Gini Rasio dengan SKPD utama adalah

i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 8 program
   - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   - Program Penataan Bangunan Gedung
   - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
   - Program Penyelenggaraan Jalan
   - Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

ii. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 5 Program
   - Program Pengembangan Perumahan
   - Program Kawasan Permukiman
   - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
   - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
   - Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Serta SKPD penunjang untuk mendukung Gini Rasio dengan programnya masing-masing diantaranya adalah:

i. Sekretariat Daerah dengan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

   Uraian pelaksanaan program ini adalah :

- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

ii. Bappelitbang dengan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Fasilitasi usulan melalui Musrenbang diakomodir merata di seluruh kecamatan (17 Kecamatan)
- Prioritas konektifitas antar wilayah (Kutabamara, Taman Sari Bunga)
- Fasilitasi Bedah Kampung Terintegrasi (BKT)

iii. Disporabudpar dengan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Uraian Pelaksanaan program ini adalah:

- Fasilitasi Desa Wisata (Pokdarwis)

iv. Dinas Kesehatan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Uraian pelaksanaan adalah

- Penanganan stunting berupa penyediaan sanitasi jamban sehat dan penyusunan dokumen EHRA.

v. Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan dengan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikanan Budidaya

Uraian pelaksanaan adalah :

- Pembangunan paket lumbung pangan masyarakat beserta sarana pendukungnya
- Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan berupa alat penangkapan ikan ramah lingkungan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)
- Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)

vi. Distan TPH dengan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Uraian pelaksanaan adalah :

- Pendampingan kegiatan palawija, rehab kebun jeruk, pengembangan sayuran dan pendampingan berupa pelaksanaan hari lapang
- kegiatan pendampingan kegiatan palawija, pembangunan UV Dryer dan pengadaan Combine Harvester
- pembinaan UPJA serta lomba UPJA dalam rangka peningkatan kelas kelompok UPJA, pelatihan untuk operator alsintan, pertemuan bagi pengelola KUB PKBM, rapat koordinasi dan sinkronisasi statistik padi

vii. Dinas Koperindag dengan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Uraian pelaksanaan adalah :

- pengelolaan pasar milik daerah

viii. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Uraian pelaksanaan program ini adalah

- Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Mandiri (KTM)

ix. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Program Administrasi Pemerintahan Desa

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

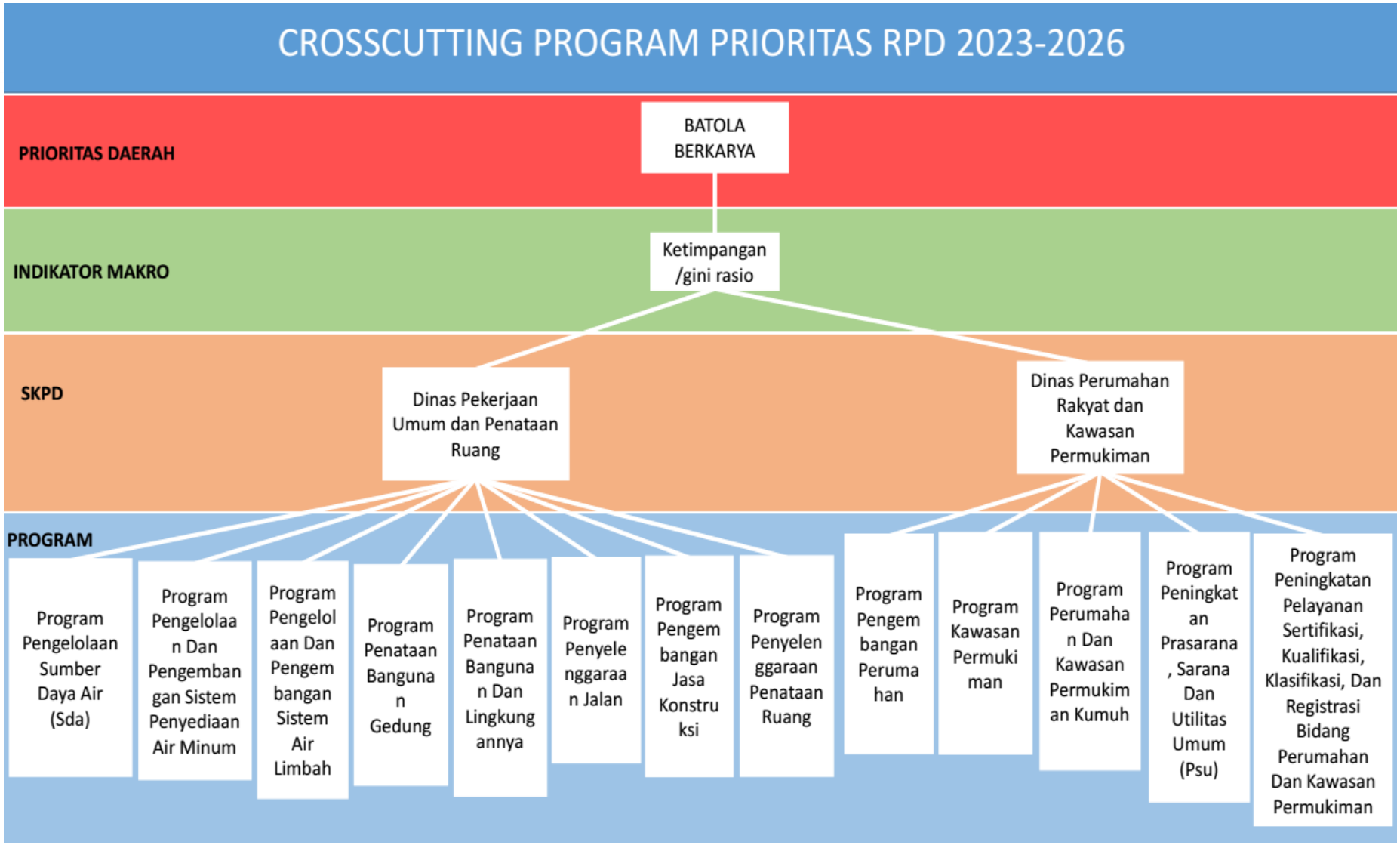
- Fasilitasi Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mendukung Bedah Kampung Terintegrasi

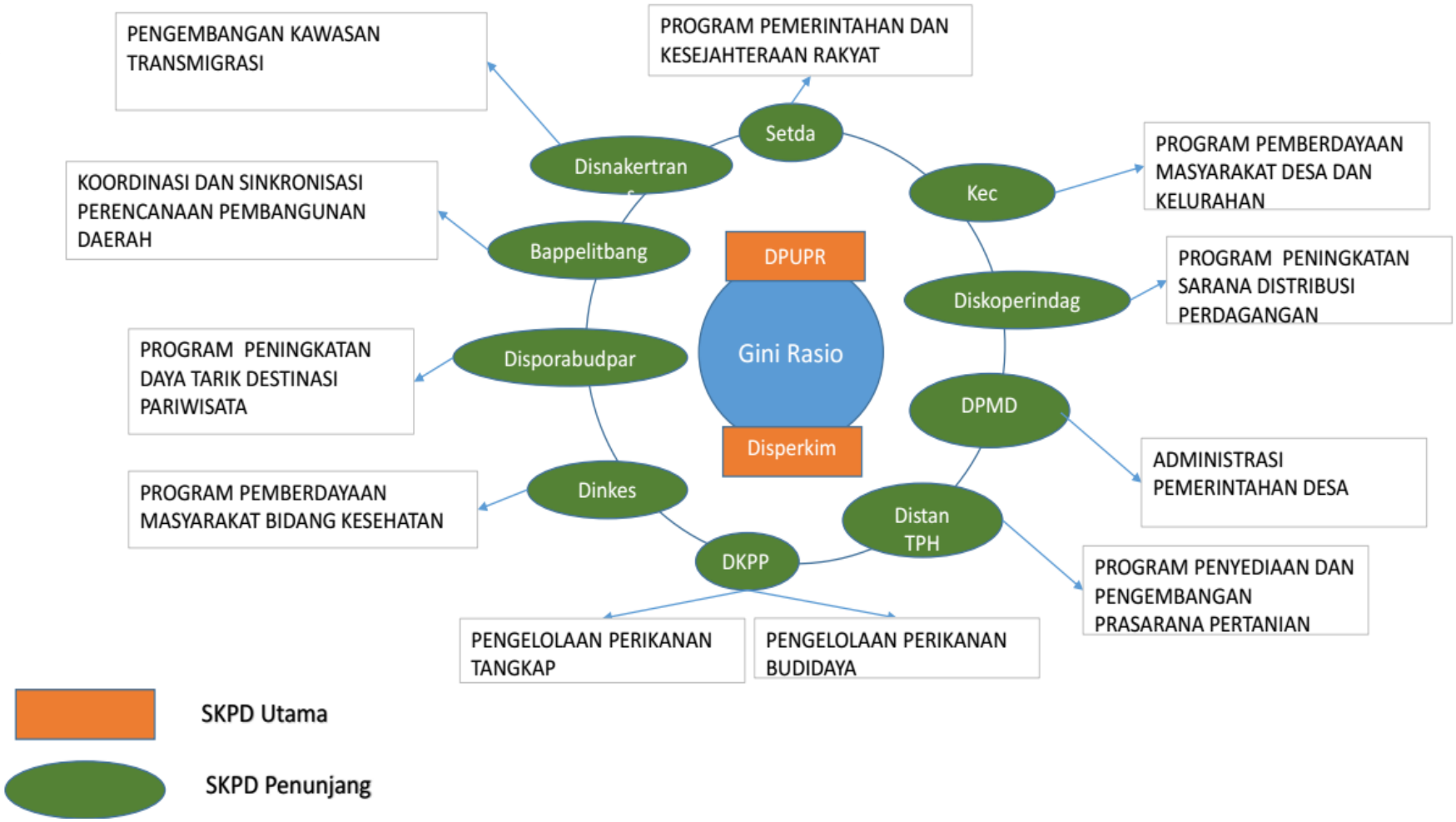
x. Serta Kecamatan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Uraian pelaksanaan adalah :

- fasilitasi pengelolaan dana desa

Gambar 6.2 Crosscutting Program Prioritas Batola Berkarya




PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Setda
Disnakertran
Kec
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bappelitbang
DPUPR
Diskoperindag
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Disporabudpar
Gini Rasio
DPMD
Disperkim
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Dinkes
Distan TPH
DKPP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
SKPD Utama
SKPD Penunjang

3. Batola Berkinerja Baik

Kabupaten Barito Kuala dalam pengelolaan keuangan daerah telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia. Capaian ini merupakan capaian tertinggi pemerintah daerah dalam akuntabilitas keuangan dan barang milik daerah tetapi nilai akuntabilitas yang dicapai masih belum optimal. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan fokus prioritas melalui pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terbuka dan melayani khususnya pada penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bebas dari KKN.

Indikator Batola Berkinerja Baik terdiri dari

a. Nilai MCP Korsubgah KPK

SKPD yang mendukung indikator ini adalah

i. Inspektorat dengan 2 program

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

ii. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 4 Program

- Program Penataan Desa
- Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Serta SKPD Penunjang untuk mendukung indikator ini dengan programnya masing-masing adalah:

i. Sekretariat Daerah dengan Program Perekonomian Dan Pembangunan dan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Uraian pelaksanaan adalah :

- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

ii. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Kepegawaian Daerah

Uraian pelaksanaan adalah :

- pelaksanaan Kegiatan Seleksi Pengadaan ASN

- penempatan ASN dan PPPK sesuai dengan kompetensi

- Pemberian TPP melalui E-Kinerja

iii. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Uraian pelaksanaan adalah :

- terkait pengelolaan aset-aset fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan (sertifikasi aset)

iv. BPKAD dengan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian pelaksanaannya adalah :

- pengelolaan keuangan daerah (KUA PPAS sampai dengan penetapan APBD)

- pengelolaan aset daerah

- laporan pertanggung jawaban keuangan daerah

- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Biaya Tak Terduga

- Penyusunan SSH dan ASB

v. BP2RD dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Uraian pelaksanaannya adalah :

- pelayanan wajib pajak dan pendataan objek pajak

- pendistribusian SPPT pajak daerah dan ketetapan retribusi

vi. Bappelitbang dengan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Uraian pelaksanaannya adalah :

- proses penyusunan RKPD dan P-RKPD (perbaikan dokumen RKPD terkait hasil fasilitasi provinsi dan review inspektorat)

vii. DPMPTSP dengan Program Pelayanan Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Uraian pelaksanaannya adalah :

- proses penerbitan perizinan

- Mall Pelayanan Publik

b. Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten

SKPD yang mendukung indikator Nilai Reformasi Birokrasi adalah

i. Sekretariat Daerah dengan 2 Program
   - Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
   - Program Perekonomian Dan Pembangunan

ii. Bappelitbang dengan 3 Program
   - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerahan Pembangunan
   - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

iii. BPKAD dengan 2 Program
   - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

iv. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 4 Program
   - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
   - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

v. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 program
   - Program Pendaftaran Penduduk
   - Program Pencatatan Sipil
   - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   - Program Pengelolaan Profil Kependudukan

vi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 5 Program
   - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
   - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
   - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
   - Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

vii. Sekretariat DPRD dengan 1 Program
   - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

viii. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan 1 Program

- Program Kepegawaian Daerah

ix. DPMPTSP dengan 5 program

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

x. BPBD dengan 1 program

- Program Penanggulangan Bencana

xi. 17 Kecamatan dengan 4 program tiap kecamatan.

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Serta didukung oleh SKPD penunjang pelaksanaan peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi dengan program SKPD masing-masing diantaranya

i. Dinas Pendidikan dengan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Sertifikasi guru
- Diklat Calon Kepala Sekolah (Cakep)
- Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)
- Data-data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- Penilain jabatan fungsional guru
- Penghargaan sekolah Adiwiyata (Sekolah Sehat)
- Sekolah Ramah Anak untuk mendukung Kab/Kota Layak Anak

ii. Dinas Kesehatan dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Akreditasi fasilitas Kesehatan

- Pengembangan mutu SDM Kesehatan
- Pelaksanaan hari-hari besar kesehatan

iii. Satpol PP dengan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Pencegahan dan penanganan kebakaran

iv. DPPKBP3A dengan Program Pengendalian Penduduk

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Pemanfaatan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

v. Dinas PMD dengan Program Administrasi Pemerintahan Desa

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Pembinaan administrasi desa dan aparatur desa

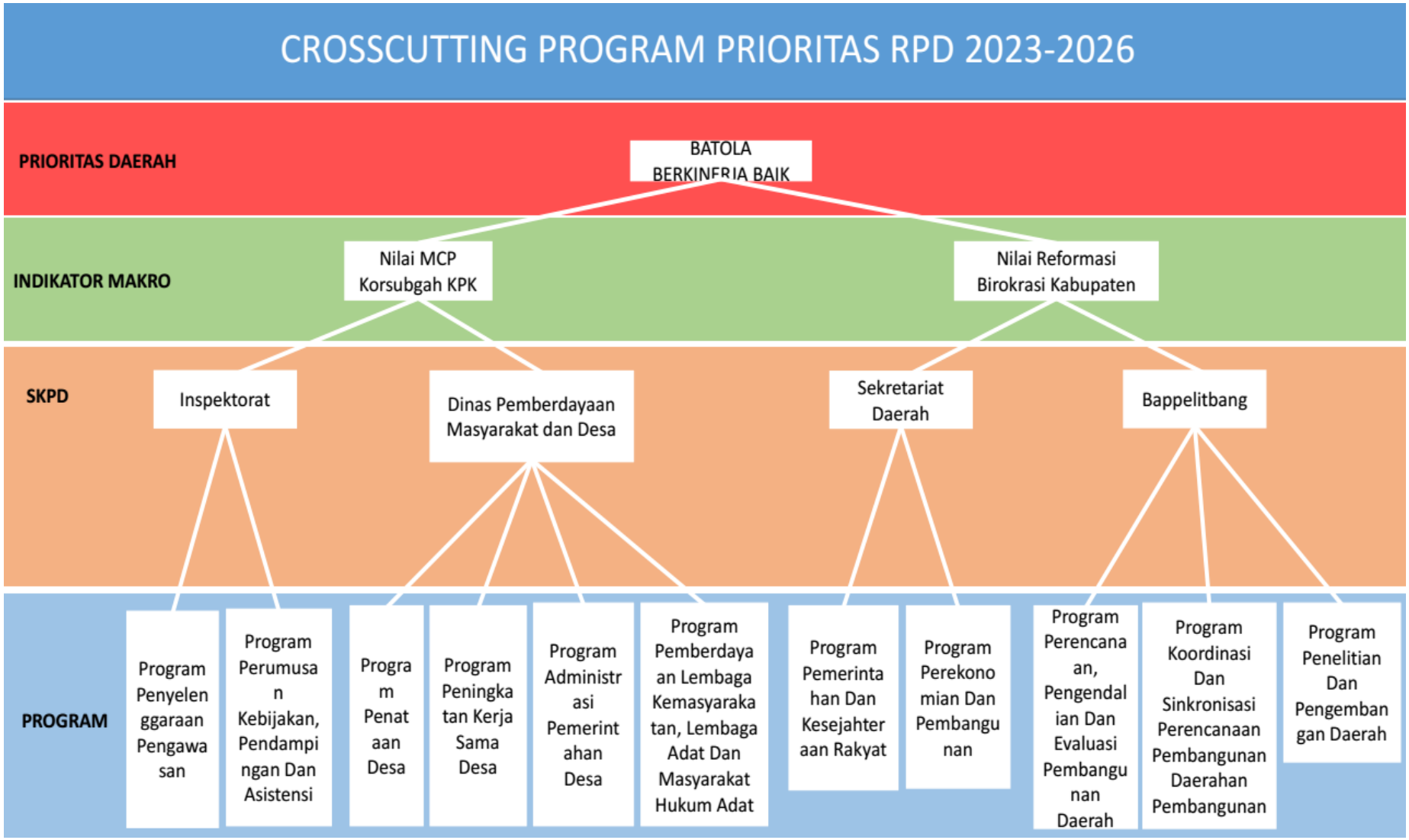
vi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, Program Perizinan Penggunaan Arsip Dan Program Pengelolaan Arsip

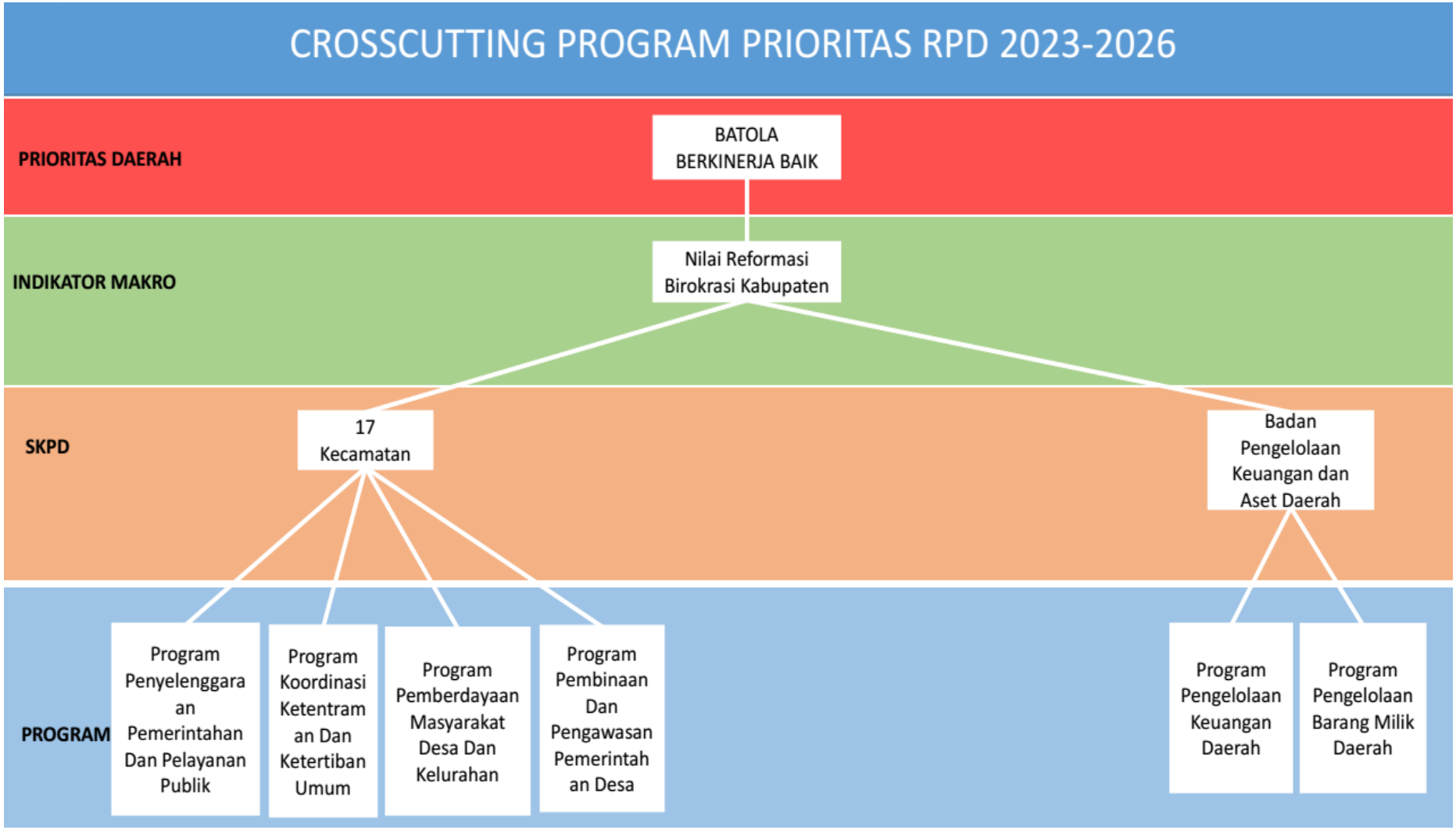
Uraian pelaksanaan program ini adalah:

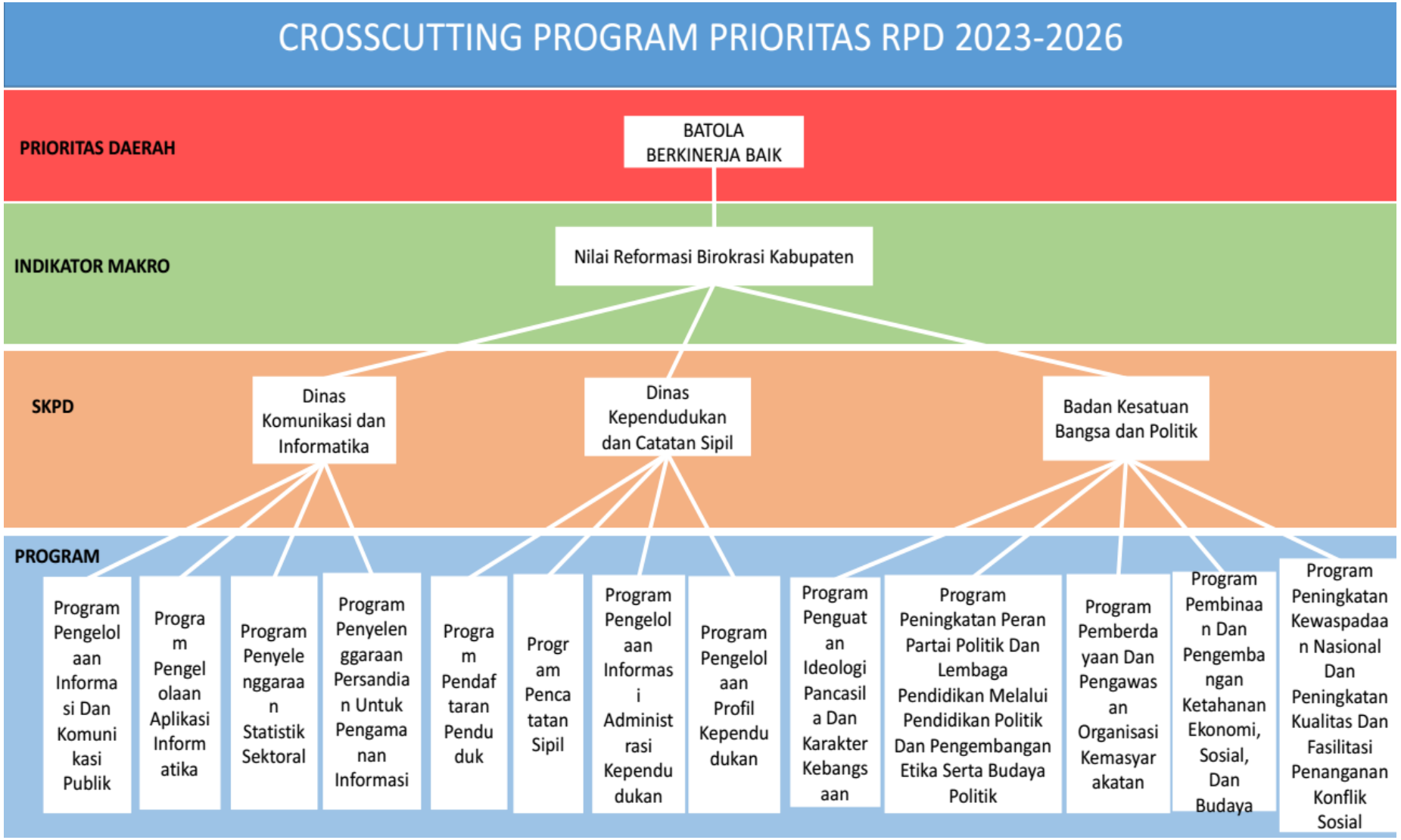
- Pengelolaan arsip statis dan arsip dinamis

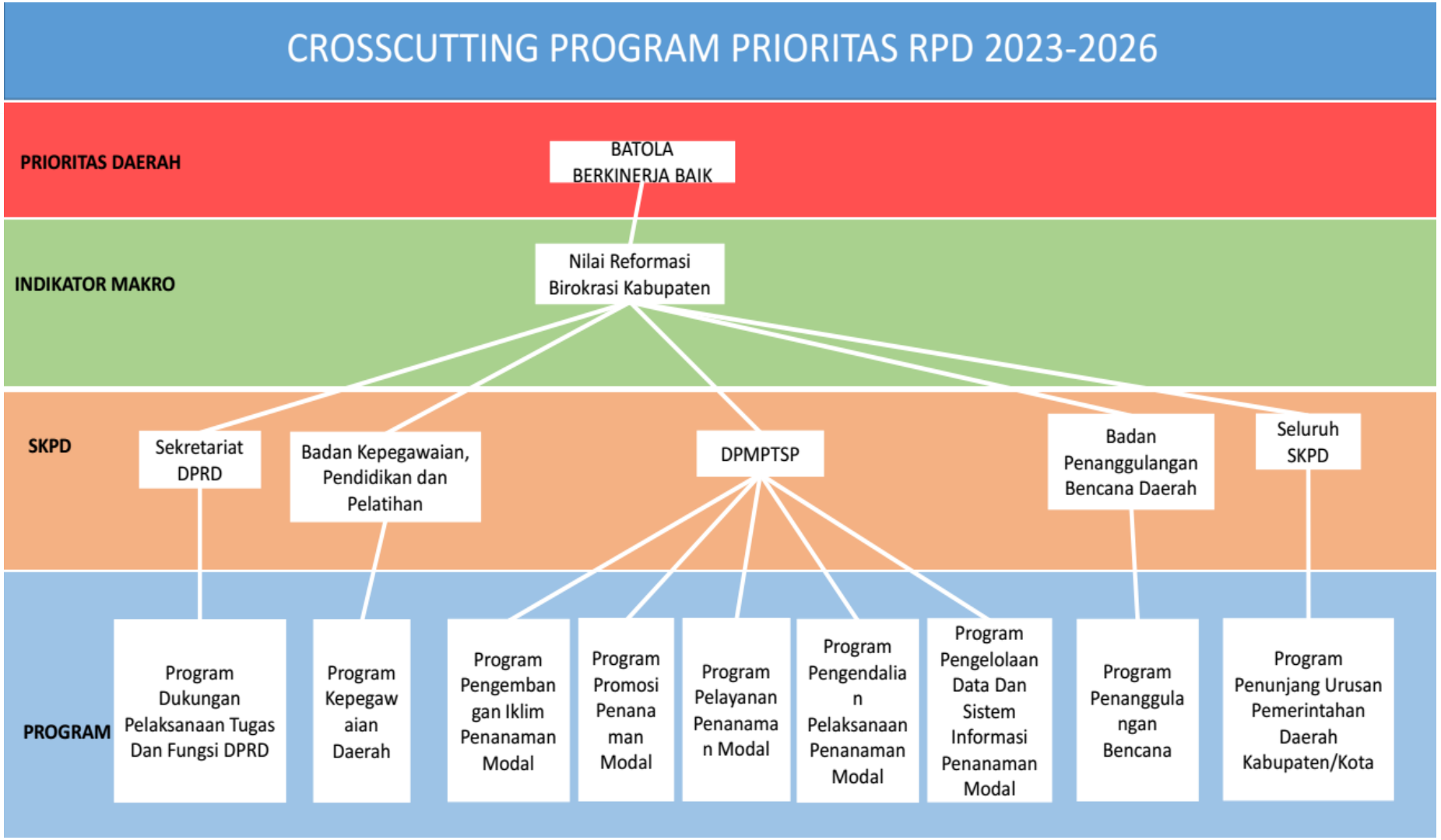
vii. Serta seluruh SKPD dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

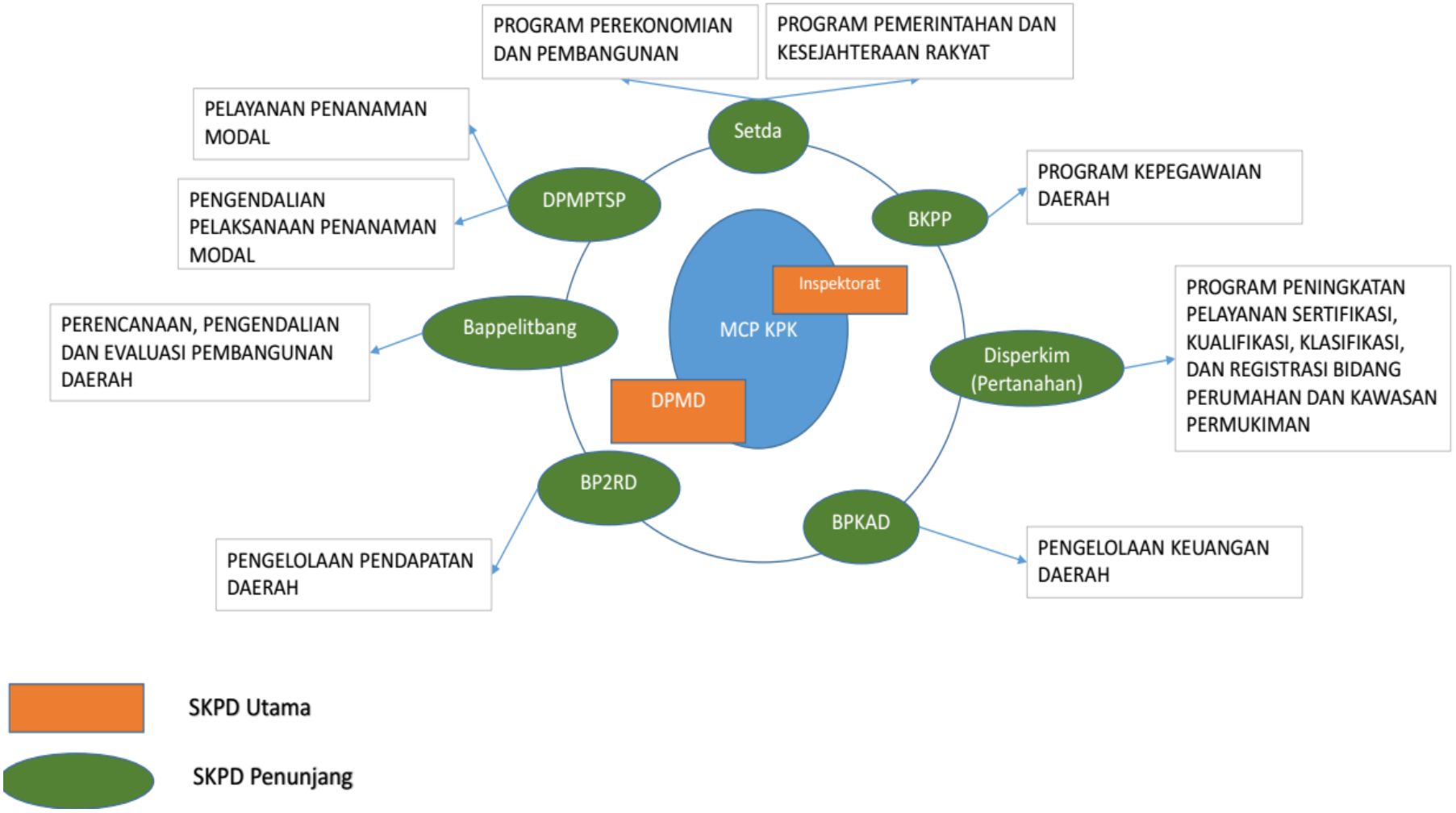
Gambar 6.3 Crosscutting Program Prioritas Batola Berkinerja Baik

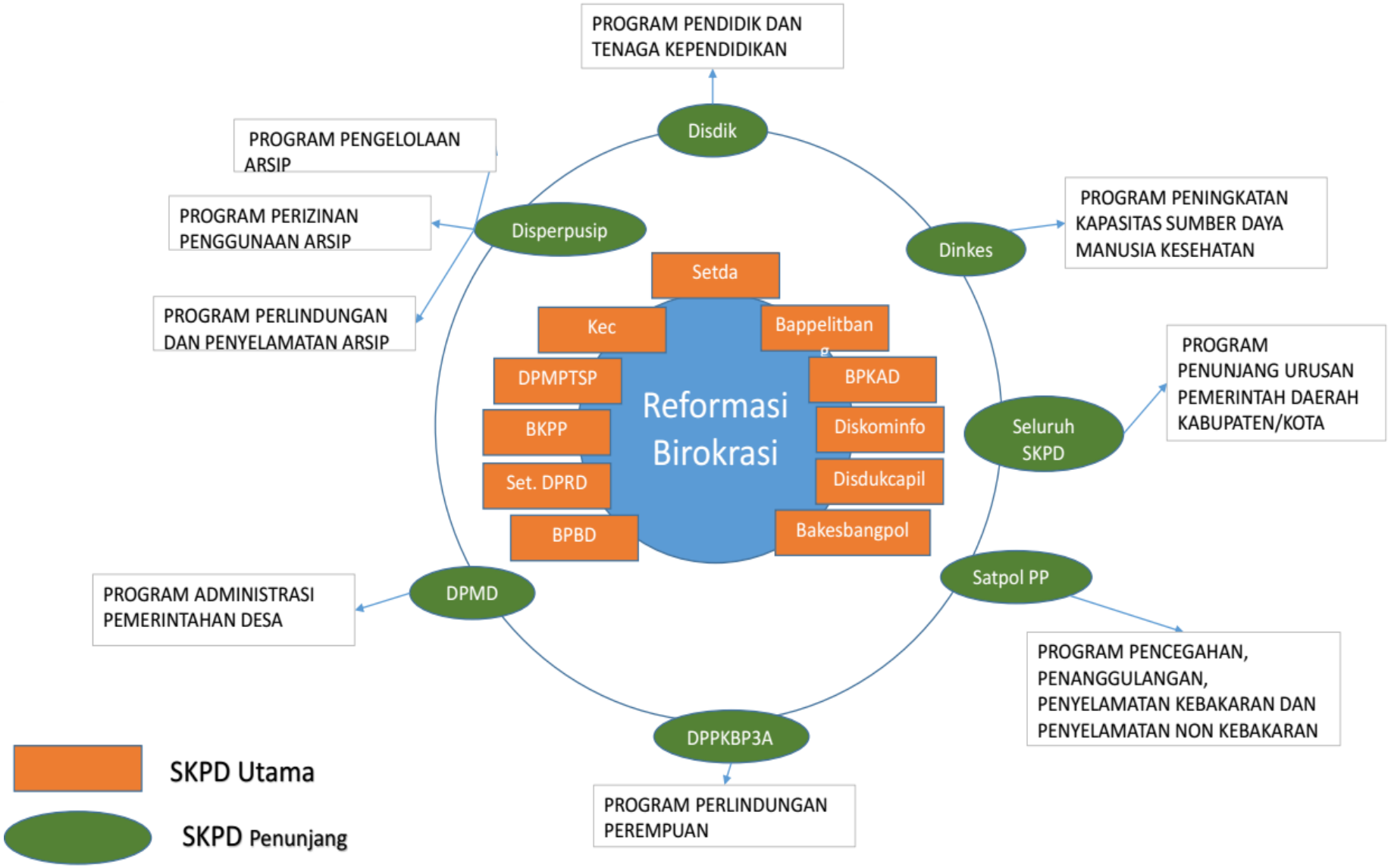



CROSSCUTTING PROGRAM PRIORITAS RPD 2023-2026
PRIORITAS DAERAH
BATOLA BERKINERJA BAIK
INDIKATOR MAKRO
Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten
SKPD
17 Kecamatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah


CROSSCUTTING PROGRAM PRIORITAS RPD 2023-2026
PRIORITAS DAERAH
BATOLA BERKINERJA BAIK
INDIKATOR MAKRO
Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten
SKPD
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Program Pendaftaran Penduduk
Program Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial


CROSSCUTTING PROGRAM PRIORITAS RPD 2023-2026
PRIORITAS DAERAH
BATOLA BERKINERJA BAIK
INDIKATOR MAKRO
Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten
SKPD
Sekretariat DPRD
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
DPMPTSP
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Seluruh SKPD
PROGRAM
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
Program Kepegawaian Daerah
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program Penanggulangan Bencana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Setda
PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DPMPTSP
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
BKPP
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Inspektorat
MCP KPK
DPMD
Bappelitbang
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Disperkim (Pertanahan)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BP2RD
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
BPKAD
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SKPD Utama
SKPD Penunjang


PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Disdik
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Disperpusip
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Dinkes
Setda
Kec
Bappelitbang
DPMPTSP
BPKAD
BKPP
Diskominfo
Set. DPRD
Disdukcapil
BPBD
Bakesbangpol
Reformasi Birokrasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Seluruh SKPD
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DPMD
Satpol PP
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
DPPKBP3A
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
SKPD Utama
SKPD Penunjang

4. Batola Cerdas, Sehat dan Berprestasi

Batola cerdas dan sehat merupakan esensi dari pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dan kesehatan. Fokus pelaksanaan kegiatan Batola cerdas dan sehat adalah peningkatan akses dan kualitas masyarakat melalui sarana dan prasaran, baik sarana prasarana pendidikan ataupun sarana prasara kesehatan sehingga dapat menciptakan peningkatan pada Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) contohnya kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Batola Cerdas dan Sehat adalah Permata Bunda dan Bulin Tertawa.

Dengan kualitas SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan daya saing, kemandirian wilayah juga mendukung pembangunan nasional. Fokus prioritas Batola Berprestasi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan formal dan non formal yang berkenaan dengan kualitas dan produktifitas masyarakat, salah satu bentuk kegiatan untuk mencapai Batola cerdas, sehat dan berprestasi adalah dengan dilaksanakannya pembangunan RSUD Setara di Kecamatan Alalak.

Indikator Batola Cerdas, Sehat dan Berprestasi adalah Indeks Pembangunan Manusia dengan SKPD yang mendukung Indikator tersebut adalah :

i. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan 2 Program
   - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

ii. Dinas Pendidikan dengan 4 program
   - Program Pengelolaan Pendidikan
   - Program Pengembangan Kurikulum
   - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
   - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

iii. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 4 program
   - Program Pembinaan Perpustakaan
   - Program Pengelolaan Arsip
   - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
   - Program Perizinan Penggunaan Arsip

iv. DPPKBP3A dengan 5 program
   - Program Pengendalian Penduduk
   - Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga

v. Dinas Kesehatan dengan 4 Program

- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Serta untuk mendukung indikator Batola Cerdas, Sehat dan Berprestasi beberapa SKPD menjadi penunjang dalam mendukung indikator tersebut dengan programnya masing-masing diantaranya:

i. Dinas PMD dengan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Uraian pelaksanaan program ini adalah

- Fasilitasi dan pembinaan, penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa berupa karang taruna, LPM, PKK, dan Posyandu

ii. Badan Kesbangpol dengan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Pembinaan untuk ketahan social, ekonomi dan budaya berupa pencegahan narkotika dan fasilitasi kerukunan umat beragama

iii. Dinas LH dengan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi dunia usaha, Lembaga masyarakat dan dunia Pendidikan (Sekolah Adiwiyata)

iv. Bappelitbang dengan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Pembinaan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

v. Distan TPH dengan Program Penyuluhan Pertanian

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Sekolah Lapang bagi kelompok pertanian (Poktan dan Gapoktan)

vi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Program Penyuluhan Pertanian

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Penyuluhan bagi kelompok peternakan dan kelompok pertanian (perkebunan)

vii. Dinas Koperindag dengan Program Pemberdayaan UMKM, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi serta Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

- Pembinaan Pelaku Usaha UMKM
- Pembinaan pengelolaan koperasi
- Pengawasan dan pemeriksaan koperasi aktif

viii. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikanan Budidaya

Uraian pelaksanaan program ini adalah:

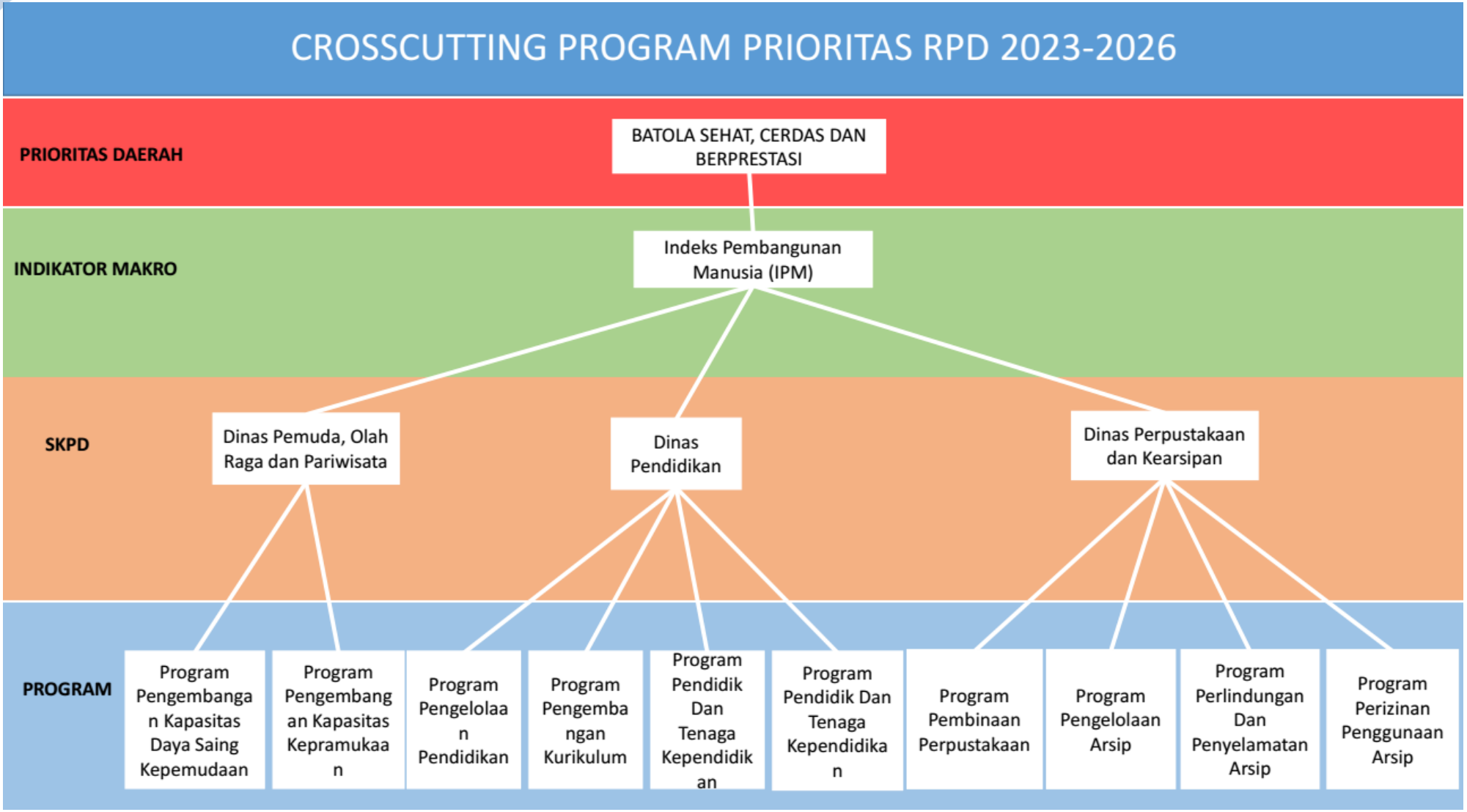
- Penyuluhan bagi kelompok budidaya perikanan

ix. Serta Kecamatan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

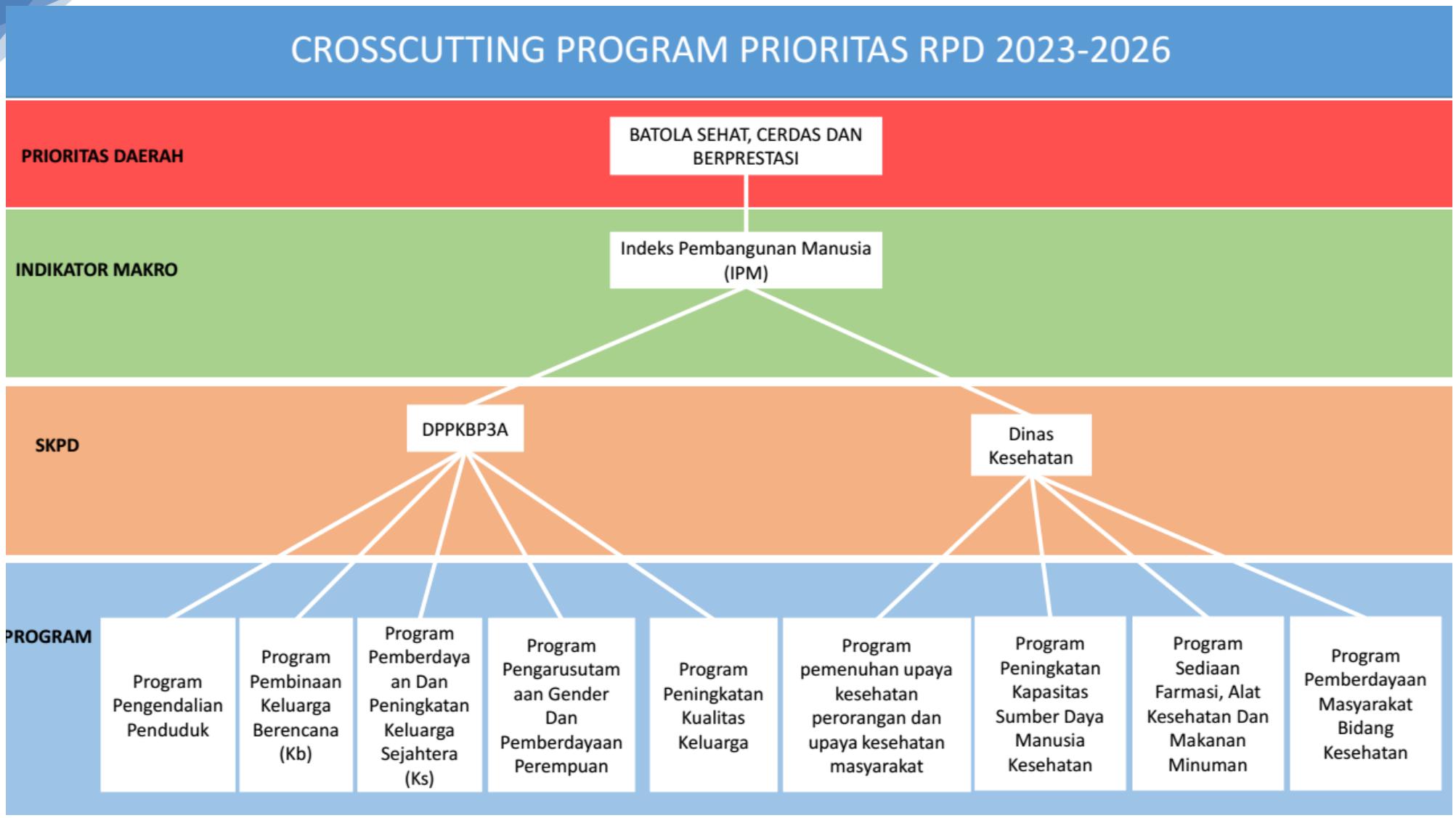
Uraian pelaksanaan program ini adalah:

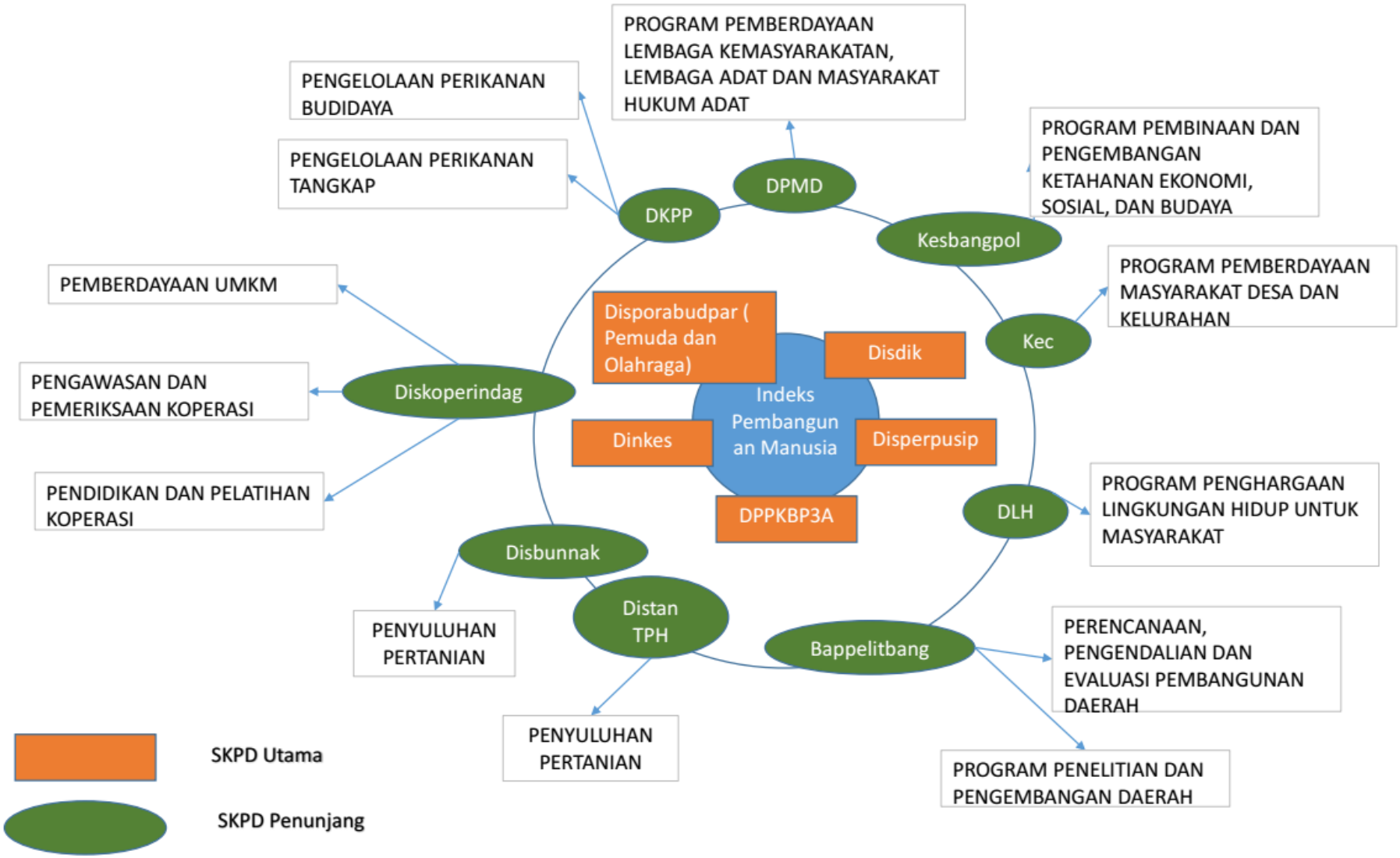
- Fasilitasi dana desa untuk pengelolaan posyandu dan PAUD
- Pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan kapasitas Aparat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Gambar 6.4 Crosscutting Program Prioritas Batola Sehat, Cerdan dan Berprestasi



CROSSCUTTING PROGRAM PRIORITAS RPD 2023-2026




PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
DPMD
DKPP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Kesbangpol
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kec
PEMBERDAYAAN UMKM
Disporabudpar (Pemuda dan Olahraga)
Disdik
Indeks Pembangunan Manusia
Dinkes
Disperpusip
DPPKBP3A
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Diskoperindag
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI
DLH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Disbunnak
Distan TPH
Bappelitbang
PENYULUHAN PERTANIAN
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
PENYULUHAN PERTANIAN
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
SKPD Utama
SKPD Penunjang

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu priode RPJMD, perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap misi, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2023-2026 adalah Meningkatkan Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Publik dan dijabarkan dalam 4 tema yaitu



Tabel dibawah ini menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Barito Kuala

VISI : TERWUJUDNYA BARITO KUALA YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRI BISNIS		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
MISI 1: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan Mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan		
1. Meningkatkan aktivitas ekonomi	1.1 Meningkatnya kesempatan kerja	Peningkatan ketersediaan sarpras pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi

masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah		Pengembangan pelatihan keterampilan dan wirausahaserta peningkatan fasiliras kesempatan kerja
	1.2 Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan Jamsostek dan UMP	
	1.3 Meningkatnya Sarpras ketransmigrasian	Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan transmigrasi
	1.4 Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan Layanan SLRT dan Poskessos
		Verivali Data DTKS
		Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial
		Peningkatan kelembagaan
		Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial
	1.5 Tersedianya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama	Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
		Pengembangan dan penyediaan benih padi unggul bersertifikat
		Pengembangan dan penyediaan bibit jeruk bersertifikat
		Pengembangan dan penyediaan benih padi lokal bersertifikat
		Peningkatan luas tambah tanam melalui intensifikasi pertanian, pengelolaan lahan dan air
		Peningkatan luas panen tanaman pangan dan hortikultura melalui pengamanan produksi
		Pengembangan dan pembentukan korporasi petani
		Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian
		Updating luas baku lahan sawah
		Optimalisasi penyusunan Perda LP2B beserta data spasialnya
		Antisipasi dan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
		Penanggulangan bencana pertanian
		Antisipasi dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DPI)
		Memperkuat akses pasar dan permodalan bagi petani dan lembaga petani
	1.6 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Perizinan Usaha Pertanian
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (perkebunan)
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (peternakan)

	1.7 Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (peternakan)
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	1.8 Meningkatnya Usaha Produk Olahan Perkebunan dan Peternakan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (perkebunan)
		Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)
		Penyuluh Pertanian (Peternakan)
	1.9 Meningkatnya kemandirian dan diversifikasi pangan	Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
		Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
		Meningkatkan diverifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Meningkatkan pengawasan keamananan pangan
	1.10 Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap
		Meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya
	1.11 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	1.12 Meningkatnya pelayanan transportasi	Meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dan penanganan moda transportasi massal
	1.13 Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Pengendalian pencemaran air dan udara ambien
		Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatkan sinergitas antar SPKD, Dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat , dalam pengelolaan lingkungan
		optimalisasi fungsi lahan
		Meningkatkan pengelolaan persampahan
		Meningkatkan pemanfaatan limbah untuk energy terbarukan
		Meningkatkan kualitas dokumen lingkungan
		Meningkatkan Jumlah desa dan kota agar memenuhi kriteria kota sehat, nyaman dan berkelanjutan
		Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air
		Meningkatkan Pengendalian dampak perubahan iklim
		Meningkatkan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

	1.14 Meningkatnya Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Penguatan kapasitas usaha mikro menjadi usaha kecil
	1.15 Meningkatnya Koperasi yang aktif	Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi
	1.16 Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Penguatan kapasitas industri kecil dan menengah
	1.17 Menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang	Pengembangan sarana distribusi perdagangan
	1.18 Meningkatnya Keamanan dan ketertiban mendukung kegiatan ekonomi	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	1.19 Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Pembinaan lembaga, seni dan pelestarian budaya lokal
	1.20 Meningkatnya pemasaran destinasi pariwisata	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepariwisataan
MISI 2 : Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan		
2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta penanggulangan bencana	2.1 Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas	Peningkatan kualitas infastruktur dasar perdesaan dan perkotaan
	2.2 Meningkatnya Hunian dan Lingkungan yang layak huni	Menurunkan Backlog
		Menurunkan kawasan permukiman kumuh
		Meningkatkan prasarana sarana dan utilitas umum
		Meningkatkan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
MISI 3 : Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.		
3. Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas	3.1 Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Melakukan identifikasi penerapan SPIP di SKPD
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas APIP serta srpras pendukung pengawasan
	3.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan jumlah desa dengan administrasi yang baik
		Peningkatan Jumlah Desa dengan administrasi yang baik
		Peningkatan Jumlah Desa Mandiri
	3.3 Memantapkan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan realisasi kebijakan daerah pada pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

		Meningkatkan realisasi kebijakan daerah pada pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan
		Meningkatkan realisasi kebijakan daerah pada pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
	3.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatkan kualitas perencanaan dalam mendukung akuntabilitas kinerja
	3.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan admistrasi desa
	3.6 Terwujudnya pengelolaan Keuangan dan BMD yang profesional transparan dan akuntabel	Peningkatan tata kelola keuangan dan BMD
	3.7 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Meningkatkan perencanaan strategis dan sarpras yang mendukung penyelenggaraan SPBE
		Meningkatkan penyelenggaraan Forum Satu Data
		Meningkatkan pengamanan siber dan persandian
		Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik
	3.8 Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil	Meningkatkan pemenuhan layanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil
	3.9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik terkait pelayanan kesbangpol	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan politik dalam rangka mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
	3.10 Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPRD	Penyusunan sistem dan prosedur pelayanan sekretariat, sarana dan prasarana serta prosedur pelayanan kepada Dewan
		Peningkatkan koordinasi dengan Anggota DPRD dalam rangka terciptanya suasana yang harmonis baik terhadap Sekretariat DPRD, dengan lembaga eksekutif maupun pihak lain yang terkait
		Memfasilitasi kegiatan sesuai program kerja DPRD
	3.11 Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Menyempurnakan dan memperbaiki standar pelayanan dan mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi

	3.12 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Penyusunan rencana diklat berdasarkan formasi dan AKD, Penegakan Disiplin Aparatur
		Penyusunan Kebutuhan pegawai berdasarkan Anjab dan ABK
	3.13 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik terkait pelayanan DPMPTSP	Meningkatkan pelayanan perizinan secara online yang didukung data peluang investasi yang akurat serta promosi yang efektif
	3.14 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan
	3.15 Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kualitas Penanggulangan Bencana melalui ketersediaan Logistik dan Sarpras penanggulangan Bencana yang memadai dan SDM yang cukup
MISI 4 : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ		
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	4.1 Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan, Olahraga serta Kepramukaan	Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan
	4.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
	4.3 Meningkatnya literasi	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan
	4.4 Meningkatnya pemanfaatn arsip Daerah	Meningkatkan layanan kearsipan
	4.5 MeningkatnyaUpaya Pengendalian Penduduk	Peningkatan pasangan usia subur yang ber KB
	4.6 Meningkatnya kesetaraan gender	Peningkatan pemberdayaan perempuan
	4.7 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak
	4.8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit
		Meningkatkan Mutu pelayanan fasilitas Kesehatan
		Meningkatkan kesehatan masyarakat
		Meningkatkan Sumber daya kesehatan

Tabel 6. 2
Tujuan Strategi dan Arah Kebiajakan Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala

ARAH KEBIJAKAN			
TAHUN 2023	**TAHUN 2024**	**TAHUN 2025**	**TAHUN 2026**
Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah (BATOLA BERDAYA)			
Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta penanggulangan bencana (BATOLA BERKARYA)			
Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas (BATOLA BERKINERJA BAIK)			
Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (BATOLA SEHAT, CERDAS DAN BERPRESTASI)			

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Adapun program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut.

Tabel 6. 3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Barito Kuala

TUJUAN/SASARAN/PROG	INDIKATOR	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	SKPD
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
MISI 1. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan Mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan														
Tujuan 1: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah						**39.997.023.171**		**34.953.049.111**		**40.075.894.804**		**38.619.020.198**		
	a. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)		**Tingkat**			**3.021.750.000**		**3.021.750.000**		**3.021.750.000**		**3.021.750.000**		
Sasaran 1.1 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	(Jumlah Angkatan Kerja terlatih yang memperoleh Kesempatan Kerja/Jumlah Angkatan Kerja yang dilatih)x100%	Persen	100	100		100		100		100		100	

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	(Jumlah Angkatan Kerja terlatih yang memperoleh Kesempatan Kerja/Jumlah Angkatan Kerja yang dilatih)x100%	Persen	100	100 Persen	1.753.000.000	100 Persen	1.753.000.000	100 Persen	1.753.000.000	100 Persen	1.753.000.000	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	(Jumlah Angkatan Kerja terlatih yang memperoleh Kesempatan Kerja/Jumlah Angkatan Kerja yang dilatih)x100%	Persen	100	100 Persen	732.000.000	100 Persen	732.000.000	100 Persen	732.000.000	100 Persen	732.000.000	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2. Persentase Perusahaan yang menerapkan Jamsostek & UMP	(Jumlah Perusahaan yang mengikuti Jamsostek dalam 1 Tahun/Jumlah perusahaan yang mengikuti Jamsostek dalam 5 Tahun)x100%	Persen	100	100		100		100		100		100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Jamsostek & UMP	(Jumlah Perusahaan yang mengikuti Jamsostek dalam 1 Tahun/Jumlah perusahaan yang mengikuti Jamsostek dalam 5 Tahun)x100%	Persen	100	100 Persen	243.750.000	100 Persen	243.750.000	100 Persen	243.750.000	100 Persen	243.750.000	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3. Persentase Sapras di Kawasan Transmigrasi yang dibangun	(Jumlah Sarpras dibangun dalam 1 tahun/Jumlah Sarparas dibangun dalam 5 tahun)x100%	Persen	100	100		100		100		100		100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	persentase sapras yang dibangun dkawasan transmigrasi	(Jumlah Sarpras dibangun dalam 1 tahun/Jumlah Sarparas dibangun dalam 5 tahun)x100%	Persen	100	100 Persen	293.000.000	100 Persen	293.000.000	100 Persen	293.000.000	100 Persen	293.000.000	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	b. Tingkat Kemiskinan		**Tingkat**			2.941.490.611		1.441.490.611		2.941.490.611		1.441.490.611		
Sasaran 1.2 Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat	**Persentase Data Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang Mandiri**	**(Jumlah PPKS yang Mandiri/Jumlah PPKS yang terdata)x 100%**	**%**	**2,10 %**	**2,72%**		**3,34%**		**3,96 %**		**4,58 %**		**4,58 %**	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha				100 Persen	180.000.270	100 Persen	180.000.270	100 Persen	180.000.270	100 Persen	180.000.270	100 Persen	Dinas Sosial
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat				100 Persen	494.999.728	100 Persen	494.999.728	100 Persen	494.999.728	100 Persen	494.999.728	100 Persen	Dinas Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga penerima manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				100 Persen	618.999.860	100 Persen	618.999.860	100 Persen	618.999.860	100 Persen	618.999.860	100 Persen	Dinas Sosial
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				100 Persen	1.647.490.753	100 Persen	147.490.753	100 Persen	1.647.490.753	100 Persen	147.490.753	67,8 Persen	Dinas Sosial
	c. Laju Pertumbuhan Ekonomi		**Persen**			34.033.782.560		30.489.808.500		34.112.654.193		34.155.779.587		

Sasaran 1.3 Tersedianya Produksi Tanaman pangan dan hortikultura utama				Padi 36,50 Jagung 53,24 Kacang Tanah 10,46 Porang 20,62 Jeruk 145,29 Nenas 1.173 Kueni 17,01 C. Rawit 12,02 C. besar 11,36 B. Merah 153,56	Padi 36,50 Jagung 53,58 Kacang Tanah 10,48 Porang 20,62 Jeruk 146,01 Nenas 1.179 Kueni 17,09 C. Rawit 13,74 C. besar 14,24 B. Merah 212,17		Padi 36,53 Jagung 53,69 Kacang Tanah 10,50 Porang 20,62 Jeruk 146,74 Nenas 1.185,78 Kueni 17,18 C. Rawit 13,88 C. besar 14,38 B. Merah 214,29		Padi 36,53 Jagung 53,80 Kacang Tanah 10,52 Porang 20,62 Jeruk 147,48 Nenas 1.191,71 Kueni 17,26 C. Rawit 14,02 C. besar 14,52 B. Merah 216,43		Padi 36,53 Jagung 53,80 Kacang Tanah 10,52 Porang 20,62 Jeruk 148,21 Nenas 1.197,67 Kueni 17,35 C. Rawit 14,16 C. besar 14,67 B. Merah 218,59		Padi 36,53 Jagung 53,80 Kacang Tanah 10,52 Porang 20,62 Jeruk 148,21 Nenas 1.197,67 Kueni 17,35 C. Rawit 14,16 C. besar 14,67 B. Merah 218,59	
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas PanenTanaman Pangan dan Hortikultura Utama (padi, jagung, Kacang Tanah, Cabai rawit, Cabai Besar dan Bawang Merah) (Ha)		Ha	109642	109937 Ha	308.258.615	110484 Ha	308.258.615	111032 Ha	308.258.615	111583 Ha	308.258.615	111583 Ha	Distan TPH

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama (Ku/Ha)		Ku/Ha	Padi 36,50 Jagung 53,24 Kacang Tanah 10,46 Porang 20,62 Jeruk 145,29 Nenas 1.173 Kueni 17,01 C. Rawit 12,02 C. besar 11,36 B. Merah 153,56	1703,43 Ku/Ha	2.325.440.891	1713,59 Ku/Ha	2.325.440.891	1722,89 Ku/Ha	2.325.440.891	1732,12 Ku/Ha	2.325.440.891	1732,12 Ku/Ha	Distan TPH
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama (padi, jagung, Kacang Tanah, Porang, Cabai rawit, Cabai Besar dan Bawang Merah) (Ha)		Ha	115511	115721 Ha	4.961.392.519	116283 Ha	4.961.392.519	116847 Ha	4.961.392.519	117413 Ha	4.961.392.519	117413 Ha	Distan TPH

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Meningkat Kelas kelompoknya (%)		Persen	10	12 %	300.542.058	12 %	300.542.058	12 %	300.542.058	12 %	300.542.058	12 %	Distan TPH
1.5 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan dan Populasi ternak														
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah rata-rata persentase peningkatan produksi kelapa sawit, karet, kelapa, dan purun	%	0	1,50%		1,50%		1,50 %		1,50 %		1,50 %	
	Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah rata-rata persentase peningkatan ternak sapi potong, kerbau, kambing, babi, kelinci, ayam buras, ayam ras pedaging, itik, puyuh, merpati dan itik manila	%	0	2,53%		2,53%		2,53 %		2,53 %		2,53 %	
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana peternakan	Jumlah realisasi pemenuhan prasarana peternakan dibagi dengan target pemenuhan prasarana peternakan dikali 100 %	Persen		100.00 Persen	63.642.069	100.00 Persen	63.642.069	100.00 Persen	63.642.069	100.00 Persen	63.642.069	100.00 Persen	Disbunak
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana produksi perkebunan	Jumlah realisasi pemenuhan sarana produksi perkebunan dibagi dengan target pemenuhan sarana produksi	Persen		100.00 Persen	349.253.740	100.00 Persen	349.253.740	100.00 Persen	349.253.740	100.00 Persen	349.253.740	100.00 Persen	Disbunak

		perkebunan dikali 100 %												
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					100.00 Persen 61.00 Persen	68.236.764	100.00 Persen 63.00 Persen	68.236.764	100.00 Persen 66.00 Persen	68.236.764	100.00 Persen 70.00 Persen	68.236.764	100.00 Persen 70.00 Persen	Disbunak
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha perkebunan yang meningkat kelasnya	Jumlah realisasi pelaku usaha perkebunan yang meningkat kelasnya dibagi dengan target pelaku usaha yang meningkat kelasnya dikali 100 %	Persen		100.00 Persen	28.962.317	100.00 Persen	28.962.317	100.00 Persen	28.962.317	100.00 Persen	28.962.317	100.00 Persen	Disbunak
	Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah rata-rata persentase peningkatan penyediaan daging ternak besar dan ternak unggas yang ASUH	Persen		7,50%		7,88%		8,25 %		8,75 %		8,75 %	
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyelesaian kasus kejadian penyakit menular ternak	Jumlah realisasi penyelesaian kasus kejadian penyakit menular ternak dibagi dengan kasus kejadian penyakit menular ternak dikali 100 %	Persen	100	7.14 Persen 100.00 Persen	3.815.301.800	6.67 Persen 100.00 Persen	234.000.000	6.25 Persen 100.00 Persen	3.815.301.800	2.94 Persen 100.00 Persen	3.815.301.800	23.00 Persen 100.00 Persen	Disbunak

Sasaran 1.5 Meningkatkan Ketersedian dan Keanekaragaman pangan	Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan(PPH)	Nilai SPPH	%	1,02	1,15		1,42		1,4		1,11			DKPP
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														DKPP
03.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA														DKPP
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase komoditas pangan yang aman dikonsumsi		%	85	90 Persen	33.294.819	95 Persen	33.294.819	97 Persen	33.294.819	98 Persen	33.294.819	98 Persen	DKPP
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang mandiri		%	50	50 Persen	6.010.808.094	60 Persen	6.010.808.094	60 Persen	6.010.808.094	70 Persen	6.010.808.094	70 Persen	DKPP
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		skor	90	91 Skor	583.873.536	92 Skor	583.873.536	93 Skor	583.873.536	94 Skor	583.873.536	94 Skor	DKPP
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		skor	84										DKPP
Sasaran 1.6 Meningkatnya Produksi perikanan budidaya dan tangkap	Persentase peningkatan Produksi perikanan		%	0,54	2,67		2,73		2,79		2,85		2,85	DKPP

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Aggregat Persentase produksi perikanan budidaya			5	5 Persen	864.245.363	5 Persen	864.245.363	5 Persen	864.245.363	5 Persen	864.245.363	5 Persen	DKPP
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aggregat Persentase produksi perikanan tangkap			0,02	0,02 Persen	433.127.818	0,02 Persen	433.127.818	0,02 Persen	433.127.818	0,02 Persen	433.127.818	0,02 Persen	DKPP
Sasara 1.7 Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah								-		-		-		BP2RD
	Persentase Peningkatan PAD		Persen	3,39	3,39		4,97	-	4,97	-	4,97	-	4,97	BP2RD
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi pendapatan asli daerah		Persen	3,39	10,1 Persen	1.234.830.950	7,1 Persen	1.271.875.879	6,7 Persen	1.310.032.155	6,3 Persen	1.349.333.120	6,3 Persen	BP2RD
	Persentase peningkatan Retribusi dari sektor perhubungan		Persen	4	4		8		12		16		16	Dinas Perhubungan
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan retribusi dari pengelolaan pelayaran	(Jumlah retribusi pengelolaan pelayaran tahun n - Jumlah Retribusi pengelolaan pelayaran Tahun n-1)/(Jumlah Retribusi pengelolaan pelayaran tahun n-1)) x 100%	Persen	4	2 Persen	96.344.667	2 Persen	96.421.670	2 Persen	97.344.041	2 Persen	98.385.346	2 Persen	Dinas Perhubungan

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan retribusi dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	(Jumlah retribusi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tahun n - Jumlah retribusi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Tahun n-1)/(Jumlah Retribusi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tahun n-1) x 100%	Persen	0	2 Persen	257.503.019	2 Persen	257.708.827	2 Persen	260.174.073	2 Persen	262.957.197	2 Persen	Dinas Perhubungan
Sasaran 1.8 Meningkatnya Kualitas Lingkungan														DLH
	IKLH		Indeks	53,37	53,47		53,57		53, 67		53,77		53,77	
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan layanan informasi status kualitas air, tanah dan udara	(Jumlah realisasi laporan informasi status kualitas air, tanah dan udara / Target laporan informasi status kualitas air, tanah dan udara) x 100%	Persen	100	100 Persen	910.888.721	100 Persen	910.888.721	100 Persen	910.888.721	100 Persen	910.888.721	100 Persen	DLH
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah RTH yang terpelihara	(Jumlah luasan RTH yang dipelihara / target luaasan RTH) x 100%	Ha	4,84	100 Persen	16.091.792	100 Persen	16.091.792	100 Persen	16.091.792	100 Persen	16.091.792	100 Persen	DLH
	Persentase pertumbuhan ekonomi lingkungan	rata2	Persen	64	65		76		89		100		100	

2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3/medis yang dikelola	(Jumlah Limbah B3 Medis yang dikelola / Jumlah Limbah B3 Medis) x 100%	Persen	100	100 Persen	437.919.678	100 Persen	437.919.678	100 Persen	437.919.678	100 Persen	437.919.678	100 Persen	DLH
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Kabupaten/kota	Total pengelolaan sampah = Persentase penguragan + persentase penanganan	Persen	28	100 Persen	5.275.873.023	100 Persen	5.275.873.023	100 Persen	5.275.873.023	100 Persen	5.275.873.023	100 Persen	DLH
	Persentase lingkungan bersih dan sehat	rata2	Persen	100	100		100		100		100		100	
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	(Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan / jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang diawasi) x 100%	Persen	100	100 Persen	42.934.571	100 Persen	42.934.571	100 Persen	42.934.571	100 Persen	42.934.571	100 Persen	DLH
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa/kota yang melakukan pengelolaan lingkungan	(Jumlah realisasi sekolah, desa atau kota yang melakukan pengelolaan lingkungan / target sekolah, desa atau kota yang melakukan pengelolaan	Persen	100	100 Persen	51.526.167	100 Persen	51.526.167	100 Persen	51.526.167	100 Persen	51.526.167	100 Persen	DLH

		lingkungan) x 100%												
01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	Cakupan pelayanan sampah di Kabupaten		Persen	100										DLH
01.09. Sasaran Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil														Diskoperindag
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Usaha Mikro menjadi usaha berkembang	(jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil/jumlah usaha mikro keseluruhan)x100%			1,368 Persen	252.714.755	1,375 Persen	252.714.755	1,379 Persen	252.714.755	1,384 Persen	252.714.755	1,384 Persen	Diskoperindag
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola jkoperasi yang dilatih	(Jumlah pengelola koperasi yang dilatih/ jumlah pengelola koperasi)x 100			4,13 Persen	6.570.000	8,26 Persen	6.570.000	12,39 Persen	6.570.000	16,52 Persen	6.570.000	16,52 Persen	Diskoperindag
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	(jumlah koperasi yang aktif/koperasi yang terdaftar)x100 %			53,71 Persen	44.809.130	54,54 Persen	44.809.130	55,37 Persen	44.809.130	56,19 Persen	44.809.130	56,19 Persen	Diskoperindag
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM	Jumlah sarana UMKM (tahun N) - jumlah sarana UMKM (tahun N-1) dibagi jumlah sarana UMKM (tahun N) x 100			100 Persen	92.611.600	100 Persen	92.611.600	100 Persen	92.611.600	100 Persen	92.611.600	100 Persen	Diskoperindag

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														Diskoperindag
03.00 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA														Diskoperindag
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase ketersediaan Gudang SRG	(Jumlah gabah dalam gudang SRG/ kapasitas gudang SRG)x100			25,00 Persen	171.146.600	30,00 Persen	171.146.600	35,00 Persen	171.146.600	40,00 Persen	171.146.600	40,00 Persen	Diskoperindag
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase meningkatnya sarana perdagangan yang refresentatif	Jumlah sarana perdagangan (tahun N) - jumlah sarana perdagangan (tahun N-1) dibagi jumlah sarana perdagangan (tahun N) x 100%			4,35 Persen	548.770.150	4,17 Persen	548.770.150	4,00 Persen	548.770.150	3,85 Persen	548.770.150	3,85 Persen	Diskoperindag
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan bahan pokok sesuai kebutuhan masyarakat	(jumlah kebutuhan bahan pokok yang tersedia dipasar/jumlah kebutuhan pokok masyarakat)x100%			82,00 Persen	88.584.800	83,00 Persen	88.584.800	84,00 Persen	88.584.800	85,00 Persen	88.584.800	85,00 Persen	Diskoperindag
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Alat UTTP yang ditera/ tera ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang (tahun N) - Jumlah alat UTTP yang ditera ulang (tahun N-1) dibagi Jumlah alat UTTP yang			3,50 Persen	82.095.775	3,74 Persen	82.095.775	4,14 Persen	82.095.775	3,91 Persen	82.095.775	3,91 Persen	Diskoperindag

		ditera ulang (tahun N) x 100												
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														Diskoperindag
03.00 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA														Diskoperindag
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase Pelaksanaan Urusan Perindustrian	(Jumlah laporan pelaksanaan urusan perindustrian/jumlah target laporan urusan perindustrian) x 100			100 Persen	549.961.015	100 Persen	549.961.015	100 Persen	549.961.015	100 Persen	549.961.015	100 Persen	Diskoperindag
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														SATPOL PP
01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA														SATPOL PP

1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran		%	100	100 Persen	66.838.898	100 Persen	66.838.898	100 Persen	66.838.898	100 Persen	66.838.898	100 Persen	SATPOL PP
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang diawasi	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan dan Ketertiban _____x 100% Jumlah Kecamatan.	%	100	100 Persen	888.553.911	100 Persen	888.553.911	100 Persen	888.553.911	100 Persen	888.553.911	100 Persen	SATPOL PP
1.13 Meningkatnya pelestarian kebudayaan	persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Rata-rata persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	65	68		73		77		82		82	Disporabudpar
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		%	100	100 Persen	214.671.718	100 Persen	214.671.718	100 Persen	214.671.718	100 Persen	214.671.718	100 Persen	Disporabudpar
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dibina	(Jumlah Objek kebudayaan yang dibina/Jumlah Objek Kpemajuan kebudayaan)x100%	%	100	36,36 Persen	1.459.767.680	36,36 Persen	1.459.767.680	45,45 Persen	1.459.767.680	54,55 Persen	1.459.767.680	63,64 Persen	Disporabudpar
1.14 Meningkatnya pemasaran destinasi pariwisata	persentase pemasaran pariwisata dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-rata persentase pemasaran pariwisata dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persen	60	63		69		76		85		85	Disporabudpar

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang terlaksana dan diikuti	(Jumlah promosi wisata yang dilaksanakan dan dikuti/ Jumlah promosi yang tersedia) x 100%	%	100	70 Persen	924.880.495	70 Persen	924.880.495	70 Persen	924.880.495	70 Persen	924.880.495	70 Persen	Disporabudpar
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi wisata	(jumlah destinasi yang meningkat daya tariknya/Jumlah Destinasi keseluruhan) x 100%	%	100	56 Persen	171.513.042	69 Persen	171.513.042	81 Persen	171.513.042	100 Persen	171.513.042	100 Persen	Disporabudpar
MISI 2. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan														
Tujuan 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta penanggulangan bencana						157.458.447.901		139.916.021.896		165.804.724.565		177.529.128.615		
	Ketimpangan/gini rasio		**Indeks**	**0,26**	**0,26**	157.458.447.901	**0,25**	139.916.021.896	**0,24**	165.804.724.565	**0,23**	177.529.128.615	**0,23**	
Sasaran 2.1 Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas	Persentase Infrastruktur yang di bangun/dipelihara	Rata-rata persentase Infrastruktur yang di bangun/dipelihara	%	70	71		72		73		74		74	DPUPR
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Tertata	(Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yg terbangun/Jumlah total bangunan berwawasan	%	0,645	100 Persen	11.344.675.043	100 Persen	11.344.675.043	100 Persen	11.344.675.043	100 Persen	11.344.675.043	100 Persen	DPUPR

		lingkungan)x100%												
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	(Jumlah sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar/Jumlah total sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar)x100%	%	85	87 Persen	9.551.942.350	89 Persen	9.551.942.350	91 Persen	9.551.942.350	93 Persen	9.551.942.350	93 Persen	DPUPR
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	(Jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi/Jumlah total rumah tangga kabupaten)x100%	%	8,49	10,00 Persen	5.307.152.000	11,50 Persen	4.000.000.000	13,00 Persen	5.307.152.000	14,50 Persen	5.307.152.000	14,50 Persen	DPUPR
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	(Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum/Jumlah total penduduk kabupaten)x100%	%	73,67	77,67 Persen	18.849.624.359	82,17 Persen	16.849.624.359	86,17 Persen	18.849.624.359	90,57 Persen	22.588.296.099	90,57 Persen	DPUPR
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	(Jumlah luas irigasi baik/Jumlah luas irigasi kabupaten)x100%	%	72	74 Persen	16.642.138.228	76 Persen	11.530.561.228	78 Persen	16.642.138.228	80 Persen	16.642.138.228	80 Persen	DPUPR
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat	(Jumlah tenaga kerja yg bersertifikat/Jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi	%	82	65 Persen	465.067.977	68 Persen	465.067.977	71 Persen	465.067.977	75 Persen	465.067.977	75 Persen	DPUPR

		kabupaten)x100%												
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	(Jumlah panjang jalan kab kondisi baik dan sedang/Jumlah total jalan kabupaten)x100%	%	64,46	67,25 Persen	76.639.338.545	67,5 Persen	67.694.146.618	67,75 Persen	85.086.321.791	68 Persen	92.984.223.963	68 Persen	DPUPR
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Perda/Perkada Produk Hukum Penataan Ruang	(Jumlah RDTR yg ditetapkan/Jumlah Perda/Perkada Produk Hukum Penataan Ruang)x100%	%	29,41	17,65 Persen	997.200.638	35,29 Persen	997.200.638	52,94 Persen	997.200.638	70,59 Persen	997.200.638	70,59 Persen	DPUPR
Sasaran 2.2 Meningkatnya hunian dan lingkungan yang layak	Persentase hunian dan lingkungan yang layak	(Jumlah hunian dan Lingkungan yang ditangani/Jumlah hunian dan lingkungan)x 100%	%	100	100		100		100		100		100	Disperkim
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase area kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya (Ha)	(Area permukiman kumuh- Area permukiman kumuh yang ditangani/Area permukiman kumuh)x100%	Persentase luas penurunan permukiman kumuh	69	66 Persen	2.660.609.527	63 Persen	2.477.548.186	60 Persen	2.500.770.141	57 Persen	2.526.986.425	0 Persen	Disperkim
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah yang terbangun (rumah umum, swadaya, khusus dan komersil)	(Jumlah Rumah Tangga - Jumlah rumah/Jumlah Rumah tangga)x100%	Persentase Rumah Layak Huni	89,56	89.63 Persen	930.174.807	89.72 Persen	930.918.245	89.81 Persen	939.823.420	89.90 Persen	949.876.863	100 Persen	Disperkim

1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase aset yang disertifikasi dan orang/badan hukum usaha perumahan skala kecil yang teregistrasi	(Jumlah aset yang tersertifikasi/Jumlah seluruh aset yang telah diserahkan)x100%	Persentase Layanan Orang/Badan Usaha Pengembang Perumahan Skala Kecil	100	25 Persen	172.348.496	50 Persen	172.446.283	75 Persen	173.617.605	100 Persen	174.939.963	100 Persen	Disperkim
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase panjang dan unit PSU yang terbangun	(Panjang jalan yang terbangun(Km)/ Jumlah panjang jalan perumahan(Km))x100%	Persentase PSU Perumahan dan permukiman yang layak	48,99	51.49 Persen	13.296.092.605	53.99 Persen	13.299.326.430	56.49 Persen	13.338.062.334	58.99 Persen	13.381.792.997	100 Persen	Disperkim
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase area kawasan permukiman yang dicegah dari kekumuhan (Ha)	Total area kawasan non kumuh yang diintervensi (non formulasi)	Persentase luas penurunan permukiman kumuh	69	100 Persen	602.083.326	100 Persen	602.564.539	100 Persen	608.328.679	100 Persen	614.836.069	100 Persen	Disperkim
MISI 3. Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.														
Tujuan 3: Meningkatnya Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas						***907.151.262.542***		***932.968.575.019***		***908.442.002.840***		***909.562.214.910***		
	a. Nilai MCP Korsubgah KPK			**92,23**	**92,53**	**5.754.482.589**	**93,92**	**5.754.482.589**	**94,3**	**5.754.482.589**	**95**	**5.754.482.589**	**95**	
Sasaran 3.1 Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah								-		-		-		Inspektorat

6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP APIP yang ditindak lanjuti	(Jumlah TLHP yang selesai ditindaklanjuti/ Jumlah TLHP) x 100%	%		100 Persen	2.606.075.520	100 Persen	2.606.075.520	100 Persen	2.606.075.520	100 Persen	2.606.075.520	100 Persen	Inspektorat
	Meningkatnya level maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level	3	3		3		3		3		3	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang menjalankan SPIP	(Jumlah SKPD yang menjalanan SPIP/Jumlah SKPD) x 100%	%		100 Persen	373.749.810	100 Persen	373.749.810	100 Persen	373.749.810	100 Persen	373.749.810	100 Persen	Inspektorat
03.02 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa														DPMD
	MCP Korsubgah KPK unsur tata kelola desa	Nilai MCP Korsubgah KPK unsur tata kelola desa	Skor	92	92		95		98		100		100	DPMD
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terlaksananya Penataan Desa	(Jumlah Desa yang Terlaksanaa Penataan Desa/ Jumlah Seluruh Desa) x 100%	Persen	0	5 Persen	115.814.526	5 Persen	115.814.526	5 Persen	115.814.526	6 Persen	115.814.526	6 Persen	DPMD
	Indeks Desa Membangun	Nilai Indeks Desa Membangun	Nilai	0,67	0,67		0,68		0,69		0,70		0,70	DPMD
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi yang baik	(Jumlah desa dengan nilai administrasi baik dibagi jumlah seluruh desa) X 100%	Persen	88	90 Persen	1.876.845.762	92 Persen	1.876.845.762	94 Persen	1.876.845.762	96 Persen	1.876.845.762	96 Persen	DPMD
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif/Jumlah Lembga Kemasyarakata	Persen	30	35 Persen	755.451.525	40 Persen	755.451.525	45 Persen	755.451.525	50 Persen	755.451.525	50 Persen	DPMD

		n Desa dan Lembaga Adat Desa) x 100%												
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	persentase desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	(Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa/jumlah seluruh desa) x 100%	Persen	15	20 Persen	26.545.446	25 Persen	26.545.446	30 Persen	26.545.446	35 Persen	26.545.446	35 Persen	DPMD
	b. Akuntabilitas (RB)			**88,06**	**88,12**	**901.396.779.953**	**88,24**	**927.214.092.430**	**88,36**	**902.687.520.251**	**88,48**	**903.807.732.321**	**88,48**	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi dokumen Administrasi Tata Pemerintahan, kebijakan Kesejahteraan Rakyat, produk hukum, fasilitasi bantuan hukum dan dokumentasi produk hukum dan Fasilitasi Kerjasama Daerah	(Jumlah realisasi dokumen Administrasi Tata Pemerintahan, kebijakan Kesejahteraan Rakyat, produk hukum, fasilitasi bantuan hukum dan dokumentasi produk hukum dan Fasilitasi Kerjasama Daerah/jumlah target dokumen Administrasi Tata Pemerintahan, kebijakan Kesejahteraan Rakyat, produk hukum,	Persen	100	100 Persen	8.850.111.957	100 Persen	8.850.111.957	100 Persen	8.850.111.957	100 Persen	8.850.111.957	100 Persen	Sekretariat Daerah

		fasilitasi bantuan hukum dan dokumentasi produk hukum dan Fasilitasi Kerjasama Daerah) x 100%												

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase realisasi kebijakan Perekonomian, dokumen Pengadaan Barang Jasa, peserta pembinaan advokasi, dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam dan dokumen Admnistrasi Pembangunan lintas sektor	(Jumlah realisasi kebijakan Perekonomian, dokumen Pengadaan Barang Jasa, peserta pembinaan advokasi, dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam dan dokumen Admnistrasi Pembangunan lintas sektor/jumlah target kebijakan Perekonomian, dokumen Pengadaan Barang Jasa, peserta pembinaan advokasi, dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam dan dokumen Admnistrasi Pembangunan lintas sektor) x 100%	Persen	100	100 Persen	2.237.639.949	100 Persen	2.237.639.949	100 Persen	2.237.639.949	100 Persen	2.237.639.949	100 Persen	Sekretariat Daerah
3.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	24	24,5		25		26		26,5		26,5	Bappelitbang

	unsur perencanaan													
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DITETAPKAN DENGAN TEPAT WAKTU		DOKUMEN	3	100 Persen	371.000.000	100 Persen	431.197.557	100 Persen	360.619.611	100 Persen	371.438.199	100 Persen	Bappelitbang
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE RENJA SKPD YANG SELARAS DENGAN RKPD		PERSEN	100	100 Persen	909.829.235	100 Persen	1.662.756.786	100 Persen	889.266.143	100 Persen	1.040.409.672	100 Persen	Bappelitbang
3.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa														
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	persen	90%	90%		90%		90%		90%		90%	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik				90 Persen	8.250.000	90 Persen	8.250.000	90 Persen	8.250.000	90 Persen	8.250.000	90 Persen	Kecamatan Tabunganen

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik		persen	90%	100 persen	23.342.080	100 persen	23.342.080	100 persen	23.342.080	100 persen	23.342.080	100 persen	Kecamatan Tamban
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Nilai	81 Nilai	81 Persen	10.556.000	81 Persen	10.556.000	81 Persen	10.556.000	81 Persen	10.556.000	81 Persen	Kecamatan Mekarsari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Persen	100%	100 Persen	8.000.000	100 Persen	8.000.000	100 Persen	8.000.000	100 Persen	8.000.000	100 Persen	Kecamatan Anjir Pasar
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan dengan baik		Persen	90%	90 Persen	10.500.000	90 Persen	10.500.000	90 Persen	10.500.000	90 Persen	10.500.000	90 Persen	Kecamatan Anjir Muara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase laporan hasil pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persen	85%	90 Nilai	7.700.000	91 Nilai	7.700.000	92 Nilai	7.700.000	93 Nilai	7.700.000	93 Nilai	Kecamatan Alalak
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	85%	85 Persen	9.360.000	85 Persen	9.360.000	85 Persen	9.360.000	85 Persen	9.360.000	85 Persen	Kecamatan Mandastana

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani dengan Baik		Persen	93%	92 Persen	12.596.600	93 Persen	12.596.600	93 Persen	12.596.600	94 Persen	12.596.600	94 Persen	Kecamatan Kecamatan Belawang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase keamanan dan ketertiban yang ditangani dengan baik		Persen	85%	85 Persen	11.000.000	85 Persen	11.000.000	85 Persen	11.000.000	85 Persen	11.000.000	85 Persen	Kecamatan Wanaraya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik		Persen	83%	83 Persen	11.410.000	83 Persen	11.410.000	83 Persen	11.410.000	83 Persen	11.410.000	83 Persen	Kecamatan Barambai
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	83,50 %	83,50 Persen	14.435.000	83,50 Persen	14.435.000	83,50 Persen	14.435.000	83,50 Persen	14.435.000	83,50 Persen	Kecamatan Rantau Badauh
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik		Persen		90 Persen	11.900.000	90 Persen	11.900.000	90 Persen	11.900.000	90 Persen	11.900.000	90 Persen	Kecamatan Cerbon
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persen	90%	100 Persen	6.000.000	100 Persen	6.000.000	100 Persen	6.000.000	100 Persen	6.000.000	100 Persen	Kecamatan Bakumpai

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persen	90%	100 Persen	12.703.000	100 Persen	12.703.000	100 Persen	12.703.000	100 Persen	12.703.000	100 Persen	Kecamatan Marabahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	90%	100 Persen	12.525.000	100 Persen	12.525.000	100 Persen	12.525.000	100 Persen	12.525.000	100 Persen	Kecamatan Tabukan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	100%	100 Persen	10.900.200	100 Persen	10.900.200	100 Persen	10.900.200	100 Persen	10.900.200	100 Persen	Kecamatan Kuripan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	100%	100 Persen	10.845.775	100 Persen	10.845.775	100 Persen	10.845.775	100 Persen	10.845.775	100 Persen	Kecamatan Jejangkit
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat		persen	100%	90 nilai	110.312.500	91 nilai	110.312.500	92 nilai	110.312.500	93 nilai	110.312.500	93 nilai	Kecamatan Tabungan en
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik		Nilai	100%	100 Persen	66.005.000	100 Persen	66.005.000	100 Persen	66.005.000	100 Persen	66.005.000	100 Persen	Kecamatan Tamban

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik		Nilai	81 Nilai	81 Persen	104.921.975	81 Persen	104.921.975	81 Persen	104.921.975	81 Persen	104.921.975	81 Persen	Kecamatan Mekarsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik		Persen	89 Nilai	89 Persen	300.271.550	89 Persen	300.271.550	89 Persen	300.271.550	89 Persen	300.271.550	89 Persen	Kecamatan Anjir Pasar
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	90%	90 Nilai	101.411.122	90 Nilai	101.411.122	90 Nilai	101.411.122	90 Nilai	101.411.122	90 Nilai	Kecamatan Anjir Muara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persen	95%	95 Persen	102.910.260	95 Persen	102.910.260	95 Persen	102.910.260	95 Persen	102.910.260	95 Persen	Kecamatan Alalak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	90%	90 Persen	104.264.500	90 Persen	104.264.500	90 Persen	104.264.500	90 Persen	104.264.500	90 Persen	Kecamatan Mandastana
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	93%	92 Persen	106.259.050	93 Persen	106.259.050	93 Persen	106.259.050	94 Persen	106.259.050	94 Persen	Kecamatan Kecamatan Belawang

PELAYANAN PUBLIK													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	85%	90 Nilai	129.000.000	91 Nilai	129.000.000	92 Nilai	129.000.000	93 Nilai	129.000.000	93 Nilai	Kecamatan Wanaraya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	83%	83 Nilai	114.553.300	83 Nilai	114.553.300	83 Nilai	114.553.300	83 Nilai	114.553.300	83 Nilai	Kecamatan Barambai
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	83,50 %	83,50 Nilai	96.109.932	83,50 Nilai	96.109.932	83,50 Nilai	96.109.932	83,50 Nilai	96.109.932	83,50 Nilai	Kecamatan Rantau Badauh
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen		85 Persen	68.404.850	85 Persen	68.404.850	85 Persen	68.404.850	85 Persen	68.404.850	85 Persen	Kecamatan Cerbon
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	85%	100 Persen	140.318.900	100 Persen	140.318.900	100 Persen	140.318.900	100 Persen	140.318.900	100 Persen	Kecamatan Bakumpai
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat			85%	90 Persen	100.515.875	91 Persen	100.515.875	92 Persen	100.515.875	93 Persen	100.515.875	93 Persen	Kecamatan Marabahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	91%	92 Nilai	112.375.000	93 Nilai	112.375.000	94 Nilai	112.375.000	95 Nilai	112.375.000	96 Nilai	Kecamatan Tabukan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	100%	100 Persen	111.203.500	100 Persen	111.203.500	100 Persen	111.203.500	100 Persen	111.203.500	100 Persen	Kecamatan Kuripan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		Persen	100%	100 Persen	55.180.600	100 Persen	55.180.600	100 Persen	55.180.600	100 Persen	55.180.600	100 Persen	Kecamatan Jejangkit
	persentase desa dengan administrasi desa yang baik	(jumlah desa yang admistrasi baik/Jumlah desa keseluruhan) x 100%	persen	90%	100%		100%		100%		100%		100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		persen	85%	85 Persen	20.757.500	85 Persen	20.757.500	85 Persen	20.757.500	85 Persen	20.757.500	85 Persen	Kecamatan Tabungan en
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		persen	85%	100 persen	28.952.730	100 persen	28.952.730	100 persen	28.952.730	100 persen	28.952.730	100 persen	Kecamatan Tamban
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	95%	95 Persen	17.692.813	95 Persen	17.692.813	95 Persen	17.692.813	95 Persen	17.692.813	95 Persen	Kecamatan Mekarsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	90 Persen	12.243.970	90 Persen	12.243.970	90 Persen	12.243.970	90 Persen	12.243.970	90 Persen	Kecamatan Anjir Pasar

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	100%	100 Persen	18.243.650	100 Persen	18.243.650	100 Persen	18.243.650	100 Persen	18.243.650	100 Persen	Kecamatan Anjir Muara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	85%	100 Persen	51.135.810	100 Persen	51.135.810	100 Persen	51.135.810	100 Persen	51.135.810	100 Persen	Kecamatan Alalak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	85%	85 Persen	20.925.000	85 Persen	20.925.000	85 Persen	20.925.000	85 Persen	20.925.000	85 Persen	Kecamatan Mandastana
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	100%	92 Persen	11.098.800	93 Persen	11.098.800	93 Persen	11.098.800	94 Persen	11.098.800	94 Persen	Kecamatan Kecamatan Belawang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	80%	100 Persen	22.000.000	100 Persen	22.000.000	100 Persen	22.000.000	100 Persen	22.000.000	100 Persen	Kecamatan Wanaraya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	90 Persen	15.094.600	90 Persen	15.094.600	90 Persen	15.094.600	90 Persen	15.094.600	90 Persen	Kecamatan Barambai
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	90 Persen	22.374.930	90 Persen	22.374.930	90 Persen	22.374.930	90 Persen	22.374.930	90 Persen	Kecamatan Rantau Badauh
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen		90 Persen	16.977.880	90 Persen	16.977.880	90 Persen	16.977.880	90 Persen	16.977.880	90 Persen	Kecamatan Cerbon
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	100 Persen	10.153.000	100 Persen	10.153.000	100 Persen	10.153.000	100 Persen	10.153.000	100 Persen	Kecamatan Bakumpai

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	100 Persen	2.610.354.157	100 Persen	2.610.354.157	100 Persen	2.610.354.157	100 Persen	2.610.354.157	100 Persen	Kecamatan Marabahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	100 Persen	23.337.500	100 Persen	23.337.500	100 Persen	23.337.500	100 Persen	23.337.500	100 Persen	Kecamatan Tabukan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	85%	90 Persen	17.941.200	90 Persen	17.941.200	90 Persen	17.941.200	90 Persen	17.941.200	90 Persen	Kecamatan Kuripan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	85%	85 Persen	20.538.850	85 Persen	20.538.850	85 Persen	20.538.850	85 Persen	20.538.850	85 Persen	Kecamatan Jejangkit
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		persen	85%	85 Persen	8.069.200	85 Persen	8.069.200	85 Persen	8.069.200	85 Persen	8.069.200	85 Persen	Kecamatan Tabungan en
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		persen	85%	100 persen	33.891.800	100 persen	33.891.800	100 persen	33.891.800	100 persen	33.891.800	100 persen	Kecamatan Tamban
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	95%	95 Persen	40.319.700	95 Persen	40.319.700	95 Persen	40.319.700	95 Persen	40.319.700	95 Persen	Kecamatan Mekarsari
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	90 Persen	3.867.400	90 Persen	3.867.400	90 Persen	3.867.400	90 Persen	3.867.400	90 Persen	Kecamatan Anjir Pasar

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	100%	100 Persen	6.078.000	100 Persen	6.078.000	100 Persen	6.078.000	100 Persen	6.078.000	100 Persen	Kecamatan Anjir Muara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	75%	100 Persen	19.605.350	100 Persen	19.605.350	100 Persen	19.605.350	100 Persen	19.605.350	100 Persen	Kecamatan Alalak
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	85%	85 Persen	20.952.500	85 Persen	20.952.500	85 Persen	20.952.500	85 Persen	20.952.500	85 Persen	Kecamatan Mandastana
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	100%	100 Persen	4.904.400	100 Persen	4.904.400	100 Persen	4.904.400	100 Persen	4.904.400	100 Persen	Kecamatan Kecamatan Belawang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	100 Persen	8.000.000	100 Persen	8.000.000	100 Persen	8.000.000	100 Persen	8.000.000	100 Persen	Kecamatan Wanaraya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	90 Persen	3.721.500	90 Persen	3.721.500	90 Persen	3.721.500	90 Persen	3.721.500	90 Persen	Kecamatan Barambai
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	90 Persen	23.140.500	90 Persen	23.140.500	90 Persen	23.140.500	90 Persen	23.140.500	90 Persen	Kecamatan Rantau Badauh
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	90 Persen	11.663.510	90 Persen	11.663.510	90 Persen	11.663.510	90 Persen	11.663.510	90 Persen	Kecamatan Cerbon

PEMERINTAHAN DESA														
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	100 Persen	3.305.320	100 Persen	3.305.320	100 Persen	3.305.320	100 Persen	3.305.320	100 Persen	Kecamatan Bakumpai
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	100 Persen	34.594.450	100 Persen	34.594.450	100 Persen	34.594.450	100 Persen	34.594.450	100 Persen	Kecamatan Marabahan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	90%	100 Persen	14.124.000	100 Persen	14.124.000	100 Persen	14.124.000	100 Persen	14.124.000	100 Persen	Kecamatan Tabukan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	100%	100 Persen	32.298.600	100 Persen	32.298.600	100 Persen	32.298.600	100 Persen	32.298.600	100 Persen	Kecamatan Kuripan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa yang baik		Persen	100%	100 Persen	9.466.475	100 Persen	9.466.475	100 Persen	9.466.475	100 Persen	9.466.475	100 Persen	Kecamatan Jejangkit
3.6 Terwujudnya pengelolaan Keuangan dan BMD yang profesional transparan dan akuntabel	WTP	Opini BPK	pernyataan	WTP	WTP		WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	BPKAD

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang tepat waktu				100 Persen	643.261.230	100 Persen	643.261.230	100 Persen	643.261.230	100 Persen	643.261.230	100 Persen	BPKAD
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tepat waktu				100 Persen	224.628.064.845	100 Persen	224.628.064.845	100 Persen	224.628.064.845	100 Persen	224.628.064.845	100 Persen	BPKAD
3.7 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah dan Informatika														Diskominfo
	Indek SPBE (unsur Tata Kelola)	Nilai indikator tata kelol / Jumlah indikator tata kelola	Indeks	2	2		2,1		2,2		2,3		2,3	Diskominfo
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tata Kelola SPBE Pemeritah Daerah	Nilai domain tata kelola SPBE dibagi dengan nilai domain tata kelola SPBE maksimal x 100%	Persen	100	40 Persen	1.482.351.145	42 Persen	1.482.351.145	44 Persen	1.482.351.145	46 Persen	1.482.351.145	46 Persen	Diskominfo
	Jumlah Buku Statistik Sektoral,	1 Kabupaten sama dengan 1 buku statistik sektoral	Buku	0	1		1		1		1		1	Diskominfo
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase buku satistisk sektoral yang disajikan SKPD pada rumah data Batola	Jumlah SKPD yang menyajikan data pada rumah data batola dibagi dengan jumlah seluruh SKPD x 100%	Persen	50	80 Persen	85.868.687	100 Persen	85.868.687	100 Persen	85.868.687	100 Persen	85.868.687	100 Persen	Diskominfo

	Indek Keamanan Informasi (KAMI)	Jumlah Total Nilai 5 Indikator Penilaian	Indeks	0	200		273		300		320		320	Diskominfo
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Persandian dalam komunkasi Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengunakan sandi dalam komunikasi dibagi dengan jumlah selisih perangkat daerah x 100%	Persen	90	50 Persen	163.150.505	60 Persen	163.150.505	70 Persen	163.150.505	80 Persen	163.150.505	80 Persen	Diskominfo
	Persentase Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik (IKP)	Realisasi Jumlah informasi yang dipublikasikan pada media infromasi dibagi Target jumlah infromasi yang dipublikasikan pada media infromasi x 100%	%	0	100%		100%		100%		100%		100%	Diskominfo
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi dan komunikasi publik	Realisasi Informasi dan komunikasi publik dibagi dengan target informasi dan komunikasi publik x 100%	Persen		100 Persen	111.020.656	100 Persen	111.020.656	100 Persen	111.020.656	100 Persen	111.020.656	100 Persen	Diskominfo
3.8 Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil														Disdukcapil
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	(Persentase dokumen kependudukan + persentase Dokumen	Persen	70	73		82		89		97		97	

		pencatatan sipil)/2												
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai standart (akta kelahiran)				63 Persen	125.216.335	76 Persen	125.216.335	87 Persen	125.216.335	99 Persen	125.216.335	99 Persen	Disdukcapil
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentasi kepemilikan dokumen kependudukan sesuai standart (KIA, kartu keluarga dan KTP)				82,67 Persen	1.283.782.874	87,00 Persen	1.283.782.874	91,00 Persen	1.283.782.874	94,33 Persen	1.283.782.874	94 Persen	Disdukcapil
	Persentase data kependudukan dan catatan sipil secara valid dan terintegrasi	Persentase data kependudukan dan catatan sipil secara valid dan terintegrasi	Persen	85	86		88		89		90		90	
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentasi pemanfaatan data kependudukan				100 Persen	73.030.538	100 Persen	73.030.538	100 Persen	73.030.538	100 Persen	73.030.538	100 Persen	Disdukcapil
3.9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan Kesbangpol	Nilai IKM	Indeks	100	100		100	-	100	-	100	-	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kecamatan yang dibina terhadap ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	(Jumlah kecamatan yang dibina/Jumlah seluruh kecamatan) x 100%	%	100	100 Persen	300.640.442	100 Persen	300.640.442	100 Persen	300.640.442	100 Persen	300.640.442	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kecamatan yang dibina terhadap ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	(Jumlah kecamatan yang dibina/Jumlah seluruh kecamatan) x 100%	%	100	47,06 Persen	254.118.204	64,71 Persen	254.118.204	82,35 Persen	254.118.204	100 Persen	254.118.204	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	(Jumlah Konfilk sosial yang disselesaikan / Jumlah konflik yang terjadi) x 100%	%	100	100 Persen	603.023.159	100 Persen	603.023.159	100 Persen	603.023.159	100 Persen	603.023.159	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidkan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	(Jumlah Partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti/Jumlah seluruh Partai politik dan lembaga pendidikan) x 100%	%	100	100 Persen	1.228.594.751	100 Persen	31.228.594.751	100 Persen	1.228.594.751	100 Persen	1.228.594.751	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	(Jumlah Ormas yang aktif/Jumlah Ormas yang terdaftar) x 100%	%	45	45 Persen	110.425.844	60 Persen	110.425.844	75 Persen	110.425.844	90 Persen	110.425.844	90 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.10 Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPRD	Indeks Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPR	Nilai IKM	Indeks	100	100		100	-	100	-	100	-	100	Sekretariat DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Indeks tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap		Angka	95	80	12.691.802.606	83	12.691.802.606	85	12.691.802.606	88	12.691.802.606	88	Sekretariat DPRD

TUGAS DAN FUNGSI DPRD	layanan Set. DPRD													
3.11 Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Indeks Tingkat kepuasan ASN	Nilai IKM	Indeks	100	100		100	-	100	-	100	-	100	BKPP
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indek Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	(Jumlah realisasi Indek Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian / Jumlah target Indek Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian) x 100%	Indeks	100	100 Persen	787.262.499	100 Persen	787.262.499	100 Persen	787.262.499	100 Persen	787.262.499	100 Persen	BKPP
3.12 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Kompeten	Persentase PNS yang Memenuhi Kompetensi	(Jumlah Pegawai yang kompeten / Jumlah Total Pegawai se Kab. Batola) X 100%	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	BKPP
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	(Jumlah realisasi PNS yang memenuhi kompetensi / Jumlah target PNS yang memenuhi kompetensi) x 100%	Persen		100 Persen	1.913.530.281	100 Persen	1.913.530.281	100 Persen	1.913.530.281	100 Persen	1.913.530.281	100 Persen	BKPP
3.13 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	%	85	85		85	-	85	-	85	-	85	DPMPTSP

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Iklim investasi yang kondusif	(Jumlah investor yang merealisasi berinvestasi/ Jumlah investor yang merencanakan investasi) x 100%	%		16,67 Persen	119.967.527	16,67 Persen	119.967.527	16,67 Persen	119.967.527	16,67 Persen	119.967.527	16,67 Persen	DPMPTSP
3.14 MeningkatnyaNilai Investasi Daerah	Nilai investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah	Milyar	300	350		400	-	450	-	500	-	500	DPMPTSP
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman modal	(Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu/Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan)x100%	%		100 Persen	147.455.216	100 Persen	147.455.216	100 Persen	147.455.216	100 Persen	147.455.216	100 Persen	DPMPTSP
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersedian data dan sistem informasi penanaman modal	(Jumlah Jenis data perizinan dan non perizinan yang diterbitkan/ Jumlah Jenis Perizinan dan Non perizinan yang didelegasikan)* 100%	%		12,50 Persen	17.173.686	13,75 Persen	17.173.686	15,00 Persen	17.173.686	16,25 Persen	17.173.686	16,25 Persen	DPMPTSP
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	((Nilai Investasi thn berjalan-Jumlah Investasi tahun sebelumnya)/Jumlah Investasi tahun sebelumnya) x 100%	%		16,67 Persen	60.283.652	14,29 Persen	60.283.652	12,50 Persen	60.283.652	11,11 Persen	60.283.652	11,11 Persen	DPMPTSP

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang diikuti	(Jumlah promosi penanaman modal yang diikuti/Jumlah Promosi penanamn modal yang difasilitasi) x 100%	%		75 Persen	280.898.806	75 Persen	280.898.806	75 Persen	280.898.806	75 Persen	280.898.806	75 Persen	DPMPTSP
3.15 Meningkatnya masyarakat korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat bencana	Persentase masyarakat korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat bencana	(Jumlah Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya saat bencana/Jumlah Penduduk keseluruhan yang terkena bencana) x 100%	%	100	100		100		100		100		100	BPBD
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					100 Persen	993.176.370	100 Persen	993.176.370	100 Persen	993.176.370	100 Persen	993.176.370	100 Persen	BPBD
3.16 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	%	100	100		100		100		100		100	Setda
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100	100 Persen	2.805.460.733	100 Persen	2.805.460.733	100 Persen	2.805.460.733	100 Persen	2.805.460.733	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	4.144.938.223	100 Persen	5.144.938.223	100 Persen	4.144.938.223	100 Persen	5.144.938.223	100 Persen	Dinas Sosial
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	20.807.462.889	100 Persen	20.807.462.889	100 Persen	20.807.462.889	100 Persen	20.807.462.889	100 Persen	Distan TPH
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100.00 Persen	4.135.458.455	100.00 Persen	4.135.458.455	100.00 Persen	4.135.458.455	100.00 Persen	4.135.458.455	100.00 Persen	Disbunak
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	5.028.211.250	100 Persen	5.028.211.250	100 Persen	5.028.211.250	100 Persen	5.028.211.250	100 Persen	DKPP

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	4.565.169.050	100 Persen	4.702.124.122	100 Persen	4.843.187.845	100 Persen	4.988.483.480	100 Persen	BP2RD
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	4.540.708.853	100 Persen	5.159.843.738	100 Persen	5.657.020.312	100 Persen	5.430.657.908	100 Persen	Dinas Perhubungan
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100	100 Persen	5.491.161.987	100 Persen	5.491.161.987	100 Persen	5.491.161.987	100 Persen	5.491.161.987	100 Persen	DLH
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	4.162.736.175	100 Persen	4.162.736.175	100 Persen	4.162.736.175	100 Persen	4.162.736.175	100 Persen	Diskoperindag

1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	5.055.415.286	100 Persen	5.055.415.286	100 Persen	5.055.415.286	100 Persen	5.055.415.286	100 Persen	SATPOL PP
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	16.383.736.307	100 Persen	16.383.736.307	100 Persen	16.383.736.307	100 Persen	16.383.736.307	100 Persen	DPUPR
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	4.352.701.366	100 Persen	4.540.608.785	100 Persen	4.575.434.891	100 Persen	4.614.751.613	100 Persen	Disperkim
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	7.610.881.205	100 Persen	7.610.881.205	100 Persen	7.610.881.205	100 Persen	7.610.881.205	100 Persen	Inspektorat

2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	2.635.070.026	100 Persen	2.635.070.026	100 Persen	2.635.070.026	100 Persen	2.635.070.026	100 Persen	DPMD
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	30.644.430.007	100 Persen	28.000.000.000	100 Persen	30.644.430.007	100 Persen	30.644.430.007	100 Persen	Sekretariat Daerah
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	3.700.252.610	100 Persen	3.700.252.610	100 Persen	3.700.252.610	100 Persen	3.700.252.610	100 Persen	Bappelitbang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	persen	100%	100 Persen	1.747.140.754	100 Persen	1.747.140.754	100 Persen	1.747.140.754	100 Persen	1.747.140.754	100 Persen	Kecamatan Tabungan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	persen	100%	100 Persen	1.149.680.721	100 Persen	1.149.680.721	100 Persen	1.149.680.721	100 Persen	1.149.680.721	100 Persen	Kecamatan Tamban
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	1.706.359.084	100 Persen	1.706.359.084	100 Persen	1.706.359.084	100 Persen	1.706.359.084	100 Persen	Kecamatan Mekarsari
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	2.180.531.081	100 Persen	2.180.531.081	100 Persen	2.180.531.081	100 Persen	2.180.531.081	100 Persen	Kecamatan Anjir Pasar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	1.820.127.955	100 Persen	1.820.127.955	100 Persen	1.820.127.955	100 Persen	1.820.127.955	100 Persen	Kecamatan Anjir Muara

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	5.081.046.461	100 Persen	5.081.046.461	100 Persen	5.081.046.461	100 Persen	5.081.046.461	100 Persen	Kecamatan Alalak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	2.073.069.561	100 Persen	2.073.069.561	100 Persen	2.073.069.561	100 Persen	2.073.069.561	100 Persen	Kecamatan Mandastana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	1.819.980.000	100 Persen	1.819.980.000	100 Persen	1.819.980.000	100 Persen	1.819.980.000	100 Persen	Kecamatan Kecamatan Belawang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	1.800.000.000	100 Persen	1.800.000.000	100 Persen	1.800.000.000	100 Persen	1.800.000.000	100 Persen	Kecamatan Wanaraya

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	1.313.423.720	100 Persen	1.313.423.720	100 Persen	1.313.423.720	100 Persen	1.313.423.720	100 Persen	Kecamatan Barambai
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	1.464.059.386	100 Persen	1.464.059.386	100 Persen	1.464.059.386	100 Persen	1.464.059.386	100 Persen	Kecamatan Rantau Badauh
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen		100 Persen	1.734.871.658	100 Persen	1.734.871.658	100 Persen	1.734.871.658	100 Persen	1.734.871.658	100 Persen	Kecamatan Cerbon
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	1.864.860.887	100 Persen	1.864.860.887	100 Persen	1.864.860.887	100 Persen	1.864.860.887	100 Persen	Kecamatan Bakumpai

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%		100%	100 Persen	3.444.119.147	100 Persen	3.444.119.147	100 Persen	3.444.119.147	100 Persen	3.444.119.147	100 Persen	Kecamatan Marabahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	1.596.233.387	100 Persen	1.596.233.387	100 Persen	1.596.233.387	100 Persen	1.596.233.387	100 Persen	Kecamatan Tabukan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	1.568.662.507	100 Persen	1.568.662.507	100 Persen	1.568.662.507	100 Persen	1.568.662.507	100 Persen	Kecamatan Kuripan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100%	100 Persen	1.902.903.960	100 Persen	1.902.903.960	100 Persen	1.902.903.960	100 Persen	1.902.903.960	100 Persen	Kecamatan Jejangkit

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	4.728.673.925	100 Persen	4.728.673.925	100 Persen	4.728.673.925	100 Persen	4.728.673.925	100 Persen	BPKAD
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	Persen	100	100 Persen	2.302.279.528	100 Persen	2.302.279.528	100 Persen	2.302.279.528	100 Persen	2.302.279.528	100 Persen	Diskominfo
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	2.507.970.253	100 Persen	2.507.970.253	100 Persen	2.507.970.253	100 Persen	2.507.970.253	100 Persen	Disdukcapil
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	2.692.852.721	100 Persen	2.692.852.721	100 Persen	2.692.852.721	100 Persen	2.692.852.721	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	26.578.808.235	100 Persen	26.578.808.235	100 Persen	26.578.808.235	100 Persen	26.578.808.235	100 Persen	Sekretariat DPRD
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	6.865.324.455	100 Persen	6.865.324.455	100 Persen	6.865.324.455	100 Persen	6.865.324.455	100 Persen	BKPP
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	2.490.970.711	100 Persen	2.490.970.711	100 Persen	2.490.970.711	100 Persen	2.490.970.711	100 Persen	DPMPTSP
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	1.968.021.195	100 Persen	1.968.021.195	100 Persen	1.968.021.195	100 Persen	1.968.021.195	100 Persen	BPBD

2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	3.328.395.439	100 Persen	3.328.395.439	100 Persen	3.328.395.439	100 Persen	3.328.395.439	100 Persen	Disporabudpar
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	340.918.286.060	100 Persen	340.622.906.060	100 Persen	340.622.906.060	100 Persen	340.622.906.060	100 Persen	Disdik
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	3.148.719.849	100 Persen	3.148.719.849	100 Persen	3.148.719.849	100 Persen	3.148.719.849	100 Persen	Disperpusip
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	persen	100	100 Persen	3.000.000.000	100 Persen	3.000.000.000	100 Persen	3.000.000.000	100 Persen	3.000.000.000	100 Persen	DPPKBP3A

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	(Jumlah Persentase realisasi seluruh kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100	100 Persen	74.729.065.228	100 Persen	70.729.065.228	100 Persen	74.729.065.228	100 Persen	74.729.065.228	100 Persen	Dinas Kesehatan
MISI 4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.														
Tujuan 4: Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**			**67,06**	**67,11**	170.423.177.061	**67,85**	167.493.464.662	**68,23**	170.718.557.061	**68,6**	170.718.557.061	**68,6**	
4.1 Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan, Olahraga serta Kepramukaan	Persentase Pemuda dan cabang olahraga yang berprestasi serta pelaksanaan aktivitas kepramukaan	Rata-rata Persentase Pemuda dan cabang olahraga yang berprestasi serta pelaksanaan aktivitas kepramukaan	Persen	61	62,94		63,27		64,83		65,31		65,31	Disporabudpar
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olah Raga yang berprestasi	(jumlah cabang olah raga yang berprestasi/Jumlah Cabor yang dibina)x 100%	%	100	25 Persen	2.728.541.955	25 Persen	2.728.541.955	25 Persen	2.728.541.955	25 Persen	2.728.541.955	25 Persen	Disporabudpar
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berprestasi	(jumlah Pemuda yang berprestasi/Jumlah Pemuda yang mengikuti)x 100%	%	100	63,8 Persen	1.288.030.306	64,8 Persen	1.288.030.306	66,4 Persen	1.288.030.306	67,8 Persen	1.288.030.306	67,8 Persen	Disporabudpar

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pelaksanaan aktivitas kepramukaan	(jumlah realisasi aktivitas kepramukaan/Jumlah aktivitas kepramukaan)x 100%	%	100	100 Persen	515.783.149	100 Persen	515.783.149	100 Persen	515.783.149	100 Persen	515.783.149	100 Persen	Disporabudpar
4.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	a. Rata-Rata Lama Sekolah	$HLS_a^t = \sum_{i=a}^{t} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} xi$			7,67		7,78		7,89		8,00		8,00	Disdik
	b. Harapan Lama Sekolah				12,90		13,40		13,90		14,40		14,40	Disdik
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan	(Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia/Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dibutuhkan)x 100%	%	100	58,02 Persen	9.703.162	70,29 Persen	9.703.162	82,57 Persen	9.703.162	100 Persen	9.703.162	100 Persen	Disdik
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan yang terlaksana	(Jumlah satuan pendidikan yang dikelola pada tahun bersangkutan/jumlah satuan pendidikan seluruhnya) x 100%	%	100	0,12 Persen	95.129.980.286	0,23 Persen	95.129.980.286	0,35 Persen	95.129.980.286	0,47 Persen	95.129.980.286	0,47 Persen	Disdik
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum pendidikan terbaru	(jumlah sekolah pelaksana Program sekolah penggerak/Jumlah Seluruh Sekolah)x 100%	%	100	0 Persen	0	0,79 Persen	295.380.000	1,59 Persen	295.380.000	2,38 Persen	295.380.000	2,38 Persen	Disdik

4.2 Meningkatnya pemanfaatn arsip Daerah	Presentase SKPD yang Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai NSPK	(Jumlah SKPD yang Menyelenggarakan arsip sesuai NSPK / Jumlah SKPD) x 100%	Persen	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Disperpusip
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD Yang Mengelola Arsip Sesuai NAIK/Baku dan Berbasis TIK		Persen		100 Persen	152.692.256	100 Persen	152.692.256	100 Persen	152.692.256	100 Persen	152.692.256	100 Persen	Disperpusip
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase SKPD Yang Mengelola Arsip Sesuai NAIK/Baku dan Berbasis TIK		Persen		100 Persen	8.574.500	100 Persen	8.574.500	100 Persen	8.574.500	100 Persen	8.574.500	100 Persen	Disperpusip
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase SKPD Yang Mengelola Arsip Sesuai NAIK/Baku dan Berbasis TIK		Persen		100 Persen	114.916.560	100 Persen	114.916.560	100 Persen	114.916.560	100 Persen	114.916.560	100 Persen	Disperpusip
4.3 Meningkatnya literasi	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	((jumlah Pengunjung tahun N-Jumlah Pengunjung tahunN-1)/(Jumlah Pengunjung tahun N-1))x100%	Persen	63	63,16 %		68,42 %		78,95 %		89,47 %		100,00%	Disperpusip
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pemustaka		Persen	63	100 Persen	275.096.835	100 Persen	275.096.835	100 Persen	275.096.835	100 Persen	275.096.835	100 Persen	Disperpusip
4.4 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai TFR	Nilai	2,3	2,24		2,28		2,27		2,25		2,25	DPPKBP3A

2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Realisasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah Realisasi Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota) x 100%	angka	51,98	100 Persen	1.605.634.810	100 Persen	1.605.634.810	100 Persen	1.605.634.810	100 Persen	1.605.634.810	100 Persen	DPPKBP3A
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Realisasi Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	(Jumlah realisasi dokumen Persentase Realisasi Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga) x 100%	Prosentasi	9,66	100 Persen	231.714.205	100 Persen	231.714.205	100 Persen	231.714.205	100 Persen	231.714.205	100 Persen	DPPKBP3A

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Realisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	(Jumlah Realisasi Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB) x 100%	Prosentasi	9,66	100 Persen	731.468.470	100 Persen	731.468.470	100 Persen	731.468.470	100 Persen	731.468.470	100 Persen	DPPKBP3A
04.05 Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai IPG	Indeks	89,25	84,35		81,45		88,55		84,65		84,65	DPPKBP3A
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Realisasi Dokumen Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	(Jumlah realisasi dokumen Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota) x 100%	%	9	100 Persen	59.994.315	100 Persen	59.994.315	100 Persen	59.994.315	100 Persen	59.994.315	100 Persen	DPPKBP3A
4.6 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Layak Anak	Nilai KLA	Nilai	650	700		725		750		775		775	DPPKBP3A

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Realisasi Dokumen Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	(Jumlah realisasi organisasi, dokumen Perencanaan, Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota) x 100%	%	3,5	100 Persen	341.095.700	100 Persen	341.095.700	100 Persen	341.095.700	100 Persen	341.095.700	100 Persen	DPPKBP3A
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Realisasi Dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	(Jumlah realisasi dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota) x 100%	%	9	100 Persen	343.739.973	100 Persen	343.739.973	100 Persen	343.739.973	100 Persen	343.739.973	100 Persen	DPPKBP3A
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan		%	100	100 Persen	322.364.820	100 Persen	322.364.820	100 Persen	322.364.820	100 Persen	322.364.820	100 Persen	DPPKBP3A

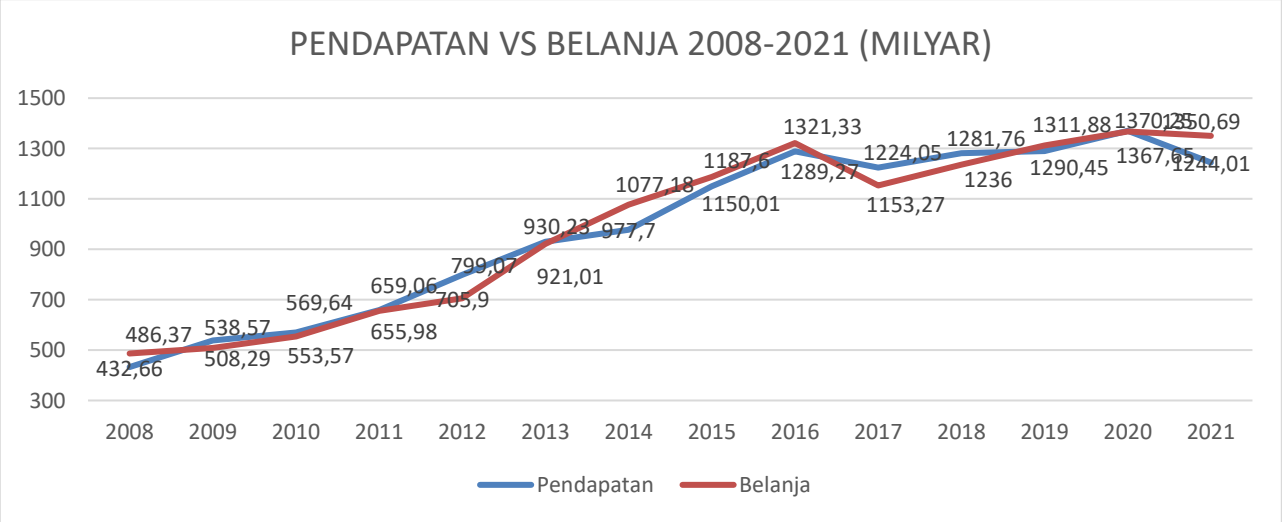
4.7 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	(Jumlah capaian seluruh SPM Kesehatan/Jumlah SPM Kesehatan)x100 %	Persen	46,00 %	46,88 %		58,75 %		73,75 %		95,00 %		95,00 %	Dinas Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase potensi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	(Jumlah Kelompok Upaya Kesehatan Berbasis masyarakat yang aktif /jumlah Kelompok Upaya Kesehatan Berbasis masyarakat)x 100%	Persen		80 Persen	255.275.032	85 Persen	255.275.032	90 Persen	255.275.032	95 Persen	255.275.032	95 Persen	Dinas Kesehatan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai UHC		Persen		70 Persen	63.225.092.399	75 Persen	60.000.000.000	80 Persen	63.225.092.399	85 Persen	63.225.092.399	85 Persen	Dinas Kesehatan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang meningkat kompetensinya	(Jumlah SDM Kes yang berkompetensi/ Jumlah target SDM Kes selama 4 tahun) x100%	Persen		25 Persen	170.344.730	50 Persen	170.344.730	75 Persen	170.344.730	100 Persen	170.344.730	100 Persen	Dinas Kesehatan
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana yang terstandarisasi	(Jumlah Sarana yang terstandarisasi/ Jumlah Sarana yang mengajukan standarisasi) x 100%	Persen		0,125 Persen	2.913.133.597	0,25 Persen	2.913.133.597	0,5 Persen	2.913.133.597	1 Persen	2.913.133.597	1 Persen	Dinas Kesehatan

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

Hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD akan duraikan di bab ini. Selain itu pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Program Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berisi program-program, baik untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program- program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Berdasrkan data yang diperoleh dari BPKAD dapat disajikan kondisi keuangan daerah dari tahun 2008 – 2021.

Gambar 7.1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah



Sumber : BPKAD Kab. Barito Kuala

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan mempertimbangkan kerangka pendanaan (Mengacu kepada grafik diatas) dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.. Sumber-sumber lain yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana material maupun SDM dan teknologi.

7.2 Program Prioritas Perangkat Daerah

Perumusan program perangkat daerah (SKPD) yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.2.

Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down serta bottom up.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategi maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang perhitungannya berdasakan satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian target kinerja program (outcome) pada masing-masing urusan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kota Banjarbaru, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yaitu kebijakan program dan masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi.

Tabel 7. 1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026

Kode	Uraian	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
5	**BELANJA**				
05.01	**BELANJA OPERASI**	**811.481.381.230**	**811.597.581.230**	**821.374.599.800**	**832.781.299.800**
05.01.01	Belanja Pegawai	575.337.654.968	575.337.654.968	582.349.920.079	590.450.607.911
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	230.249.133.647	200.365.333.647	233.058.173.077	236.281.660.948
05.01.05	Belanja Hibah	5.823.698.556	35.823.698.556	5.894.747.678	5.976.279.458
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	70.894.059	70.894.059	71.758.966	72.751.483
05.02	**BELANJA MODAL**	**242.531.842.995**	**242.531.842.995**	**242.531.842.995**	**242.531.842.995**
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.480.289.548	29.480.289.548	29.480.289.548	29.480.289.548
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.047.801.403	67.047.801.403	67.047.801.403	67.047.801.403
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.531.467.859	142.531.467.859	142.531.467.859	142.531.467.859
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.472.284.185	3.472.284.185	3.472.284.185	3.472.284.185
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya				
05.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
05.04	**BELANJA TRANSFER**	**216.986.440.100**	**216.986.440.100**	**216.986.440.100**	**216.986.440.100**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.843.779.800	2.843.779.800	2.843.779.800	2.843.779.800
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	214.142.660.300	214.142.660.300	214.142.660.300	214.142.660.300
	Jumlah Belanja	**1.275.999.664.325**	**1.276.115.864.325**	**1.285.892.882.895**	**1.297.299.582.895**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diolah

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar														
Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan yang terlaksana	0 Persen	0,12 Persen	95.129.980.286	0,23 Persen	95.129.980.286	0,35 Persen	95.129.980.286	0,47 Persen	95.129.980.286	0,47 Persen	0	Disdik
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Terbaru	0 Persen	0 Persen	0	0,79 Persen	295.380.000	1,59 Persen	295.380.000	2,38 Persen	295.380.000	2,38 Persen	0	Disdik
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan	0 Persen	58,02 Persen	9.703.162	70,29 Persen	9.703.162	82,57 Persen	9.703.162	100 Persen	9.703.162	100 Persen	0	Disdik
Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai UHC	0 Persen	70 Persen	63.225.092.399	75 Persen	60.000.000.000	80 Persen	63.225.092.399	85 Persen	63.225.092.399	85 Persen	0	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang meningkat kompetensinya	0 Persen	25 Persen	170.344.730	50 Persen	170.344.730	75 Persen	170.344.730	100 Persen	170.344.730	100 Persen	0	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN	Persentase sarana yang terstandarisasi	0 Persen	0,125 Persen	2.913.133.597	0,25 Persen	2.913.133.597	0,5 Persen	2.913.133.597	1 Persen	2.913.133.597	1 Persen	0	Dinas Kesehatan

	DAN MAKANAN MINUMAN													
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase potensi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	0 Persen	80 Persen	255.275.032	85 Persen	255.275.032	90 Persen	255.275.032	95 Persen	255.275.032	95 Persen	0	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	0 Persen	74 Persen	16.642.138.228	76 Persen	11.530.561.228	78 Persen	16.642.138.228	80 Persen	16.642.138.228	80 Persen	0	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	0 Persen	77,67 Persen	18.844.624.359	82,17 Persen	16.844.624.359	86,17 Persen	18.844.624.359	90,57 Persen	22.583.296.099	90,57 Persen	0	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	0 Persen	10,00 Persen	5.307.152.000	11,50 Persen	4.000.000.000	13,00 Persen	5.307.152.000	14,50 Persen	5.307.152.000	14,50 Persen	0	DPUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	0 Persen	87 Persen	9.551.942.350	89 Persen	9.551.942.350	91 Persen	9.551.942.350	93 Persen	9.551.942.350	93 Persen	0	DPUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Tertata	0 Persen	100 Persen	11.344.675.043	100 Persen	11.344.675.043	100 Persen	11.344.675.043	100 Persen	11.344.675.043	100 Persen	0	DPUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	0 Persen	67,25 Persen	76.639.338.545	67,5 Persen	67.694.146.618	67,75 Persen	85.086.321.791	68 Persen	92.984.223.963	68 Persen	0	DPUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	0 Persen	65 Persen	465.067.977	68 Persen	465.067.977	71 Persen	465.067.977	75 Persen	465.067.977	75 Persen	0	DPUPR

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Perda/Perkada Produk Hukum Penataan Ruang	0 Persen	17,65 Persen	997.200.638	35,29 Persen	997.200.638	52,94 Persen	997.200.638	70,59 Persen	997.200.638	70,59 Persen	0	DPUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase sarana prasarana persambahan yang dibangun		92 persen	5.000.000	94 persen	5.000.000	96 persen	5.000.000	98 persen	5.000.000	98 persen		
Perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	0 Persen	89.63 Persen	930.174.807	89.72 Persen	930.918.245	89.81 Persen	939.823.420	89.90 Persen	949.876.863	100 Persen	0	Disperkim
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Permukiman Kumuh	0 Persen	66 Persen	2.660.609.527	63 Persen	2.477.548.186	60 Persen	2.500.770.141	57 Persen	2.526.986.425	0 Persen	0	Disperkim
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pencegahan Area Kawasan Permukiman Kumuh	0 Persen	100 Persen	602.083.326	100 Persen	602.564.539	100 Persen	608.328.679	100 Persen	614.836.069	100 Persen	0	Disperkim
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang layak	0 Persen	51.49 Persen	13.296.092.605	53.99 Persen	13.299.326.430	56.49 Persen	13.338.062.334	58.99 Persen	13.381.792.997	100 Persen	0	Disperkim
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang ditangani	0 Persen	100 Persen	993.176.370	100 Persen	993.176.370	100 Persen	993.176.370	100 Persen	993.176.370	100 Persen	0	BPBD
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang diawasi	0 Persen	100 Persen	888.553.911	100 Persen	888.553.911	100 Persen	888.553.911	100 Persen	888.553.911	100 Persen	0	SATPOL PP
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATA	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	0 Persen	100 Persen	66.838.898	100 Persen	66.838.898	100 Persen	66.838.898	100 Persen	66.838.898	100 Persen	0	SATPOL PP

	N NON KEBAKARAN													
Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	0 Persen	100 Persen	180.000.270	100 Persen	180.000.270	100 Persen	180.000.270	100 Persen	180.000.270	100 Persen	0	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, penyandang disabilitas dan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial	0 Persen	100 Persen	1.647.490.753	100 Persen	147.490.753	100 Persen	1.647.490.753	100 Persen	147.490.753	67,8 Persen	0	Dinas Sosial

		lainnya) yang mandiri												
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	0 Persen	100 Persen	618.999.860	100 Persen	618.999.860	100 Persen	618.999.860	100 Persen	618.999.860	100 Persen	0	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	0 Persen	100 Persen	494.999.728	100 Persen	494.999.728	100 Persen	494.999.728	100 Persen	494.999.728	100 Persen	0	Dinas Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar														
Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	0 Persen	100 Persen	1.753.000.000	100 Persen	1.753.000.000	100 Persen	1.753.000.000	100 Persen	1.753.000.000	100 Persen	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	0 Persen	100 Persen	732.000.000	100 Persen	732.000.000	100 Persen	732.000.000	100 Persen	732.000.000	100 Persen	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Jamsostek & UMP	(Jumlah Perusahaan yang mengikuti Jamsostek dalam 1 Tahun/Jumlah perusahaan yang mengikuti Jamsostek dalam 5 Tahun)x100%	100	100	69.539.250	100	71.625.428	100	73.774.190	100	75.987.416	100	290.926.284	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SKPD yang mengimplemtasikan PPRG dalam RKA	0 Persen	100 Persen	59.994.315	100 Persen	59.994.315	100 Persen	59.994.315	100 Persen	59.994.315	100 Persen	0	DPPKBP3A
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentasedesa yang memiliki forum anak desa	0 Persen	100 Persen	341.095.700	100 Persen	341.095.700	100 Persen	341.095.700	100 Persen	341.095.700	100 Persen	0	DPPKBP3A
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan yang berperan dalam pembangunan di tingkat desa	0 Persen	100 Persen	343.739.973	100 Persen	343.739.973	100 Persen	343.739.973	100 Persen	343.739.973	100 Persen	0	DPPKBP3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi perempuan korban kekerasan yang diselesaikan	0 Persen	100 Persen	322.364.820	100 Persen	322.364.820	100 Persen	322.364.820	100 Persen	322.364.820	100 Persen	0	DPPKBP3A
Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase komoditas pangan yang aman dikonsumsi	0 Persen	90 Persen	33.294.819	95 Persen	33.294.819	97 Persen	33.294.819	98 Persen	33.294.819	98 Persen	0	DKPP
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang mandiri	0 Persen	50 Persen	6.010.808.094	60 Persen	6.010.808.094	60 Persen	6.010.808.094	70 Persen	6.010.808.094	70 Persen	0	DKPP

	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	0 Skor	91 Skor	583.873.536	92 Skor	583.873.536	93 Skor	583.873.536	94 Skor	583.873.536	94 Skor	0	DKPP
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84	84,5		86		87,5		88,5		88,5	-	DKPP
Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Layanan Orang/Badan Usaha Pengembang Perumahan Skala Kecil	0 Persen	25 Persen	172.348.496	50 Persen	172.446.283	75 Persen	173.617.605	100 Persen	174.939.963	100 Persen	0	Disperkim
Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Cakupan Layanan Informasi Status Kualitas Air, Tanah dan Udara	0 Persen	100 Persen	910.888.721	100 Persen	910.888.721	100 Persen	910.888.721	100 Persen	910.888.721	100 Persen	0	DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Jumlah RTH yang Terpelihara	0 Persen	100 Persen	16.091.792	100 Persen	16.091.792	100 Persen	16.091.792	100 Persen	16.091.792	100 Persen	0	DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3/Medis yang dikelola	0 Persen	100 Persen	437.919.678	100 Persen	437.919.678	100 Persen	437.919.678	100 Persen	437.919.678	100 Persen	0	DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	0 Persen	100 Persen	5.275.873.023	100 Persen	5.275.873.023	100 Persen	5.275.873.023	100 Persen	5.275.873.023	100 Persen	0	DLH

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Persen	100 Persen	42.934.571	100 Persen	42.934.571	100 Persen	42.934.571	100 Persen	42.934.571	100 Persen	0	DLH
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa/Kota yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan	0 Persen	100 Persen	51.526.167	100 Persen	51.526.167	100 Persen	51.526.167	100 Persen	51.526.167	100 Persen	0	DLH
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Dokumen Pencatatn Sipil yang diterbitkan Sesuai Standart (Akta Kelahiran)	0 Persen	63 Persen	125.216.335	76 Persen	125.216.335	87 Persen	125.216.335	99 Persen	125.216.335	99 Persen	0	Disdukcapil
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan sesuai Standar (KIA, Kartu Keluarga dan KTP)	0 Persen	82,67 Persen	1.283.782.874	87,00 Persen	1.283.782.874	91,00 Persen	1.283.782.874	94,33 Persen	1.283.782.874	94 Persen	0	Disdukcapil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentasi Pemanfaatan Data Kependudukan	0 Persen	100 Persen	73.030.538	100 Persen	73.030.538	100 Persen	73.030.538	100 Persen	73.030.538	100 Persen	0	Disdukcapil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi yang baik	0 Persen	90 Persen	1.876.845.762	92 Persen	1.876.845.762	94 Persen	1.876.845.762	96 Persen	1.876.845.762	96 Persen	0	DPMD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif	0 Persen	35 Persen	755.451.525	40 Persen	755.451.525	45 Persen	755.451.525	50 Persen	755.451.525	50 Persen	0	DPMD

	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	persentase desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	0 Persen	20 Persen	26.545.446	25 Persen	26.545.446	30 Persen	26.545.446	35 Persen	26.545.446	35 Persen	0	DPMD
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19 Tahun)	0 Persen	100 Persen	1.605.634.810	100 Persen	1.605.634.810	100 Persen	1.605.634.810	100 Persen	1.605.634.810	100 Persen	0	DPPKBP3A
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmet Need	0 Persen	100 Persen	231.714.205	100 Persen	231.714.205	100 Persen	231.714.205	100 Persen	231.714.205	100 Persen	0	DPPKBP3A
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmet Need	0 Persen	100 Persen	731.468.470	100 Persen	731.468.470	100 Persen	731.468.470	100 Persen	731.468.470	100 Persen	0	DPPKBP3A
Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan retribusi dari pengelolaan pelayaran	0 Persen	2 Persen	96.344.667	2 Persen	96.421.670	2 Persen	97.344.041	2 Persen	98.385.346	2 Persen	0	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan retribusi dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	0 Persen	2 Persen	257.503.019	2 Persen	257.708.827	2 Persen	260.174.073	2 Persen	262.957.197	2 Persen	0	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tata Kelola SPBE Pemeritah Daerah	0 Persen	40 Persen	1.482.351.145	42 Persen	1.482.351.145	44 Persen	1.482.351.145	46 Persen	1.482.351.145	46 Persen	0	Diskominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	0 Persen	100 Persen	111.020.656	100 Persen	111.020.656	100 Persen	111.020.656	100 Persen	111.020.656	100 Persen	0	Diskominfo
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang berkembang	0 Persen	1,368 Persen	252.714.755	1,375 Persen	252.714.755	1,379 Persen	252.714.755	1,384 Persen	252.714.755	1,384 Persen	0	Diskoperindag

	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang dilatih	0 Persen	4,13 Persen	6.570.000	8,26 Persen	6.570.000	12,39 Persen	6.570.000	16,52 Persen	6.570.000	16,52 Persen	0	Diskoperindag
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	0 Persen	53,71 Persen	44.809.130	54,54 Persen	44.809.130	55,37 Persen	44.809.130	56,19 Persen	44.809.130	56,19 Persen	0	Diskoperindag
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pengembangan UMKM	0 Persen	100 Persen	92.611.600	100 Persen	92.611.600	100 Persen	92.611.600	100 Persen	92.611.600	100 Persen	0	Diskoperindag
Penanaman Modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Iklim investasi yang kondusif	0 Persen	16,67 Persen	119.967.527	16,67 Persen	119.967.527	16,67 Persen	119.967.527	16,67 Persen	119.967.527	16,67 Persen	0	DPMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman modal	0 Persen	100 Persen	147.455.216	100 Persen	147.455.216	100 Persen	147.455.216	100 Persen	147.455.216	100 Persen	0	DPMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersedian data dan sistem informasi penanaman modal	0 Persen	12,50 Persen	17.173.686	13,75 Persen	17.173.686	15,00 Persen	17.173.686	16,25 Persen	17.173.686	16,25 Persen	0	DPMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	0 Persen	16,67 Persen	60.283.652	14,29 Persen	60.283.652	12,50 Persen	60.283.652	11,11 Persen	60.283.652	11,11 Persen	0	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang diikuti	0 Persen	75 Persen	280.898.806	75 Persen	280.898.806	75 Persen	280.898.806	75 Persen	280.898.806	75 Persen	0	DPMPTSP
Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	0 Persen	25 Persen	2.728.541.955	25 Persen	2.728.541.955	25 Persen	2.728.541.955	25 Persen	2.728.541.955	25 Persen	10.914.167.820	Disporabudpar
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berprestasi	0 Persen	63,8 Persen	1.288.030.306	64,8 Persen	1.288.030.306	66,4 Persen	1.288.030.306	67,8 Persen	1.288.030.306	67,8 Persen	0	Disporabudpar

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pelaksanaan aktivitas kepramukaan	0 Persen	100 Persen	515.783.149	100 Persen	515.783.149	100 Persen	515.783.149	100 Persen	515.783.149	100 Persen	0	
Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase buku statistik sektoral yang disajikan SKPD pada rumah data Batola	0 Persen	80 Persen	85.868.687	100 Persen	85.868.687	100 Persen	85.868.687	100 Persen	85.868.687	100 Persen	0	Diskominfo
Persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Persandian dalam komunkasi Perangkat Daerah	0 Persen	50 Persen	163.150.505	60 Persen	163.150.505	70 Persen	163.150.505	80 Persen	163.150.505	80 Persen	0	Diskominfo
		Persentase Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik (IKP)	0	100%		100%		100%		100%		1	-	Diskominfo
Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0 Persen	100 Persen	275.096.835	100 Persen	275.096.835	100 Persen	275.096.835	100 Persen	275.096.835	100 Persen	0	Disperpusip
Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD yang Mengelola Arsip Sesuai NSPK/Baku dan Berbasis TIK	0 Persen	100 Persen	152.692.256	100 Persen	152.692.256	100 Persen	152.692.256	100 Persen	152.692.256	100 Persen	0	Disperpusip
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Peningkatan SOP perijinan penggunaan arsip	0 Persen	100 Persen	8.574.500	100 Persen	8.574.500	100 Persen	8.574.500	100 Persen	8.574.500	100 Persen	0	Disperpusip
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0 Persen	100 Persen	114.916.560	100 Persen	114.916.560	100 Persen	114.916.560	100 Persen	114.916.560	100 Persen	0	Disperpusip
3. Urusan Pilihan														

Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Aggregat Persentase produksi perikanan budidaya	0 Persen	5 Persen	864.245.363	5 Persen	864.245.363	5 Persen	864.245.363	5 Persen	864.245.363	5 Persen	0	DKPP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aggregat Persentase produksi perikanan tangkap	0 Persen	0,02 Persen	433.127.818	0,02 Persen	433.127.818	0,02 Persen	433.127.818	0,02 Persen	433.127.818	0,02 Persen	0	DKPP
Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang terlaksana dan diikuti	0 Persen	70 Persen	924.880.495	70 Persen	924.880.495	70 Persen	924.880.495	70 Persen	924.880.495	70 Persen	0	Disporabudpar
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi wisata	0 Persen	56 Persen	171.513.042	69 Persen	171.513.042	81 Persen	171.513.042	100 Persen	171.513.042	100 Persen	0	Disporabudpar
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0 Persen	100 Persen	214.671.718	100 Persen	214.671.718	100 Persen	214.671.718	100 Persen	214.671.718	100 Persen	0	Disporabudpar
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dibina	0 Persen	36,36 Persen	1.459.767.680	36,36 Persen	1.459.767.680	45,45 Persen	1.459.767.680	54,55 Persen	1.459.767.680	63,64 Persen	0	Disporabudpar
Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama	0 Ha	115721 Ha	4.961.392.519	116283 Ha	4.961.392.519	116847 Ha	4.961.392.519	117413 Ha	4.961.392.519	117413 Ha	0	Distan TPH
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Meningkat Kelas kelompoknya	0 %	12 %	300.542.058	12 %	300.542.058	12 %	300.542.058	12 %	300.542.058	12 %	0	Distan TPH
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana peternakan	0 Persen	100.00 Persen	64.749.336	100.00 Persen	64.749.336	100.00 Persen	64.749.336	100.00 Persen	64.749.336	100.00 Persen	0	Disbunak

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana peternakan	0 Persen	100.00 Persen	349.253.740	100.00 Persen	349.253.740	100.00 Persen	349.253.740	100.00 Persen	349.253.740	100.00 Persen	0	Disbunak
Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase keterisian gudang SRG	0 Persen	25,00 Persen	171.146.600	30,00 Persen	171.146.600	35,00 Persen	171.146.600	40,00 Persen	171.146.600	40,00 Persen	0	Diskoperindag
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase meningkatnya sarana perdagangan yang refresentatif	0 Persen	4,35 Persen	548.770.150	4,17 Persen	548.770.150	4,00 Persen	548.770.150	3,85 Persen	548.770.150	3,85 Persen	0	Diskoperindag
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersedian bahan pokok sesuai kebutuhan masyarakat	0 Persen	82,00 Persen	88.584.800	83,00 Persen	88.584.800	84,00 Persen	88.584.800	85,00 Persen	88.584.800	85,00 Persen	0	Diskoperindag
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan Alat UTTP yang ditera / tera ulang	0 Persen	3,50 Persen	82.095.775	3,74 Persen	82.095.775	4,14 Persen	82.095.775	3,91 Persen	82.095.775	3,91 Persen	0	Diskoperindag
Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pelaksanaan urusan perindustrian	0 Persen	100 Persen	549.961.015	100 Persen	549.961.015	100 Persen	549.961.015	100 Persen	549.961.015	100 Persen	0	Diskoperindag
Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	persentase sapras yang dibangun dkawasan transmigrasi	0 Persen	100 Persen	293.000.000	100 Persen	293.000.000	100 Persen	293.000.000	100 Persen	293.000.000	100 Persen	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														
Perencanaan dan Keuangan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Dikoordinir Penyusunannya	0 Persen	100 Persen	371.000.000	100 Persen	431.197.557	100 Persen	360.619.611	100 Persen	371.438.199	100 Persen	0	Bappelitbang

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan kabupaten yang di tetapkan	0 Persen	100 Persen	909.829.235	100 Persen	1.662.756.786	100 Persen	889.266.143	100 Persen	1.040.409.672	100 Persen	0	Bappelitbang
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang tepat waktu	0 Persen	100 Persen	643.261.230	100 Persen	643.261.230	100 Persen	643.261.230	100 Persen	643.261.230	100 Persen	0	BPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tepat waktu	0 Persen	100 Persen	224.628.064.845	100 Persen	224.628.064.845	100 Persen	224.628.064.845	100 Persen	224.628.064.845	100 Persen	0	BPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realiasai Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0 Persen	10,1 Persen	1.234.830.950	7,1 Persen	1.271.875.879	6,7 Persen	1.310.032.155	6,3 Persen	1.349.333.120	6,3 Persen	0	BP2RD
Kepegawaian	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indek Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	787.262.499	100 Persen	787.262.499	100 Persen	787.262.499	100 Persen	787.262.499	100 Persen	0	BKPP
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	0 Persen	100 Persen	1.913.530.281	100 Persen	1.913.530.281	100 Persen	1.913.530.281	100 Persen	1.913.530.281	100 Persen	0	BKPP

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Makro Daerah

Indikator kinerja daerah ditetapkan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Kuala dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Barito Kuala diwajibkan menetapkan target- target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Kuala. Target pencapaian ini adalah indikator kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah disajikan sebagaimana tabel 8.1 dan tabel 8.2 berikut ini.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Kuala

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)**	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	3,03	2,93	2,7	2,38	1,76
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,00	4,68	4,65	4,59	4,54
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	3,4	4,23	4,46	4,78	5,11
4	Ketimpangan/gini rasio	Indeks	0,26	0,255	0,25	0,24	0,23
5	Nilai MCP Korsubgah KPK	Nilai	92,23	92,53	93,92	94,3	95
6	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	88,06	88,12	88,24	88,36	88,48
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,06	67,48 - 67,78	67,85	68,23	68,6

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala

Tabel T-C.18.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Barito Kuala

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	SKPD
		2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	APSEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI							
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI							
	KEUANGAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
	Pertumbuhan Ekonomi	3,4	4,13	4,46	4,78	5,11	5,11	
	Laju Inflasi						0	
	KESEJAHTERAAN SOSIAL							
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,06	67,48-67,78	67,85	68,23	68,6	68,6	

	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,6	7,67	7,78	7,89	8	8	
	Indeks Gini	0,26	0,255	0,25	0,24	0,23	0,23	
	APSEK PELAYANAN UMUM							
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
- Pendidikan								
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,37	92,47	92,56	92,66	92,75	92,75	Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Disdukcapil
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,94	99,95	99,95	99,96	99,96	99,96	Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Disdukcapil
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96,96	96,98	96,99	97,01	97,03	97,03	Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Disdukcapil
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	71,7	71,76	71,83	71,89	71,95	71,95	Dinas Pendidikan
	220201 - Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	94	100	100	100	100	100	
	220202 - Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,53	100	100	100	100	100	
	220203 - Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,2	
	220204 - Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,64	1,66	1,68	1,7	1,72	1,72	

	220205 - Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,2	
	220206 - Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,67	1,69	1,71	1,73	1,75	1,75	
	220207 - Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	26,26	40,26	50,26	60,26	70,26	70,26	
	220208 - Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	43,24	59,35	65,35	71,25	77	77	
	220209 - Rasio pengawas dan penilik PAUD	4,04	4,04	4,12	4,2	4,24	4,24	
- Kesehatan								
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,05	0,06	0,07	0,09	0,1	0,1	RSUD Abdul Aziz
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	0	0	0	0	0	0	DInas Kesehatan
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,97	90,99	91	91,02	91,03	91,03	Dinas Kesehatan
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	80	80,45	80,89	81,34	81,78	81,78	Dinas Kesehatan
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91	91,96	92,93	93,89	94,85	94,85	Dinas Kesehatan
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	61	61,99	62,97	63,96	64,95	64,95	Dinas Kesehatan

1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82	82,21	82,43	82,64	82,85	82,85	Dinas Kesehatan
1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	35	39,56	44,12	48,69	53,25	53,25	Dinas Kesehatan
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	47	48,54	50,08	51,63	53,17	53,17	Dinas Kesehatan
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25	25,18	25,36	25,55	25,73	25,73	Dinas Kesehatan
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	33	32.97	34	32.98	35	35	Dinas Kesehatan
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	73,5	73,66	73,81	73,97	74,12	74,12	Dinas Kesehatan
	100 - Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	101 - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	102 - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

	1020003 - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	18,4	16	15	14	13	13	Dinas Kesehatan
	1020015 - Jumlah Penurunan Kematian Ibu	5	5	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
	1020018 - Persentase FKTP terakreditasi	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1020019 - Jumlah Puskesmas yang dibangun di Kecamatan yang belum memiliki puskesmas	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1020020 - Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	85	90	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1020021 - Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	95	95	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1020022 - Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	94,1	94,6	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1020024 - Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 penduduk	4/100	4/100	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
	1020026 - Persentase posyandu aktif	80	80	90	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1020027 - Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7	6,7	Dinas Kesehatan
	1020029 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1020032 - Presentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

	1020035 - Persentase Tatanan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1020038 - Persentase Capaian 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1020041 - Penurunan jumlah kematian ibu	15	15	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
	1020042 - Presentase rumah sakit yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	103 - Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	512111 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	5123123 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	51231231 - Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15	15	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
	512323 - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	512413 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	5124231 - Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	1359	1359	1400	1469	1524	1524	Dinas Kesehatan
	514123 - Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

	515232 - Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	54321 - Persentase Sarana Produksi UMOT	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	555125 - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Sep-19	Sep-19					Dinas Kesehatan
	92 - Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,42:1000	0,42:1000	0,50:1000	0,50:1000	0,50:1000	0,50:1000	Dinas Kesehatan
	93 - Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	94 - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	95 - Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	96 - Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1179	615					Dinas Kesehatan
	97 - Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	98 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	81,8	81,8	85	85	85	85	Dinas Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	53	53,49	53,98	54,48	54,97	54,97	DPUPR

1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100	100	100	100	100	100	DPUPR
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	66,5	66,65	66,79	66,94	67,09	67,09	DPUPR
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	70	77,07	84,15	91,22	98,29	98,29	DPUPR
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80	81,73	83,47	85,2	86,94	86,94	DPUPR
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100	100	100	100	DPUPR
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	64	64,65	65,31	65,96	66,61	66,61	DPUPR
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	70	71,42	72,84	74,27	75,69	75,69	DPUPR
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	100	100	DPUPR
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	53	54,84	56,67	58,51	60,35	60,35	Disperkim, BPBD

1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	Disperkim
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	32	33,34	34,69	36,03	37,38	37,38	Disperkim
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1.000,00	800	600	400	200	200	Disperkim
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	5,9	6,02	6,13	6,25	6,36	6,36	Disperkim
	BM2 - Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	67	67,25	67,5	67,75	68	68	DPUPR
	CK1 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	73,67	77,67	81,67	85,67	89,67	89,67	DPUPR
	CK12 - Persentase angka BABS di tempat terbuka							DPUPR
	CK14 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	92	95	98	100	100	100	DPUPR
	CK2 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	23	25	27	29	31	31	DPUPR
	CK4 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	73,67	77,67	81,67	85,67	89,67	89,67	DPUPR
	CK6 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	52	54	56	58	60	60	DPUPR

	CK7 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	20						DPUPR
	CK9 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	8,49	10	12	14	16	16	DPUPR
	PR1 - Penyelesaian Materi Teknis RTRW	1	1					DPUPR
	PR10 - Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Alih Fungsi Lahan Sawah							DPUPR
	PR2 - Penyelesaian Materi Teknis RDTR	2	2					DPUPR
	PR5 - Penetapan RTRW	1	1					DPUPR
	PR6 - Penetapan RDTR		3					DPUPR
	PR7 - Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada DAS							DPUPR
	PR8 - Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)							DPUPR
	PR9 - Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	1	2	3	3	3	3	DPUPR
	SDA2 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	21398	21993	22400	23000	23600	23600	DPUPR
	SDA3 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	2101	2500	2800	3000	3200	3200	DPUPR

	SDA4 - Tambahan Debit Air Baku		50	100	100	100	100	DPUPR
	10015 - Persentase rumah terbangun yang memenuhi PBG dan SLF							Disperkim
	10017 - Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau							Disperkim
	10019 - Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	7,114	6	4,85	3,7	2,55	2,55	Disperkim
	1081 - Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)							Disperkim
	1120 - Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan							Disperkim
	1212 - Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)							Disperkim
	1213 - Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha							Disperkim
	1214 - Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah	6	12	15	20	20	20	Disperkim

	1329 - Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	26	32	34	36	40	40	Disperkim
	1330 - Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	501	880	940	980	1100	1100	Disperkim
	1331 - Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	4						Disperkim
	1332 - Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota							Disperkim
	292 - Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7082	6725	6690	6420	6300	6300	Disperkim
	P1 - Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	1075	405	420	450	475	475	Disperkim
	P2 - Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	300	300	400	400	400	400	Disperkim
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	45	46,25	47,5	48,75	50	50	Satpol PP
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	250	300	350	400	450	450	BPBD

1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	250	300	350	400	450	450	BPBD
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	595000	595400	595800	596200	596600	596600	BPBD
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	67	69	71	73	75	75	Satpol PP
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	Satpol PP
	1178 - Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani							
	1245 - Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya							
	1456 - Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan							
	2145 - Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota							
	2411 - Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani							
	2445 - Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana							

	2451 - Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional							
	2452 - Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan							
	294 - Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani							
	3421 - Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan							
	3451 - Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS							
	3456 - Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota							
	3641 - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana							

	4125 - Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial							
	42152 - Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur							
	6512 - Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya							
	6741 - Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan							
- Sosial								
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100	100	100	100	100	Dinsos
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	95	95,36	95,73	96,09	96,46	96,46	Dinsos
	1134 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	17	17	17	17	17	17	Dinsos

	115000 - Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan							Dinsos
	115100 - Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	1	1	1	1	1	1	Dinsos
	115200 - Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	60		70	75	80	80	Dinsos
	115300 - Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya							Dinsos
	115400 - Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya							Dinsos
	115500 - Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	15	10	10	10	10	10	Dinsos
	115600 - Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial							Dinsos
	115800 - Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi							Dinsos
	115900 - Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme							Dinsos
	116000 - Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial							Dinsos

	116100 - Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial							Dinsos
	116200 - Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	4	6	8	10	10	10	Dinsos
	116300 - Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat							Dinsos
	116400 - Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas							Dinsos
	116600 - Jumlah Lembaga di Didang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan							Dinsos
	116700 - Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional							Dinsos
	116800 - Presentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	41	35	30	25	20	20	Dinsos
	116900 - Presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti							Dinsos
	117000 - Presentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti							Dinsos
	117100 - Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial							Dinsos

	117200 - Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial							Dinsos
	117300 - Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial							Dinsos
	117400 - Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial							Dinsos
	390 - Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	200	200	150	100	100	100	Dinsos
	391 - Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Disediakan							Dinsos
	392 - Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan							Dinsos
	393 - Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial							Dinsos
	394 - Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	157	200	250	250	250	250	Dinsos
	400 - Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	100	100	100	100	100	100	Dinsos
	401 - Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM							Dinsos

	402 - Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk							Dinsos
	403 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau							Dinsos
	404 - Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4	8	8	8	8	8	Dinsos
	405 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi							Dinsos
	406 - Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar							Dinsos
	407 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang							Dinsos
	408 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	4						Dinsos
	409 - Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter							Dinsos
	410 - Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia							Dinsos

	411 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan							Dinsos
	413 - Jumlah pekerja sosial profesionalprofessional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	157	200	250	250	250	250	Dinsos
	414 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial							Dinsos
	415 - Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial							Dinsos
	416 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan							Dinsos
	417 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar							Dinsos

	418 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga							Dinsos
	419 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga							Dinsos
	420 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	3	3	5	7	10	10	Dinsos
	426 - Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	5	5	5	5	5	5	Dinsos
	427 - Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	200	200	200	200	200	200	Dinsos
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar								
- Tenaga Kerja								
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	10	20	30	30	Disnakertrans
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,4	0,42	0,45	0,47	0,49	0,49	Disnakertrans, BKPP

2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,67	3,77	3,86	3,96	4,06	4,06	Disnakertrans, BKPP
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	90	90	90	90	90	90	Disnakertrans
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	Disnakertrans
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	DPPKBP3A
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DPPKBP3A
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,55	11,56	11,57	11,58	11,59	11,59	DPPKBP3A
- Pangan								
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	81,13	81,13	81,13	81,13	81,13	81,13	DKPP
- Pertanahan								

2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	22,84	22,89	22,95	23	23,05	23,05	Disperkim
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100	100	BPN
- Lingkungan Hidup								
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	62,255	62,66	63,03	63,44	63,84	63,84	DLH
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	77	77,84	78,69	79,53	80,38	80,38	Dinas Lingkungan Hidup
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100	100	100	100	100	

- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	99,68	99,73	99,78	99,83	99,88	99,88	Disdukcapil
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	36	36,15	36,31	36,46	36,61	36,61	Disdukcapil
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	85	86,48	87,96	89,43	90,91	90,91	Disdukcapil
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	10,64	14,89	19,15	23,4	27,66	27,66	Disdukcapil
- Pemberdayaan masyarakat dan desa								
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	87,5	91,67	95,83	100	100	100	DPMD
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	9,43	12,58	15,72	18,87	22,01	22,01	DPMD
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana								
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	0,12	0,1344	0,1489	0,1633	0,1778	0,1778	DPPKBP3A
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	83,72	85,54	86,45	87,36	88,64	88,64	DPPPKBP3A
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,6	DPPKBP3A
- Perhubungan								
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	5	5,79	6,57	7,36	8,14	8,14	Dinas Perhubungan
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan

- Komunikasi dan Informatika								
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,74	97,87	100	100	100	100	Diskominfo
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20,83	29,17	37,5	45,83	54,17	54,17	Diskominfo dan Bag. Organisasi Setda
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	0,06	0,13	0,19	0,25	0,32	0,32	Diskominfo
- Koperasi, usaha kecil dan menengah								
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	31,4	33,06	34,71	36,36	39,67	39,67	Diskopperindag
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0,006	0,011	0,017	0,022	0,028	0,028	Diskopperindag
- Penanaman Modal								
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	45	45,21	45,42	45,63	45,84	45,84	DPMPTSP
- Kepemudaan dan Olahraga								
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,68	1,81	1,94	2,07	2,19	2,19	Disporabudpar dan Disdukcapil
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,07	2,09	2,13	2,19	2,32	2,32	Disporabudpar dan Disdukcapil

2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	11	13	15	17	19	19	Disporabudpar
- Statistik								
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	17,02	21,28	25,53	29,79	34,04	34,04	BPS
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	17,02	21,28	25,53	29,79	34,04	34,04	BPS
- Persandian								
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	102,29	102,29	102,29	102,29	102,29	102,29	Diskominfo
- Kebudayaan								
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	100	100	100	100	100	Disporabudpar
- Perpustakaan								
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	0	0	0	0	0	Disperpusip
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,2	13,24	13,28	13,32	13,36	13,36	Disperpusip
- Kearsipan								
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	76	77	78	79	80	80	Disperpusip

2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	85	86	87	88	89	89	Disperpusip
3. Urusan Pilihan								
- Kelautan dan Perikanan								
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	18738017	18738017	18738017	18738017	18738017	18738017	DKPP
- Pariwisata								
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	19	25	50	60	70	70	Disporabudpar
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	20,03	20,17	20,89	21,61	23,05	23,05	Disporabudpar
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	53,09	61,73	67,9	74,07	80,25	80,25	Disporabudpar
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,39	2,42	2,45	2,48	2,51	2,51	Disporabudpar
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,1	2,19	2,28	2,37	2,46	2,46	Disporabudpar
- Pertanian								
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	365,811	370,811	371,811	373,811	380,811	380,811	DistanTPH

3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	450	100	100	100	100	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
- Kehutanan								
3.d								Dinas Lingkungan Hidup
- Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	
- Perdagangan								
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	65,52	72,41	82,76	89,66	100	100	DIskopperindag
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	30,98	30,98	30,98	30,98	30,98	30,98	DistanTPH dan Diskopperindag
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	79,07	79,82	80,57	81,33	82,08	82,08	Diskopperindag
- Perindustrian								
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	Diskopperindag

3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	2,1	2,1	2,11	2,11	2,12	2,12	Diskopperindag
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	70	75	80	85	90	90	Diskopperindag
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP dan Diskopperindag
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP dan Diskopperindag
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125	125	125	125	125	125	Diskopperindag
- Transmigrasi								
3.h	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	1	1	1	1	1	Disnakertrans
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
- Perencanaan dan Keuangan								

4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	BPKAD
4.a.2	Rasio PAD	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	BPKAD dan BPS
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	80	80	80	80	80	80	BPKAD
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	100	100	100	100	100	100	BPKAD
- Pengadaan								
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0	0	DPUPR
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	Setda Bagian P2BJ
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	Setda Bagian P2BJ
- Kepegawaian								
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	168,8	168,8	168,8	168,8	168,8	168,8	BKPP
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	65	64,18	64,18	64,18	64,18	64,18	BKPP

4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	91,87	93	94,13	95,27	96,4	96,4	BKPP
- Manajemen Keuangan								
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	477,01	477,01	477,01	477,01	477,01	477,01	
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	232,48	232,48	232,48	232,48	232,48	232,48	
4.d.3	Manajemen Aset	100	100	100	100	100	100	
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	BPKAD
- Transparansi dan Partisipasi Publik								
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	Diskominfo
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	77,78	77,78	88,89	88,89	100	100	Diskominfo
	APSEK DAYA SAING DAERAH							
	Persentase Luasa Lahan Pertanian Yang terlayani Irigasi	72	74	76	78	80	80	DPUPR
	Persentase Sarana perkantoran dan publik yang sesuai standart	85	87	89	91	93	93	DPUPR

	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	64,4	64,9	65,4	66,1	67,2	67,2	DPUPR
	Persentase penetapan perda/perkada tata ruang yang ditetapkan	0	17,65	32,59	52,94	70,59	70,59	DPUPR
	Persentase Hunian dan lingkungan yang layak huni	100	100	100	100	100	100	DISPERKIM
	Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat	62	65	68	71	75	75	DPUPR
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	87,5	84,5	86	87,5	88,5	88,5	DKPP
	Persentase Desa Mandiri	0,67	0,67	0,68	0,69	0,7	0,7	DPMD
	Nilai Indeks SPBE	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,3	DISKOMINFO
	Indeks Keamaman Informasi (KAMI)	134	200	273	300	320	320	DISKOMINFO
	Peringkat IGA	100	100	90	90	80	80	SETDA (ORGANISASI)
	Persentase koperasi berkualitas	4,55	4,76	5	5,26	5,55	5,55	DISKOPERINDAG
	Nilai investasi Daerah (PMDN/PMA)	300 milyar	350 milyar	400 milyar	450 milyar	500 milyar	500 Milyar	DPMPTSP
	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	4	4,3	4,6	4,9	5,2	5,2	DISKOPERINDAG

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupatem Barito Kuala Tahun 2023-2026 disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJM Nasional. Selain itu, hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, sinkronisasi terkait akuntabilitas kinerja daerah dan Perangkat Daerah.

Dokumen RPD ini disusun berdasarkan analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis aktual. RPD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah dalam empat tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana melaksanakan RPD, baik dalam tahapan normal maupun pada masa transisi agar RPD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan Pemerintah Pusat.

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah berakhirnya RPJMD berakhir dan menunggu pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Barito Kuala, maka pedoman transisi ditetapkan Penyusunan RKPD Tahun 2023 sampai 2026 disusun dengan berpedoman pada RPD Tahun 2023- 2026, dan Perubahan RKPD 2022 disesuaikan dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022.

Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah melalui Bappelitbang akan menyusun RPJPD 2025 – 2045 serta RPJMD 2025 – 2030.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 selain mengacu pada RPD Tahun 2023-2026 juga mempertimbangkan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2030.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala agar melaksanakan program-program dalam RPD Tahun 2023-2026 dengan sebaik- baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPD;

3. Penjabaran lebih lanjut RPD Tahun 2023-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Barito Kuala yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang);
4. Dalam hal pelaksanaan RPD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
5. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
6. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPD Tahun 2023-2026 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
8. Evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa RPD terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala serta melaporkan hasilnya kepada penjabat Bupati;
9. Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
10. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD Kabupaten Barito Kuala merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BUPATI BARITO KUALA,

HJ. NOORMILIYANI AS

BUKU 2

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 18 TAHUN 2022

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 - 2026



Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kualitas SDM untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**67.06 Indeks**	**67.11 Indeks**		**67.85 Indeks**		**68.23 Indeks**		**68.60 Indeks**		**0 Indeks**		**68.60 Indeks**			
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat			**Rata-Rata Lama Sekolah** **Harapan Lama Sekolah**	**7.55 Indeks** **12.40 Indeks**	**7.67 Indeks** **12.90 Indeks**		**7.78 Indeks** **13.40 Indeks**		**7.89 Indeks** **13.90 Indeks**		**8.00 Indeks** **14.40 Indeks**		**0 Indeks** **0 Indeks**		**8.00 Indeks** **14.40 Indeks**			
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan yang terlaksana	0 Persen	0,12 Persen	95,129,980,286	0,23 Persen	99,737,001,697	0,35 Persen	103,566,275,459	0,47 Persen	108,278,038,458	0 Persen	0	0,47 Persen	0		
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan pendidikan SD yang terlaksana	0 Persen	0.03 Persen	51,267,099,525	0.06 Persen	47,923,244,964	0.09 Persen	49,839,465,984	0.12 Persen	52,249,274,441	0 Persen	0	0.12 Persen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan pendidikan SMP yang terlaksana	0 Persen	025 Persen	24,368,520,840	0.50 Persen	29,664,018,640	0.75 Persen	31,033,443,640	1.00 Persen	324,449,729,890	0 Persen	0	1.00 Persen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase pengelolaan pendidikan PAUD yang terlaksana	0 Persen	0.06 Persen	17,220,819,921	0.12 Persen	18,022,764,741	0.18 Persen	18,337,231,316	0.24 Persen	19,005,092,882	0 Persen	0	0.24 Persen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan Nonformal yang terlaksana	0 Persen	0.13 Persen	2,273,540,000	0.26 Persen	4,126,973,352	0.39 Persen	4,356,134,519	0.52 Persen	4,573,941,245	0 Persen	0	0.52 Persen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Terbaru	0 Persen	0 Persen	0	0,79 Persen	295,380,000	1,59 Persen	337,950,000	2,38 Persen	380,782,500	0 Persen	0	2,38 Persen	0		
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	0 Dokumen	Dokumen	0	1 Dokumen	295,380,000	1 Dokumen	337,950,000	1 Dokumen	380,782,500	0 Dokumen	0	3 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan	0 Persen	58,02 Persen	11,300,000	70,29 Persen	11,865,000	82,57 Persen	12,458,250	100 Persen	13,081,163	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	0 Dokumen	1 Dokumen	11,300,000	1 Dokumen	11,865,000	1 Dokumen	12,458,250	1 Dokumen	13,081,163	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN																
							0		0		0		0		0		0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan sinergitas penyelanggaraan pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Nilai MCP Korsubgah KPK** **Akuntabilitas (RB)**	**92.23 Persen** **88.06 Persen**	**92.53 Persen** **88.12 Persen**		**93.92 Persen** **88.24 Persen**		**94.30 Persen** **88.36 Persen**		**95.00 Persen** **88.48 Persen**		**0 Persen** **0 Persen**		**95.00 Persen** **88.48 Persen**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	0 Persen	100 Persen	361,274,115,450	100 Persen	379,847,821,223	100 Persen	398,840,212,284	100 Persen	418,782,222,898	0 Persen	0	100 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	0 Persen	100 Persen	229,131,205	100 Persen	350,587,765	100 Persen	368,117,154	100 Persen	386,523,011	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Dilaporkan	0 Persen	100 Persen	355,724,240,099	100 Persen	373,510,452,104	100 Persen	392,185,974,709	100 Persen	411,795,273,445	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlaksana	0 Persen	100 Persen	617,377,436	100 Persen	648,246,308	100 Persen	680,658,623	100 Persen	714,691,554	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Tersedia	0 Persen	100 Persen	1,536,654,995	100 Persen	1,613,487,745	100 Persen	1,694,162,132	100 Persen	1,778,870,239	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	0 Persen	100 Persen	1,376,850,000	100 Persen	1,745,692,500	100 Persen	1,832,977,125	100 Persen	1,924,625,981	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	100 Persen	585,784,435	100 Persen	615,073,657	100 Persen	645,827,340	100 Persen	678,118,707	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	0 Persen	100 Persen	1,204,077,280	100 Persen	1,364,281,144	100 Persen	1,432,495,201	100 Persen	1,504,119,961	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung pembangunan berkelanjutan				**Indeks pembangunan manusia (IPM)**	**67,11 persen**	**67,11 persen**		**67,85 persen**		**68,23 persen**		**68,60 persen**		**0 persen**		**68,60 persen**			
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			**Persentase rata-rata capian SPM Bidang Kesehatan**	**66 Persentase**	**67 Persentase**		**68 Persentase**		**69 Persentase**		**70 Persentase**		**0 Persentase**		**70 Persentase**			
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai UHC	0 Persen	70 Persen	48,225,092,399	75 Persen	48,263,636,124	80 Persen	48,725,326,630	85 Persen	49,246,549,327	0 Persen	0	85 Persen	0		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	15714 Unit	23,883,215,173	15725 Unit	27,465,697,449	15734 Unit	31,585,552,066	15744 Unit	36,323,384,876	0 Unit	0	15744 Unit	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	152302 Orang	39,773,778,021	156478 Orang	45,739,844,724	160286 Orang	52,600,821,433	164922 Orang	60,490,944,648	0 Orang	0	164922 Orang	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	62 Unit	388,394,620	62 Unit	446,653,813	63 Unit	513,651,885	63 Unit	590,699,668	0 Unit	0	63 Unit	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang meningkat kompetensinya	0 Persen	25 Persen	170,344,730	50 Persen	170,480,877	75 Persen	172,111,699	100 Persen	173,952,806	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	172,500,000	2 Dokumen	198,375,000	2 Dokumen	228,131,250	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	6 Dokumen	748,378,170	6 Dokumen	860,634,896	6 Dokumen	989,730,130	6 Dokumen	1,138,189,649	0 Dokumen	0	6 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang	450,000,000	10 Orang	517,500,000	15 Orang	595,125,000	20 Orang	684,393,750	0 Orang	0	20 Orang	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana yang terstandarisasi	0 Persen	0,125 Persen	113,133,597	0,25 Persen	113,224,018	0,5 Persen	114,307,121	1 Persen	115,529,882	0 Persen	0	1 Persen	0		
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0 Sarana	135 Sarana	154,354,130	150 Sarana	177,507,250	165 Sarana	204,133,337	180 Sarana	234,753,337	0 Sarana	0	180 Sarana	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0 Dokumen	25 Dokumen	50,000,000	30 Dokumen	57,500,000	35 Dokumen	66,125,000	40 Dokumen	76,043,750	0 Dokumen	0	40 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase potensi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	0 Persen	80 Persen	255,275,032	85 Persen	255,479,060	90 Persen	257,922,975	95 Persen	260,682,019	0 Persen	0	95 Persen	0		
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	40,318,750	1 Dokumen	46,366,563	1 Dokumen	53,321,547	1 Dokumen	61,319,779	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	205,890,376	1 Dokumen	236,773,932	1 Dokumen	272,290,022	1 Dokumen	313,133,526	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	51,076,230	1 Dokumen	58,737,665	1 Dokumen	67,548,314	1 Dokumen	77,680,561	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya sinergitas pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	0 Persen	100 Persen	74,729,065,228	100 Persen	74,788,792,154	100 Persen	75,504,222,612	100 Persen	76,311,903,489	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	4 Laporan	460,146,055	4 Laporan	529,167,963	4 Laporan	608,543,157	4 Laporan	699,824,631	0 Laporan	0	4 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Dokumen	25016 Dokumen	81,141,495,902	25016 Dokumen	90,312,720,287	25016 Dokumen	100,859,628,330	25016 Dokumen	112,988,572,579	0 Dokumen	0	25,016 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	11,340,600	1 Dokumen	13,041,690	1 Dokumen	14,997,944	1 Dokumen	17,247,635	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Paket	206 Paket	1,316,170,712	206 Paket	1,513,596,318	206 Paket	1,740,635,766	206 Paket	2,001,731,131	0 Paket	0	206 Paket	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	5 Unit	25,000,000	5 Unit	28,750,000	5 Unit	33,062,500	5 Unit	38,021,875	0 Unit	0	5 Unit	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	774 Laporan	2,514,234,128	774 Laporan	2,891,369,247	774 Laporan	3,325,074,634	774 Laporan	3,823,835,829	0 Laporan	0	774 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	446 Unit	845,648,060	446 Unit	972,495,269	446 Unit	1,118,369,559	446 Unit	1,286,124,993	0 Unit	0	446 Unit	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	0 Unit	13 Unit	19,980,578,350	20 Unit	22,977,665,102	21 Unit	26,424,314,867	21 Unit	30,387,962,098	0 Unit	0	21 Unit	0	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Konektifitas antar wilayah dan penyediaan sarana prasarana mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta penanggulangan bencana				**Gini Rasio**	**0,26 nilai**	**0,26 nilai**		**0,25 nilai**		**0,24 nilai**		**0,23 nilai**		**0 nilai**		**0,23 nilai**			
	Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas			**Persentase infrastruktur yg dibangun/dipelihara**	**58,52 persen**	**62,32 persen**		**66,18 persen**		**69,98 persen**		**76,85 persen**		**0 persen**		**76,85 persen**			
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	0 Persen	74 Persen	11,530,561,228	76 Persen	11,530,561,228	78 Persen	11,630,561,228	80 Persen	11,630,561,228	0 Persen	0	80 Persen	0		
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	100 orang	1,764,951,228	100 orang	1,764,951,228	100 orang	1,764,951,228	100 orang	1,764,951,228	0 orang	0	100 orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Daerah Irigasi Rawa kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	0 KM	120 KM	9,765,610,000	124 KM	9,765,610,000	128 KM	9,865,610,000	131 KM	9,865,610,000	0 KM	0	131 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	0 Persen	77,67 Persen	7,621,305,359	82,17 Persen	7,621,305,359	86,17 Persen	7,721,305,359	90,57 Persen	7,821,305,359	0 Persen	0	90,57 Persen	0		
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Minum yang di Bangun	0 unit	5 unit	7,621,305,359	5 unit	7,621,305,359	5 unit	7,721,305,359	5 unit	7,821,305,359	0 unit	0	5 unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	0 Persen	10,00 Persen	368,128,000	11,50 Persen	368,128,000	13,00 Persen	418,128,000	14,50 Persen	468,128,000	0 Persen	0	14,50 Persen	0		
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan akses terhadap pelayanan sanitasi	0 Rumah tangga	1231 Rumah tangga	368,128,000	1268 Rumah tangga	368,128,000	1306 Rumah tangga	418,128,000	1345 Rumah tangga	468,128,000	0 Rumah tangga	0	1345 Rumah tangga	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	0 Persen	87 Persen	9,551,942,350	89 Persen	9,551,942,350	91 Persen	9,601,942,350	93 Persen	9,651,942,350	0 Persen	0	93 Persen	0		
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan yang terbangun dan terpelihara	0 unit	5 unit	9,551,942,350	5 unit	9,551,942,350	5 unit	9,601,942,350	5 unit	9,651,942,350	0 unit	0	20 unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Tertata	0 Persen	100 Persen	11,344,675,043	100 Persen	11,344,675,043	100 Persen	11,444,675,043	100 Persen	11,544,675,043	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luasan bangunan publik berwawasan lingkungan yang terpelihara	0 unit	20 unit	11,344,675,043	20 unit	11,344,675,043	20 unit	11,444,675,043	20 unit	11,544,675,043	0 unit	0	20 unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	0 Persen	67,25 Persen	58,192,497,334	67,5 Persen	58,192,497,334	67,75 Persen	58,740,318,939	68 Persen	59,602,440,433	0 Persen	0	68 Persen	0		
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	0 persen	67,25 persen	58,192,497,334	67,5 persen	58,192,497,334	67,75 persen	58,740,318,939	68 persen	59,602,440,433	0 persen	0	68 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	0 Persen	65 Persen	465,067,977	68 Persen	479,020,016	71 Persen	493,390,617	75 Persen	508,192,335	0 Persen	0	75 Persen	0		
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Tersertifikasi	0 orang	100 orang	325,985,350	100 orang	333,985,350	100 orang	342,985,350	100 orang	345,985,350	0 orang	0	400 orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0 Dokumen	3 Dokumen	83,712,500	3 Dokumen	85,664,539	3 Dokumen	90,712,500	3 Dokumen	96,712,500	0 Dokumen	0	3 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	0 Dokumen	1 Dokumen	18,881,377	1 Dokumen	18,881,377	1 Dokumen	20,881,377	1 Dokumen	23,881,377	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0 Laporan	30 Laporan	36,488,750	30 Laporan	40,488,750	30 Laporan	38,811,390	30 Laporan	41,613,108	0 Laporan	0	30 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Perda/Perkada Produk Hukum Penataan Ruang	0 Persen	17,65 Persen	997,200,638	35,29 Persen	1,027,116,657	52,94 Persen	1,057,930,157	70,59 Persen	1,089,668,062	0 Persen	0	70,59 Persen	0		
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	3 Dokumen	493,649,900	6 Dokumen	513,649,900	9 Dokumen	530,649,900	12 Dokumen	560,649,900	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	433	1 Dokumen	438,312,100	1 Dokumen	449,312,100	1 Dokumen	449,312,100	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dokumen	1 Dokumen	70,238,638	1 Dokumen	75,154,657	1 Dokumen	77,968,157	1 Dokumen	79,706,062	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya sinergitas pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88.06 persen**	**88.12 persen**		**88.24 persen**		**88.36 persen**		**88.48 persen**		**0 persen**		**88.48 persen**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**indeks kepuasan masyarakat**	**96,69 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**0 persen**		**100 persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	16,383,736,307	100 Persen	16,432,944,563	100 Persen	16,554,840,207	100 Persen	16,604,840,207	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi keuangan	0 persen	100 persen	6,233,316,648	100 persen	6,253,316,648	100 persen	6,303,316,648	100 persen	6,353,316,648	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 persen	100 persen	89,099,307	100 persen	89,099,307	100 persen	89,099,307	100 persen	89,099,307	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi umum	0 persen	100 persen	391,160,225	100 persen	392,264,125	100 persen	392,264,125	100 persen	392,264,125	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan barang milik daerah	0 persen	100 persen	204,880,000	100 persen	204,880,000	100 persen	204,880,000	100 persen	204,880,000	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda	0 persen	100 persen	9,151,247,627	100 persen	9,179,351,983	100 persen	9,251,247,627	100 persen	9,251,247,627	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	0 persen	100 persen	314,032,500	100 persen	314,032,500	100 persen	314,032,500	100 persen	314,032,500	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana yang Mendukung Pertumbuhan dan Pengembangan Wilayah serta Penanggulangan Bencana				**GINI RASIO**	**0,26 Persen**	**0,26 Persen**		**0,25 Persen**		**0,24 Persen**		**0,23 Persen**		**0 Persen**		**0,23 Persen**			
	Meningkatnya Hunian dan Lingkungan yang Layak Huni			**Persentase Hunian dan Lingkungan yang Layak Huni**	**0 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	0 Persen	89.63 Persen	930,174,807	89.72 Persen	930,918,245	89.81 Persen	939,823,420	89.90 Persen	949,876,863	0 Persen	0	100 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	0 Persen	100 Persen	223,207,275	100 Persen	158,312,754	100 Persen	185,162,860	100 Persen	171,326,666	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	0 Persen	100 Persen	719,415,350	100 Persen	866,583,150	100 Persen	867,497,000	100 Persen	881,025,300	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0 Persen	100 Persen	108,468,500	100 Persen	71,444,000	100 Persen	75,491,750	100 Persen	94,408,175	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0 Persen	100 Persen	32,161,500	100 Persen	19,410,300	100 Persen	21,071,100	100 Persen	36,939,250	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Permukiman Kumuh	0 Persen	66 Persen	602,083,326	63 Persen	602,564,539	60 Persen	608,328,679	57 Persen	614,836,069	0 Persen	0	0 Persen	0		
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Pencegahan Penambahan Kawasan Permukiman Kumuh	0 Persen	100 Persen	446,896,000	100 Persen	460,302,880	100 Persen	474,111,966	100 Persen	488,335,326	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kecamatan yg diintervensi pencegahan kekumuhan (kecamatan)	0 Kecamatan	17 Kecamatan	132,226,410	17 Kecamatan	136,193,202	17 Kecamatan	140,278,998	17 Kecamatan	144,487,369	0 Kecamatan	0	17 Kecamatan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase luas penurunan permukiman kumuh	0 Persen	64,24 Persen	2,231,203,815	62,25 Persen	2,298,139,930	59,06 Persen	2,367,084,127	55,08 Persen	2,438,096,651	0 Persen	0	0 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pencegahan Area Kawasan Permukiman Kumuh	0 Persen	100 Persen	1,101,704,375	100 Persen	1,134,755,506	100 Persen	1,168,798,171	100 Persen	1,203,862,117	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya pada kawasan kumuh	0 Unit	20 Unit	701,167,500	20 Unit	722,202,525	20 Unit	743,868,601	20 Unit	766,184,659	0 Unit	0	20 Unit	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang layak	0 Persen	51.49 Persen	4,046,092,605	53.99 Persen	4,049,326,430	56.49 Persen	4,088,062,334	58.99 Persen	4,131,792,997	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Perumahan dengan PSU yang layak	0 Persen	16,52 Persen	4,726,416,625	18,77 Persen	4,868,209,124	20,58 Persen	5,014,255,397	22,40 Persen	5,164,683,059	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Layanan Orang/Badan Usaha Pengembang Perumahan Skala Kecil	0 Persen	25 Persen	122,348,496	50 Persen	122,446,283	75 Persen	123,617,605	100 Persen	124,939,963	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Layanan Orang/Badan Usaha Pengembang Perumahan Skala Kecil	0 Persen	60,69 Persen	142,483,250	73,79 Persen	146,757,748	86,90 Persen	151,160,480	100 Persen	155,695,294	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya Sinergitas Pemerintahan yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	3,637,701,366	100 Persen	3,640,608,785	100 Persen	3,675,464,891	100 Persen	3,714,751,613	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	0 Persen	100 Persen	62,151,200	100 Persen	64,015,736	100 Persen	65,936,208	100 Persen	67,914,294	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana	0 Persen	100 Persen	3,194,901,561	100 Persen	3,290,748,608	100 Persen	3,389,471,066	100 Persen	3,491,155,198	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Persen	25 Persen	80,903,000	50 Persen	83,330,090	75 Persen	85,829,993	100 Persen	88,404,892	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana	0 Persen	100 Persen	458,593,100	100 Persen	472,350,893	100 Persen	486,521,420	100 Persen	501,117,062	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	167,410,750	100 Persen	172,433,073	100 Persen	177,606,065	100 Persen	182,934,247	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	0 Persen	100 Persen	129,149,164	100 Persen	133,023,639	100 Persen	137,014,348	100 Persen	141,124,779	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	0 Persen	100 Persen	143,245,000	100 Persen	147,542,350	100 Persen	151,968,621	100 Persen	156,527,679	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk lokal unggulan daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,00 Persen**	**4,13 Persen**		**4,46 Persen**		**4,78 Persen**		**5,11 Persen**		**0 Persen**		**5,11 Persen**			
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam mendukung Kegiatan ekonomi.			**Persentase kecamatan dengan aktifitas ekonomi yang tertib**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang diawasi	0 Persen	100 Persen	888,553,911	100 Persen	889,264,084	100 Persen	897,770,795	100 Persen	907,374,394	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang diawasi.	0 Persen	100 Persen	827,562,386	100 Persen	828,272,559	100 Persen	836,779,270	100 Persen	846,382,869	0 Persen	0	100 Persen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Masyarakat di Kecamatan terhadap PERDA dan PERKADA	0 Persen	100 Persen	60,991,525	100 Persen	60,991,525	100 Persen	60,991,525	100 Persen	60,991,525	0 Persen	0	100 Persen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	0 Persen	100 Persen	66,838,898	100 Persen	66,892,319	100 Persen	67,532,211	100 Persen	68,254,614	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	0 Persen	100 Persen	66,838,898	100 Persen	66,892,319	100 Persen	67,532,211	100 Persen	68,254,614	0 Persen	0	100 Persen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya sinergitas pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,46 Persen**		**0 Persen**		**88,46 Persen**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik"			**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Indeks**	**100 Indeks**		**100 Indeks**		**100 Indeks**		**100 Indeks**		**0 Indeks**		**100 Indeks**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	5,055,415,286	100 Persen	5,059,455,808	100 Persen	5,017,854,621	100 Persen	5,162,494,168	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	56 Orang/bulan	4,920,983,886	56 Orang/bulan	4,930,024,408	56 Orang/bulan	4,887,660,721	56 Orang/bulan	5,033,062,768	0 Orang/bulan	0	224 Orang/bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	18 Orang	40,230,800	18 Orang	40,230,800	18 Orang	40,230,800	18 Orang	40,230,800	0 Orang	0	54 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Perangkat Daerah	0 %	100 %	50,141,000	100 %	50,141,000	100 %	50,141,000	100 %	50,141,000	0 %	0	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Unit	9 Unit	9,000,000	21 Unit	4,000,000	23 Unit	4,762,500	20 Unit	4,000,000	0 Unit	0	66 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	0 Bulan	12 Bulan	35,059,600	12 Bulan	35,059,600	12 Bulan	35,059,600	12 Bulan	35,059,600	0 Bulan	0	12 Bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	0 %	100 %	55,375,000	100 %	55,375,000	100 %	55,375,000	100 %	55,375,000	0 %	0	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebencanaan			**Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani**	**88,06 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang ditangani	0 Persen	100 Persen	993,176,370	100 Persen	1,092,494,007	100 Persen	1,201,743,408	100 Persen	1,321,917,748	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	PERSENTASE DESA DAN KELURAHAN YANG MENDAPATKAN SOSIALISASI KEBENCANAAN	0 persen	100 persen	121,496,200	100 persen	133,645,820	100 persen	147,010,402	100 persen	161,711,442	0 persen	0	100 persen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PERSENTASE PELAYANAN PENCEGAHAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	0 persen	100 persen	460,240,000	100 persen	506,264,000	100 persen	556,890,400	100 persen	612,579,440	0 persen	0	100 persen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PERSENTASE PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	0 persen	100 persen	291,229,670	100 persen	320,352,637	100 persen	352,387,901	100 persen	387,626,691	0 persen	0	100 persen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	PERSENTASE DOKUMEN KEBENCANAAN YANG DISUSUN	0 persen	100 persen	162,710,500	100 persen	178,981,550	100 persen	196,879,705	100 persen	216,567,676	0 persen	0	100 persen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**indeks kepuasan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,618,021,195	100 Persen	1,779,823,315	100 Persen	1,957,805,646	100 Persen	2,153,586,211	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 persen	100 persen	35,000,000	100 persen	38,500,000	100 persen	42,350,000	100 persen	46,585,000	0 persen	0	100 persen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi keuangan	0 persen	100 persen	1,453,500,000	100 persen	1,598,850,000	100 persen	1,758,735,000	100 persen	1,934,608,500	0 persen	0	100 persen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 persen	100 persen	132,659,600	100 persen	145,925,560	100 persen	160,518,116	100 persen	176,569,928	0 persen	0	100 persen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi umum	0 persen	100 persen	186,806,573	100 persen	205,487,230	100 persen	226,035,953	100 persen	248,639,549	0 persen	0	100 persen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan barang milik daerah	0 persen	100 persen	1,475,000,000	100 persen	1,622,500,000	100 persen	1,784,750,000	100 persen	1,963,225,000	0 persen	0	100 persen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda	0 persen	100 persen	132,522,500	100 persen	145,774,750	100 persen	160,352,225	100 persen	176,387,448	0 persen	0	100 persen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	0 persen	100 persen	114,000,000	100 persen	125,400,000	100 persen	137,940,000	100 persen	151,734,000	0 persen	0	100 persen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Tertib Melalui Peningkatan Produktifitas dan Hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah Dalam Rangka Membuka Peluang Kerja yang Berdampak Pada Peningkatan Pendapatan Daerah				**Persentase Tingkat Kemiskinan**	**5,105 Persen**	**4,68 Persen**		**4,65 Persen**		**4,59 Persen**		**4,54 Persen**		**0 Persen**		**4,54 Persen**			
	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri**	**2,72 Persen**	**2,72 Persen**		**3,34 Persen**		**3,96 Persen**		**4,58 Persen**		**0 Persen**		**4,58 Persen**			
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	0 Persen	100 Persen	180,000,270	100 Persen	198,000,297	100 Persen	217,800,327	100 Persen	239,580,360	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha dan keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan	0 Keluarga	105 Keluarga	210,457,021	115 Keluarga	210,715,729	145 Keluarga	212,814,625	155 Keluarga	215,045,904	0 Keluarga	0	155 Keluarga	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan yang dikelola	0 Persen	100 Persen	113,232,800	100 Persen	113,232,800	100 Persen	114,232,800	100 Persen	115,500,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, penyandang disabilitas dan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri	0 Persen	100 Persen	147,490,753	100 Persen	162,239,827	100 Persen	178,463,809	100 Persen	196,310,189	0 Persen	0	67,8 Persen	0		
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan penyandang disabilitas yang mandiri	0 Orang	212 Orang	63,324,186	216 Orang	126,749,596	217 Orang	63,981,042	218 Orang	129,330,916	0 Orang	0	218 Orang	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0 Persen	100 Persen	63,324,186	00 Persen	0	100 Persen	63,981,042	00 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	0 Persen	100 Persen	618,999,860	100 Persen	680,899,847	100 Persen	748,989,831	100 Persen	823,888,814	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	0 Kecamatan	17 Kecamatan	161,110,205	17 Kecamatan	161,335,026	17 Kecamatan	163,423,684	17 Kecamatan	166,168,493	0 Kecamatan	0	17 Kecamatan	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0 Keluarga	8995 Keluarga	370,416,848	8871 Keluarga	370,616,848	8747 Keluarga	373,616,848	8623 Keluarga	376,616,848	0 Keluarga	0	8623 Keluarga	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	0 Persen	100 Persen	494,999,728	100 Persen	544,499,701	100 Persen	598,949,671	100 Persen	658,844,638	0 Persen	0	100 Persen	0		
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	0 Orang	200 Orang	425,049,767	200 Orang	425,389,487	200 Orang	429,458,768	200 Orang	434,052,757	0 Orang	0	200 Orang	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
Meningkatnya sinergitas pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	5,144,938,223	100 Persen	5,659,457,620	100 Persen	6,228,703,379	100 Persen	6,851,573,712	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 Persen	100 Persen	66,319,635	100 Persen	72,951,598	100 Persen	80,246,757	100 Persen	88,271,432	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	2,465,208,866	100 Persen	2,711,729,752	100 Persen	2,982,902,727	100 Persen	3,281,192,999	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	74,975,000	100 Persen	82,472,500	100 Persen	90,719,750	100 Persen	99,791,725	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	195,360,495	100 Persen	214,896,544	100 Persen	236,386,198	100 Persen	260,024,817	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemda	0 Persen	100 Persen	91,567,578	100 Persen	100,724,335	100 Persen	110,796,768	100 Persen	121,876,444	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	0 Persen	100 Persen	106,176,800	100 Persen	116,794,480	100 Persen	128,473,928	100 Persen	141,321,320	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
							0		0		0		0		0		0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
Meningkatkan aktivitas Ekonomi Masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktvitas dan hilirisasi produk lokal unggulan daerah,dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**3,03 Persen**	**2,98 Persen**		**2,7 Persen**		**2,38 Persen**		**1,76 Persen**		**0 Persen**		**1,76 Persen**			
	Meningkatnya Kesempatan Kerja			**Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja**	**0 Persen**	**25 Persen**		**50 Persen**		**75 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	0 Persen	100 Persen	1,753,000,000	100 Persen	1,638,000,000	100 Persen	1,588,000,000	100 Persen	2,288,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan yang Kompeten	0 Orang	160 Orang	1,753,000,000	160 Orang	1,638,000,000	160 Orang	1,588,000,000	160 Orang	2,288,000,000	0 Orang	0	160 Orang	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	0 Persen	100 Persen	732,000,000	100 Persen	183,000,000	100 Persen	183,000,000	100 Persen	183,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Difasilitasi	0 Orang	40 Orang	143,000,000	40 Orang	143,000,000	40 Orang	143,000,000	40 Orang	143,000,000	0 Orang	0	40 Orang	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkatan Kerja yang Difasilitasi	0 Orang	40 Orang	40,000,000	40 Orang	40,000,000	40 Orang	40,000,000	40 Orang	40,000,000	0 Orang	0	40 Orang	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan aktivitas Ekonomi Masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktvitas dan hilirisasi produk lokal unggulan daerah,dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**3,03 Persen**	**2,98 Persen**		**2,7 Persen**		**2,38 Persen**		**1,76 Persen**		**0 Persen**		**1,76 Persen**			
	Meningkatnya kesejahteraan Pekerja			**Persentase Perusahaan yang menerapkan Jamsostek dan UMP**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Jamsostek & UMP	0 Persen	100 Persen	243,750,000	100 Persen	243,750,000	100 Persen	243,750,000	100 Persen	243,750,000	0 Persen	0	100 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	0 Perusahaan	10 Perusahaan	100,000,000	10 Perusahaan	100,000,000	10 Perusahaan	100,000,000	10 Perusahaan	100,000,000	0 Perusahaan	0	10 Perusahaan	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Dimediasi/Difasilitasi	0 Persen	100 Persen	143,750,000	100 Persen	143,750,000	100 Persen	143,750,000	100 Persen	143,750,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan aktivitas Ekonomi Masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktvitas dan hilirisasi produk lokal unggulan daerah,dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**3,03 Persen**	**2,98 Persen**		**2,7 Persen**		**2,38 Persen**		**1,76 Persen**		**0 Persen**		**1,76 Persen**			
	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan di Kawasan transmigrasi			**Persentase Sapras di Kawasan Transmigrasi yang dibangu**	**0 Persen**	**25 Persen**		**50 Persen**		**75 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	persentase sapras yang dibangun dkawasan transmigrasi	0 Persen	100 Persen	293,000,000	100 Persen	293,000,000	100 Persen	315,000,000	100 Persen	315,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Satuan Permukiman Mandiri	0 Persen	100 Persen	293,000,000	100 Persen	293,000,000	100 Persen	315,000,000	100 Persen	315,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya Sinergitas Pemerintah yang baik untuk terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	2,805,460,733	100 Persen	3,599,703,512	100 Persen	3,767,577,991	100 Persen	3,834,639,918	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 Persen	100 Persen	56,854,720	100 Persen	56,854,720	100 Persen	56,854,720	100 Persen	56,854,720	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Adminsitasri Keuangan	0 Persen	100 Persen	2,118,015,089	100 Persen	2,633,744,792	100 Persen	2,715,619,271	100 Persen	2,815,681,198	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	0 Persen	100 Persen	75,000,000	100 Persen	125,000,000	100 Persen	162,000,000	100 Persen	187,500,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	186,926,195	100 Persen	194,000,000	100 Persen	223,000,000	100 Persen	259,500,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 Persen	0 Persen	0	100 Persen	130,000,000	100 Persen	150,000,000	100 Persen	55,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0 Persen	100 Persen	265,594,729	100 Persen	298,664,000	100 Persen	298,664,000	100 Persen	298,664,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	0 Persen	100 Persen	103,070,000	100 Persen	161,440,000	100 Persen	161,440,000	100 Persen	161,440,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan				**Indek Pembangunan Manusia (IPM)**	**67,06 persen**	**67,11 persen**		**67,85 persen**		**68,23 persen**		**68,60 persen**		**0 persen**		**68,97 persen**			
	Meningkatnya Kesetaraan Gender			**Indek Pembangunan Gender (IPG)**	**89,35 Persen**	**89,35 Persen**		**89,45 Persen**		**89,55 Persen**		**89,65 Persen**		**0 Persen**		**89,65 Persen**			
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SKPD yang mengimplemtasikan PPRG dalam RKA	0 Persen	100 Persen	59,994,315	100 Persen	70,000,000	100 Persen	80,000,000	100 Persen	90,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan yang aktif dalam Pembangunan Gender	0 persen	89,25 persen	59,994,315	89,35 persen	70,000,000	89,45 persen	80,000,000	89,55 persen	90,000,000	0 persen	0	89,55 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan yang berperan dalam pembangunan di tingkat desa	0 Persen	100 Persen	343,739,973	100 Persen	450,000,000	100 Persen	55,000,000	100 Persen	650,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang berperan dalam pembangunan	0 persen	25 persen	343,739,973	25 persen	450,000,000	25 persen	550,000,000	25 persen	650,000,000	0 persen	0	25 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan				**Indek Pembangunan Manusia (IPM)**	**67,06 Persen**	**67,11 Persen**		**67,85 Persen**		**68,23 Persen**		**68,60 Persen**		**0 Persen**		**68,97 Persen**			
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak			**Score Capaian KLA**	**700 Nilai**	**700 Nilai**		**725 Nilai**		**750 Nilai**		**775 Nilai**		**0 Nilai**		**775 Nilai**			
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi perempuan korban kekerasan yang diselesaikan	0 Persen	100 Persen	322,364,820	100 Persen	348,632,048	100 Persen	393,426,855	100 Persen	442,690,883	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	0 persen	100 persen	149,641,300	100 persen	150,000,000	100 persen	165,000,000	100 persen	180,000,000	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang diselesaikan	0 persen	100 persen	172,723,520	100 persen	198,632,048	100 persen	228,426,855	100 persen	262,690,883	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentasedesa yang memiliki forum anak desa	0 Persen	100 Persen	341,095,700	100 Persen	360,000,000	100 Persen	380,000,000	100 Persen	400,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa yang memiliki forum anak desa	0 persen	3,5 persen	341,095,700	3,5 persen	360,000,000	3,5 persen	380,000,000	3,5 persen	400,000,000	0 persen	0	3,5 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan				**Indek Pembangunan Manusia (IPM)**	**67,06 Persen**	**67,11 Persen**		**67,85 Persen**		**68,23 Persen**		**68,60 Persen**		**0 Persen**		**68,97 Persen**			
	Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk			**TFR (Total Ferteliti Rate)**	**2,24 Persen**	**2,28 Persen**		**2,27 Persen**		**2,25 Persen**		**2,23 Persen**		**0 Persen**		**2,23 Persen**			
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19 Tahun)	0 Persen	100 Persen	205,634,810	100 Persen	217,634,810	100 Persen	229,634,810	100 Persen	241,634,810	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Masyarakat yang mengetahui tentang isu-isu kependudukan	0 persen	100 persen	154,857,250	100 persen	161,857,250	100 persen	168,857,250	100 persen	175,857,250	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data kependudukan yang akurat dan valid	0 persen	100 persen	50,777,560	100 persen	55,777,560	100 persen	60,777,560	100 persen	61,777,560	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmet Need	0 Persen	100 Persen	731,468,470	100 Persen	768,041,894	100 Persen	844,846,084	100 Persen	929,330,691	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	0 persen	100 persen	731,468,470	100 persen	768,041,894	100 persen	844,846,084	100 persen	929,330,691	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0 persen	100 persen	48,806,990	100 persen	58,806,990	100 persen	68,806,990	100 persen	78,806,990	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmet Need	0 Persen	100 Persen	231,714,205	100 Persen	112,601,390	100 Persen	115,751,750	100 Persen	117,951,410	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0 persen	100 persen	231,714,205	100 persen	112,601,390	100 persen	115,751,750	100 persen	117,951,410	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan Pemerintah yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik			**Indek Kepuasan Manusia (IKM)**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	3,000,000,000	100 Persen	3,285,000,000	100 Persen	3,570,000,000	100 Persen	3,855,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 persen	100 persen	14,873,480	100 persen	19,873,480	100 persen	24,873,480	100 persen	29,873,480	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 persen	100 persen	2,812,563,895	100 persen	3,067,563,895	100 persen	3,322,563,895	100 persen	3,577,563,895	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 persen	100 persen	201,746,275	100 persen	236,746,275	100 persen	271,746,275	100 persen	306,746,275	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0 persen	100 persen	42,258,000	100 persen	52,258,000	100 persen	62,258,000	100 persen	72,258,000	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 persen	100 persen	172,600,000	100 persen	197,600,000	100 persen	222,600,000	100 persen	247,600,000	0 persen	0	100 persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk lokal unggulan daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,00 Persen**	**4,13 Persen**		**4,46 Persen**		**4,78 Persen**		**5,11 Persen**		**0 Persen**		**5,11 Persen**			
	Meningkatnya Kemandirian dan Diversifikasi Pangan			**Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan**	**1,02 Persen**	**1,11 Persen**		**1,20 Persen**		**1,29 Persen**		**1,38 Persen**		**0 Persen**		**1,38 Persen**			
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang mandiri	0 Persen	50 Persen	6,010,808,094	60 Persen	6,015,612,210	60 Persen	6,073,157,627	70 Persen	6,138,123,176	0 Persen	0	70 Persen	0		
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat Dengan Stock Gabah di Atas 3 Ton	0 Unit	12 Unit	6,010,808,094	19 Unit	6,015,612,210	20 Unit	6,073,157,627	24 Unit	6,138,123,176	0 Unit	0	24 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	0 Skor	91 Skor	583,873,536	92 Skor	584,340,195	93 Skor	589,930,000	94 Skor	596,240,576	0 Skor	0	94 Skor	0		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis Ketersediaan Pangan Masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen	136,471,635	1 Dokumen	136,658,297	1 Dokumen	137,776,258	1 Dokumen	141,239,577	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	0 Ton	84,788 Ton	151,109,400	94,788 Ton	151,202,735	104,788 Ton	152,991,473	114,788 Ton	153,940,556	0 Ton	0	114,788 Ton	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penurunan Konsumsi Beras	0 Persen	1,5 Persen	296,292,501	1,5 Persen	296,479,163	1,5 Persen	299,162,269	1,5 Persen	301,060,443	0 Persen	0	1,5 Persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase komoditas pangan yang aman dikonsumsi	0 Persen	90 Persen	33,294,819	95 Persen	33,321,430	97 Persen	33,640,183	98 Persen	34,000,038	0 Persen	0	98 Persen	0		
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas Pangan yang di Uji Keamanan Pangannya	0 Komoditas	20 Komoditas	33,294,819	25 Komoditas	33,321,430	25 Komoditas	33,640,183	25 Komoditas	34,000,038	0 Komoditas	0	25 Komoditas	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk lokal unggulan daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,00 Persen**	**4,13 Persen**		**4,46 Persen**		**4,78 Persen**		**5,11 Persen**		**0 Persen**		**5,11 Persen**			
	Meningkatnya Produksi Perikanan			**Persentase Produksi Perikanan**	**0,54 Persen**	**2,67 Persen**		**2,73 Persen**		**2,79 Persen**		**2,85 Persen**		**0 Persen**		**2,85 Persen**			
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aggregat Persentase produksi perikanan tangkap	0 Persen	0,02 Persen	433,127,818	0,02 Persen	433,473,994	0,02 Persen	437,620,611	0,02 Persen	442,301,909	0 Persen	0	0,02 Persen	0		
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Perikanan Tangkap Penerima Sarana dan Prasarana Sesuai Kriteria Kelompok	0 Kelompok	3 Kelompok	254,773,214	3 Kelompok	254,946,302	3 Kelompok	257,019,610	3 Kelompok	259,360,259	0 Kelompok	0	12 Kelompok	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah Nelayan yang di Bina Untuk Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	0 Orang	180 Orang	178,354,604	180 Orang	178,527,692	180 Orang	180,601,001	180 Orang	182,941,650	0 Orang	0	720 Orang	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Aggregat Persentase produksi perikanan budidaya	0 Persen	5 Persen	864,245,363	5 Persen	864,936,108	5 Persen	873,210,097	5 Persen	882,550,966	0 Persen	0	5 Persen	0		
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan yang di Bina Untuk Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	0 Orang	160 Orang	77,444,400	160 Orang	77,674,648	160 Orang	80,432,644	160 Orang	83,546,267	0 Orang	0	640 Orang	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya Penerima Sarana dan Prasarana sesuai Kriteria	0 Kelompok	4 Kelompok	786,800,963	4 Kelompok	787,261,460	4 Kelompok	792,777,453	4 Kelompok	799,004,699	0 Kelompok	0	16 Kelompok	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya Senergitas Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	5,028,211,250	100 Persen	5,030,751,255	100 Persen	5,061,176,338	100 Persen	5,095,918,622	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realissi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	0 Persen	100 Persen	45,442,200	100 Persen	45,637,585	100 Persen	47,977,976	100 Persen	50,620,146	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	4,181,828,880	100 Persen	4,182,024,265	100 Persen	4,184,364,656	100 Persen	4,187,006,826	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	20,121,200	100 Persen	20,316,585	100 Persen	22,656,976	100 Persen	25,299,146	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Admnistrasi Umum	0 Persen	100 Persen	262,843,458	100 Persen	263,624,998	100 Persen	272,986,562	100 Persen	283,949,316	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	97,865,000	100 Persen	98,060,385	100 Persen	100,400,776	100 Persen	103,042,946	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	214,289,012	100 Persen	214,875,167	100 Persen	221,896,340	100 Persen	229,822,850	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	0 Persen	100 Persen	205,821,500	100 Persen	206,212,270	100 Persen	210,893,052	100 Persen	216,177,392	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Pertumbuhan Ekonomi**	**52 Unit**	**10 Unit**		**10 Unit**		**10 Unit**		**10 Unit**		**0 Unit**		**40 Unit**			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** **Persentase Pertumbuhan Ekonomi Lingkungan** **Persentase Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup** **Persentase Lingkungan Bersih dan Sehat**	**63,21 Indeks** **0 Persen** **0 Persen** **0 Persen**	**62,66 Indeks** **65,00 Persen** **100 Persen** **100 Persen**		**63,03 Indeks** **76,00 Persen** **100 Persen** **100 Persen**		**63,44 Indeks** **89,00 Persen** **100 Persen** **100 Persen**		**63,84 Indeks** **100 Persen** **100 Persen** **100 Persen**		**0 Indeks** **0 Persen** **0 Persen** **0 Persen**		**63,84 Indeks** **100 Persen** **100 Persen** **100 Persen**			
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Cakupan Layanan Informasi Status Kualitas Air, Tanah dan Udara	0 Persen	100 Persen	910,888,721	100 Persen	911,616,745	100 Persen	920,337,282	100 Persen	930,182,279	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Parameter Lingkungan yang Terakreditasi	0 Persen	100 Persen	595,000,000	100 Persen	590,728,224	100 Persen	580,337,282	100 Persen	590,182,279	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Laporan yang Disampaikan untuk Kepentingan Publik	0 Persen	100 Persen	185,888,721	100 Persen	190,888,521	100 Persen	200,000,000	100 Persen	195,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0 Persen	100 Persen	130,000,000	100 Persen	130,000,000	100 Persen	140,000,000	100 Persen	145,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Jumlah RTH yang Terpelihara	0 Persen	100 Persen	16,091,792	100 Persen	16,104,653	100 Persen	16,258,711	100 Persen	16,432,633	0 Persen	0	100 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Tutupan Hutan	0 Persen	100 Persen	16,091,782	100 Persen	16,104,653	100 Persen	16,258,711	100 Persen	16,432,633	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3/Medis yang dikelola	0 Persen	100 Persen	437,919,678	100 Persen	438,269,683	100 Persen	442,462,176	100 Persen	447,195,266	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Perusahaan yang Mengelola Limbah B3	0 Persen	100 Persen	9,987,625	100 Persen	15,000,000	100 Persen	20,000,000	100 Persen	25,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah Medis yang Terkelola	0 Persen	100 Persen	427,932,053	100 Persen	423,269,983	100 Persen	422,462,176	100 Persen	422,195,266	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Persen	100 Persen	42,934,571	100 Persen	42,968,886	100 Persen	43,379,927	100 Persen	43,843,969	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Lingkungan yang Diterbitkan	0 Persen	100 Persen	42,934,571	100 Persen	42,968,886	100 Persen	43,379,927	100 Persen	43,843,969	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat yang Terampil dalam Pengelolaan Lingkungan	0 Persen	100 Persen	48,945,152	100 Persen	48,984,271	100 Persen	49,452,855	100 Persen	49,981,860	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Pelatihan/Pendidikan/Penyuluhan Lingkungan	0 Persen	100 Persen	48,945,152	100 Persen	48,984,271	100 Persen	49,452,855	100 Persen	49,981,860	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa/Kota yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan	0 Persen	100 Persen	51,526,167	100 Persen	51,567,349	100 Persen	52,060,643	100 Persen	52,617,544	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Titik Pantau Penilaian	0 Persen	100 Persen	51,526,167	100 Persen	51,567,349	100 Persen	52,060,643	100 Persen	52,617,544	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang Tertangani	0 Persen	100 Persen	25,760,606	100 Persen	25,781,195	100 Persen	26,027,818	100 Persen	26,306,242	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Dilayani	0 Persen	100 Persen	25,760,606	100 Persen	25,781,195	100 Persen	26,027,818	100 Persen	26,306,242	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	0 Persen	100 Persen	5,275,873,023	100 Persen	5,280,089,745	100 Persen	5,330,599,145	100 Persen	5,387,621,426	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang Terkelola	0 Persen	100 Persen	5,275,823,023	100 Persen	5,280,089,745	100 Persen	5,330,599,145	100 Persen	5,387,621,426	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	3,523,345,263	100 Persen	3,526,161,283	100 Persen	3,559,892,583	100 Persen	3,597,973,330	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Persen	100 Persen	24,999,870	100 Persen	27,499,857	100 Persen	30,249,842	100 Persen	33,274,826	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	32,000,000	100 Persen	82,700,000	100 Persen	53,700,000	100 Persen	56,900,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Adminstrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	3,701,247,572	100 Persen	4,071,372,328	100 Persen	4,478,509,561	100 Persen	4,926,360,517	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Adminstrasi Umum	0 Persen	100 Persen	78,882,455	100 Persen	254,114,862	100 Persen	317,999,848	100 Persen	357,049,833	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	32,000,000	100 Persen	82,700,000	100 Persen	53,700,000	100 Persen	56,900,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	100 Persen	131,928,000	100 Persen	145,120,800	100 Persen	159,632,880	100 Persen	175,596,168	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD	0 Persen	100 Persen	138,067,400	100 Persen	151,874,140	100 Persen	167,061,554	100 Persen	183,767,709	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik yang berkualitas				**Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid dan terintegrasi			**Persentasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil** **Persentase data kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid dan terintegrasi**	**63 Persen** **35 Persen**	**73 Persen** **86 Persen**		**82 Persen** **88 Persen**		**89 Persen** **89 Persen**		**97 Persen** **90 Persen**		**0 Persen** **0 Persen**		**97 Persen** **90 Persen**			
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan sesuai Standar (KIA, Kartu Keluarga dan KTP)	0 Persen	82,67 Persen	1,283,782,874	87,00 Persen	1,322,296,360	91,00 Persen	1,361,965,251	94,33 Persen	1,402,824,208	0 Persen	0	94 Persen	0		
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (KTP,KIA,Kartu Keluarga,SKPWNI,Data Rentan dan Non Permanen)	0 dokumen	75800 dokumen	843,426,619	75800 dokumen	849,176,619	75800 dokumen	869,176,619	75800 dokumen	900,035,576	0 dokumen	0	75800 dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pengadaan Dokumen Kependudukan (blanko KIA, Ribbon KTP el, Ribbon KIA)	0 kali	3 kali	410,000,000	2 kali	438,763,486	3 kali	458,432,377	2 kali	468,432,377	0 kali	0	2 kali	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
		2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah ASN dan THL yang mengikuti bimbingan dan rapat operator	0 orang	39 orang	30,356,255	39 orang	34,356,255	39 orang	34,356,255	39 orang	34,356,255	0 orang	0	39 orang	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Dokumen Pencatatn Sipil yang diterbitkan Sesuai Standart (Akta Kelahiran)	0 Persen	63 Persen	125,216,335	76 Persen	128,972,825	87 Persen	132,842,010	99 Persen	136,827,270	0 Persen	0	99 Persen	0		
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai standar (Akta kelahiran,Akta perkawinan,Akta kematian dan Perceraian)	0 dokumen	38974 dokumen	125,216,335	38974 dokumen	104,972,825	38666 dokumen	108,842,010	38666 dokumen	112,827,270	0 dokumen	0	36666 dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
		2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan Teknis	0 Orang	0 Orang	0	3 Orang	24,000,000	3 Orang	24,000,000	3 Orang	24,000,000	0 Orang	0	3 Orang	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentasi Pemanfaatan Data Kependudukan	0 Persen	100 Persen	73,030,538	100 Persen	73,030,538	100 Persen	73,030,538	100 Persen	75,673,151	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah PKS dan inovasi yang dilaksanakan	0 inovasi	2 inovasi	32,680,668	2 inovasi	32,680,668	2 inovasi	32,680,668	2 inovasi	32,680,668	0 inovasi	0	2 inovasi	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	0 kecamatan	6 kecamatan	26,349,870	6 kecamatan	26,349,870	6 kecamatan	26,349,870	6 kecamatan	26,349,870	0 kecamatan	0	6 kecamatan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentasi data kependudukan skala kabupaten yang akurat	0 Persen	72 Persen	10,000,000	75 Persen	12,490,916	78 Persen	15,056,560	80 Persen	15,056,560	0 Persen	0	80 Persen	0		
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan	0 laporan	14 laporan	10,000,000	14 laporan	12,490,916	14 laporan	15,056,560	14 laporan	15,056,560	0 laporan	0	14 laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meingkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	2,507,970,253	100 Persen	2,583,209,361	100 Persen	2,660,705,641	100 Persen	2,740,526,811	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 persen	100 persen	1,999,680	100 persen	8,770,000	100 persen	8,770,000	100 persen	8,770,000	0 persen	0	100 persen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi keuangan	0 persen	100 persen	1,867,921,626	100 persen	1,867,921,986	100 persen	1,867,921,986	100 persen	1,867,921,986	0 persen	0	100 persen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	44,401,800	100 Persen	44,401,800	100 Persen	44,401,800	100 Persen	44,401,800	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi umum	0 persen	100 persen	225,035,603	100 persen	238,033,868	100 persen	238,033,868	100 persen	238,033,868	0 persen	0	100 persen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda	0 persen	100 persen	262,547,794	100 persen	227,604,794	100 persen	227,604,794	100 persen	227,604,794	0 persen	0	100 persen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	0 persen	100 persen	106,063,750	100 persen	106,063,750	100 persen	106,063,750	100 persen	106,063,750	0 persen	0	100 persen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**MCP Korsupgah KPK**	**92,23 Persen**	**92,53 Persen**		**93,92 Persen**		**94,30 Persen**		**95,00 Persen**		**0 Persen**		**95,00 Persen**			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa			**MCP Korsupgah KPK Unsur Tata Kelola Desa** **Indeks Desa Membangun**	**90,00 Persen** **0,66 Persen**	**92,00 Persen** **0,67 Persen**		**95,00 Persen** **0,68 Persen**		**98,00 Persen** **0,69 Persen**		**100 Persen** **0,70 Persen**		**0 Persen** **0 Persen**		**100 Persen** **0,70 Persen**			
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terlaksananya Penataan Desa	0 Persen	5 Persen	115,814,526	5 Persen	117,407,152	5 Persen	56,393,485	6 Persen	56,996,735	0 Persen	0	6 Persen	0		
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi penataan desa	0 Persen	5 Persen	115,814,526	5 Persen	117,407,152	5 Persen	56,393,485	6 Persen	56,996,735	0 Persen	0	6 Persen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	persentase desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	0 Persen	20 Persen	26,545,446	25 Persen	26,566,662	30 Persen	26,820,799	35 Persen	27,107,706	0 Persen	0	35 Persen	0		
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	0 Dokumen	3 Dokumen	26,545,446	3 Dokumen	26,566,662	3 Dokumen	26,820,799	3 Dokumen	27,107,706	0 Dokumen	0	3 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi yang baik	0 Persen	90 Persen	1,876,845,762	92 Persen	1,876,845,762	94 Persen	1,956,936,476	96 Persen	1,977,870,142	0 Persen	0	96 Persen	0		
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Tata kelola Pemerintahan desa yang dibina	0 Persen	90 Persen	1,876,845,762	92 Persen	1,876,845,762	94 Persen	1,956,936,476	96 Persen	1,977,870,142	0 Persen	0	96 Persen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif	0 Persen	35 Persen	755,451,525	40 Persen	756,055,317	45 Persen	763,287,751	50 Persen	771,452,763	0 Persen	0	50 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang dibina	0 Persen	35 Persen	755,451,525	40 Persen	756,055,317	45 Persen	763,287,751	50 Persen	771,452,763	0 Persen	0	50 Persen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	
							0		0		0		0		0		0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas Reformasi Birokrasi**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	2,635,070,026	100 Persen	2,637,176,096	100 Persen	2,662,403,353	100 Persen	2,690,883,512	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 Persen	100 Persen	36,220,480	100 Persen	36,220,480	100 Persen	36,220,480	100 Persen	36,220,480	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	2,068,126,231	100 Persen	2,072,503,301	100 Persen	2,072,503,301	100 Persen	2,076,210,717	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi administrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	58,938,400	100 Persen	58,938,400	100 Persen	58,938,400	100 Persen	58,938,400	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	158,740,690	100 Persen	160,519,690	100 Persen	159,900,697	100 Persen	160,519,690	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	34,100,000	100 Persen	25,000,000	0 Persen	50,846,250	0 Persen	75,000,000	0 Persen	0	0 Persen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	100 Persen	160,570,475	100 Persen	160,570,475	100 Persen	160,570,475	100 Persen	160,570,475	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	0 Persen	100 Persen	118,373,750	100 Persen	123,423,750	100 Persen	123,423,750	100 Persen	123,423,750	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat yang Tertib Melalui Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerahdalam Rangka Membuka Peluang Kerja yang Berdampak Pada Peningkatan Pendapatan Daerah				**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,00 Persen**	**4,13 Persen**		**4,46 Persen**		**4,78 Persen**		**5,11 Persen**		**0 Persen**		**5,11 Persen**			
	Meningkatnya Pelayanan Transportasi			**Persentase Peningkatan Retribusi dari Sektor Perhubungan**	**100 Persen**	**2 Persen**		**2 Persen**		**2 Persen**		**2 Persen**		**0 Persen**		**8 Persen**			
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan retribusi dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	0 Persen	2 Persen	257,503,019	2 Persen	257,708,827	2 Persen	260,174,073	2 Persen	262,957,197	0 Persen	0	2 Persen	0		
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	0 Persen	100 Persen	92,900,000	100 Persen	93,100,000	100 Persen	93,400,000	100 Persen	93,900,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Realisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Persen	100 Persen	12,000,000	100 Persen	12,000,000	100 Persen	12,200,000	100 Persen	13,500,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Persen	100 Persen	152,603,019	100 Persen	152,608,827	100 Persen	154,574,073	100 Persen	155,557,197	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan retribusi dari pengelolaan pelayaran	0 Persen	2 Persen	96,344,667	2 Persen	96,421,670	2 Persen	97,344,041	2 Persen	98,385,346	0 Persen	0	2 Persen	0		
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Realisasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0 Persen	100 Persen	96,344,667	100 Persen	96,421,670	100 Persen	97,344,041	100 Persen	98,385,346	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya Sinergitas Pemerintahan yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	4,540,708,853	100 Persen	5,159,843,738	100 Persen	5,657,020,312	100 Persen	5,430,657,908	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	0 Persen	100 Persen	9,528,400	100 Persen	10,481,240	100 Persen	11,529,364	100 Persen	12,682,300	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	3,681,565,453	100 Persen	4,049,721,998	100 Persen	4,454,694,198	100 Persen	4,127,034,873	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Adminsitrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	108,000,000	100 Persen	118,800,000	100 Persen	130,680,000	100 Persen	143,748,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	261,509,000	100 Persen	285,223,900	100 Persen	311,188,490	100 Persen	339,621,649	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	90,000,000	100 Persen	266,500,000	100 Persen	276,900,000	100 Persen	288,340,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	100 Persen	175,856,000	100 Persen	193,441,600	100 Persen	212,785,760	100 Persen	234,064,336	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	0 Persen	100 Persen	214,250,000	100 Persen	235,675,000	100 Persen	259,242,500	100 Persen	285,166,750	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik untuk terciptannya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 %**	**88,12 %**		**88.24 %**		**88,36 %**		**88,48 %**		**0 %**		**88,48 %**			
	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah			**Indek SPBE (Unsur Tata Kelola)** **Persentase Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik (IKP)** **Jumlah Buku Statistisk Sektoral Kabupaten** **Indek Keamanan Informasi (KAMI)**	**1,9 Indek** **100 %** **1 Buku** **134 Nilai**	**2,0 Indek** **100 %** **1 Buku** **200 Nilai**		**2,1 Indek** **100 %** **1 Buku** **273 Nilai**		**2,2 Indek** **100 %** **1 Buku** **300 Nilai**		**2,3 Indek** **100 %** **1 Buku** **320 Nilai**		**0 Indek** **0 %** **0 Buku** **0 Nilai**		**2,3 Indek** **100 %** **1 Buku** **320 Nilai**			
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	0 Persen	100 Persen	111,020,656	100 Persen	111,109,389	100 Persen	112,172,262	100 Persen	113,372,187	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dikelola	0 %	100 %	111,020,656	100 %	111,109,389	100 %	112,172,262	100 %	113,372,187	0 %	0	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tata Kelola SPBE Pemeritah Daerah	0 Persen	40 Persen	1,482,351,145	42 Persen	1,483,535,908	44 Persen	1,497,727,430	46 Persen	1,513,748,863	0 Persen	0	46 Persen	0		
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah domain dan sub domain pemerintah daerah yang aktif	0 %	92 %	50,000,000	95 %	50,000,000	98 %	50,000,000	100 %	50,000,000	0 %	0	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	0 %	60 %	1,432,351,145	65 %	1,433,535,908	70 %	1,447,727,430	75 %	1,463,748,863	0 %	0	75 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase buku statistik sektoral yang disajikan SKPD pada rumah data Batola	0 Persen	80 Persen	85,868,687	100 Persen	85,937,317	100 Persen	86,759,395	100 Persen	87,687,474	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku statisitik sektoral daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	85,868,687	1 Dokumen	85,937,317	1 Dokumen	86,759,395	1 Dokumen	87,687,474	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Persandian dalam komunkasi Perangkat Daerah	0 Persen	50 Persen	163,150,505	60 Persen	163,280,903	70 Persen	164,842,850	80 Persen	166,606,200	0 Persen	0	80 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi daerah bersandi yang ditangani	0 Surat	450 Surat	113,150,505	460 Surat	113,280,903	460 Surat	114,842,850	470 Surat	116,606,200	0 Surat	0	470 Surat	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pejabat menggunakan perangkat bersandi	0 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	50,000,000	5 Perangkat Daerah	50,000,000	5 Perangkat Daerah	50,000,000	5 Perangkat Daerah	50,000,000	0 Perangkat Daerah	0	5 Perangkat Daerah	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik untuk terciptannya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabiltas (RB)**	**88,06 %**	**88,12 %**		**88,24 %**		**88,36 %**		**88,48 %**		**0 %**		**88,48 %**			
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik			**Indek Kepuasan Masyarakat**	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**0 %**		**100 %**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	2,302,279,528	100 Persen	2,304,119,616	100 Persen	2,326,160,851	100 Persen	2,351,044,170	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 %	100 %	20,900,940	100 %	20,900,940	100 %	20,900,940	100 %	20,900,940	0 %	0	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Adminsitasri Keuangan	0 %	100 %	1,915,404,313	100 %	1,915,404,313	100 %	1,924,611,312	100 %	1,924,714,934	0 %	0	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	0 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	0 %	0	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi Umum	0 %	100 %	94,009,017	100 %	95,849,105	100 %	102,547,593	100 %	101,335,390	0 %	0	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 %	100 %	35,000,000	100 %	35,000,000	100 %	35,000,000	100 %	55,000,000	0 %	0	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0 %	100 %	86,333,559	100 %	86,333,559	100 %	88,406,138	100 %	91,144,138	0 %	0	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	0 %	100 %	100,631,699	100 %	100,631,699	100 %	104,694,868	100 %	107,948,768	0 %	0	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktifitas dan dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,00 Persen**	**4,13 Persen**		**4,46 Persen**		**4,78 Persen**		**5,11 Persen**		**0 Persen**		**5,11 Persen**			
	Meningkatnya koperasi yang aktif			**Persentase peningkatan koperasi yang aktif**	**5,55 Persen**	**5,26 Persen**		**5,00 Persen**		**4,76 Persen**		**4,55 Persen**		**0 Persen**		**4,55 Persen**			
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	0 Persen	53,71 Persen	44,809,130	54,54 Persen	46,153,404	55,37 Persen	47,538,006	56,19 Persen	48,964,146	0 Persen	0	56,19 Persen	0		
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Persen	1,65 Persen	38,477,012	1,65 Persen	38,507,764	1,65 Persen	38,876,130	1,65 Persen	39,291,994	0 Persen	0	1,65 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang dilatih	0 Persen	4,13 Persen	6,570,000	8,26 Persen	6,767,100	12,39 Persen	6,970,113	16,52 Persen	7,179,216	0 Persen	0	16,52 Persen	0		
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian	0 Persen	4,96 Persen	5,641,573	9,92 Persen	5,646,082	14,88 Persen	5,700,092	19,83 Persen	5,761,067	0 Persen	0	19,83 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktifitas dan dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,00 Persen**	**4,13 Persen**		**4,46 Persen**		**4,78 Persen**		**5,11 Persen**		**0 Persen**		**5,11 Persen**			
	Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil			**Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil**	**1,360 Persen**	**1,368 Persen**		**1,375 Persen**		**1,379 Persen**		**1,384 Persen**		**0 Persen**		**1,384 Persen**			
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang berkembang	0 Persen	1,368 Persen	252,714,755	1,375 Persen	260,296,198	1,379 Persen	268,105,084	1,384 Persen	276,148,236	0 Persen	0	1,384 Persen	0		
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	0 Persen	100 Persen	217,002,842	100 Persen	217,176,281	100 Persen	219,253,792	100 Persen	221,599,185	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pengembangan UMKM	0 Persen	100 Persen	92,611,600	100 Persen	95,389,948	100 Persen	98,251,646	100 Persen	101,199,196	0 Persen	0	100 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase fasilitasi pengembangan usaha mikro	0 Persen	100 Persen	79,524,365	100 Persen	79,587,925	100 Persen	80,349,264	100 Persen	81,208,773	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktifitas dan dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,00 Persen**	**4,13 Persen**		**4,46 Persen**		**4,78 Persen**		**5,11 Persen**		**0 Persen**		**5,11 Persen**			
	Menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang			**Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil**	**85,00 Persen**	**90,00 Persen**		**90,00 Persen**		**90,00 Persen**		**90,00 Persen**		**0 Persen**		**90,00 Persen**			
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase meningkatnya sarana perdagangan yang refresentatif	0 Persen	4,35 Persen	548,770,150	4,17 Persen	565,233,255	4,00 Persen	582,190,252	3,85 Persen	599,655,960	0 Persen	0	3,85 Persen	0		
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang refresentatif	0 Persen	62,00 Persen	471,221,723	63,00 Persen	471,598,345	64,00 Persen	476,109,660	65,00 Persen	481,202,682	0 Persen	0	65,00 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersedian bahan pokok sesuai kebutuhan masyarakat	0 Persen	82,00 Persen	88,584,800	83,00 Persen	91,242,344	84,00 Persen	93,979,614	85,00 Persen	96,799,003	0 Persen	0	85,00 Persen	0		
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan bahan pokok yang dimonitor	0 Macam	33 Macam	76,066,605	33 Macam	76,127,401	33 Macam	76,855,636	33 Macam	77,677,773	0 Macam	0	33 Macam	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan Alat UTTP yang ditera / tera ulang	0 Persen	3,50 Persen	82,095,775	3,74 Persen	84,558,648	4,14 Persen	87,095,408	3,91 Persen	89,708,270	0 Persen	0	3,91 Persen	0		
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP yang ditera / tera ulang	0 Persen	83,75 Persen	70,494,564	87,50 Persen	70,550,907	91,25 Persen	71,225,797	95,00 Persen	71,987,711	0 Persen	0	95,00 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase keterisian gudang SRG	0 Persen	25,00 Persen	171,146,600	30,00 Persen	176,280,998	35,00 Persen	181,569,428	40,00 Persen	187,016,511	0 Persen	0	40,00 Persen	0		
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah komoditas (gabah) yang diresigudangkan	0 Ton	600 Ton	146,961,338	700 Ton	147,078,797	800 Ton	148,485,754	900 Ton	150,074,130	0 Ton	0	900 Ton	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktifitas dan dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,00 Persen**	**4,13 Persen**		**4,46 Persen**		**4,78 Persen**		**5,11 Persen**		**0 Persen**		**5,11 Persen**			
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menegah (IKM)			**Persentase IKM yang tumbuh**	**4,00 Persen**	**4,30 Persen**		**4,60 Persen**		**4,90 Persen**		**5,20 Persen**		**0 Persen**		**5,20 Persen**			
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pelaksanaan urusan perindustrian	0 Persen	100 Persen	549,961,015	100 Persen	566,459,845	100 Persen	583,453,640	100 Persen	600,957,250	0 Persen	0	100 Persen	0		
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen urusan perindustrian	0 Dokumen	2 Dokumen	472,244,303	2 Dokumen	472,621,742	2 Dokumen	477,142,848	2 Dokumen	482,246,922	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase perusahaan industri yang dipantau dan diawasi	0 Persen	20 Persen	25,000,000	20 Persen	30,000,000	20 Persen	35,000,000	20 Persen	40,000,000	0 Persen	0	20 Persen	0		
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan industri yang diverifikasi pengajuan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kabupaten	0 Persen	5 Persen	21,467,172	5 Persen	21,484,329	5 Persen	21,689,849	5 Persen	21,921,868	0 Persen	0	5 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri yang mampu mengakses SIINas	0 Persen	15 Persen	40,000,000	20 Persen	45,000,000	25 Persen	50,000,000	30 Persen	55,000,000	0 Persen	0	30 Persen	0		
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	0 Dokumen	1 Dokumen	34,347,475	1 Dokumen	34,374,927	1 Dokumen	34,703,758	1 Dokumen	35,074,990	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Nilai**	**100 Nilai**		**100 Nilai**		**100 Nilai**		**100 Nilai**		**0 Nilai**		**100 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	4,162,736,175	100 Persen	4,219,936,175	100 Persen	4,277,136,175	100 Persen	4,333,336,175	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 Persen	100 Persen	27,568,600	100 Persen	30,568,600	100 Persen	33,568,600	100 Persen	35,568,600	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi keuangan	0 Persen	100 Persen	3,101,478,985	100 Persen	3,151,478,985	100 Persen	3,201,478,985	100 Persen	3,251,478,985	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 Persen	55,55 Persen	75,594,300	55,55 Persen	75,794,300	55,55 Persen	75,994,300	55,55 Persen	76,194,300	0 Persen	0	55,55 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi umum	0 Persen	100 Persen	207,044,900	100 Persen	208,044,900	100 Persen	209,044,900	100 Persen	210,044,900	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan barang milik daerah	0 Persen	100 Persen	258,699,800	100 Persen	259,699,800	100 Persen	260,699,800	100 Persen	261,699,800	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda	0 Persen	100 Persen	264,394,590	100 Persen	265,394,590	100 Persen	266,394,590	100 Persen	267,394,590	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	0 Persen	6,29 Persen	227,955,000	6,29 Persen	228,955,000	6,29 Persen	229,955,000	6,29 Persen	230,955,000	0 Persen	0	6,29 Persen	0	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)**	**85 Indeks** **300 Milyar**	**85,25 Indeks** **350 Milyar**		**85,5 Indeks** **400 Milyar**		**85,75 Indeks** **450 Milyar**		**86 Indeks** **500 Milyar**		**0 Indeks** **0 Milyar**		**86 Indeks** **500 Milyar**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik terkait DPMPTSP			**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)**	**85 Indeks** **300 Milyar**	**85,25 Indeks** **350 Milyar**		**85,5 Indeks** **400 Milyar**		**85,75 Indeks** **450 Milyar**		**86 Indeks** **500 Milyar**		**0 Indeks** **0 Milyar**		**86 Indeks** **500 Milyar**			
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Iklim investasi yang kondusif	0 Persen	16,67 Persen	119,967,527	16,67 Persen	120,063,411	16,67 Persen	121,211,939	16,67 Persen	122,508,563	0 Persen	0	16,67 Persen	0		
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investor	0 Persen	16,67 Persen	44,967,527	16,67 Persen	45,063,411	16,67 Persen	46,211,939	16,67 Persen	47,508,563	0 Persen	0	16,67 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investor	0 Persen	16,67 Persen	75,000,000	16,67 Persen	75,000,000	16,67 Persen	75,000,000	16,67 Persen	75,000,000	0 Persen	0	16,67 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang diikuti	0 Persen	75 Persen	280,898,806	75 Persen	281,123,313	75 Persen	283,812,542	75 Persen	286,848,530	0 Persen	0	75 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investor	0 Persen	75 Persen	280,898,806	75 Persen	281,123,313	75 Persen	283,812,542	75 Persen	286,848,530	0 Persen	0	75 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman modal	0 Persen	100 Persen	147,455,216	100 Persen	147,573,069	100 Persen	148,984,755	100 Persen	150,578,469	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	0 Persen	100 Persen	147,455,216	100 Persen	147,573,069	100 Persen	148,984,755	100 Persen	150,578,469	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	0 Persen	16,67 Persen	60,283,652	14,29 Persen	60,331,834	12,50 Persen	60,908,969	11,11 Persen	61,560,522	0 Persen	0	11,11 Persen	0		
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perizinan	0 Persen	16,67 Persen	60,283,652	14,29 Persen	60,331,834	12,50 Persen	60,908,969	11,11 Persen	61,560,522	0 Persen	0	11,11 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersedian data dan sistem informasi penanaman modal	0 Persen	12,50 Persen	17,173,686	13,75 Persen	17,187,412	15,00 Persen	17,351,827	16,25 Persen	17,537,442	0 Persen	0	16,25 Persen	0		
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perizinan	0 Persen	12,50 Persen	17,173,686	13,75 Persen	17,187,412	15,00 Persen	17,351,827	16,25 Persen	17,537,442	0 Persen	0	16,25 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	2,490,970,711	100 Persen	2,492,961,610	100 Persen	2,516,809,310	100 Persen	2,543,732,026	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	0 Persen	100 Persen	14,999,890	100 Persen	14,999,890	100 Persen	14,999,890	100 Persen	14,999,890	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	2,102,545,448	100 Persen	2,026,450,347	100 Persen	2,055,298,047	100 Persen	2,077,220,763	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Adminstrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	16,921,800	100 Persen	16,921,800	100 Persen	16,921,800	100 Persen	16,921,800	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	154,654,978	100 Persen	154,654,978	100 Persen	154,654,978	100 Persen	154,654,978	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	110,648,595	100 Persen	188,734,595	100 Persen	188,734,595	100 Persen	188,734,595	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	91,200,000	100 Persen	91,200,000	100 Persen	91,200,000	100 Persen	91,200,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan, Olahraga Serta Kepramukaan				**Persentase prestasi pemuda dan olahraga**	**44.4 Persen**	**44.4 Persen**		**44.9 Persen**		**47.2 Persen**		**47.9 Persen**		**0 Persen**		**47.9 Persen**			
	Meningkatnya kualitas pemuda dalam mendukung pembangunan			**Rata-rata persentase pemuda dan cabang olahraga yang berprestasi serta pelaksanaan aktivitas kepramukaan**	**62.94 Persen**	**62.94 Persen**		**63.27 Persen**		**64.83 Persen**		**65.31 Persen**		**0 Persen**		**65.31 Persen**			
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berprestasi	0 Persen	63,8 Persen	1,288,030,306	64,8 Persen	1,289,059,759	66,4 Persen	1,301,390,920	67,8 Persen	1,315,312,109	0 Persen	0	67,8 Persen	0		
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang meningkat kapasitas daya saingnya	0 Orang	41 Orang	800,000,000	41 Orang	800,000,000	41 Orang	800,000,000	41 Orang	800,000,000	0 Orang	0	41 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	0 Dokumen	5 Dokumen	488,030,306	5 Dokumen	489,059,759	5 Dokumen	501,390,920	5 Dokumen	515,312,109	0 Dokumen	0	5 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	0 Persen	25 Persen	2,728,541,955	25 Persen	2,730,722,732	25 Persen	2,756,844,858	25 Persen	2,786,335,273	0 Persen	0	25 Persen	0		
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor Olahraga yang dibina dan dikembangkan	0 Cabor	4 Cabor	2,000,000,000	5 Cabor	2,000,000,000	6 Cabor	2,000,000,000	7 Cabor	2,000,000,000	0 Cabor	0	7 Cabor	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	0 event	4 event	728,541,955	4 event	730,722,732	5 event	756,844,858	5 event	786,335,273	0 event	0	5 event	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pelaksanaan aktivitas kepramukaan	0 Persen	100 Persen	515,783,149	100 Persen	516,195,387	100 Persen	521,133,318	100 Persen	526,707,965	0 Persen	0	100 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah aktivitas kepramukaan yang dilaksanakan	0 event	4 event	515,783,149	3 event	516,195,387	3 event	521,133,318	4 event	526,707,965	0 event	0	4 event	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya pelestarian kebudayaan				**Persentase pelestarian kebudayaan**	**36.36 persen**	**36.36 persen**		**45.45 persen**		**54.55 persen**		**63.64 persen**		**0 persen**		**63.64 persen**			
	Meningkatnya pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya			**Rata-rata persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan**	**63 persen**	**63 persen**		**69 persen**		**76 persen**		**83 persen**		**0 persen**		**83 persen**			
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dibina	0 Persen	36,36 Persen	1,459,767,680	36,36 Persen	1,460,934,394	45,45 Persen	1,474,909,709	54,55 Persen	1,490,687,057	0 Persen	0	63,64 Persen	0		
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan masyarakat pelakunya dalam daerah yang dikelola	0 objek	4 objek	1,459,767,680	5 objek	1,460,934,394	6 objek	1,474,909,709	7 objek	1,490,687,057	0 objek	0	7 objek	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0 Persen	100 Persen	214,671,718	100 Persen	214,843,293	100 Persen	216,898,487	100 Persen	219,218,685	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Objek cagar budaya yang dikelola	0 persen	100 persen	214,671,718	100 persen	214,843,293	100 persen	216,898,487	100 persen	219,218,685	0 persen	0	100 persen	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya pemasaran destinasi pariwisata				**Persentase pemasaran pariwisata dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	**68 persen**	**68 persen**		**73 persen**		**77 persen**		**82 persen**		**0 persen**		**82 persen**			
	Meningkatnya jumlah wisatawan			**Jumlah wisatawan**	**69432 orang**	**72000 orang**		**78000 orang**		**84000 orang**		**90000 orang**		**0 orang**		**90000 orang**			
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi wisata	0 Persen	56 Persen	171,513,042	69 Persen	171,650,123	81 Persen	173,292,130	100 Persen	175,145,864	0 Persen	0	100 Persen	0		
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	0 lokasi	8 lokasi	171,513,042	8 lokasi	171,650,123	9 lokasi	173,292,130	10 lokasi	175,145,864	0 lokasi	0	10 lokasi	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang terlaksana dan diikuti	0 Persen	70 Persen	924,880,495	70 Persen	925,619,703	70 Persen	934,474,192	70 Persen	944,470,413	0 Persen	0	70 Persen	0		
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan dan dikuti	0 event	6 event	924,880,495	7 event	925,619,703	7 event	934,474,192	7 event	944,470,413	0 event	0	7 event	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya sinergitas pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88.06 Persen**	**88.12 Persen**		**88.24 Persen**		**88.36 Persen**		**88.48 Persen**		**0 Persen**		**88.48 Persen**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	3,328,395,439	100 Persen	3,245,395,439	100 Persen	3,528,395,439	100 Persen	3,245,395,439	0 Persen	0	100 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 Persen	100 Persen	43,336,640	100 Persen	43,336,640	100 Persen	43,336,640	100 Persen	43,336,640	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi keuangan	0 Persen	100 Persen	2,543,359,079	100 Persen	2,543,359,079	100 Persen	2,543,359,079	100 Persen	2,543,359,079	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 Persen	13.63 Persen	39,451,800	13.63 Persen	39,451,800	13.63 Persen	39,451,800	13.63 Persen	39,451,800	0 Persen	0	13.63 Persen	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi umum	0 Persen	100 Persen	274,230,280	100 Persen	274,230,280	100 Persen	274,230,280	100 Persen	274,230,280	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan barang milik daerah	0 Persen	0 Persen	0	0.58 Persen	83,000,000	0 Persen	0	0.72 Persen	283,000,000	0 Persen	0	0 Persen	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda	0 Persen	100 Persen	141,177,640	100 Persen	141,177,640	100 Persen	141,177,640	100 Persen	141,177,640	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	0 Persen	72 Persen	103,810,000	72.78 Persen	103,810,000	72 Persen	103,810,000	77.78 Persen	103,810,000	0 Persen	0	77.78 Persen	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan				**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**67,06 Persen**	**67,11 Persen**		**67,85 Persen**		**68,23 Persen**		**68,60 Persen**		**0 Persen**		**68,60 Persen**			
	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca			**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**	**15 Persen**	**15 Persen**		**16 Persen**		**17 Persen**		**18 Persen**		**0 Persen**		**18 Persen**			
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0 Persen	100 Persen	275,096,835	100 Persen	366,500,000	100 Persen	433,000,000	100 Persen	527,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IPLM	0 Persen	100 Persen	149,990,360	100 Persen	200,000,000	100 Persen	243,000,000	100 Persen	299,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat kegemaran membaca	0 Persen	100 Persen	125,106,475	100 Persen	166,500,000	100 Persen	190,000,000	100 Persen	228,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan				**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**67,06 Persen**	**67,11 Persen**		**67,85 Persen**		**68,23 Persen**		**68,60 Persen**		**0 Persen**		**68,60 Persen**			
	Meningkatnya Pemanfaatan Arsip Daerah			**Persentase SKPD yang penyelenggaraan Kearsipan sesuai NSPK**	**22 Persen**	**22 Persen**		**22 Persen**		**28 Persen**		**28 Persen**		**0 Persen**		**28 Persen**			

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD yang Mengelola Arsip Sesuai NSPK/Baku dan Berbasis TIK	0 Persen	100 Persen	152,692,256	100 Persen	199,700,000	100 Persen	230,000,000	100 Persen	263,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kearsipan yang Dibina dan Diawasi	0 Persen	100 Persen	112,517,256	100 Persen	135,000,000	100 Persen	145,000,000	100 Persen	158,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang diakuisisi dan dilestarikan	0 Arsip	10 Arsip	3,000,000	10 Arsip	10,000,000	10 Arsip	15,000,000	10 Arsip	25,000,000	0 Arsip	0	40 Arsip	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang Menggunakan Aplikasi Srikandi	0 Persen	100 Persen	37,175,000	100 Persen	54,700,000	100 Persen	70,000,000	100 Persen	80,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0 Persen	100 Persen	114,916,560	100 Persen	151,500,000	100 Persen	165,000,000	100 Persen	185,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase SKPD yang memusnahkan arsip	0 Persen	100 Persen	63,516,400	100 Persen	75,000,000	100 Persen	80,000,000	100 Persen	85,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Arsip SKPD terkait Bencana yang Dibuatkan Sarana bantunya	0 Persen	100 Persen	50,000,000	100 Persen	60,000,000	100 Persen	65,000,000	100 Persen	75,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Arsip In Aktif yang Dibuatkan Daftar Arsip	0 Persen	100 Persen	1,400,160	100 Persen	16,500,000	100 Persen	20,000,000	100 Persen	25,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Peningkatan SOP perijinan penggunaan arsip	0 Persen	100 Persen	8,574,500	100 Persen	20,000,000	100 Persen	23,000,000	100 Persen	25,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase SOP Izin Penggunaan Arsip Tertutup	0 Persen	100 Persen	8,574,500	100 Persen	20,000,000	100 Persen	23,000,000	100 Persen	25,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya Sinergitas Pemerintahan yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,12 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	3,148,719,849	100 Persen	4,169,000,000	100 Persen	4,481,500,000	100 Persen	4,863,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang telah dilaksanakan	0 Persen	100 Persen	27,250,000	100 Persen	35,000,000	100 Persen	37,000,000	100 Persen	40,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terlaksana	0 Persen	100 Persen	2,443,033,074	100 Persen	3,300,000,000	100 Persen	3,500,000,000	100 Persen	3,800,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	0 Persen	100 Persen	29,496,200	100 Persen	35,000,000	100 Persen	40,000,000	100 Persen	45,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksana	0 Persen	100 Persen	297,243,725	100 Persen	383,000,000	100 Persen	409,000,000	100 Persen	445,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	0 Persen	100 Persen	68,200,000	100 Persen	80,000,000	100 Persen	95,000,000	100 Persen	98,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	0 Persen	100 Persen	154,773,200	100 Persen	180,000,000	100 Persen	220,000,000	100 Persen	233,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	0 Persen	100 Persen	128,723,650	100 Persen	156,000,000	100 Persen	180,500,000	100 Persen	202,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi produksi lokal unggulan daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,00 %**	**4,13 %**		**4,46 %**		**4,78 %**		**5,11 %**		**0 %**		**5,11 %**			
	Tersedianya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama			**Produksi Padi** **Produksi Jagung** **Produksi Kacang Tanah** **Produksi Porang** **Produksi Jeruk** **Produksi Nenas** **Produksi Kueni** **Produksi Cabai Rawit** **Produksi Cabai Besar** **Produksi Bawang Merah**	**359.622 Ton** **7.025,86 Ton** **55,69 Ton** **25 Ton** **65.647,31 Ton** **14.067,22** **902,39** **87,07 Ton** **59,36** **151,35**	**376.358 Ton** **7.054,76 Ton** **55,91 Ton** **30 Ton** **65.975,54 Ton** **14.137,56** **906,81** **90,27 Ton** **80,74** **38,19**		**377.675 Ton** **7.083,31 Ton** **56,13 Ton** **35 Ton** **66.305,42 Ton** **14.208,25** **911,34** **93,01 Ton** **83,42** **57,86**		**378.997 Ton** **7.111,91 Ton** **56,35 Ton** **40 Ton** **66.636,95 Ton** **14.279,29** **915,90** **95,82 Ton** **85,92** **75,75**		**380.323 Ton** **7.140,57 Ton** **56,57 Ton** **45 Ton** **66.970,13 Ton** **14.350,68** **920,48** **98,72 Ton** **88,53** **98,37**		**0 Ton** **0 Ton** **0 Ton** **0 Ton** **0 Ton** **0** **0** **0 Ton** **0** **0**		**380.323 Ton** **7.140,57 Ton** **56,57 Ton** **45 Ton** **66.970,13 Ton** **14.350,68** **920,48** **98,72 Ton** **88,53** **98,37**			
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama	0 Ha	115721 Ha	2,954,238,769	116283 Ha	2,956,599,934	116847 Ha	2,984,882,803	117413 Ha	3,016,812,577	0 Ha	0	117413 Ha	0		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikutura Utama	0 Ha	656 Ha	2,454,690,469	656 Ha	2,457,001,679	656 Ha	2,480,288,565	656 Ha	2,507,121,938	0 Ha	0	2624 Ha	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Disediakan	0 Kg/Pohon	28000 Kg/Pohon	499,548,300	28000 Kg/Pohon	499,598,255	28000 Kg/Pohon	504,594,237	28000 Kg/Pohon	509,690,639	0 Kg/Pohon	0	112000 Kg/Pohon	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama	0 Ku/Ha	1703,43 Ku/Ha	257,605,991	1713,59 Ku/Ha	257,811,881	1722,89 Ku/Ha	260,278,113	1732,12 Ku/Ha	263,062,350	0 Ku/Ha	0	1732,12 Ku/Ha	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	0 Dokumen	12 Dokumen	257,605,991	12 Dokumen	257,811,881	12 Dokumen	260,278,113	12 Dokumen	263,062,350	0 Dokumen	0	48 Dokumen	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jenis Prasarana dan Sarana Pertanian yang Dibangun	0 Jenis	2 Jenis	0	2 Jenis	0	2 Jenis	0	2 Jenis	0	0 Jenis	0	8 Jenis	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama	0 Ha	109937 Ha	308,258,615	110484 Ha	308,504,990	111032 Ha	311,456,152	111583 Ha	314,787,849	0 Ha	0	111583 Ha	0		
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Prosentase Kerusakan Tanaman Pangan dan Hortikultura Akibat Serangan OPT dan DPI	0 %	0,5 %	308,258,615	0,5 %	308,504,990	0,5 %	311,456,152	0,5 %	314,787,849	0 %	0	2 %	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Meningkat Kelas kelompoknya	0 %	12 %	300,542,058	12 %	300,782,265	12 %	303,659,551	12 %	306,907,847	0 %	0	12 %	0		
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Meningkat Kelas Kelompoknya	0 KT	204 KT	300,542,058	204 KT	300,782,265	204 KT	303,659,551	204 KT	306,907,847	0 KT	0	816 KT	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya Sinergitas Pemerintahanyang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas RB**	**88,06 %**	**88,12 %**		**88,24 %**		**88,36 %**		**88,48 %**		**0 %**		**88,48 %**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**80 %**	**85 %**		**90 %**		**95 %**		**98 %**		**0 %**		**98 %**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	20,807,462,889	100 Persen	20,819,302,012	100 Persen	20,949,276,130	100 Persen	20,967,562,088	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	0 %	100 %	44,593,805	100 %	44,593,805	100 %	44,593,805	100 %	44,593,805	0 %	0	400 %	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	0 %	100 %	18,544,771,061	100 %	18,556,610,184	100 %	18,686,584,302	100 %	18,704,870,260	0 %	0	400 %	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian	0 %	100 %	74,762,400	100 %	74,762,400	100 %	74,762,400	100 %	74,762,400	0 %	0	400 %	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	0 %	100 %	550,713,985	100 %	550,713,985	100 %	550,713,985	100 %	550,713,985	0 %	0	400 %	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	0 %	100 %	110,319,100	100 %	110,319,100	100 %	110,319,100	100 %	110,319,100	0 %	0	400 %	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemda	0 %	100 %	471,443,788	100 %	471,443,788	100 %	471,443,788	100 %	471,443,788	0 %	0	400 %	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	0 %	100 %	1,010,858,750	100 %	1,010,858,750	100 %	1,010,858,750	100 %	1,010,858,750	0 %	0	400 %	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat yang Tertib Melalui Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka Membuka Peluang Kerja yang Berdampak pada Peningkatan Pendapatan Daerah				**Pertumbuhan ekonomi**	**2.00 Persen**	**4.13 Persen**		**4.46 Persen**		**4.78 Persen**		**5.11 Persen**		**0 Persen**		**5.11 Persen**			
	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan			**Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan**	**1.50 Persen**	**1.50 Persen**		**1.50 Persen**		**1.50 Persen**		**1.50 Persen**		**0 Persen**		**6.00 Persen**			
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana produksi perkebunan	0 Persen	100.00 Persen	73,535,736	100.00 Persen	73,594,509	100.00 Persen	74,298,515	100.00 Persen	75,093,298	0 Persen	0	100.00 Persen	0		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana produksi perkebunan	0 Persen	100.00 Persen	73,535,736	100.00 Persen	73,594,509	100.00 Persen	74,298,515	100.00 Persen	75,093,298	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha perkebunan yang meningkat kelasnya	0 Persen	100.00 Persen	28,962,317	100.00 Persen	28,985,465	100.00 Persen	29,262,740	100.00 Persen	29,575,769	0 Persen	0	100.00 Persen	0		
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan pelaku usaha bidang perkebunan	0 Persen	100.00 Persen	28,962,317	100.00 Persen	28,985,465	100.00 Persen	29,262,740	100.00 Persen	29,575,769	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat yang Tertib Melalui Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka Membuka Peluang Kerja yang Berdampak pada Peningkatan Pendapatan Daerah				**Pertumbuhan ekonomi**	**2.00 Persen**	**4.13 Persen**		**4.46 Persen**		**4.78 Persen**		**5.11 Persen**		**0 Persen**		**5.11 Persen**			

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak			**Persentase peningkatan populasi ternak** **Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)**	**2.69 Persen** **6.00 Persen**	**2.53 Persen** **7.50 Persen**		**2.53 Persen** **7.88 Persen**		**2.53 Persen** **8.25 Persen**		**2.53 Persen** **8.75 Persen**		**0 Persen** **0 Persen**		**10.12 Persen** **32.38 Persen**			
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana peternakan	0 Persen	100.00 Persen	349,253,740	100.00 Persen	349,532,879	100.00 Persen	352,876,515	100.00 Persen	356,651,292	0 Persen	0	100.00 Persen	0		
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase bibit ternak yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	0 Persen	40.00 Persen	101,290,740	42.00 Persen	101,371,696	44.00 Persen	102,341,419	45.00 Persen	103,436,182	0 Persen	0	45.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase penambahan ternak yang didistribusikan ke masyarakat	0 Persen	0.20 Persen	247,963,000	0.21 Persen	248,161,183	0.22 Persen	250,535,096	0.23 Persen	253,215,111	0 Persen	0	0.86 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana peternakan	0 Persen	100.00 Persen	64,749,336	100.00 Persen	64,801,087	100.00 Persen	65,420,975	100.00 Persen	66,120,793	0 Persen	0	100.00 Persen	0		
		3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB)	0 Persen	90.00 Persen	64,749,336	90.00 Persen	64,801,087	90.00 Persen	65,420,975	90.00 Persen	66,120,793	0 Persen	0	90.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan penyediaan daging ternak Persentase penyelesaian kasus kejadian penyakit menular ternak	0 Persen 0 Persen	7.14 Persen 100.00 Persen	32,052,835 202,424,800	6.67 Persen 100.00 Persen	32,078,453 202,586,587	6.25 Persen 100.00 Persen	32,385,316 204,524,533	2.94 Persen 100.00 Persen	32,731,747 206,712,365	0 Persen 0 Persen	0 0	23.00 Persen 100.00 Persen	0 0		
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak yang tercover pelayanan kesehatan hewan (vaksinasi dan pengobatan)	0 Persen	100.00 Persen	170,350,952	100.00 Persen	170,487,104	100.00 Persen	172,117,986	100.00 Persen	173,959,160	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak masuk dan keluar yang bersertifikat veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Hewan/SKKH)	0 Persen	100.00 Persen	32,073,848	100.00 Persen	32,099,483	100.00 Persen	32,406,547	100.00 Persen	32,753,205	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pemotongan ternak yang diawasi	0 Persen	100.00 Persen	32,052,835	100.00 Persen	32,078,453	100.00 Persen	32,385,316	100.00 Persen	32,731,747	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat yang Tertib Melalui Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka Membuka Peluang Kerja yang Berdampak pada Peningkatan Pendapatan Daerah				**Pertumbuhan ekonomi**	**2.00 Persen**	**4.13 Persen**		**4.46 Persen**		**4.78 Persen**		**5.11 Persen**		**0 Persen**		**5.11 Persen**			

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Usaha Produk Olahan Perkebunan dan Peternakan			**Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan** **Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil ternak**	**- Persen** **- Persen**	**33.33 Persen** **1.67 Persen**		**25.00 Persen** **3.28 Persen**		**20.00 Persen** **4.76 Persen**		**16.67 Persen** **6.06 Persen**		**0 Persen** **0 Persen**		**95.00 Persen** **15.77 Persen**			
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana perkebunan	0 Persen	100.00 Persen	63,642,069	100.00 Persen	63,692,935	100.00 Persen	64,302,222	100.00 Persen	64,990,073	0 Persen	0	100.00 Persen	0		
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan prasarana produksi perkebunan	0 Persen	100.00 Persen	63,642,069	100.00 Persen	63,692,935	100.00 Persen	64,302,222	100.00 Persen	64,990,073	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi peternakan	0 Persen 0 Persen	100.00 Persen 61.00 Persen	57,959,608 10,277,156	100.00 Persen 63.00 Persen	58,005,932 10,285,370	100.00 Persen 66.00 Persen	58,560,817 10,383,760	100.00 Persen 70.00 Persen	59,187,252 10,494,837	0 Persen 0 Persen	0 0	100.00 Persen 70.00 Persen	0 0		
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok yang menerima penyuluhan teknologi perkebunan	0 Persen	100.00 Persen	57,959,608	100.00 Persen	58,005,932	100.00 Persen	58,560,817	100.00 Persen	59,187,252	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mengikuti pelatihan teknologi peternakan tepat guna	0 Persen	30.00 Persen	10,277,156	32.00 Persen	10,285,370	33.00 Persen	10,383,760	34.00 Persen	10,494,837	0 Persen	0	34.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88.06 Persen**	**88.12 Persen**		**88.24 Persen**		**88.36 Persen**		**88.48 Persen**		**0 Persen**		**88.48 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks kepuasan masyarakat**	**96.69 Persen**	**100.00 Persen**		**100.00 Persen**		**100.00 Persen**		**100.00 Persen**		**0 Persen**		**100.00 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100.00 Persen	4,135,458,455	100.00 Persen	3,986,845,567	100.00 Persen	4,329,082,393	100.00 Persen	4,705,715,726	0 Persen	0	100.00 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 Persen	100.00 Persen	22,734,760	100.00 Persen	22,752,931	100.00 Persen	22,970,585	100.00 Persen	23,216,306	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi keuangan	0 Persen	100.00 Persen	3,532,438,120	100.00 Persen	3,383,343,270	100.00 Persen	3,719,806,986	100.00 Persen	4,089,922,801	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 Persen	100.00 Persen	29,495,000	100.00 Persen	29,518,574	100.00 Persen	29,800,949	100.00 Persen	30,119,734	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi umum	0 Persen	100.00 Persen	197,632,490	100.00 Persen	197,790,447	100.00 Persen	199,682,513	100.00 Persen	201,818,549	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0 Persen	100.00 Persen	168,937,485	100.00 Persen	169,072,508	100.00 Persen	170,689,857	100.00 Persen	172,515,754	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	0 Persen	100.00 Persen	184,220,600	100.00 Persen	184,367,837	100.00 Persen	186,131,503	100.00 Persen	188,122,582	0 Persen	0	100.00 Persen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (Reformasi Birokrasi)**	**88.06 %**	**88.12 %**		**88.24 %**		**88.36 %**		**88.48 %**		**0 %**		**88.48 %**			
	Memantapkan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah			**Persentase realisasi rata-rata Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan dan Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berjalan efektif**	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**0 %**		**100 %**			
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi dokumen Administrasi Tata Pemerintahan, kebijakan Kesejahteraan Rakyat, produk hukum, fasilitasi bantuan hukum dan dokumentasi produk hukum dan Fasilitasi Kerjasama Daerah	0 Persen	100 Persen	8,850,111,957	100 Persen	8,857,185,375	100 Persen	8,941,913,314	100 Persen	9,037,566,407	0 Persen	0	100 Persen	0		
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase realisasi dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	0 %	100 %	3,575,108,900	100 %	3,576,236,850	100 %	3,577,120,650	100 %	3,599,604,200	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0 %	100 %	4,759,273,357	100 %	4,756,549,825	100 %	4,830,002,764	100 %	4,866,802,607	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase realisasi produk hukum, fasilitasi bantuan hukum dan dokumentasi produk hukum	0 %	100 %	317,189,700	100 %	318,909,700	100 %	323,789,900	100 %	335,159,600	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase realisasi dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	0 %	100 %	198,540,000	100 %	205,489,000	100 %	211,000,000	100 %	236,000,000	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase realisasi kebijakan Perekonomian, dokumen Pengadaan Barang Jasa, peserta pembinaan advokasi, dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam dan dokumen Admnistrasi Pembangunan lintas sektor	0 Persen	100 Persen	2,237,639,949	100 Persen	2,239,428,374	100 Persen	2,260,850,772	100 Persen	2,285,035,458	0 Persen	0	100 Persen	0		
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase realisasi dokumen kebijakan perekonomian	0 %	100 %	246,030,150	100 %	246,100,850	100 %	250,530,150	100 %	256,300,750	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi dokumen administrasi pembangunan lintas sektor	0 %	100 %	202,500,300	100 %	202,850,500	100 %	210,550,900	100 %	221,660,880	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi dokumen pengadaan barang jasa dan peserta pembinaan advokasi	0 %	100 %	1,663,559,499	100 %	1,664,886,124	100 %	1,667,219,222	100 %	1,672,523,828	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase realisasi dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	0 %	100 %	125,550,000	100 %	125,590,900	100 %	132,550,500	100 %	134,550,000	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (Reformasi Birokrasi)**	**88.06 %**	**88.12 %**		**88.12 %**		**88.12 %**		**88.12 %**		**0 %**		**88.48 %**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Indeks**	**100 Indeks**		**100 Indeks**		**100 Indeks**		**100 Indeks**		**0 Indeks**		**100 Indeks**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	30,644,430,007	100 Persen	30,668,922,453	100 Persen	30,962,301,723	100 Persen	31,293,510,471	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 %	100 %	66,635,000	100 %	66,635,000	100 %	66,635,000	100 %	66,635,000	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi keuangan	0 %	100 %	12,344,650,000	100 %	12,344,650,000	100 %	12,344,650,000	100 %	12,344,650,000	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 %	100 %	191,533,200	100 %	195,533,200	100 %	201,533,200	100 %	210,533,200	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi umum	0 %	100 %	3,291,043,723	100 %	3,391,043,723	100 %	3,491,043,723	100 %	3,591,043,723	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 %	100 %	1,763,633,550	100 %	3,863,633,550	100 %	1,763,633,550	100 %	1,763,633,550	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0 %	100 %	2,328,013,750	100 %	2,328,013,750	100 %	2,328,013,750	100 %	2,328,013,750	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	0 %	100 %	4,075,940,000	100 %	4,175,940,000	100 %	4,275,940,000	100 %	4,375,940,000	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, Pakaian dinas atribut kelengkapan dan dana opersional Kepala daerah dan wakil Kepala daerah	0 %	100 %	875,881,723	100 %	875,881,723	100 %	875,881,723	100 %	875,881,723	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase realisasi Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	0 %	100 %	1,300,000,000	100 %	1,300,000,000	100 %	1,300,000,000	100 %	1,300,000,000	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase realisasi dokumen Penataan Organisasi	0 %	100 %	1,066,672,350	100 %	1,066,672,350	100 %	1,066,672,350	100 %	1,066,672,350	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan Daerah yang terfasilitasi	0 %	100 %	3,330,450,700	100 %	3,345,201,850	100 %	3,364,675,500	100 %	3,364,671,520	0 %	0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan DPRD				**Nilai Reformasi Birokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD			**Indeks tingkat kepuasaan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD**	**95**	**80**		**83**		**85**		**88**		**0**		**88**			
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Set. DPRD	0	80	12,691,802,606	83	12,701,946,482	85	12,823,453,450	88	12,960,628,005	0	0	88	0		
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD yang difasilitasi	0 Persen	100 Persen	2,151,989,200	100 Persen	2,151,989,200	100 Persen	2,151,989,200	100 Persen	2,151,989,200	0 Persen	0	100 Persen	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	0 Persen	100 Persen	58,650,000	100 Persen	58,650,000	100 Persen	58,650,000	100 Persen	58,650,000	0 Persen	0	100 Persen	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	0 Persen	100 Persen	1,363,701,446	100 Persen	1,373,845,322	100 Persen	1,495,352,290	100 Persen	1,632,526,845	0 Persen	0	100 Persen	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Anggota DPRD yang terfasilitasi tugas DPRD	0 Persen	100 Persen	1,514,513,650	100 Persen	1,514,513,650	100 Persen	1,514,513,650	100 Persen	1,514,513,650	0 Persen	0	100 Persen	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang terfasilitasi tugas DPRD	0 Persen	100 Persen	7,602,948,310	100 Persen	7,602,948,310	100 Persen	7,602,948,310	100 Persen	7,602,948,310	0 Persen	0	100 Persen	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	
Meningkatnya sinergitas pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (Reformasi Birokrasi)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks kepuasan masyarakat**	**95**	**80**		**83**		**85**		**88**		**0**		**88**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	26,578,808,235	100 Persen	30,145,081,059	100 Persen	32,042,578,154	100 Persen	35,153,013,947	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan kegiatan sarana dan prasarana dan ketatausahaaan	0 Persen	100 Persen	2,789,669,360	100 Persen	3,068,636,296	100 Persen	3,375,499,926	100 Persen	3,713,049,918	0 Persen	0	100 Persen	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi Set DPRD	0 Persen	100 Persen	804,351,080	100 Persen	1,073,178,188	100 Persen	925,285,296	100 Persen	1,002,392,404	0 Persen	0	100 Persen	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	60,000,000	100 Persen	786,000,000	100 Persen	40,000,000	100 Persen	40,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi Set DPRD	0 Persen	100 Persen	1,177,734,000	100 Persen	1,295,507,400	100 Persen	1,413,280,800	100 Persen	1,531,054,200	0 Persen	0	100 Persen	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi Set DPRD	0 Persen	100 Persen	1,977,160,000	100 Persen	2,174,876,000	100 Persen	2,372,592,000	100 Persen	2,570,308,000	0 Persen	0	100 Persen	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase kualitas pelayanan administrasi Set DPRD	0 Persen	100 Persen	19,204,757,795	100 Persen	21,125,233,575	100 Persen	23,237,756,932	100 Persen	25,561,532,625	0 Persen	0	100 Persen	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase kualitas pelayanan administrasi Set DPRD	0 Target	100 Target	565,136,000	100 Target	621,649,600	100 Target	678,163,200	100 Target	734,676,800	0 Target	0	100 Target	0	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Nilai Reformasi Birokrasi**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan			**Nilai SAKIP Kabupaten Dari Unsur Perencanaan**	**24,5 Nilai**	**24,5 Nilai**		**25,0 Nilai**		**26,0 Nilai**		**26,5 Nilai**		**0 Nilai**		**26,5 Nilai**			
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan kabupaten yang di tetapkan	0 Persen	100 Persen	659,829,235	100 Persen	1,462,756,786	100 Persen	1,489,266,143	100 Persen	1,940,409,672	0 Persen	0	100 Persen	0		
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan SKPD Yang Ditetapkan	0 Persen	100 Persen	159,856,055	100 Persen	564,651,737	100 Persen	169,591,288	100 Persen	174,679,027	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	0 Persen	100 Persen	499,973,180	100 Persen	898,105,049	100 Persen	1,319,674,855	100 Persen	1,765,730,646	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Dikoordinir Penyusunannya	0 Persen	100 Persen	339,918,570	100 Persen	350,116,127	100 Persen	360,619,611	100 Persen	371,438,199	0 Persen	0	100 Persen	0		
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Batola Cerdas, Sehat, Berprestasi dan Berkinerja baik	0 Persen	100 Persen	99,999,880	100 Persen	102,999,876	100 Persen	106,089,873	100 Persen	109,272,569	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Batola Berdaya	0 Persen	100 Persen	99,999,890	100 Persen	102,999,887	100 Persen	106,089,883	100 Persen	109,272,580	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Batola Berkarya	0 Persen	100 Persen	139,918,800	100 Persen	144,116,364	100 Persen	148,439,855	100 Persen	152,893,051	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Innovative Government Award Kabupaten Barito Kuala Secara Nasional	0 Indeks	45 Indeks	749,999,585	50 Indeks	564,999,572	55 Indeks	631,949,560	60 Indeks	650,908,046	0 Indeks	0	60 Indeks	0		
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Data dan Informasi Pembangunan yang dipublikasikan	0 Persen	100 Persen	399,999,970	100 Persen	204,499,969	100 Persen	260,634,968	100 Persen	268,454,017	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Daerah yang mendapatkan Predikat Inovatif	0 Persen	100 Persen	349,999,615	100 Persen	360,499,603	100 Persen	371,314,592	100 Persen	382,454,029	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (Reformasi Birokrasi)**	**88,06 Persen**	**88,12 Persen**		**88,24 Persen**		**88,36 Persen**		**88,48 Persen**		**0 Persen**		**88,48 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Nilai**	**100 Nilai**		**100 Nilai**		**100 Nilai**		**100 Nilai**		**0 Nilai**		**100 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	3,700,252,610	100 Persen	3,844,198,786	100 Persen	3,942,935,643	100 Persen	4,044,634,605	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	0 Persen	100 Persen	86,089,270	100 Persen	88,671,948	100 Persen	91,332,107	100 Persen	94,072,070	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	2,824,598,504	100 Persen	2,909,336,459	100 Persen	2,996,616,553	100 Persen	3,086,515,049	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	36,832,500	100 Persen	36,832,500	100 Persen	36,832,500	100 Persen	36,832,500	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	344,191,980	100 Persen	395,303,869	100 Persen	398,421,410	100 Persen	401,632,478	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	35,897,500	100 Persen	35,897,500	100 Persen	35,897,500	100 Persen	35,897,500	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	100 Persen	189,284,456	100 Persen	194,798,110	100 Persen	200,477,173	100 Persen	206,326,608	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	0 Persen	100 Persen	183,358,400	100 Persen	183,358,400	100 Persen	183,358,400	100 Persen	183,358,400	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten**	**88,06 %**	**88,12 %**		**88,24 %**		**88,36 %**		**88,48 %**		**0 %**		**88,48 %**			
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan bmd yang profesional,transparan dan akuntabel			**WTP**	**WTP Opini BPK**	**WTP Opini BPK**		**WTP Opini BPK**		**WTP Opini BPK**		**WTP Opini BPK**		**0 Opini BPK**		**WTP Opini BPK**			

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tepat waktu	0 Persen	100 Persen	224,628,064,845	100 Persen	247,090,871,330	100 Persen	271,845,140,462	100 Persen	299,029,654,509	0 Persen	0	100 Persen	0		
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu	0 Persen	100 Persen	1,187,030,570	100 Persen	1,305,733,627	100 Persen	1,436,306,990	100 Persen	1,579,937,689	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen penatausahaan keuangan daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku	0 Persen	100 Persen	609,092,560	100 Persen	670,001,816	100 Persen	737,001,998	100 Persen	810,702,197	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen pertanggungjawaban APBD yang disusun tepat waktu	0 Persen	100 Persen	615,732,240	100 Persen	677,305,464	100 Persen	790,218,010	100 Persen	869,239,811	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah yang disusun sesuai peraturan yang berlaku	0 Persen	100 Persen	214,142,660,300	100 Persen	235,556,926,330	100 Persen	259,112,618,963	100 Persen	285,023,880,859	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang tepat waktu	0 Persen	100 Persen	643,261,230	100 Persen	707,587,353	100 Persen	778,346,088	100 Persen	856,180,697	0 Persen	0	100 Persen	0		
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang mencatat barang milik daerah tepat waktu (SKPD)	0 SKPD	47 SKPD	643,261,230	47 SKPD	707,587,353	47 SKPD	778,346,088	47 SKPD	856,180,697	0 SKPD	0	47 SKPD	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya sinergisitas pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayan publik berkualitas				**Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten**	**88.06 Persen**	**88.12 Persen**		**88.24 Persen**		**88.36 Persen**		**88.48 Persen**		**0 Persen**		**88.48 Persen**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	4,728,673,925	100 Persen	5,250,441,318	100 Persen	5,775,485,449	100 Persen	6,353,033,994	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 Persen	100 Persen	3,793,920	100 Persen	4,173,312	100 Persen	4,590,643	100 Persen	5,049,708	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi keuangan	0 Persen	100 Persen	3,838,778,511	100 Persen	4,222,656,362	100 Persen	4,644,921,998	100 Persen	5,109,414,198	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 Persen	100 Persen	149,604,200	100 Persen	164,564,620	100 Persen	181,021,082	100 Persen	199,123,190	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	0 Persen	100 Persen	309,923,665	100 Persen	340,916,032	100 Persen	375,007,635	100 Persen	412,508,398	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan barang milik	0 Persen	100 Persen	69,927,000	100 Persen	125,819,700	100 Persen	138,401,670	100 Persen	152,241,837	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda	0 Persen	100 Persen	190,407,129	100 Persen	209,447,842	100 Persen	230,392,626	100 Persen	253,431,889	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	0 Persen	100 Persen	166,239,500	100 Persen	182,863,450	100 Persen	201,149,795	100 Persen	221,264,775	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk lokal unggulan daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah				**Pertumbuhan ekonomi**	**6,0 Persen**	**10,1 Persen**		**7,1 Persen**		**6,7 Persen**		**6,3 Persen**		**0 Persen**		**6,3 Persen**			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			**Persentase Peningkatan PAD**	**3,39 persen**	**3,39 persen**		**4,97 persen**		**4,97 persen**		**4,97 persen**		**0 persen**		**4,97 persen**			
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realiasai Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0 Persen	10,1 Persen	22,325,858,636	7,1 Persen	22,343,702,495	6,7 Persen	22,557,442,614	6,3 Persen	22,798,743,225	0 Persen	0	6,3 Persen	0		
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	0 Persen	100 Persen	24,169,110,650	100 Persen	25,370,266,183	100 Persen	26,631,479,492	100 Persen	27,955,753,466	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya sinergitas pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Nilai**	**100 Nilai**		**100 Nilai**		**100 Nilai**		**100 Nilai**		**0 Nilai**		**100 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	3,920,050,725	100 Persen	3,923,183,811	100 Persen	3,960,713,033	100 Persen	4,003,081,421	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	0 Persen	100 Persen	25,000,000	100 Persen	25,750,000	100 Persen	26,522,500	100 Persen	27,318,175	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	0 Persen	100 Persen	3,656,689,850	100 Persen	3,766,390,546	100 Persen	3,879,382,262	100 Persen	3,995,763,730	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	0 Persen	100 Persen	50,000,000	100 Persen	51,500,000	100 Persen	53,045,000	100 Persen	54,636,350	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	0 Persen	100 Persen	370,888,000	100 Persen	382,014,680	100 Persen	393,475,079	100 Persen	405,279,332	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	0 Persen	100 Persen	77,850,000	100 Persen	80,185,500	100 Persen	82,591,065	100 Persen	85,068,797	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	0 Persen	100 Persen	238,461,600	100 Persen	245,615,448	100 Persen	252,983,911	100 Persen	260,573,429	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	0 Persen	100 Persen	146,279,600	100 Persen	150,667,988	100 Persen	155,188,028	100 Persen	159,843,668	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten**	**88.06 persen**	**88.12 persen**		**88.24 persen**		**88.36 persen**		**88.48 persen**		**0 persen**		**88.48 persen**			
	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas			**Indek Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indek Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	787,262,499	100 Persen	787,891,715	100 Persen	795,428,697	100 Persen	803,937,526	0 Persen	0	100 Persen	0		
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase proses pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	0 Persen	100 Persen	156,045,600	100 Persen	156,045,600	100 Persen	156,045,600	100 Persen	156,045,600	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase cakupan pelayanan mutasi aparatur	0 Persen	100 Persen	150,000,000	100 Persen	150,000,000	100 Persen	150,000,000	100 Persen	150,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan formal dan diklat	0 Persen	100 Persen	281,216,899	100 Persen	281,846,115	100 Persen	289,383,097	100 Persen	297,891,926	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase cakupan pelayanan kesejahteraan ASN	0 Persen	100 Persen	200,000,000	100 Persen	200,000,000	100 Persen	200,000,000	100 Persen	200,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten**	**88.06 Persen**	**88.12 Persen**		**88.24 Persen**		**88.36 Persen**		**88.48 Persen**		**0 Persen**		**88.48 Persen**			
	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten			**Persentase PNS yang Memenuhi Kompetensi**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	0 Persen	100 Persen	1,913,530,281	100 Persen	1,915,059,663	100 Persen	1,933,379,146	100 Persen	1,954,060,815	0 Persen	0	100 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat	0 Persen	100 Persen	1,913,530,281	100 Persen	1,915,059,663	100 Persen	1,933,379,146	100 Persen	1,954,060,815	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya sinergisitas pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88.06 persen**	**88.12 persen**		**88.24 persen**		**88.36 persen**		**88.48 persen**		**0 persen**		**88.48 persen**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks kepuasaan masyarakat**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**0 persen**		**100 persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	6,865,324,455	100 Persen	6,870,811,540	100 Persen	6,936,537,803	100 Persen	7,010,739,070	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 Persen	100 Persen	88,780,800	100 Persen	88,780,800	100 Persen	88,780,800	100 Persen	88,780,800	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi keuangan	0 Persen	100 Persen	5,608,118,350	100 Persen	5,873,605,435	100 Persen	5,906,483,553	100 Persen	5,975,434,820	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi umum	0 Persen	100 Persen	391,693,805	100 Persen	391,693,805	100 Persen	424,541,950	100 Persen	424,791,950	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 Persen	100 Persen	215,000,000	100 Persen	155,000,000	100 Persen	155,000,000	100 Persen	155,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	193,381,500	100 Persen	193,381,500	100 Persen	193,381,500	100 Persen	193,381,500	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	0 Persen	100 Persen	368,350,000	100 Persen	168,350,000	100 Persen	168,350,000	100 Persen	173,350,000	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Nilai MCP Korsupgah KPK**	**92.23 Persen**	**92.53 Persen**		**93.92 Persen**		**94.30 Persen**		**95.00 Persen**		**0 Persen**		**95.00 Persen**			
	Meningkatnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah			**Meningkatnya level maturitas SPIP** **Meningkatnya level kapabilitas APIP**	**3 Level** **3 Level**	**3 Level** **3 Level**		**3 Level** **3 Level**		**3 Level** **3 Level**		**3 Level** **3 Level**		**0 Level** **0 Level**		**3 Level** **3 Level**			
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan/rekomendasi APIP dan BPK RI yang selesai ditangani sesuai ketentuan	0 Persen	100 Persen	2,606,075,520	100 Persen	2,736,379,295	100 Persen	2,873,198,258	100 Persen	3,016,858,169	0 Persen	0	100 Persen	0		
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan internal perangkat daerah yang dilaksanakan APIP (%)	0 Persen	100 Persen	2,204,639,560	100 Persen	2,314,871,537	100 Persen	2,430,615,113	100 Persen	2,552,145,867	0 Persen	0	100 Persen	0	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penerbitan LHA Khusus/Kasus sesuai ketentuan (%)	0 Persen	100 Persen	401,435,960	100 Persen	421,507,758	100 Persen	442,583,145	100 Persen	464,712,302	0 Persen	0	100 Persen	0	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	0 Persen	100 Persen	373,749,810	100 Persen	392,437,300	100 Persen	412,059,165	100 Persen	432,662,123	0 Persen	0	100 Persen	0		
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase investigasi dan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan	0 Persen	100 Persen	373,749,810	100 Persen	392,437,300	100 Persen	412,059,165	100 Persen	432,662,123	0 Persen	0	100 Persen	0	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	
Meningkatnya sinergitas pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik yang berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88.06 Nilai**	**88.12 Nilai**		**88.24 Nilai**		**88.36 Nilai**		**88.48 Nilai**		**0 Nilai**		**88.48 Nilai**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Akuntabilitas Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	7,610,881,205	100 Persen	7,991,425,264	100 Persen	8,390,996,520	100 Persen	8,810,546,339	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disinkronisasi dan berkualitas	0 Persen	100 Persen	65,610,970	100 Persen	68,891,518	100 Persen	72,336,093	100 Persen	75,952,897	0 Persen	0	100 Persen	0	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan	0 Persen	100 Persen	6,741,163,580	100 Persen	7,078,221,759	100 Persen	7,432,132,846	100 Persen	7,803,739,487	0 Persen	0	100 Persen	0	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pejabat Pengawasan yang mengikuti diklat subtansi Bidang Pengawasan	0 Persen	100 Persen	118,589,200	100 Persen	124,518,660	100 Persen	130,744,592	100 Persen	137,281,821	0 Persen	0	100 Persen	0	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan sarana pelayanan administrasi umum kantor	0 Persen	100 Persen	466,711,790	100 Persen	490,047,379	100 Persen	514,549,745	100 Persen	540,277,230	0 Persen	0	100 Persen	0	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan sarana pelayanan administrasi penunjang kantor	0 Persen	100 Persen	96,910,565	100 Persen	101,756,093	100 Persen	106,843,897	100 Persen	112,186,091	0 Persen	0	100 Persen	0	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RKBU	0 Persen	100 Persen	121,895,100	100 Persen	127,989,855	100 Persen	134,389,347	100 Persen	141,108,813	0 Persen	0	100 Persen	0	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,08 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**88,58 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 nilai	90 nilai	110,312,500	91 nilai	110,312,500	92 nilai	110,312,500	93 nilai	110,312,500	0 nilai	0	93 nilai	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanankepada msyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	0 persen	100 persen	49,662,500	100 persen	49,662,500	100 persen	49,662,500	100 persen	49,662,500	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tabunganen	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	0 persen	100 persen	60,650,000	100 persen	60,650,000	100 persen	60,650,000	100 persen	60,650,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tabunganen	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	90 Persen	8,250,000	90 Persen	8,250,000	90 Persen	8,250,000	90 Persen	8,250,000	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 persen	90 persen	8,250,000	90 persen	8,250,000	90 persen	8,250,000	90 persen	8,250,000	0 persen	0	90 persen	0	Kecamatan Tabunganen	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase desa dengan administrasi desa yang baik**	**78,57 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	85 Persen	20,757,500	85 Persen	20,757,500	85 Persen	20,757,500	85 Persen	20,757,500	0 Persen	0	85 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	0 persen	85 persen	20,757,500	85 persen	20,757,500	85 persen	20,757,500	85 persen	20,757,500	0 persen	0	85 persen	0	Kecamatan Tabunganen	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	85 Persen	8,069,200	85 Persen	8,069,200	85 Persen	8,069,200	85 Persen	8,069,200	0 Persen	0	85 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik	0 persen	85 persen	8,069,200	85 persen	8,069,200	85 persen	8,069,200	85 persen	8,069,200	0 persen	0	85 persen	0	Kecamatan Tabunganen	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,08 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**88,58 Nlai**	**90 Nlai**		**91 Nlai**		**92 Nlai**		**93 Nlai**		**0 Nlai**		**93 Nlai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,747,140,754	100 Persen	1,767,573,304	100 Persen	1,747,855,904	100 Persen	1,797,978,904	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi keuangan	0 persen	100 persen	1,575,336,804	100 persen	1,575,336,804	100 persen	1,575,336,804	100 persen	1,575,336,804	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tabunganen	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 persen	100 persen	10,840,600	100 persen	10,840,600	100 persen	10,840,600	100 persen	21,681,200	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tabunganen	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 persen	100 persen	74,230,350	100 persen	77,938,000	100 persen	88,076,000	100 persen	82,588,500	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tabunganen	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 persen	100 persen	32,562,500	100 persen	41,297,900	100 persen	10,062,500	100 persen	52,735,400	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tabunganen	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	0 persen	100 persen	20,270,500	100 persen	20,670,000	100 persen	20,970,000	100 persen	21,470,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tabunganen	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	0 persen	100 persen	33,900,000	100 persen	41,490,000	100 persen	42,570,000	100 persen	44,167,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tabunganen	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,06 nilai**	**88,12 nilai**		**88,24 nilai**		**88,36 nilai**		**88,48 nilai**		**0 nilai**		**88,48 nilai**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**86 nilai**	**87 nilai**		**88 nilai**		**89 nilai**		**90 nilai**		**0 nilai**		**90 nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Persen	100 Persen	66,005,000	100 Persen	67,005,000	100 Persen	68,005,000	100 Persen	69,005,000	0 Persen	0	100 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	0 persen	100 persen	104,921,975	100 persen	115,414,173	100 persen	126,955,590	100 persen	139,651,149	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase laporan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0 persen	100 persen	51,266,975	100 persen	57,266,975	100 persen	67,266,975	100 persen	72,266,975	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	0 persen	100 persen	41,042,000	100 persen	42,042,000	100 persen	43,042,000	100 persen	44,042,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase laporan hasil pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	0 persen	100 persen	28,952,730	100 persen	29,952,730	100 persen	30,952,730	100 persen	31,952,730	0 persen	0	100 persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase laporan hasil pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	0 persen	100 persen	28,952,730	100 persen	29,952,730	100 persen	30,952,730	100 persen	31,952,730	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase laporan hasil pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 persen	100 persen	23,342,080	100 persen	24,342,080	100 persen	25,342,080	100 persen	26,342,080	0 persen	0	100 persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase laporan hasil pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 persen	100 persen	22,342,080	100 persen	23,342,080	100 persen	24,342,080	100 persen	25,342,080	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase laporan hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0 persen	100 persen	33,891,800	100 persen	34,891,800	100 persen	35,891,800	100 persen	36,891,800	0 persen	0	100 persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 persen	100 persen	33,891,000	100 persen	34,891,000	100 persen	35,891,000	100 persen	36,891,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntanbilitas (RB)**	**88,06 nilai**	**88,12 nilai**		**88,24 nilai**		**88,36 nilai**		**88,48 nilai**		**0 nilai**		**88,48 nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**86 persen**	**87 persen**		**88 persen**		**89 persen**		**90 persen**		**0 persen**		**90 persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,149,680,721	100 Persen	1,359,994,992	100 Persen	1,495,994,492	100 Persen	1,645,593,941	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	0 persen	100 persen	1,149,680,721	100 persen	1,249,680,721	100 persen	1,349,680,721	100 persen	1,449,680,721	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi Kepegawaian	0 persen	100 persen	24,381,200	100 persen	25,381,200	100 persen	26,381,200	100 persen	27,381,200	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi Umum	0 persen	100 persen	112,132,433	100 persen	132,132,433	100 persen	142,132,433	100 persen	152,132,433	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 persen	100 persen	12,499,000	100 persen	14,499,000	100 persen	16,499,000	100 persen	18,499,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	0 persen	100 persen	54,789,000	100 persen	59,789,000	100 persen	64,789,000	100 persen	69,789,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	0 persen	100 persen	52,550,000	100 persen	57,550,000	100 persen	62,550,000	100 persen	67,550,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Tamban	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**81 Persen**	**81 Persen**		**81 Persen**		**81 Persen**		**81 Persen**		**0 Persen**		**81 Persen**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	0 Persen	81 Persen	104,921,975	81 Persen	104,921,975	81 Persen	104,921,975	81 Persen	104,921,975	0 Persen	0	81 Persen	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	0 Persen	100 Persen	8,030,000	100 Persen	8,030,000	100 Persen	8,030,000	100 Persen	8,030,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mekarsari	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase laporan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0 Persen	100 Persen	51,266,975	100 Persen	51,266,975	100 Persen	51,266,975	100 Persen	51,266,975	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mekarsari	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	0 Persen	100 Persen	45,625,000	100 Persen	45,625,000	100 Persen	45,625,000	100 Persen	45,625,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mekarsari	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan hasil pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 Persen	81 Persen	10,556,000	81 Persen	10,556,000	81 Persen	10,556,000	81 Persen	10,556,000	0 Persen	0	81 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Persen	100 Persen	10,556,000	100 Persen	10,556,000	100 Persen	10,556,000	100 Persen	10,556,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mekarsari	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik**	**95 Persen**	**95 Persen**		**95 Persen**		**95 Persen**		**95 Persen**		**0 Persen**		**95 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase laporan hasil pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	0 Persen	95 Persen	17,692,813	95 Persen	17,692,813	95 Persen	17,692,813	95 Persen	17,692,813	0 Persen	0	95 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	0 Laporan	2 Laporan	17,692,813	2 Laporan	17,692,813	2 Laporan	17,692,813	2 Laporan	17,692,813	0 Laporan	0	2 Laporan	0	Kecamatan Mekarsari	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0 Persen	95 Persen	40,319,700	95 Persen	40,319,700	95 Persen	40,319,700	95 Persen	40,319,700	0 Persen	0	95 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 Laporan	27 Laporan	40,319,700	27 Laporan	40,319,700	27 Laporan	40,319,700	27 Laporan	40,319,700	0 Laporan	0	27 Laporan	0	Kecamatan Mekarsari	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**81 Persen**	**81 Persen**		**81 Persen**		**81 Persen**		**81 Persen**		**0 Persen**		**81 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,236,359,084	100 Persen	1,209,752,736	100 Persen	1,221,325,244	100 Persen	1,236,359,084	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	0 Persen	100 Persen	30,856,200	100 Persen	32,399,010	100 Persen	34,018,961	100 Persen	35,719,909	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mekarsari	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	1,039,849,594	100 Persen	1,143,834,553	100 Persen	1,258,218,009	100 Persen	1,384,039,810	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mekarsari	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 Persen	100 Persen	15,510,600	100 Persen	17,061,660	100 Persen	18,767,826	100 Persen	20,644,609	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mekarsari	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Peningkatan Administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	79,526,060	100 Persen	87,478,666	100 Persen	96,226,533	100 Persen	105,849,186	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mekarsari	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	12,499,000	100 Persen	13,748,900	100 Persen	15,123,790	100 Persen	16,636,169	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mekarsari	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	100 Persen	52,435,080	100 Persen	57,678,588	100 Persen	63,446,447	100 Persen	69,791,091	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mekarsari	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	36,538,750	100 Persen	40,192,625	100 Persen	44,211,888	100 Persen	48,633,076	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mekarsari	
Meningkatkakan sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya peleyanan publik berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88.08 Nilai**	**88.12 Nilai**		**88.24 Nilai**		**88.36 Nilai**		**88.48 Nilai**		**0 Nilai**		**88.48 Nilai**			
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik**	**90 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	90 Persen	12,243,970	90 Persen	12,243,970	90 Persen	12,243,970	90 Persen	12,243,970	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase organisasi desa yang dibina	0 Persen	100 Persen	12,243,970	100 Persen	12,243,970	100 Persen	12,243,970	100 Persen	12,243,970	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Pasar	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	90 Persen	3,867,400	90 Persen	3,867,400	90 Persen	3,867,400	90 Persen	3,867,400	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik	0 Persen	100 Persen	3,867,400	100 Persen	3,867,400	100 Persen	3,867,400	100 Persen	3,867,400	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Pasar	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**89 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Persen	89 Persen	300,271,550	89 Persen	300,271,550	89 Persen	300,271,550	89 Persen	300,271,550	0 Persen	0	89 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanannkepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	0 Persen	100 Persen	50,321,250	100 Persen	50,321,250	100 Persen	50,321,250	100 Persen	50,321,250	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Pasar	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	0 Persen	100 Persen	249,950,300	100 Persen	249,950,300	100 Persen	249,950,300	100 Persen	249,950,300	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Pasar	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	100 Persen	8,000,000	100 Persen	8,000,000	100 Persen	8,000,000	100 Persen	8,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	0 Persen	100 Persen	8,000,000	100 Persen	8,000,000	100 Persen	8,000,000	100 Persen	8,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Pasar	
Meningkatkan sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya peleyanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88.24 Nilai**		**88.36 Nilai**		**88.48 Nilai**		**0 Nilai**		**88.48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**89 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	2,180,531,081	100 Persen	2,144,792,610	100 Persen	2,160,337,162	100 Persen	2,180,531,081	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi keuangan	0 Persen	100 Persen	1,540,098,749	100 Persen	1,540,098,749	100 Persen	1,540,098,749	100 Persen	1,540,098,749	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Pasar	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 Persen	100 Persen	43,309,055	100 Persen	43,309,055	100 Persen	43,309,055	100 Persen	43,309,055	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Pasar	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	47,725,500	100 Persen	47,725,500	100 Persen	47,725,500	100 Persen	47,725,500	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Pasar	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	0 Persen	100 Persen	29,582,500	100 Persen	29,582,500	100 Persen	29,582,500	100 Persen	29,582,500	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Pasar	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks reformasi Birokrasi**	**88.06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Nilai	90 Nilai	101,411,122	90 Nilai	101,411,122	90 Nilai	101,411,122	90 Nilai	101,411,122	0 Nilai	0	90 Nilai	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanankepada msyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	0 Persen	100 Persen	47,861,122	100 Persen	47,861,122	100 Persen	49,296,955	100 Persen	47,775,800	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Muara	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	0 Persen	100 Persen	53,550,000	100 Persen	53,550,000	100 Persen	52,114,167	100 Persen	53,635,322	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Muara	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	90 Persen	10,500,000	90 Persen	10,500,000	90 Persen	10,500,000	90 Persen	10,500,000	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	0 Persen	100 Persen	10,500,000	100 Persen	10,500,000	100 Persen	10,500,000	100 Persen	10,500,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Muara	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	100 Persen	18,243,650	100 Persen	18,243,650	100 Persen	18,243,650	100 Persen	18,243,650	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Musrenbang dan Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	0 Persen	100 Persen	18,243,650	100 Persen	18,243,650	100 Persen	18,243,650	100 Persen	18,243,650	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Muara	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	100 Persen	6,078,000	100 Persen	6,078,000	100 Persen	6,078,000	100 Persen	6,078,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	0 Persen	100 Persen	6,078,000	100 Persen	6,078,000	100 Persen	6,078,000	100 Persen	6,078,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Muara	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indek Kepuasan Masyarakat**	**90 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,820,127,955	100 Persen	1,780,958,947	100 Persen	1,797,955,621	100 Persen	1,820,127,955	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi keuangan	0 Persen	100 Persen	1,511,361,055	100 Persen	1,511,361,055	100 Persen	1,539,375,779	100 Persen	1,544,555,555	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Muara	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 Persen	100 Persen	38,011,800	100 Persen	38,011,800	100 Persen	38,011,800	100 Persen	38,011,800	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Muara	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	144,977,400	100 Persen	120,977,400	100 Persen	120,326,700	100 Persen	120,807,800	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Muara	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 Persen	100 Persen	34,377,700	100 Persen	20,377,700	100 Persen	10,409,000	100 Persen	20,471,300	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Muara	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	48,695,000	100 Persen	48,695,000	100 Persen	48,296,350	100 Persen	53,975,400	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Muara	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	0 Persen	100 Persen	42,705,000	100 Persen	41,535,992	100 Persen	41,535,992	100 Persen	42,306,100	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Anjir Muara	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**89 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Persen	95 Persen	102,910,260	95 Persen	51,755,260	95 Persen	53,307,918	95 Persen	54,907,155	0 Persen	0	95 Persen	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	0 Persen	100 Persen	51,940,260	100 Persen	1,685,260	100 Persen	1,735,818	100 Persen	1,787,892	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Alalak	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	0 Persen	100 Persen	50,970,000	100 Persen	50,070,000	100 Persen	51,572,100	100 Persen	53,119,263	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Alalak	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Nilai	90 Nilai	7,700,000	91 Nilai	7,700,000	92 Nilai	7,931,000	93 Nilai	8,168,930	0 Nilai	0	93 Nilai	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Persen	100 Persen	7,700,000	100 Persen	7,700,000	100 Persen	7,931,000	100 Persen	8,168,930	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Alalak	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik**	**80 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	100 Persen	51,135,810	100 Persen	4,782,360,076	100 Persen	4,925,830,878	100 Persen	5,073,605,805	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	0 Persen	100 Persen	25,842,060	100 Persen	27,163,546	100 Persen	27,978,453	100 Persen	28,817,805	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Alalak	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0 Persen	100 Persen	8,431,250	100 Persen	1,585,065,510	100 Persen	1,632,617,475	100 Persen	1,681,596,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Alalak	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	100 Persen	19,605,350	100 Persen	19,465,350	100 Persen	20,049,311	100 Persen	20,650,760	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik	0 Persen	100 Persen	19,605,350	100 Persen	19,465,350	100 Persen	20,049,311	100 Persen	20,650,790	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Alalak	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Nilai**	**100 Nilai**		**100 Nilai**		**100 Nilai**		**100 Nilai**		**0 Nilai**		**100 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	5,081,046,461	100 Persen	4,926,799,649	100 Persen	5,095,614,238	100 Persen	5,248,867,666	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 %	100 %	2,202,500	100 %	2,202,500	100 %	2,268,575	100 %	2,336,632	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Alalak	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi keuangan	0 %	100 %	4,144,273,169	100 %	4,144,388,419	100 %	4,268,720,072	100 %	4,396,781,674	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Alalak	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 %	100 %	15,510,600	100 %	15,510,600	100 %	15,510,600	100 %	15,975,918	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Alalak	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi Umum	0 %	100 %	444,488,330	100 %	408,081,205	100 %	420,323,641	100 %	432,933,350	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Alalak	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 %	100 %	125,683,000	100 %	54,972,500	100 %	56,621,675	100 %	58,320,325	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Alalak	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	0 %	100 %	227,664,462	100 %	230,401,025	100 %	237,313,056	100 %	244,432,447	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Alalak	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	0 %	100 %	136,735,000	100 %	86,754,000	100 %	94,856,620	100 %	98,087,319	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Alalak	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,08 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**87 Nilai**	**87 Nilai**		**88 Nilai**		**88 Nilai**		**88 Nilai**		**0 Nilai**		**88 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Persen	90 Persen	104,264,500	90 Persen	104,264,500	90 Persen	104,264,500	90 Persen	104,264,500	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0 Persen	100 Persen	50,489,500	100 Persen	50,489,500	100 Persen	50,489,500	100 Persen	50,489,500	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mandastana	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	0 Persen	100 Persen	53,775,000	100 Persen	53,775,000	100 Persen	53,775,000	100 Persen	53,775,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mandastana	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	85 Persen	9,360,000	85 Persen	9,360,000	85 Persen	9,360,000	85 Persen	9,360,000	0 Persen	0	85 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi untuk penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Persen	100 Persen	9,360,000	100 Persen	9,360,000	100 Persen	9,360,000	100 Persen	9,360,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mandastana	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase desa dengan administrasi desa yang baik**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	85 Persen	20,925,000	85 Persen	20,925,000	85 Persen	20,925,000	85 Persen	20,925,000	0 Persen	0	85 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang dan Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	0 Persen	100 Persen	20,925,000	100 Persen	20,925,000	100 Persen	20,925,000	100 Persen	20,925,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mandastana	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	85 Persen	20,952,500	85 Persen	20,952,500	85 Persen	20,952,500	85 Persen	20,952,500	0 Persen	0	85 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pebinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 Persen	100 Persen	20,952,500	100 Persen	20,952,500	100 Persen	20,952,500	100 Persen	20,952,500	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mandastana	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**87 Nilai**	**87 Nilai**		**88 Nilai**		**88 Nilai**		**88 Nilai**		**0 Nilai**		**88 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	2,073,069,561	100 Persen	2,073,069,561	100 Persen	2,073,069,561	100 Persen	2,073,069,561	0 Persen	0	100 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai	0 Persen	100 Persen	1,835,206,305	100 Persen	1,835,206,305	100 Persen	1,835,206,305	100 Persen	1,835,206,305	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mandastana	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	0 Persen	100 Persen	12,850,600	100 Persen	12,850,600	100 Persen	12,850,600	100 Persen	12,850,600	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mandastana	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum yang terlaksana	0 Persen	100 Persen	103,430,950	100 Persen	103,430,950	100 Persen	103,430,950	100 Persen	103,430,950	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mandastana	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Pelayanan sarana Administrasi Perkantoran	0 Persen	100 Persen	18,425,400	100 Persen	18,425,400	100 Persen	18,425,400	100 Persen	18,425,400	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mandastana	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Pelayanan sarana Administrasi Perkantoran	0 Persen	100 Persen	62,462,956	100 Persen	62,462,956	100 Persen	62,462,956	100 Persen	62,462,956	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mandastana	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Pelayanan sarana Administrasi Perkantoran	0 Persen	100 Persen	40,693,350	100 Persen	40,693,350	100 Persen	40,693,350	100 Persen	40,693,350	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Mandastana	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**92 Nilai**	**92 Nilai**		**93 Nilai**		**93 Nilai**		**94 Nilai**		**0 Nilai**		**94 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Persen	92 Persen	106,259,050	93 Persen	106,259,050	93 Persen	106,259,050	94 Persen	106,259,050	0 Persen	0	94 Persen	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan kepada Masyarakat yang Tepat Waktu sesuai SOP	0 Persen	92 Persen	55,000,000	93 Persen	53,000,000	93 Persen	52,000,000	94 Persen	52,000,000	0 Persen	0	94 Persen	0	Kecamatan Belawang	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0 Persen	95 Persen	51,259,050	95 Persen	53,259,050	98 Persen	54,259,050	100 Persen	54,259,050	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Belawang	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	92 Persen	12,596,600	93 Persen	12,596,600	93 Persen	12,596,600	94 Persen	12,596,600	0 Persen	0	94 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi untuk Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Persen	92 Persen	12,596,600	93 Persen	12,596,600	93 Persen	12,596,600	94 Persen	12,596,600	0 Persen	0	94 Persen	0	Kecamatan Belawang	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	92 Persen	11,098,800	93 Persen	11,098,800	93 Persen	11,098,800	94 Persen	11,098,800	0 Persen	0	94 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang dan Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	0 Persen	92 Persen	11,098,800	93 Persen	11,098,800	93 Persen	11,098,800	94 Persen	11,098,800	0 Persen	0	94 Persen	0	Kecamatan Belawang	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	100 Persen	4,904,400	100 Persen	4,904,400	100 Persen	4,904,400	100 Persen	4,904,400	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 Persen	100 Persen	6,600,000	100 Persen	8,000,000	100 Persen	9,400,000	100 Persen	10,800,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Belawang	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**92 Nilai**	**92 Nilai**		**93 Nilai**		**93 Nilai**		**94 Nilai**		**0 Nilai**		**94 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,819,980,000	100 Persen	1,963,280,000	100 Persen	2,206,250,000	100 Persen	2,435,150,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	1,485,000,000	100 Persen	1,587,000,000	100 Persen	1,765,000,000	100 Persen	1,980,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Belawang	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	46,000,000	100 Persen	46,000,000	100 Persen	60,000,000	100 Persen	60,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Belawang	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	95,080,000	100 Persen	106,780,000	100 Persen	113,450,000	100 Persen	118,950,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Belawang	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	34,000,000	100 Persen	54,500,000	100 Persen	57,500,000	100 Persen	58,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Belawang	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemda	0 Persen	100 Persen	50,100,000	100 Persen	53,500,000	100 Persen	55,800,000	100 Persen	57,200,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Belawang	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	0 Persen	100 Persen	109,800,000	100 Persen	115,500,000	100 Persen	154,500,000	100 Persen	161,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Belawang	
Meningkatnya Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang BaikUntuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88.08 Nilai**	**88.12 Nilai**		**88.24 Nilai**		**88.36 Nilai**		**88.48 Nilai**		**0 Nilai**		**88.48 Nilai**			
	Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa			**Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik**	**90 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	100 Persen	22,000,000	100 Persen	28,000,000	100 Persen	29,000,000	100 Persen	34,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase organisasi desa yang dibina	0 persen	100 persen	22,000,000	100 persen	28,000,000	100 persen	29,000,000	100 persen	34,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Wanaraya	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	100 Persen	8,000,000	100 Persen	10,000,000	100 Persen	11,500,000	100 Persen	12,500,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan administrasi desa yang baik	0 persen	100 persen	8,000,000	100 persen	10,000,000	100 persen	11,500,000	100 persen	12,500,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Wanaraya	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**85 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Nilai	90 Nilai	129,000,000	91 Nilai	119,000,000	92 Nilai	109,000,000	93 Nilai	100,000,000	0 Nilai	0	93 Nilai	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan pelanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	0 persen	100 persen	35,886,700	100 persen	37,886,700	100 persen	39,886,700	100 persen	40,886,700	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Wanaraya	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan	0 persen	100 persen	35,700,000	100 persen	37,700,000	100 persen	38,700,000	100 persen	39,700,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Wanaraya	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	85 Persen	11,000,000	85 Persen	11,000,000	85 Persen	11,000,000	85 Persen	11,000,000	0 Persen	0	85 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	0 persen	85 persen	11,000,000	85 persen	11,000,000	85 persen	11,000,000	85 persen	11,000,000	0 persen	0	85 persen	0	Kecamatan Wanaraya	
Meningkatnya Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang BaikUntuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88.24 Nilai**		**88.36 Nilai**		**88.48 Nilai**		**0 Nilai**		**88.48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**85 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,800,000,000	100 Persen	1,900,000,000	100 Persen	2,100,000,000	100 Persen	2,200,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase realisasi admintrasi keuangan	0 persen	100 persen	1,364,785,000	100 persen	156,478,000	100 persen	176,478,000	100 persen	197,648,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Wanaraya	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 persen	100 persen	46,000,000	100 persen	46,000,000	100 persen	60,000,000	100 persen	60,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Wanaraya	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase realisasi administrasi umum	0 persen	100 persen	95,000,000	100 persen	105,000,000	100 persen	112,450,000	100 persen	113,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Wanaraya	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 persen	100 persen	34,000,000	100 persen	40,000,000	100 persen	42,000,000	100 persen	45,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Wanaraya	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda	0 persen	100 persen	44,000,000	100 persen	48,000,000	100 persen	51,000,000	100 persen	53,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Wanaraya	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase realisasi barang milik daerah yang terpelihara	0 persen	100 persen	111,800,000	100 persen	125,500,000	100 persen	150,000,000	100 persen	155,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Wanaraya	
Meningkatkan Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang BaikUntuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88.08 Nilai**	**88.12 Nilai**		**88.24 Nilai**		**88.36 Nilai**		**88.48 Nilai**		**0 Nilai**		**88.48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Nilai	83 Nilai	114,553,300	83 Nilai	114,553,300	83 Nilai	114,553,300	83 Nilai	114,553,300	0 Nilai	0	83 Nilai	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanankepada msyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	0 Persen	83 Persen	53,903,300	83 Persen	53,903,300	83 Persen	53,903,300	83 Persen	53,903,300	0 Persen	0	83 Persen	0	Kecamatan Barambai	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	0 Persen	83 Persen	60,650,000	83 Persen	60,650,000	83 Persen	60,650,000	83 Persen	60,650,000	0 Persen	0	83 Persen	0	Kecamatan Barambai	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	83 Persen	11,410,000	83 Persen	11,410,000	83 Persen	11,410,000	83 Persen	11,410,000	0 Persen	0	83 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	0 Persen	83 Persen	11,410,000	83 Persen	11,410,000	83 Persen	11,410,000	83 Persen	11,410,000	0 Persen	0	83 Persen	0	Kecamatan Barambai	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase Dsa dengan Administrasi Desa yang Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	90 Persen	15,094,600	90 Persen	15,094,600	90 Persen	15,094,600	90 Persen	15,094,600	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Musrenbang dan Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	0 Persen	90 Persen	15,094,600	90 Persen	15,094,600	90 Persen	15,094,600	90 Persen	15,094,600	0 Persen	0	90 Persen	0	Kecamatan Barambai	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	90 Persen	3,721,500	90 Persen	3,721,500	90 Persen	3,721,500	90 Persen	3,721,500	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	0 Persen	90 Persen	3,721,500	90 Persen	3,721,500	90 Persen	3,721,500	90 Persen	3,721,500	0 Persen	0	90 Persen	0	Kecamatan Barambai	
Meningkatkan Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang BaikUntuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88.24 Nilai**		**88.36 Nilai**		**88.48 Nilai**		**0 Nilai**		**88.48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,313,423,720	100 Persen	1,285,158,947	100 Persen	1,297,452,792	100 Persen	1,313,423,720	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	1,063,212,440	100 Persen	1,034,947,667	100 Persen	1,047,241,512	100 Persen	1,063,212,440	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Barambai	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	21,681,200	100 Persen	21,681,200	100 Persen	21,681,200	100 Persen	21,681,200	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Barambai	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	80,440,780	100 Persen	80,440,780	100 Persen	80,440,780	100 Persen	80,440,780	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Barambai	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 Persen	100 Persen	22,114,300	100 Persen	22,114,300	100 Persen	22,114,300	100 Persen	22,114,300	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Barambai	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayran jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	47,793,000	100 Persen	47,793,000	100 Persen	47,793,000	100 Persen	47,793,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Barambai	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	0 Persen	100 Persen	78,182,000	100 Persen	78,182,000	100 Persen	78,182,000	100 Persen	78,182,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Barambai	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88.06 Nilai**	**88.12 Nilai**		**88.24 Nilai**		**88.36 Nilai**		**88.48 Nilai**		**0 Nilai**		**88.48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Nilai	83,50 Nilai	96,109,932	83,50 Nilai	96,109,932	83,50 Nilai	96,109,932	83,50 Nilai	96,109,932	0 Nilai	0	83,50 Nilai	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tepat Waktu Sesuai SOP	0 Persen	100 Persen	53,796,682	100 Persen	53,796,682	100 Persen	53,796,682	100 Persen	53,796,682	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Rantau Badauh	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Yang di Laksanakan	0 Persen	100 Persen	42,313,250	100 Persen	42,313,250	100 Persen	42,313,250	100 Persen	42,313,250	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Rantau Badauh	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Untuk Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Persen	83,50 Persen	14,435,000	83,50 Persen	14,435,000	83,50 Persen	14,435,000	83,50 Persen	14,435,000	0 Persen	0	83,50 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	100 Persen	14,435,000	100 Persen	14,435,000	100 Persen	14,435,000	100 Persen	14,435,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Rantau Badauh	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik**	**90 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	90 Persen	22,374,930	90 Persen	22,374,930	90 Persen	22,374,930	90 Persen	22,374,930	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Musrembang dan Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	0 Persen	100 Persen	22,374,930	100 Persen	22,374,930	100 Persen	22,374,930	100 Persen	22,374,930	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Rantau Badauh	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	90 Persen	23,140,500	90 Persen	23,140,500	90 Persen	23,140,500	90 Persen	23,140,500	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik	0 Persen	100 Persen	23,140,500	100 Persen	23,140,500	100 Persen	23,140,500	100 Persen	23,140,500	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Rantau Badauh	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,464,059,386	100 Persen	1,432,552,945	100 Persen	1,446,256,764	100 Persen	1,464,059,386	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	1,225,180,961	100 Persen	1,225,180,961	100 Persen	1,225,180,961	100 Persen	1,225,180,961	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Rantau Badauh	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	42,151,800	100 Persen	39,151,800	100 Persen	41,416,354	100 Persen	42,151,800	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Rantau Badauh	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	77,391,825	100 Persen	70,391,825	100 Persen	74,213,579	100 Persen	77,391,825	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Rantau Badauh	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	24,453,300	100 Persen	14,946,859	100 Persen	20,384,277	100 Persen	24,453,300	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Rantau Badauh	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	47,519,000	100 Persen	42,519,000	100 Persen	43,444,570	100 Persen	47,519,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Rantau Badauh	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	0 Persen	100 Persen	47,362,500	100 Persen	40,362,500	100 Persen	41,617,023	100 Persen	47,362,500	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Rantau Badauh	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,06 Nilai**		**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			**Indeks Kepuasaan Masyarakat**	**85 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Persen	85 Persen	68,404,850	85 Persen	68,404,850	85 Persen	68,404,850	85 Persen	68,404,850	0 Persen	0	85 Persen	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanankepada msyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	0 Persen	85 Persen	32,590,750	85 Persen	32,590,750	85 Persen	32,590,750	85 Persen	32,590,750	0 Persen	0	85 Persen	0	Kecamatan Cerbon	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	0 Persen	85 Persen	35,814,100	85 Persen	35,814,100	85 Persen	35,814,100	85 Persen	35,814,100	0 Persen	0	85 Persen	0	Kecamatan Cerbon	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	90 Persen	11,900,000	90 Persen	11,900,000	90 Persen	11,900,000	90 Persen	11,900,000	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Laporan	12 Laporan	11,900,000	12 Laporan	11,900,000	12 Laporan	11,900,000	12 Laporan	11,900,000	0 Laporan	0	12 Laporan	0	Kecamatan Cerbon	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase Desa Dengan Administrasi Desa yang Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	90 Persen	16,977,880	90 Persen	16,977,880	90 Persen	16,977,880	90 Persen	16,977,880	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pelaksanaan Musrenbang dan Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	0 Persen	90 Persen	16,977,880	90 Persen	16,977,880	90 Persen	16,977,880	90 Persen	16,977,880	0 Persen	0	90 Persen	0	Kecamatan Cerbon	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	90 Persen	11,663,510	90 Persen	11,663,510	90 Persen	11,663,510	90 Persen	11,663,510	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa yang Baik	0 Persen	90 Persen	11,663,510	90 Persen	11,663,510	90 Persen	11,663,510	90 Persen	11,663,510	0 Persen	0	90 Persen	0	Kecamatan Cerbon	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**85 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,354,871,658	100 Persen	1,325,714,929	100 Persen	1,338,396,733	100 Persen	1,354,871,658	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi keuangan	0 Persen	100 Persen	1,354,871,658	100 Persen	1,325,714,929	100 Persen	1,338,396,733	100 Persen	1,354,871,658	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Cerbon	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 Persen	100 Persen	20,190,000	100 Persen	20,190,000	100 Persen	20,190,000	100 Persen	20,190,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Cerbon	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasiUmum	0 Persen	100 Persen	89,804,250	100 Persen	89,804,250	100 Persen	89,804,250	100 Persen	89,804,250	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Cerbon	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 Persen	100 Persen	100,986,300	100 Persen	100,986,300	100 Persen	100,986,300	100 Persen	100,986,300	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Cerbon	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	42,509,442	100 Persen	42,509,442	100 Persen	42,509,442	100 Persen	42,509,442	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Cerbon	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milikdaerah yang dipelihara	0 Persen	100 Persen	28,222,000	100 Persen	28,222,000	100 Persen	28,222,000	100 Persen	28,222,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Cerbon	
Meningkatkan sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik untuk terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,08 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**89 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Persen	100 Persen	140,318,900	100 Persen	144,528,467	100 Persen	148,864,321	100 Persen	153,330,250	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	0 Persen	100 Persen	68,900,000	100 Persen	72,345,000	100 Persen	75,962,250	100 Persen	79,760,362	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	0 Persen	100 Persen	50,000,000	100 Persen	50,000,000	100 Persen	50,000,000	100 Persen	50,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	0 Persen	100 Persen	6,000,000	100 Persen	6,000,000	100 Persen	6,000,000	100 Persen	6,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Persen	100 Persen	6,000,000	100 Persen	6,000,000	100 Persen	6,000,000	100 Persen	6,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	
	Meningkatnya Pengelolaan adminisrasi Pemerintahan Desa			**Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik**	**95 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Laporan hasil Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	0 Persen	100 Persen	10,153,000	100 Persen	10,457,590	100 Persen	10,771,317	100 Persen	11,094,456	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Laporan hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahanb	0 Persen	100 Persen	10,153,000	100 Persen	10,457,590	100 Persen	10,771,317	100 Persen	11,094,456	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	100 Persen	3,305,320	100 Persen	3,404,479	100 Persen	3,506,613	100 Persen	3,611,811	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan hasil Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan kelurahan	0 Persen	100 Persen	3,305,320	100 Persen	3,404,479	100 Persen	3,506,613	100 Persen	3,611,811	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik untuk terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas				**Akuntabilitas (Reformasi Birokrasi)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**89 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,864,860,887	100 Persen	1,902,266,713	100 Persen	1,959,334,714	100 Persen	2,018,114,755	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	0 Persen	100 Persen	4,036,140	100 Persen	4,237,947	100 Persen	4,449,844	100 Persen	4,672,336	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai	0 Persen	100 Persen	1,439,094,432	100 Persen	1,514,114,108	100 Persen	1,589,819,813	100 Persen	1,669,310,804	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase RealisasiAdministrasi kepegawaian yan terlaksana	0 Persen	100 Persen	39,215,000	100 Persen	39,500,000	100 Persen	39,500,000	100 Persen	39,750,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Adinistrasi Umum Yang Terlaksana	0 Persen	100 Persen	122,009,075	100 Persen	128,109,075	100 Persen	134,514,528	100 Persen	141,240,254	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	40,127,900	100 Persen	50,000,000	100 Persen	50,000,000	100 Persen	50,000,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pe,mbayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	66,156,290	100 Persen	69,464,104	100 Persen	72,373,309	100 Persen	76,584,174	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi Perkantoran	0 Persen	100 Persen	22,570,000	100 Persen	23,698,500	100 Persen	24,883,425	100 Persen	26,127,596	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Bakumpai	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83,75 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Persen	90 Persen	100,515,875	91 Persen	103,161,750	92 Persen	106,256,603	93 Persen	109,444,301	0 Persen	0	93 Persen	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat yang Tepat Waktu Sesuai SOP	0 Persen	100 Persen	39,246,625	100 Persen	41,892,500	100 Persen	43,149,275	100 Persen	44,443,753	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Laporan Pelaksanaan Kewewenangan Lain yang Di Limpahkan	0 Persen	100 Persen	61,269,250	100 Persen	61,269,250	100 Persen	63,107,328	100 Persen	65,000,547	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	100 Persen	12,703,000	100 Persen	35,382,000	100 Persen	36,443,460	100 Persen	37,536,763	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Persen	100 Persen	10,001,500	100 Persen	30,390,000	100 Persen	31,301,700	100 Persen	32,240,751	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi penerapan dan Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Persen	100 Persen	2,701,500	100 Persen	4,992,000	100 Persen	5,141,760	100 Persen	5,296,013	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indek Reformasi Birokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan di Desa			**Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik**	**95 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	100 Persen	2,610,354,157	100 Persen	2,736,886,912	100 Persen	2,818,993,519	100 Persen	2,903,563,325	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Organisasi Desa Yang DiBina	0 Persen	100 Persen	18,231,450	100 Persen	25,654,730	100 Persen	26,424,372	100 Persen	27,217,103	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pesrsentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0 Persen	100 Persen	2,592,122,707	100 Persen	2,711,232,182	100 Persen	2,792,569,147	100 Persen	2,876,346,222	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	100 Persen	34,594,450	100 Persen	36,428,950	100 Persen	37,521,819	100 Persen	38,647,473	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 Persen	100 Persen	34,594,450	100 Persen	36,428,950	100 Persen	37,521,819	100 Persen	38,647,473	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
Meningkatnya Sinegritas Pemerintaan yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88.06 Nilai**	**88.12 Nilai**		**88.24 Nilai**		**88.36 Nilai**		**88.48 Nilai**		**0 Nilai**		**88.48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Nilai**	**100 Nilai**		**100 Nilai**		**100 Nilai**		**100 Nilai**		**0 Nilai**		**100 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	3,444,119,147	100 Persen	3,765,844,369	100 Persen	3,878,369,700	100 Persen	4,024,720,791	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Persen	100 Persen	2,132,500	100 Persen	4,500,000	100 Persen	4,635,000	100 Persen	4,774,050	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Persen	100 Persen	2,481,360,769	100 Persen	2,484,430,769	100 Persen	2,558,963,692	100 Persen	2,635,732,603	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Persen	100 Persen	64,803,000	100 Persen	120,484,200	100 Persen	124,098,726	100 Persen	127,821,688	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentas Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 Persen	100 Persen	223,342,550	100 Persen	323,502,400	100 Persen	333,207,472	100 Persen	343,203,696	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	399,819,000	100 Persen	445,106,000	100 Persen	458,459,180	100 Persen	472,212,955	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi Perkantoran	0 Persen	100 Persen	146,942,328	100 Persen	179,936,000	100 Persen	184,884,080	100 Persen	220,430,604	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	125,719,000	100 Persen	207,585,000	100 Persen	214,121,550	100 Persen	220,545,197	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Marabahan	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Biokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**91 Nilai**	**92 Nilai**		**93 Nilai**		**94 Nilai**		**95 Nilai**		**0 Nilai**		**96 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Nilai	92 Nilai	112,375,000	93 Nilai	112,375,000	94 Nilai	112,375,000	95 Nilai	112,375,000	0 Nilai	0	96 Nilai	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanankepada msyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	0 Persen	100 Persen	41,350,000	100 Persen	41,350,000	100 Persen	41,350,000	100 Persen	41,350,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Tabukan	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Yang dilaksanakan	0 Persen	100 Persen	71,025,000	100 Persen	71,025,000	100 Persen	71,025,000	100 Persen	71,025,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Tabukan	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	100 Persen	12,525,000	100 Persen	12,525,000	100 Persen	12,525,000	100 Persen	12,525,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi untuk penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Persen	100 Persen	12,525,000	100 Persen	12,525,000	100 Persen	12,525,000	100 Persen	12,525,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Tabukan	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	100 Persen	23,337,500	100 Persen	23,337,500	100 Persen	23,712,500	100 Persen	24,087,500	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Musrenbang dan Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	0 Persen	100 Persen	23,337,500	100 Persen	23,337,500	100 Persen	23,712,500	100 Persen	24,087,500	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Tabukan	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	100 Persen	14,124,000	100 Persen	14,124,000	100 Persen	14,374,000	100 Persen	14,624,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	0 Persen	100 Persen	14,124,000	100 Persen	14,124,000	100 Persen	14,374,000	100 Persen	14,624,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Tabukan	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**91 Nilai**	**92 Nilai**		**93 Nilai**		**94 Nilai**		**95 Nilai**		**0 Nilai**		**96 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,596,233,387	100 Persen	1,647,102,687	100 Persen	1,687,554,864	100 Persen	1,731,422,773	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi keuangan	0 Persen	100 Persen	1,347,595,762	100 Persen	1,347,595,762	100 Persen	1,388,023,634	100 Persen	1,429,664,343	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Tabukan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 Persen	100 Persen	38,011,800	100 Persen	38,011,800	100 Persen	38,011,800	100 Persen	38,011,800	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Tabukan	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi umum	0 Persen	100 Persen	120,876,575	100 Persen	120,876,575	100 Persen	122,464,430	100 Persen	124,070,630	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Tabukan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 Persen	100 Persen	0	100 Persen	50,869,300	100 Persen	45,482,000	100 Persen	42,876,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Tabukan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisai pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	39,337,000	100 Persen	39,337,000	100 Persen	40,509,000	100 Persen	41,732,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Tabukan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	0 Persen	100 Persen	50,412,250	100 Persen	50,412,250	100 Persen	53,064,000	100 Persen	55,068,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Tabukan	
Meningkatnya Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya kualitas pelayan publik			**Indeks Kepuasaan Masyarakat**	**89 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Persen	100 Persen	111,203,500	100 Persen	111,203,500	100 Persen	111,203,500	100 Persen	111,203,500	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	0 Persen	100 Persen	9,716,300	100 Persen	9,716,300	100 Persen	9,716,300	100 Persen	9,716,300	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Kuripan	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase laporan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0 Persen	100 Persen	50,887,200	100 Persen	50,887,200	100 Persen	50,887,200	100 Persen	50,887,200	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Kuripan	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	0 persen	100 persen	50,600,000	100 persen	50,600,000	100 persen	50,600,000	100 persen	50,600,000	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Kuripan	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan hasil pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 Persen	100 Persen	10,900,200	100 Persen	10,900,200	100 Persen	10,900,200	100 Persen	10,900,200	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 Laporan	6 Laporan	10,900,200	6 Laporan	10,900,200	6 Laporan	10,900,200	6 Laporan	10,900,200	0 Laporan	0	24 Laporan	0	Kecamatan Kuripan	
	Meningkatnya persentase pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik			**Persentase desa dengan Administrasi desa yang baik**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**0 persen**		**100 persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	90 Persen	17,941,200	90 Persen	17,941,200	90 Persen	17,941,200	90 Persen	17,941,200	0 Persen	0	90 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0 Dokumen	5 Dokumen	17,941,200	5 Dokumen	17,941,200	5 Dokumen	17,941,200	5 Dokumen	17,941,200	0 Dokumen	0	20 Dokumen	0	Kecamatan Kuripan	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	100 Persen	32,298,600	100 Persen	32,298,600	100 Persen	32,298,600	100 Persen	32,298,600	0 Persen	0	100 Persen	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 Dokumen	9 Dokumen	32,298,600	9 Dokumen	32,298,600	9 Dokumen	32,298,600	9 Dokumen	32,298,600	0 Dokumen	0	36 Dokumen	0	Kecamatan Kuripan	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indek Reformasi Birokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**89 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,568,662,507	100 Persen	1,534,905,016	100 Persen	1,549,587,935	100 Persen	1,568,662,507	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	0 Persen	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Kuripan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	1,321,006,022	100 Persen	1,321,006,022	100 Persen	1,321,006,022	100 Persen	1,321,006,022	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Kuripan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 Persen	100 Persen	13,770,600	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	13,770,600	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Kuripan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Peningkatan Administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	106,673,015	100 Persen	86,686,124	100 Persen	101,369,043	100 Persen	106,673,015	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Kuripan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	2,500,000	100 Persen	2,500,000	100 Persen	2,500,000	100 Persen	2,500,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Kuripan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	100 Persen	62,202,870	100 Persen	62,202,870	100 Persen	62,202,870	100 Persen	62,202,870	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Kuripan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	62,510,000	100 Persen	62,510,000	100 Persen	62,510,000	100 Persen	62,510,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Kuripan	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,46 Nilai**		**0 Nilai**		**88,46 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	0 Persen	100 Persen	55,180,600	100 Persen	55,180,600	100 Persen	55,180,600	100 Persen	55,180,600	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Persen	100 Persen	1,360,000	100 Persen	1,360,000	100 Persen	1,360,000	100 Persen	1,360,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Di Limpahkan	0 Persen	100 Persen	53,820,600	100 Persen	53,820,600	100 Persen	53,820,600	100 Persen	53,820,600	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik	0 Persen	100 Persen	10,845,775	100 Persen	10,845,775	100 Persen	10,845,775	100 Persen	10,845,775	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Persen	100 Persen	10,845,775	100 Persen	10,845,775	100 Persen	10,845,775	100 Persen	10,845,775	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			**Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	0 Persen	85 Persen	20,538,850	85 Persen	20,538,850	85 Persen	20,538,850	85 Persen	20,538,850	0 Persen	0	85 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0 Persen	85 Persen	14,600,000	85 Persen	14,600,000	85 Persen	14,600,000	85 Persen	14,600,000	0 Persen	0	85 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0 Persen	85 Persen	5,938,850	85 Persen	5,938,850	85 Persen	5,938,850	85 Persen	5,938,850	0 Persen	0	85 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0 Persen	100 Persen	9,466,475	100 Persen	9,466,475	100 Persen	9,466,475	100 Persen	9,466,475	0 Persen	0	100 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 Persen	100 Persen	9,466,475	100 Persen	9,466,475	100 Persen	9,466,475	100 Persen	9,466,475	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
Meningkatnya Sinergitas Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**88,06 Nilai**	**88,12 Nilai**		**88,24 Nilai**		**88,36 Nilai**		**88,48 Nilai**		**0 Nilai**		**88,48 Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Nilai**	**90 Nilai**		**91 Nilai**		**92 Nilai**		**93 Nilai**		**0 Nilai**		**93 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	1,902,903,960	100 Persen	1,861,953,619	100 Persen	1,879,765,089	100 Persen	1,902,903,960	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasae Laporan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Persen	100 Persen	6,351,724	100 Persen	5,545,633	100 Persen	5,437,310	100 Persen	6,500,360	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Persen	100 Persen	1,567,357,341	100 Persen	1,567,357,341	100 Persen	1,567,472,991	100 Persen	1,567,714,804	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Persen	100 Persen	21,681,200	100 Persen	21,681,200	100 Persen	21,681,200	100 Persen	21,681,200	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 Persen	100 Persen	122,982,870	100 Persen	112,388,620	100 Persen	120,431,563	100 Persen	130,481,670	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	112,980,000	100 Persen	82,980,000	100 Persen	90,000,000	100 Persen	97,500,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Yang Disediakan	0 Persen	100 Persen	29,065,825	100 Persen	29,065,825	100 Persen	31,212,727	100 Persen	31,700,000	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Di Pelihara	0 Persen	100 Persen	42,485,000	100 Persen	42,935,000	100 Persen	43,529,298	100 Persen	47,325,926	0 Persen	0	100 Persen	0	Kecamatan Jejangkit	
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**100 Persen**	**88.12 Persen**		**88.24 Persen**		**88.36 Persen**		**88.48 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Bakesbangpol**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kecamatan yang dibina terhadap ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	0 Persen	47,06 Persen	254,118,204	64,71 Persen	254,321,307	82,35 Persen	256,754,148	100 Persen	259,500,688	0 Persen	0	100 Persen	0		
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0 Dokumen	1 Dokumen	295,938,150	1 Dokumen	304,816,295	1 Dokumen	313,960,783	1 Dokumen	323,379,607	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidkan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	0 Persen	100 Persen	1,228,594,751	100 Persen	1,229,576,701	100 Persen	1,241,338,846	100 Persen	1,254,617,648	0 Persen	0	100 Persen	0		
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0 Dokumen	1 Dokumen	1,430,783,203	1 Dokumen	1,473,706,699	1 Dokumen	1,517,917,900	1 Dokumen	1,563,455,437	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	0 Persen	45 Persen	110,425,844	60 Persen	110,514,101	75 Persen	111,571,280	90 Persen	112,764,776	0 Persen	0	90 Persen	0		
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0 Dokumen	1 Dokumen	128,598,500	1 Dokumen	132,456,455	1 Dokumen	136,430,149	1 Dokumen	140,523,053	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kecamatan yang dibina terhadap ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	0 Persen	100 Persen	300,640,442	100 Persen	300,880,727	100 Persen	303,758,956	100 Persen	307,008,315	0 Persen	0	100 Persen	0		
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0 Dokumen	1 Dokumen	350,116,500	1 Dokumen	360,619,995	1 Dokumen	371,438,595	1 Dokumen	382,581,753	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	0 Persen	100 Persen	603,023,159	100 Persen	603,505,123	100 Persen	609,278,260	100 Persen	615,795,808	0 Persen	0	100 Persen	0		
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0 Dokumen	1 Dokumen	702,262,000	1 Dokumen	723,329,860	1 Dokumen	745,029,756	1 Dokumen	767,380,648	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya sinergitas pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				**Akuntabilitas (RB)**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	2,692,852,721	100 Persen	2,694,672,697	100 Persen	2,716,473,019	100 Persen	2,741,084,360	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	0 Persen	100 Persen	8,770,000	100 Persen	9,033,100	100 Persen	9,304,093	100 Persen	9,583,216	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi keuangan	0 Persen	100 Persen	2,016,054,864	100 Persen	2,076,536,510	100 Persen	2,138,832,605	100 Persen	2,202,997,583	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	0 Persen	100 Persen	90,061,300	100 Persen	92,763,139	100 Persen	95,546,033	100 Persen	98,412,414	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi umum	0 Persen	100 Persen	277,621,935	100 Persen	285,950,593	100 Persen	294,529,111	100 Persen	303,364,984	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	0 Persen	100 Persen	43,270,000	100 Persen	44,568,100	100 Persen	45,905,143	100 Persen	47,282,297	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda	0 Persen	100 Persen	118,139,588	100 Persen	121,683,776	100 Persen	125,334,289	100 Persen	129,094,318	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	0 Persen	100 Persen	97,940,000	100 Persen	100,878,200	100 Persen	103,904,546	100 Persen	107,021,682	0 Persen	0	100 Persen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	